

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**

***PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021***



Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN (INDUK)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS (PARENT)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama/ Name | : | Dony Oskaria |
| Alamat Kantor/ Office Address | : | Gedung Sarinah Lantai 14
JL MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/ Domicile as stated in ID Card | : | JL Samudra No.39 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : | 021-29065224 |
| Jabatan/ Position | : | Direktur Utama/ President Director |
| 2. Nama/ Name | : | Edwin Hidayat Abdullah |
| Alamat Kantor/ Office Address | : | Gedung Sarinah Lantai 14
JL MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/ Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Widya Chandra XIII No.1-D Kebayoran Baru Jakarta |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : | 021-29065224 |
| Jabatan/ Position | : | Wakil Direktur Utama/ Vice President Director |

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan (induk) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements (parent) of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) ("the Company"); |
| 2. Laporan keuangan (induk) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements (parent) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan (induk) telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements (parent) is complete and correct; |
| b. Laporan keuangan (induk) Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. The Company's financial statements (parent) do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; and |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control system and its application. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 27 April 2023

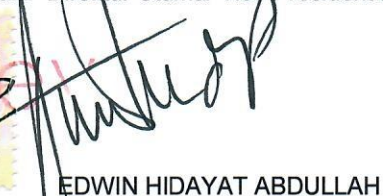
Atas Nama dan Mewakili Direksi/ On Behalf on the Board of Directors

Direktur Utama/ President Director

Wakil Direktur Utama/ Vice President Director


DONY OSKARIA




EDWIN HIDAYAT ABDULLAH

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Gedung Sarinah Lantai 14
JL. MH Thamrin No. 11
Jakarta Pusat 10350, INDONESIA
P : 021-29065224

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00570/2.1030/AU.1/06/1155-2/1/IV/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia, dan dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dalam laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast*

dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Entitas Induk terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on the Compliance to Regulations and Internal Controls

We also have tested on the Parent Entity compliance with certain regulations and internal controls. The compliance with certain regulations and internal controls are the responsibility of the management. Our responsibility is to express a conclusion on the compliance with certain regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Statement of Standards on Auditing No. 62 (Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami nomor R/192.AAT/eiz/2023 dan R/193.AAT/eiz/2023.

The reports of compliance to laws and regulations and internal controls, are submitted separately to the management, in our reports number R/192.AAT/eiz/2023 and R/193.AAT/eiz/2023 respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 27 April/ April 27, 2023



00570

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021

(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4, 43, 47	5,817,311,403	3,725,597,431	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	5, 47	159,988,146	141,656,618	Short-Term Investment
Piutang Usaha	6, 47			Trade Receivables
Pihak Berelasi	43	746,960,792	576,651,735	Related Parties
Pihak Ketiga		1,094,670,849	1,057,789,779	Third Parties
Piutang Lain-lain	7, 47			Other Receivables
Pihak Berelasi	43	11,221,843	20,185,129	Related Parties
Pihak Ketiga		114,368,411	86,493,036	Third Parties
Persediaan	8	49,222,389	57,950,557	Inventories
Uang Muka	9	194,629,483	120,884,222	Advances
Biaya Dibayar di Muka	10	76,194,198	85,532,423	Prepaid Expenses
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	11	524,951,944	297,333,970	Accrued Revenue
Pajak Dibayar di Muka	12.a	99,092,762	1,280,690,665	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya		32,102,490	28,391,413	Other Current Assets
TOTAL ASET LANCAR		8,920,714,710	7,479,156,978	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang Usaha - Pihak Berelasi	6, 43, 47	242,030,072	--	Trade Receivable - Related Parties
Estimasi Tagihan Pajak	12.b	356,908,715	516,235,090	Estimated Claims for Refundable Tax
Aset Pajak Tangguhan	12.f	2,422,089,643	1,979,570,515	Deferred Tax Assets
Investasi Jangka Panjang	13	32,633,441	35,242,078	Long Term Investments
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	14	2,346,237,600	2,505,628,933	Investment in Associates and Joint Venture
Uang Muka Investasi	15	251,223,003	--	Advance for Investments
Uang Muka Pembelian Tanah	16	--	1,960,000	Advance for Land Acquisition
Properti Investasi	17	2,805,450,963	221,442,982	Investment Properties
Aset Tetap	18	75,532,960,992	80,788,882,877	Fixed Assets
Aset Hak-Guna	19	1,485,500,029	682,329,661	Right-of-Use Assets
Aset Takberwujud		167,569,908	226,151,607	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lain-lain	20	100,572,182	101,213,827	Other Non-Current Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		85,743,176,548	87,058,657,570	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		94,663,891,258	94,537,814,548	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021

(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	21, 47			Trade Payables
Pihak Berelasi	43	415,585,187	184,107,523	Related Parties
Pihak Ketiga		451,637,243	596,402,658	Third Parties
Utang Lain-lain	22, 47			Other Payables
Pihak Berelasi	43	289,231,354	866,199,845	Related Parties
Pihak Ketiga		1,461,228,002	2,718,321,020	Third Parties
Beban Akruai	24, 47			Accrued Expenses
Pihak Berelasi	43	678,890	1,329,666	Related Parties
Pihak Ketiga		2,672,000,992	3,000,712,890	Third Parties
Utang Pajak	12.c	274,001,820	210,284,807	Taxes Payables
Pendapatan Diterima di Muka	25	384,478,294	361,941,337	Unearned Revenues
Liabilitas Imbalan Kerja				Short-Term Employees
Jangka Pendek		241,471,522	304,519,387	Benefits Liabilities
Utang Bank dan Lembaga				Short-Terms Bank and Other Financial
Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	23, 43, 47	899,757,062	1,722,245,844	Institutions Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh				Current Maturities of Long-Term
Tempo dalam Waktu Satu Tahun:				Liabilities:
Utang Bank Jangka Panjang dan				Long-Term Bank and
Lembaga Keuangan Lainnya	26, 47	3,209,336,141	1,463,087,314	Other Financial Institutions Loans
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	27, 47	1,126,000,000	--	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	19	153,970,716	91,080,336	Lease Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		11,579,377,223	11,520,232,627	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Setelah				Long-Term Liabilities - Net Of
Dikurangi Bagian yang Jatuh				Current Maturities:
Tempo dalam Waktu Satu Tahun:				Long-Term Bank and
Utang Bank Jangka Panjang dan				Other Financial Institutions Loans
Lembaga Keuangan Lainnya	26	35,285,770,340	35,337,790,753	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	27	6,381,281,013	7,505,553,188	Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	19	1,522,332,171	525,528,288	Other Long-Term Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	28, 47	1,424,731,290	459,867,588	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	30	2,426,766,900	2,275,765,106	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	12.f	--	262,115,001	Deferred Revenue
Pendapatan Ditangguhkan		718,747,081	429,331,717	Advances from Customers
Pendapatan Diterima di Muka		7,500,000	1,430,585	Provisions Payables
Utang Provisi	29	13,814,557	20,367,575	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		47,780,943,352	46,817,749,801	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		59,360,320,575	58,337,982,428	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal				Capital Stock - Par Value
Rp1.000.000 (Angka Penuh)				Rp1.000.000 (Full Amount)
Modal Dasar - 260.000.000 Saham				Authorized Capital - 260,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				Issued and Fully Paid -
65.164.367 Saham	31	65,164,367,000	65,164,367,000	65,164,367 Shares
Tambahan Modal Disetor	32	(28,765,976,052)	(28,765,976,052)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Dicadangkan		2,110,870	2,110,870	Appropriated
Belum Dicadangkan		(1,125,191,377)	(202,320,210)	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lain		(163,069,095)	(44,891)	Other Comprehensive Income
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan		35,112,241,346	36,198,136,717	Equity Attributable to Owner of
Kepada Pemilik Entitas Induk				the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	33	191,329,337	1,695,403	Non Controlling Interests
TOTAL EKUITAS		35,303,570,683	36,199,832,120	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		94,663,891,258	94,537,814,548	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT AND LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN	34	15,498,534,792	9,732,833,584	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	35	<u>(9,117,070,586)</u>	<u>(8,760,520,441)</u>	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		6,381,464,206	972,313,143	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	36	(2,920,026,674)	(2,723,905,528)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	37	(2,653,238,396)	(3,719,845,907)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	39	(209,771,066)	(343,911,418)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	38	747,395,199	333,655,168	Other Income
LABA (RUGI) USAHA		1,345,823,269	(5,481,694,542)	OPERATING GAIN (LOSS)
Pendapatan Keuangan	40	410,071,389	83,921,402	Finance Income
Beban Keuangan	41	(2,901,011,805)	(2,780,798,012)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	14	<u>(172,434,327)</u>	<u>(131,478,148)</u>	Equity Loss of Associates Entities
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN		(1,317,551,474)	(8,310,049,300)	LOSS BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX BENEFIT
RUGI OPERASI YANG DIHENTIKAN	42	<u>--</u>	<u>(84,116,150)</u>	LOSS OF DISCONTINUED OPERATIONS
RUGI SEBELUM PAJAK Pajak Final		(1,317,551,474)	(8,394,165,450)	LOSS BEFORE TAX Final Tax Expense
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		(1,495,349,837)	(8,556,440,606)	LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX
Pajak Kini	12.d	(61,165,747)	(103,946,324)	Current Tax
Pajak Tangguhan		<u>642,688,626</u>	<u>1,124,222,719</u>	Deferred Tax
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		(913,826,958)	(7,536,164,211)	LOSS FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				Items That will Not be Reclassified to Profit or Loss
Kerugian Aktuarial dari Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pascakerja		(231,461,946)	(26,253,220)	Actuarial Losses from Remeasurement on the Post-Employment Benefits Program
Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Kenaikan Nilai Wajar Aset Keuangan		150,000	--	Unrealized Gain on Fair Value Increase of Financial Assets
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		78,580,957	2,801,877	Related Tax Benefits (Expense)
Laba Komprehensif Entitas Asosiasi		1,042,994	1,693,562	Comprehensive Income of Associate
Pos yang akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				Items That will Not be Reclassified to Profit or Loss
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan		<u>(3,346,500)</u>	<u>(1,431,252)</u>	Changes in Fair Value of Financial Assets
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(155,034,495)	(23,189,033)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA		(1,068,861,453)	(7,559,353,244)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Penyesuaian Proforma Rugi Tahun Berjalan		--	7,495,116,524	Proforma Adjustment of Loss for the Year
TOTAL RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:				TOTAL LOSS FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Pemilik Entitas Induk		(922,871,167)	(41,047,687)	ATTRIBUTABLE TO:
Kepentingan Non Pengendali		<u>9,044,209</u>	<u>--</u>	Owners of the Parent Entity
		(913,826,958)	(41,047,687)	Non-Controlling Interests
Penyesuaian Proforma Rugi Komprehensif Tahun Berjalan		--	7,518,260,666	Proforma Adjustment of Comprehensive Loss for the Year
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
Pemilik Entitas Induk		(1,085,895,371)	(41,092,578)	ATTRIBUTABLE TO:
Kepentingan Non Pengendali		<u>17,033,918</u>	<u>--</u>	Owners of the Parent Entity
		(1,068,861,453)	(41,092,578)	Non-Controlling Interests

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Owners of the Parent Entity</i>										
Catatan/ Note	Modal Disetor/ Share Capital Rp	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid - in Capital Rp	Proforma Ekuitas yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ <i>Proforma Equity Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ Others Comprehensive Income Rp	Saldo laba/ <i>Retained Earnings</i>		Total/ Total Rp	Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interests Rp	Total Ekuitas/ Total Equity Rp	
			Rp		Dicadangkan/ Appropriated Rp	Belum Dicadangkan/ Unappropriated Rp				
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	13,000,000	--	43,748,607,061	--	2,111,085	(161,272,523)	43,602,445,623	--	43,602,445,623	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020
Akuisisi Saham Entitas Sepengendali	32	65,151,367,000	(28,765,976,052)	(36,230,346,395)	--	(215)	155,044,338	1,695,403	156,739,741	Acquisition of Under Common Entities Shares
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(23,144,142)	(44,891)	--	(23,189,033)	--	(23,189,033)	Others Comprehensive Income
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(7,495,116,524)	--	--	(41,047,687)	--	(7,536,164,211)	Loss for the Year
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	65,164,367,000	(28,765,976,052)	--	(44,891)	2,110,870	(202,320,210)	36,198,136,717	1,695,403	36,199,832,120	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(163,024,204)	--	--	(163,024,204)	7,989,709	(155,034,495)	Others Comprehensive Income
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	(922,871,167)	9,044,209	(913,826,958)	Loss for the Year
Dividen Anak kepada Kepentingan Non Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	(1,065,984)	(1,065,984)	Dividend in Subsidiaries for Non Controlling Interests
Penambahan Modal Entitas Anak oleh Kepentingan Non Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	173,666,000	173,666,000	Paid up Capital of Subsidiary from Non Controlling Interests
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	65,164,367,000	(28,765,976,052)	--	(163,069,095)	2,110,870	(1,125,191,377)	35,112,241,346	191,329,337	35,303,570,683	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		14,878,626,424	9,578,200,283	Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(9,536,684,619)	(7,401,984,546)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi		5,341,941,805	2,176,215,737	Cash Provided from Operating Activities
Penghasilan Bunga		95,725,570	81,624,374	Interest Received
Pembayaran Bunga		(2,297,489,325)	(2,824,873,509)	Payment of Interest
Restitusi Pajak		1,273,978,791	562,099,391	Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan		(3,348,013)	(292,977,043)	Payment of Tax Income
Pembayaran Lainnya		--	(39,183,000)	Received from Other Income
Pembayaran kepada Karyawan		(2,124,511,587)	(2,871,103,440)	Payment to Employee
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		2,286,297,241	(3,208,197,490)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Hasil Pelepasan Aset Tetap	18	49,987,109	106,246,512	Proceeds from Disposal of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap dan Properti Investasi	17, 18, 48	(925,360,151)	(2,493,336,411)	Acquisitions of Fixed Assets and Investment Property
Penerimaan dari Investasi Jangka Pendek	5	25,820,000	43,203,865	Receipt from Short-Term Investment
Pengeluaran untuk Investasi Jangka Pendek	5	(46,000,000)	(33,320,000)	Payment for Short-Term Investment
Perolehan Aset Takberwujud		(450,074)	(11,690,965)	Acquisitions of Intangible Assets
Penerimaan dari Investasi Jangka Panjang	13	--	5,164,000	Receipt from Long-Term Investment
Pembayaran Penambahan Investasi Asosiasi Tahun Sebelumnya		(162,628,023)	--	Payment of Addition of Investment in Associates from Previous Year
Penerimaan dari Pelepasan Entitas Anak		--	439,998,887	Receipts from Disposal of Subsidiaries
Penambahan Uang Muka Setoran Modal	15	(251,223,003)	--	Additional Capital Deposit Advances
Penambahan Investasi Asosiasi	14	(12,000,000)	(366,283,690)	Addition of Investment in Associates
Penerimaan Dividen		--	30,000,000	Dividend Receipt
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1,321,854,142)	(2,280,017,802)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pencairan Utang Bank Jangka Pendek		16,605,030	1,402,991,008	Drawdown of Short Term Bank Loans
Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek		(19,845,270)	--	Payment of Short Term Bank Loans
Pencairan Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Panjang		2,020,187,525	4,936,281,720	Drawdown of Long Term Bank and Finance Institutions Loans
Pembayaran Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Panjang		(919,172,753)	(519,275,042)	Payment of Long Term Bank and Finance Institutions Loans
Penerimaan Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah		--	1,611,900,000	Receipt of Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Pembayaran Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah		--	(2,090,000,000)	Payment of Bonds and Sukuk Ijarah
Pembayaran Liabilitas Sewa		(106,035,503)	(151,356,132)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Biaya Transaksi Utang Bank		(7,217,000)	(4,500,000)	Payment of Bank Debt Transaction Fee
Pembayaran Biaya Transaksi Utang Obligasi		--	(1,623,508)	Payment of Bonds Payable Transaction Fee
Pembayaran Dividen Tunai kepada Kepentingan Non-Pengendali		(1,065,984)	--	Cash Dividend Paid to Non-Controlling Interest
Penerimaan Penyertaan Modal Entitas Anak dari Kepentingan Non-Pengendali		173,665,000	--	Receipt of Additional Capital in Subsidiaries from Non-Controlling Interest
Penerimaan dari (Pembayaran kepada) Pihak Berelasi		(14,188,566)	(8,934,504)	Receipts from (Payment to) Related Parties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		1,142,932,479	5,175,483,542	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		2,107,375,578	(312,731,750)	INCREASE (DECREASE) IN CASH IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(15,661,606)	(1,801,453)	EXCHANGE RATES FLUCTUATION EFFECTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		3,725,597,431	4,040,130,634	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	5,817,311,403	3,725,597,431	CASH DAN CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 48

*) Additional information of cash flows presented in Note 48

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 31 Mei 1961 sesuai Peraturan Pemerintah No. 197 tahun 1961 dengan status Perusahaan Negara (PN) bernama Perusahaan Negara Aerial Survey disingkat Penas. Pada tahun 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46/1974 bentuk perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penas. Pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48, status perusahaan ditingkatkan menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) bernama PT Survai Udara Penas (Persero) yang berorientasi profit. Badan hukum PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai Perusahaan Terbatas (Persero) dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 203 tanggal 30 Desember 1992. Perubahan nama PT Survai Udara Penas (Persero) menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dilakukan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2021 oleh Desman, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0438677 tanggal 19 Agustus 2021.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 (Catatan 1.b).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkedudukan di Gedung. Sarinah Lt. 14, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat.

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero) (the "Company") was established on May 31, 1961 in accordance with Government Regulation No. 197 year 1961 with the status of a State Company (PN) named the State Company Aerial Survey abbreviated Penas. In 1974 based on Government Regulation no. 46/1974 the form of the Company changed to Public Company (Perum) Penas. In 1991 based on Government Regulation No. 48, the status of the Company was upgraded to a Limited Company (Persero) named PT Survai Udara Penas (Persero) which was profit oriented. The legal entity of PT Survai Udara Penas (Persero) as a Limited Liability Company (Persero) is contained in the Notary Deed of Muhani Salim, S.H., No. 203 dated December 30, 1992. The name change of PT Survai Udara Penas (Persero) to PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) was based on Deed No. 23 dated August 9, 2021 by Desman, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree AHU-AH.01.03-0438677 dated August 19, 2021.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No.65 dated December 15, 2021 was made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 on December 28, 2021 (Note 1.b).

Based on article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's main activities are to carry out business activities as a holding company in the tourism and supporting sectors, carry out investment and management consulting activities in the transportation, tourism, retail and other sectors related to business activities, as well as optimize utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.

The Company is domiciled at Puri Building Sarinah 14th Floor, Jl. MH Thamrin, Central Jakarta.

1.b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Pada tahun 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero), yang berganti nama seiring dengan penunjukkan PENAS sebagai induk Holding Pariwisata. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara ("Penas") menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Tugas dan tujuan Holding BUMN Pariwisata Dalam PP Nomor 72 Tahun 2021 tersebut, dijelaskan mengenai maksud dan tujuan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), yaitu melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk tahap pertama, PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) menjadi pemimpin Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang beranggotakan PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura II ("AP II"), PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), PT Sarinah ("Sarinah") dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC"). PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) akan menjadi pemimpin dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang merupakan Holding bersifat ekosistem untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam menunjang sektor pariwisata.

Selanjutnya untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan, ditetapkanlah PP No. 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC yang kemudian dinilai penyertaan tersebut melalui Keputusan

1.b. Holding for Tourism and Supporting SOEs

In 2021, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) officially formed a Tourism and Supporting SOEs Holding under PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero), which changed its name along with the appointment of PENAS as the holding company for Tourism. This refers to Government Regulation (PP) Number 72 of 2021 dated July 1, 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 48 of 1991 concerning the Transfer of the Form of a Public Company (Perum) Survai Udara ("Penas") to a State Owned Enterprises (Persero). Duties and objectives of Holding Tourism SOEs In PP Number 72 in 2021, it is explained about the tasks and objectives of establishing Tourism and Supporting SOEs Holdings under PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), namely carrying out business activities as holding companies in the tourism and supporting sectors, carrying out activities investment and management consulting in the transportation, tourism, retail, and other sectors related to business activities, as well as optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.

For the first stage, PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) became the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding consisting of PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura II ("AP II"), PT Hotel Indonesia Natour (HIN"), PT Sarinah ("Sarinah") and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko. ("TWC"). PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) will be the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding which is an ecosystem holding to integrate various functions in supporting the tourism sector.

Furthermore, to strengthen the capital structure and increase the Company's business capacity, Government Regulation No. 104 of 2021 dated October 6, 2021 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation to the Share Capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) has been enacted from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia. Indonesia's participation in AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC which assessed for participation through

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Menteri Keuangan RI No. 498/KMK.06/2021 tanggal 6 Desember 2021 sebesar total Rp65.151.366.785.

Setelah melalui Perjanjian No. PERJ-14/MBU/12/2021 No. Perjj-14/AVIATA-BUMN/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC kepada dan dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan ("inbreng"), dibuatlah Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH. 01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dengan demikian Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung efektif terbentuk setelah Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas dan menerima Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-107/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari Pemerintah RI terkait pemberian kuasa khusus kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Triawan Munaf	Triawan Munaf
Komisaris	Odo Rene Mathew Manuhutu	Odo Rene Mathew Manuhutu
Komisaris	Wihana Kirana Jaya	Wihana Kirana Jaya
Komisaris Independen	Elwin Chandra Mochsin	Elwin Chandra Mochsin
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Dony Oskaria	Dony Oskaria
Wakil Direktur Utama	Edwin Hidayat Abdulllah	Edwin Hidayat Abdulllah
Direktur SDM dan Digital	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata	Maya Carolina Watono	--

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 498/KMK.06/2021 dated December 6, 2021, amounting to a total of Rp65,151,366,785.

After going through the Agreement No. PERJ-14/MBU/12/2021 No. Perjj-14/AVIATA-BUMN/12/2021 dated December 14, 2021 regarding the Agreement on the Transfer of Rights to the Shares of the Republic of Indonesia at AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC to and in the context of adding the Republic of Indonesia State Equity Participation to the Company's Share Capital ("inbreng"), a Deed No. 65 dated December 15, 2021 was made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH. 01.02.TAHUN 2021 on December 28, 2021.

Therefore the Tourism and Supporting SOEs Holding is effectively formed after the Company becomes the majority shareholder and receives a Special Power of Attorney Number: SKK-107/MBU/12/2021 dated December 14, 2021 from the Government of the Republic of Indonesia regarding the granting of special powers to the Company to take actions that become the authority and/or rights of Series A Dwiwarna Shareholder in AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC.

1.c. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner and
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors
President Director
Vice President Director
Human Capital and
Digital Director
Director of Marketing and
Tourism Programs

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebanyak 17.307 dan 19.870 orang (tidak diaudit).

1.d. Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha Utama/ Business Activities	Presentase Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung) Percentage of Ownership (Direct and Indirect)		Total Aset (dalam Ribuan Rupiah)/ Total Assets (In Thousand Rupiah)	
			2022	2021	2022	2021
			%	%	Rp	Rp
PT Angkasa Pura I (AP I)	Jakarta	Jasa	99.99	99.99	41,135,340,830	42,627,524,784
PT Angkasa Pura Logistik (APL)	Jakarta	Logistik	99.72	99.72	507,151,161	458,037,854
PT Angkasa Pura Hotel (APH)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	734,402,710	649,566,966
PT Angkasa Pura Properti (APP1)	Jakarta	Properti	99.96	99.96	304,076,705	295,290,473
PT Angkasa Pura Suport (APS1)	Jakarta	Jasa	99.81	99.81	1,043,766,402	1,194,271,156
PT Angkasa Pura Retail (APR)	Jakarta	Trading	97.50	97.50	17,897,239	121,718,145
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	7.76	7.76	1,227,478,000	1,086,021,000
PT Angkasa Pura II (AP II)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	42,354,178,000	41,764,049,000
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	46.62	46.62	1,227,478,000	1,086,021,000
PT Angkasa Pura Kargo (APK)	Tangerang	Logistik	99.95	99.95	449,749,000	485,409,000
PT Angkasa Pura Propertindo (APP2)	Tangerang	Properti	99.93	99.93	208,377,000	190,155,000
PT Angkasa Pura Aviati (APA)	Tangerang	Jasa	51.00	100.00	2,677,010,000	26,325,000
PT Angkasa Pura Solusi (APS2)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	1,032,289,000	1,021,353,000
PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI)	Tangerang	Jasa	80.00	80.00	39,958,000	33,353,000
PT Angkasa Pura Solusi Digital (APSD)	Tangerang	Jasa	99.00	99.00	177,249,000	146,071,000
PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	9,831,924,224	8,766,245,762
PT Hotel Indonesia Group (HIG)	Jakarta	Hotel	51.00	51.00	11,147,829	1,037,299
PT Sarinah (Sarinah)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	1,439,262,472	514,231,153
PT Sari Valuta Asing (Sari Valas)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	8,024,429	7,206,101
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC)	Yogyakarta	Jasa	99.99	99.99	822,054,477	802,410,733
PT Bhumi Visatanda Indonesia (BVI)	Yogyakarta	Jasa	99.98	99.98	25,895,684	23,469,165
PT Manajemen CBT Nusantara (MCN)	Magelang	Perdagangan	51.22	51.22	688,313	1,553,482

PT Angkasa Pura I ("AP I")

AP I pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 33 Tahun 1962.

Anggaran Dasar AP I beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AP I No. 66 tanggal 15 Desember 2021 mengenai perubahan struktur pemegang saham AP I. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Januari 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The number of employees of the Company and subsidiaries as of December 31, 2022 and 2021 were 17,307 and 19,870, respectively (unaudited).

1.d. Subsidiaries

The Company has consolidated control of subsidiaries as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha Utama/ Business Activities	Presentase Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung) Percentage of Ownership (Direct and Indirect)		Total Aset (dalam Ribuan Rupiah)/ Total Assets (In Thousand Rupiah)	
			2022	2021	2022	2021
			%	%	Rp	Rp
PT Angkasa Pura I (AP I)	Jakarta	Jasa	99.99	99.99	41,135,340,830	42,627,524,784
PT Angkasa Pura Logistik (APL)	Jakarta	Logistik	99.72	99.72	507,151,161	458,037,854
PT Angkasa Pura Hotel (APH)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	734,402,710	649,566,966
PT Angkasa Pura Properti (APP1)	Jakarta	Properti	99.96	99.96	304,076,705	295,290,473
PT Angkasa Pura Suport (APS1)	Jakarta	Jasa	99.81	99.81	1,043,766,402	1,194,271,156
PT Angkasa Pura Retail (APR)	Jakarta	Trading	97.50	97.50	17,897,239	121,718,145
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	7.76	7.76	1,227,478,000	1,086,021,000
PT Angkasa Pura II (AP II)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	42,354,178,000	41,764,049,000
PT Gapura Angkasa (GA)	Jakarta	Jasa	46.62	46.62	1,227,478,000	1,086,021,000
PT Angkasa Pura Kargo (APK)	Tangerang	Logistik	99.95	99.95	449,749,000	485,409,000
PT Angkasa Pura Propertindo (APP2)	Tangerang	Properti	99.93	99.93	208,377,000	190,155,000
PT Angkasa Pura Aviati (APA)	Tangerang	Jasa	51.00	100.00	2,677,010,000	26,325,000
PT Angkasa Pura Solusi (APS2)	Tangerang	Jasa	99.99	99.99	1,032,289,000	1,021,353,000
PT Angkasa Pura Solusi Integra (APSI)	Tangerang	Jasa	80.00	80.00	39,958,000	33,353,000
PT Angkasa Pura Solusi Digital (APSD)	Tangerang	Jasa	99.00	99.00	177,249,000	146,071,000
PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Jakarta	Hotel	99.99	99.99	9,831,924,224	8,766,245,762
PT Hotel Indonesia Group (HIG)	Jakarta	Hotel	51.00	51.00	11,147,829	1,037,299
PT Sarinah (Sarinah)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	1,439,262,472	514,231,153
PT Sari Valuta Asing (Sari Valas)	Jakarta	Perdagangan	99.99	99.99	8,024,429	7,206,101
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC)	Yogyakarta	Jasa	99.99	99.99	822,054,477	802,410,733
PT Bhumi Visatanda Indonesia (BVI)	Yogyakarta	Jasa	99.98	99.98	25,895,684	23,469,165
PT Manajemen CBT Nusantara (MCN)	Magelang	Perdagangan	51.22	51.22	688,313	1,553,482

PT Angkasa Pura I ("AP I")

AP I was first established as a State Company by the name of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran by the Indonesian Government Regulation (PP) No. 33 Year 1962.

The Articles of Association of AP I have changed several times, most recently based on the Deed of Statement of Decision of the Shareholders of AP I No. 66 dated December 15, 2021 concerning the change of the shareholder structure of AP I. The amendment to the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights dated January 13, 2022.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AP I pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00002	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	6,414,411	99.99998	6,414,411,000
Total		6,414,412	100	6,414,412,000

PT Angkasa Pura II ("AP II")

AP II sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984.

Anggaran Dasar AP II telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., No. 91 tanggal 22 Desember 2021 mengenai perubahan nama AP II dan struktur pemegang saham AP II. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2022 melalui keputusan No. AHU-AH.01.03-0004213.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AP II pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ <i>Government of The Republic of Indonesia</i>	Seri A Dwiwarna	1	0.00001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	15,971,651	99.99999	15,971,651,000
Total		15,971,652	100	15,971,652,000

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

HIN merupakan perubahan nama dari PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) setelah bergabungnya PT National Hotel & Tourism (Persero) ("PT Natour") ke dalam PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Kedua HIN tersebut merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepariwisataan, khususnya hotel dan restoran. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The details of the shareholders and their share ownerships of AP I as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

PT Angkasa Pura II ("AP II")

AP II previously named Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, was established by Government Regulation (PP) No. 20 Year 1984.

AP II articles of association have been amended several times, the latest amendments through Notarial Deeds No. 91 dated December 22, 2020 of I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., regarding change of AP II's name and AP II shareholder structure. Such Amendment of Article of Association has been approved by Ministry of Law and Human Rights in decision letter No.AHU-AH.01.03-0004213 dated January 4, 2022.

The details of the shareholders and their share ownerships of AP II as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

HIN is a name change from PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) after the joining of PT National Hotel & Tourism (Persero) ("PT Natour") into PT Hotel Indonesia Natour (Persero). The two companies are State-Owned Enterprises (SOEs) engaged in tourism services, especially hotels and restaurants. The merger was carried out based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 1998.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2021, anggaran dasar HIN mengalami perubahan berdasarkan Akta Penyesuaian Kegiatan Usaha KBLI HIN, Notaris Lenny Faisyah, S.H., M.Kn No. 69 tanggal 25 Agustus 2021 yang berisikan penambahan jenis usaha dan perubahan pada pasal 3, maksud dan tujuan HIN adalah melakukan usaha dibidang industri jasa perhotelan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh HIN untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai HIN dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HIN pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.001	1,000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	101,699	99.999	101,699,000
Total		101,700	100	101,700,000

PT Sarinah ("Sarinah")

Sarinah didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Departement Store Indonesia dan diubah dengan nama PT Departement Store Indonesia (DSI) Sarinah dengan Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 1962 dan Akta No. 89 tanggal 29 Januari 1963 ketiganya dari Notaris Eliza Pondaag.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan No. S-973/MBU/12/2021 dan No. S-081/PD/12/2021 tentang perubahan anggaran dasar dan telah di aktakan dengan Akta No. 5 tanggal 12 Januari 2022 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Februari 2022 melalui keputusan No. AHU-008604.AH.01.02.Tahun 2022.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Sarinah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In 2021, the articles of association of HIN underwent changes based on the Deed of Adjustment of KBLI Business Activities of HIN, Notary Lenny Faisyah, S.H., M.Kn No. 69 dated August 25, 2021 which contains additional types of business and changes to article 3, the aims and objectives of HIN are to conduct business in the hospitality service industry and optimize the use of resources owned by HIN to produce high quality and powerful goods and/or services. strong competitiveness to gain/pursue profits in order to increase the value of HIN by applying the principles of a Limited Liability Company.

The details of the shareholders and their share ownerships of HIN as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

PT Sarinah ("Sarinah")

Sarinah was established based on Deed No. 33 dated August 17, 1962 under the name PT Department Store Indonesia and changed to PT Department Store Indonesia (DSI) Sarinah with Deed No. 50 dated October 18, 1962 and Deed No. 89 dated January 29, 1963 all three from Notary Eliza Pondaag.

Based on the Decision of the Company's Shareholders No. S-973/MBU/12/2021 and No. S-081/PD/12/2021 concerning changes to the articles of association and has been notarized by Deed No. 5 dated 12 January 2022 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights on 4 February 2022 through decision No. AHU-008604.AH.01.02.Year 2022.

The details of the shareholders and their share ownerships of Sarinah as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.002	1,000
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	46,849	99.998	46,849,000
Total		46,850	100	46,850,000

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

TWC didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1980 dengan Akta Notaris No. 19 tanggal 15 Juli 1980 oleh Soeleman Ardjosasmita S.H., Notaris di Jakarta, semula dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Dengan masuknya kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari Taman Wisata, maka nama Perusahaan berubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) sesuai dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 3 Agustus 1994 oleh Soekeimi, S.H.

Anggaran dasar TWC telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham TWC No. S-974/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2022 oleh Ir. Edwin Rusdy, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Bantul dan telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara No. 018 tambahan Berita Negara RI No.007968 tanggal 4 Maret 2022.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TWC pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jenis Saham/ Type of Shares	Lembar Saham/ Shares	Kepemilikan/ Ownership %	Total/ Total Rp
Pemerintah Indonesia/ Government of The Republic of Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	0.0004	1,000
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	249,999	99.9996	249,999,000
Total		250,000	100	250,000,000

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

TWC was established based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 year 1980 with Notarial Deed No. 19 dated July 15, 1980 by Soeleman Ardjosasmita S.H., Notary in Jakarta, originally under the name PT Taman Wisata Candi Borobudur and Prambanan. With the inclusion of the Ratu Boko area as part of the Taman Wisata, the Company's name changed to PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko (Persero) in accordance with Notarial Deed No. 15 dated August 3, 1994 by Soekeimi, S.H.

TWC's articles of association have been amended several times. The last amendment based on TWC Shareholders Decree No. S-974/MBU/12/2021 dated 14 December 2021 and has been contained in Deed No. 1 March 1, 2022 by Ir. Edwin Rusdy, S.H., M.Kn., M.Hum., Notary in Bantul and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022 and has been published in State Gazette No. 018 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.007968 dated March 4, 2022.

The details of the shareholders and their share ownerships of TWC as of December 31, 2022 and 2022 are as follows:

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group"

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;

2. Significant Accounting Policies

2.a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Basis of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments to PSAK 22: Business Combinations concerning Reference to the Conceptual Framework;
- Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling Contracts;

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali

- Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment concerning Proceeds Before Intensified Use;
- PSAK 69 (2020 Annual Adjustment): Agriculture;
- PSAK 71 (2020 Annual Adjustment): Financial Instruments; and
- PSAK 73 (2020 Annual Adjustment): Leases.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiary as described in Note 1.d.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (which substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara

The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (which transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Business Combinations of Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for

keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

2.f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other exchange ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction of a business combination of entities under common control in equity under additional paid-in capital.

If the entity that received the business, subsequently dispose the business entity acquired previously, the additional paid-in capital recorded before, can not be recognized as a realized gain or loss nor reclassified to retained earning.

2.f. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

Financial assets are classified into these categories on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

i. *Financial Assets Measured at Amortized Costs*

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

- The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value, where the changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses, and foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

- iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- *Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - i. The amount of the loss allowance; and*
 - ii. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- *Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.*

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- *It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- *A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Impairment of Financial Assets

The Group recognized expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment.

Misal, aset keuangan dengan peringkat *“investment grade”* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

For example, a financial asset with “investment grade” according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group’s business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required the Group to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset’s fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*

- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

- iii. *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement and are not issued as collateral and are not restricted in use.

2.h. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense on a straight-line method (straight-line method).

2.j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65;
- Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

2.k. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai

2.j. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 22 and PSAK 65;*
- If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and*
- When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

2.k. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require

aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Klasifikasi pengaturan bersama terdiri atas operasi bersama dan ventura bersama.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama. Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.I. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

the unanimous consent of the parties sharing control. The classification of joint arrangement consists of joint operation and joint venture.

The Group classified joint arrangement as joint venture. Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers. A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.I. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties are initially measured at cost, including the purchase price and any directly attributable expenses (legal service fees, property transfer taxes, and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement. Furthermore, investment properties are measured at cost less accumulated depreciation (except land which is not depreciated) and impairment losses. The carrying amount includes the cost of replacing an existing investment property at the time the cost is incurred, if the recognition criteria are met and does not include the daily cost of using the investment property. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives of 20 years.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan

Lands are recognised at its cost and are not depreciated

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation is recognized using the straight-line method. Land is recognized at acquisition cost and not depreciated. Estimated useful lives of the assets are as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan Lapangan	5 - 80	<i>Buildings/Fields</i>
Bangunan Gedung	10 - 40	<i>Buildings</i>
Pesawat	30	<i>Aircraft</i>
Kendaraan Bermotor	5 - 10	<i>Vehicles</i>
Mesin dan Peralatan	3 - 15	<i>Machinery and Equipments</i>
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5 - 15	<i>Terminal dan Building Equipments</i>
Instalasi dan Jaringan	5 - 20	<i>Installation and Network</i>
Overlay	1.5 - 20	<i>Overlay</i>
Renovasi Bangunan	10	<i>Buildings Renovation</i>
Lain-lain	1 - 20	<i>Others</i>

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of construction in progress. Cost construction in progress shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.n. Sewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- b. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset dasar.

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.n. Lease

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Company shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- a. The right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
- b. The right to direct the use of the identified asset, only if either:
 - (i) The Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
 - (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and
 - The Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
 - The Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the right to use the underlying assets.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perusahaan melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode dimana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

The Group recognizes right of use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date underlying assets is available for use). Right of use assets are measure at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right of use assets includes the amount of lease liabilities recognized, intitial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right of use assets are depreciated on a straght-line basis over the shorter period of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased assets transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects to exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets.

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expexted to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, The Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *Determine the lease term of the modified lease;*
- *Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of use assets. The revised discount rate is determined as The Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*

- Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup Sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Perangkat Lunak Komputer dan Lisensi serta Hak Paten; 12,5% - 20% garis lurus.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

- Decrease the carrying amount of the right of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

The Group as Lessor

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, are recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.o. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible Asset with Finite Useful Life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

Software and License as well as Patent; 12,5% - 20% straight line.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Tidak Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

2.p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Intangible Asset with Indefinite Useful Life

Intangible assets with unlimited useful life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

2.p. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.q. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan,

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. the initial recognition of goodwill; or*
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the

pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.r. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law on Job Creation No. 11 Year 2020 dated November 2, 2020 and Government Regulation No. 35 Year 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya konsisten dengan pengukuran liabilitas imbalan pascakerja kecuali untuk keuntungan/kerugian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui pada laba rugi.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

- a. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial.
- b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
- c. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
- d. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- e. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Other Long Term Post-Employment Benefits

The Group provides other long-term employee benefits. The measurement of other long-term employee benefit liabilities is consistent with the measurement of post employment benefit liabilities except for actuarial gain/loss in other long-term employee benefit liability is recognised on profit or loss.

2.s. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

- a. Identify contracts with customers, with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - The contract has commercial substance.
- b. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
- c. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
- d. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
- e. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

- c. Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- d. Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- e. Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- c. The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- d. The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- e. The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as current year expenses in profit or loss.

Revenue from the sale of goods is recognised when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of services is recognised when the customer has received and consumed benefit from the services.

Expenses are recognised as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

2.t. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021
	Rp	Rp
1 Arab Emirates Dirham (AED)	3.785	3.874
1 Australia Dollar (AUD)	10.581	10.344
1 Brunei Darussalam Dollar (BND)	11.659	10.534
1 Canadian Dollar (CAD)	11.566	11.139
1 Swiss Franc (CHF)	16.968	15.544
1 China Yuan (CNY)	2.257	2.238
1 Uni Europa (EUR)	2.247	16.127
1 Great British Poundsterling (GBP)	18.926	19.200
1 Hongkong Dollar (HKD)	2.019	1.830
1 Japannese Yen (JPY)	11.757	124
1 Korea Won (KRW)	12	12
1 Malaysia Ringit (MYR)	3.556	3.416
1 New Zealand Dollar (NZD)	9.944	9.729
1 Philipinas Peso (PHP)	282	280
1 Russian Rubel (RUB)	113	238
1 Saudi Arabia Real (SAR)	4.184	3.801
1 Singapura Dollar (SGD)	11.659	10.534
1 Thailand Bath (THB)	455	428
1 Turkish Lira (TRY)	890	1.550
1 Taiwan Dollar (TWD)	535	513
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.731	14.269
1 Vietnam Dong (VND)	0,66	0,63

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.t. Transactions in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The Group's functional currency is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, which middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2022 and 2021 as follows:

1 Arab Emirates Dirham (AED)	
1 Australia Dollar (AUD)	
1 Brunei Darussalam Dollar (BND)	
1 Canadian Dollar (CAD)	
1 Swiss Franc (CHF)	
1 China Yuan (CNY)	
1 Uni Europa (EUR)	
1 Great British Poundsterling (GBP)	
1 Hongkong Dollar (HKD)	
1 Japannese Yen (JPY)	
1 Korea Won (KRW)	
1 Malaysia Ringit (MYR)	
1 New Zealand Dollar (NZD)	
1 Philipinas Peso (PHP)	
1 Russian Rubel (RUB)	
1 Saudi Arabia Real (SAR)	
1 Singapura Dollar (SGD)	
1 Thailand Bath (THB)	
1 Turkish Lira (TRY)	
1 Taiwan Dollar (TWD)	
1 United Stated Dollar (USD)	
1 Vietnam Dong (VND)	

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.u. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2.u. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. *A person or a close member of that persons family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others;*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
 - viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan pada Catatan 43.

2.v. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in Note 43.

2.v. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.w. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: (a). aset berwujud tertentu; (b). manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c). jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; (d). aset proyek tertentu; atau (e). kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Grup menerapkan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk" untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Grup Sebagai Penerbit

Sukuk Ijarah

Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Sukuk ijarah diakui pada saat Grup menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal yang disebabkan karena penyesuaian yang tersebut diatas, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Amortisasi tersebut tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Beban Ijarah diakui pada saat terutang.

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Grup menyajikan sukuk ijarah menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.

2.w. Sukuk

Sukuk are the sharia securities represented by a certificate or evidence of ownership of equal denomination and representing individual ownership interest in (not separated or divided): (a). particular intangible assets; (b).existing or future benefits of particular intangible assets; (c).existing or future services; (d).particular project assets; or (e).determined investment activity.

Group adopted PSAK 110 "Accounting Sukuk" to an entity who enters sukuk Ijarah sukuk mudaraba transactions, either as sukuk issuers and investors.

Sukuk ijarah is a sukuk using ijarah's contract. Sukuk mudaraba is sukuk using a mudaraba's contract.

Group as Issuer

Sukuk Ijarah

Initial recognition is done at the time of sukuk ijarah issued. Sukuk Ijarah is recognized when the Group becomes a party bound by the provisions of sukuk ijarah issuance.

Sukuk Ijarah is recognized at its nominal amount, adjusted with any premium or discount, and the transaction costs related with the issuance.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value due to the adjustments mentioned above, the difference is amortized using a straight line method over the period of sukuk ijarah. Amortization is not recognized as an ijarah's expense, but is recognized as an issuance expense of sukuk ijarah.

Ijarah expense recognized when due.

Sukuk Ijarah is presented as a liability at a net of premium or discount and unamortized transaction costs. Group presents Sukuk Ijarah as long-term liabilities and short-term liabilities.

**3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi Kritis**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Takberwujud

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi disajikan dalam Catatan 18 dan 17.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan beban pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja dan beban pensiun.

**3. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment**

The preparation of the Group consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets, Investment Properties and Intangible Assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. Carrying amounts of fixed assets and investment properties are disclosed in Notes 18 and 17.

Estimated Pension Expenses and Post Employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations and accrued pension expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits and pension expenses.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja dan cadangan dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja serta dana pensiun diungkapkan pada Catatan 30.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit obligations and other pension fund reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and Additional information and total liabilities and post-employment benefits expenses and include pension funds are disclosed in Note 30.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Pada tanggal pelaporan Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya.

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomi dan bisnis yang memburuk dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Nilai tercatat piutang usaha dan piutang lain-lain diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 47.

Impairment Loss on Receivables

At the reporting date, the Group assesses whether the credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Group considers changes in default risk that occurs over the life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In making this assessment, the Group compares the risk of default at the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available free of charge.

The credit risk of a financial instrument is considered low if the financial instrument has a low risk of default, the borrower has strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and economic and business conditions deteriorate in the long term, but not always, deteriorate capacity, the borrower to meet its contractual cash flow obligations.

The carrying amounts of account receivables and other receivables are disclosed in Notes 6 and 7.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosures on fair value are presented in Note 47.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.f dan 47.

ii. Judgements in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2.f and 47.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2022 Rp	2021 Rp	
Kas	3,595,140	3,099,148	Cash on Hand
Bank	3,326,419,503	2,759,653,283	Cash in Banks
Deposito Berjangka	2,487,296,760	962,845,000	Time Deposits
Total	5,817,311,403	3,725,597,431	Total
Kas			Cash on Hand
Rupiah	3,004,655	2,958,842	Rupiah
Dolar AS	331,908	71,166	US Dollar
Dolar Singapura	17,640	26,292	Singapore Dollar
Kas Mata Uang Asing Lainnya	240,937	42,848	Other Cash in Foreign Currency
Subtotal	3,595,140	3,099,148	Subtotal
Bank			Cash in Banks
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,118,373,203	702,183,977	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	444,218,990	545,834,425	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	395,846,773	373,806,488	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	283,947,244	546,978,977	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	192,695,896	217,629,658	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	2,435,082,106	2,386,433,525	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	161,802,498	163,536,633	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,313,158	18,834,424	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,168,692	1,061,532	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	314,359	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	183,284,348	183,746,948	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,540	119,270	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	27,637	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	15,540	146,907	
Euro			Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,061	21,270	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	22,061	21,270	
Subtotal	2,618,404,055	2,570,348,650	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	462,782,572	1,056,296	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DKI	95,214,378	57,208,805	PT Bank DKI
PT Bank Central Asia Tbk	57,499,895	17,320,193	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	49,582,833	45,594,083	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	28,417,796	52,725,664	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3,374,670	3,144,097	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3,367,889	3,097,977	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	2,862,251	--	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1,589,277	399,000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	1,252,922	3,981,185	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	455,956	177,749	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	230,658	1,732,783	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	217,229	160,502	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank KB Bukopin Tbk	30,069	57,168	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	4,432	559,656	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	2,339	4,603	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank MNC Internasional Tbk	--	630,000	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Permata Tbk	--	396,554	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	--	31,124	PT Bank Sinarmas Tbk
	<u>706,885,166</u>	<u>188,277,439</u>	
Dolar AS			US Dollar
Citibank N.A.	798,468	724,000	Citibank N.A.
PT Bank Central Asia Tbk	331,814	301,832	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	--	1,362	PT Bank Permata Tbk
	<u>1,130,282</u>	<u>1,027,194</u>	
Subtotal	708,015,448	189,304,633	Subtotal
Total Bank	3,326,419,503	2,759,653,283	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	540,200,000	161,084,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	520,800,000	112,800,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	454,254,760	369,461,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	410,475,000	176,500,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20,000,000	--	PT Bank Syariah Indonesia Syariah
PT Bank Mandiri Taspen	--	5,000,000	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>1,945,729,760</u>	<u>824,845,000</u>	
Subtotal	1,945,729,760	824,845,000	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	225,000,000	--	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	204,000,000	102,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	50,000,000	--	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	33,317,000	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	18,000,000	5,000,000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	5,250,000	5,000,000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	3,000,000	25,000,000	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3,000,000	1,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Subtotal	541,567,000	138,000,000	Subtotal
Total Deposito Berjangka	2,487,296,760	962,845,000	Total Time Deposits
Total	5,817,311,403	3,725,597,431	Total
Tingkat Suku Bunga			Interest Rate
Rupiah			Rupiah
Deposito Berjangka	2.00% - 5.75%	2.00% - 7.75%	Time Deposit

Deposito berjangka merupakan deposito waktu
sampai dengan 3 bulan.

Time deposits are time deposits up to 3 months.

5. Investasi Jangka Pendek

5. Short Term Investments

a. Investasi Jangka Pendek Terdiri dari:

a. Short Term Investments Consist of:

	2022 Rp	2021 Rp	
Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya	35,000,000	33,320,000	Restricted Time Deposits
Deposito Berjangka > 3 Bulan	34,000,000	3,000,000	Time Deposits > 3 Months
Reksadana	33,492,146	39,494,118	Mutual Fund
Obligasi	57,496,000	65,842,500	Bonds
Total	159,988,146	141,656,618	Total

**1) Deposito Berjangka Lebih dari 3 Bulan
Sampai dengan 1 Tahun – Biaya
Perolehan Diamortisasi**

**1) Time Deposits above 3 Months up to 1
Year – Amortised Cost**

	2022		2021		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Rupiah					Rupiah
Pihak Berelasi					Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Subtotal
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	30,000,000	30,000,000	--	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1,000,000	1,000,000	--	--	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Subtotal	31,000,000	31,000,000	--	--	Subtotal
Total	34,000,000	34,000,000	3,000,000	3,000,000	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**2) Obligasi – Nilai Wajar diukur Melalui
Penghasilan Komprehensif Lain**

	2022		2021	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Rupiah				
Pihak Berelasi				
BEXI04BCN7	--	--	5,000,000	4,955,000
FR0028 (2005), 10%	5,000,000	5,065,000	5,000,000	5,462,500
Obligasi Negara Tahun 2007				
Seri FR0047	30,000,000	34,260,000	30,000,000	36,594,000
Obligasi Negara Tahun 2007				
Seri FR0045	15,150,000	18,171,000	15,150,000	18,831,000
Total	50,150,000	57,496,000	55,150,000	65,842,500

**2) Bonds – Fair Value through Other
Comprehensive Income**

Rupiah	
Related Parties	
BEXI04BCN7	
FR0028 (2005), 10%	
Obligasi Negara Tahun 2007	
Seri FR0047	
Obligasi Negara Tahun 2007	
Seri FR0045	
Total	

3) Reksadana

	2022		2021	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Rupiah				
RDT Panin 12	--	--	7,500,000	7,500,000
Subtotal	--	--	7,500,000	7,500,000
Nilai Wajar Diukur Melalui Laba Rugi				
Rupiah				
SAM Indonesia Equity Fund	30,000,000	26,052,084	30,000,000	24,396,780
HPAM Flexi Plus	10,000,000	7,440,062	10,000,000	7,597,338
Subtotal	40,000,000	33,492,146	40,000,000	31,994,118
Total	40,000,000	33,492,146	47,500,000	39,494,118

3) Mutual Fund

Amortized Cost	
Rupiah	
RDT Panin 12	
Subtotal	
Fair Value Through Profit or Loss	
Rupiah	
SAM Indonesia Equity Fund	
HPAM Flexi Plus	
Subtotal	
Total	

4) Deposito yang Dibatasi Penggunaanya

	2022		2021	
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Rupiah				
Pihak Berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35,000,000	35,000,000	20,000,000	20,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	13,320,000	13,320,000
Total	35,000,000	35,000,000	33,320,000	33,320,000

4) Restricted Time Deposits

Rupiah	
Related Parties	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

b. Tingkat Suku Bunga

	2022 Rp	2021 Rp
Rupiah:		
Deposito Berjangka	2.25% - 2.50%	2.75% - 3.25%
Obligasi	7.99% - 8.10 %	7.00% - 8.10 %

b. Interest Rate

Rupiah:	
Time Deposits	
Bonds	

**c. Keuntungan yang Belum Direalisasi dari
Investasi – Nilai Wajar diukur Melalui
Penghasilan Komprehensif Lain**

	2022 Rp	2021 Rp
Nilai Wajar Pada Awal Tahun	65,842,500	80,943,752
Nilai Nominal Penjualan Aset Keuangan	(5,000,000)	(13,670,000)
Diakui sebagai Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi		
Nilai Wajar - Tahun Berjalan	(3,391,500)	2,997,813
Penyesuaian Reklasifikasi	45,000	(4,429,065)
Nilai Wajar pada Akhir Tahun	57,496,000	65,842,500

**c. Unrealized Gains from Investment – Fair
Value through Other Comprehensive Income**

Fair Value at Beginning Year	
Nominal Value of Instrument Assets Selling	
Recognize as Other	
Comprehensive Income:	
Unrealized Gain (Loss)	
at Fair Value - Current Year	
Reclassification Adjustments	
Fair Value at Year End	

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai wajar seluruh aset keuangan berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif dan input selain harga pasar yang dapat diobservasi.

The fair value of all financial assets is based on the current bid price in active markets and observable inputs other than quoted prices.

6. Piutang Usaha

6. Account Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2022 Rp	2021 Rp
Piutang Usaha - Lancar		
Pihak Berelasi (Catatan 43)	901,817,086	2,292,873,995
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(154,856,294)	(1,716,222,260)
Subtotal	746,960,792	576,651,735
Pihak Ketiga	2,203,735,315	1,852,103,955
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,109,064,466)	(794,314,176)
Subtotal	1,094,670,849	1,057,789,779
Total Piutang Usaha - Lancar	1,841,631,641	1,634,441,514
Piutang Usaha - Tidak Lancar		
Pihak Berelasi (Catatan 43)	1,571,053,548	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,329,023,476)	--
Total Piutang Usaha - Tidak Lancar	242,030,072	--
Total Piutang Usaha	2,083,661,713	1,634,441,514

Trade Receivables - Current
Related Parties (Note 43)
Allowance for Impairment Losses
Subtotal

Third Parties
Allowance for Impairment Losses
Subtotal

Total Trade Receivables - Current

Trade Receivables - Non Current
Related Parties (Note 43)
Allowance for Impairment Losses
Total Trade Receivable - Non Current

Total Trade Receivables

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2022 Rp	2021 Rp
Belum Jatuh Tempo	572,722,778	508,795,218
Telah Jatuh Tempo		
1-30 Hari	192,851,178	172,788,627
31-60 Hari	84,450,279	95,795,206
61-90 Hari	727,508,211	373,553,380
91-180 Hari	119,890,645	300,114,817
181-365 Hari	422,142,410	754,633,240
Lebih dari 365 Hari	2,557,040,448	1,939,297,462
Subtotal	4,676,605,949	4,144,977,950
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,592,944,236)	(2,510,536,436)
Total	2,083,661,713	1,634,441,514

Not yet due
Overdue
1-30 days
31-60 days
61-90 days
91-180 days
181-365 days
Over 365 days

Subtotal

Allowance for Impairment Losses

Total

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currencies

	2022 Rp	2021 Rp
Rupiah	4,647,506,949	4,066,033,289
Mata Uang Asing	29,099,000	78,944,661
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,592,944,236)	(2,510,536,436)
Total	2,083,661,713	1,634,441,514

Rupiah
Foreign Currencies
Allowance for Impairment Losses
Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	2,510,536,436	822,111,863	Beginning Balance
Divestasi HIPRO, entitas anak HIN	--	(1,336,846)	Divestment of HIPRO, HIN subsidiary
Penambahan	265,273,301	1,731,613,260	Addition
Pemulihan	(176,431,627)	(4,397,841)	Recovery
Penghapusan	(6,433,874)	(37,454,000)	Write-Off
Saldo Akhir	2,592,944,236	2,510,536,436	Ending Balance

Piutang kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.435.604.027 sudah dinyatakan macet dan atas saldo piutang tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke rekening Piutang usaha tidak lancar. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2022. Per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo piutang usaha sebesar Rp188.196.535 yang merupakan piutang usaha lancar.

Receivables from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp1,435,604,027 have been declared bad and the balance of these receivables has been reclassified to non-current accounts receivable. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk has submitted a Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) which has been approved by the Commercial Court at the Court Negeri Jakarta Pusat on June 20 2022. As of December 31, 2022 there was still a balance of trade receivables of Rp188,196,535 which is a current trade receivable.

Piutang kepada PT Aerofood Indonesia sebesar Rp121.212.972 sudah dinyatakan macet dan atas saldo piutang tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke rekening Piutang usaha tidak lancar. PT Aerofood Indonesia telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2022. Per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo piutang usaha sebesar Rp29.424.815 yang merupakan piutang usaha lancar.

Receivables from PT Aerofood Indonesia amounting to Rp121,212,972 have been declared bad and the balance of these receivables has been reclassified to non-current accounts receivable. PT Aerofood Indonesia has filed a Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) which was approved by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on July 20, 2022. As of December 31, 2022 there was still a balance of trade receivables of Rp29,424,815 which are current trade receivables.

Piutang kepada PT Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp14.236.550 sudah dinyatakan macet dan atas saldo piutang tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke rekening Piutang usaha tidak lancar. PT Barata Indonesia (Persero) telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2022.

Receivables from PT Barata Indonesia (Persero) amounting to Rp14,236,550 have been declared bad and the balance of these receivables has been reclassified to non-current accounts receivable. PT Barata Indonesia (Persero) has filed a Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) which was approved by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on July 20, 2022.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses on trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang usaha sebesar Rp50.000.000 dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka pendek PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Catatan 23).

As of December 31, 2022 and 2021, trade receivables amounting to Rp50,000,000 are used for collateral for short-term loan facility of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Note 23).

7. Piutang Lain-lain

7. Other Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2022 Rp	2021 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 43)	60,014,772	60,871,512
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(48,792,929)	(40,686,383)
Subtotal	11,221,843	20,185,129
Pihak Ketiga	132,804,632	115,103,133
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(18,436,221)	(28,610,097)
Subtotal	114,368,411	86,493,036
Total	125,590,254	106,678,165

*Related Parties (Note 43)
Allowance for Impairment Losses
Subtotal*

*Third Parties
Allowance for Impairment Losses
Subtotal
Total*

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2022 Rp	2021 Rp
Belum Jatuh Tempo	38,143,417	24,743,607
Telah Jatuh Tempo		
< 1 Tahun	36,662,756	33,512,316
1 - 2 Tahun	57,047,694	65,670,972
> 2 Tahun	60,965,537	52,047,750
Subtotal	192,819,404	175,974,645
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(67,229,150)	(69,296,480)
Total	125,590,254	106,678,165

*Not Yet Due
Overdue
< 1 Year
1 - 2 Years
> 2 Years
Subtotal
Allowance for Impairment Losses
Total*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	69,296,480	55,516,790
Divestasi HIPRO, entitas anak HIN	--	(2,765,063)
Penambahan	19,760,762	18,343,468
Pemulihan	(21,828,092)	(1,798,715)
Saldo Akhir	67,229,150	69,296,480

*Beginning Balance
Divestment of HIPRO, HIN subsidiary
Addition
Recovery
Ending Balance*

Piutang lain-lain pihak ketiga terutama merupakan piutang yang timbul dari pembayaran pada pegawai, jaminan, talangan, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("LPPNPI") dan pihak lain di luar kegiatan utama Grup.

Other receivables third parties mainly represents receivables arise from payment to employee, deposits, temporary loan, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("LPPNPI") and others outside the Group's main business.

Piutang pegawai merupakan kekurangan pembayaran biaya berobat yang ditanggung oleh Grup yang akan ditagihkan kemudian kepada pegawai. Piutang pegawai juga berisikan piutang atas pembayaran gaji karyawan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB") yang akan ditagihkan ke BIJB dan biaya sertifikasi petugas keamanan bandara (*aviation security*) yang ditanggung oleh Grup yang akan ditagihkan dengan cara pemotongan gaji bulanan pegawai *aviation security*.

Employee receivables represent underpayment of medical expenses borne by the Group which will be billed later to employees. Employee receivables also contain receivables for payment of salaries of PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB") employees which will be billed to BIJB and airport security officer certification fees (aviation security) borne by the Group which will be billed by deducting the monthly salary of aviation security employees.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang lain-lain kepada PT Hotel Indonesia Properti terkait dengan utang kontraktor yang kontrak perjanjiannya masih dengan PT Hotel Indonesia Natour dan belum di novasikan ke PT Hotel Indonesia Properti. Selain itu piutang lain-lain kepada PT Hotel Indonesia Properti juga terkait biaya operasional PT Hotel Indonesia Properti yang ditanggung oleh Grup periode 1 Mei sampai dengan 30 September 2021.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui perjanjian Nomor 0060.1/PERJ/DF/HIN/X/2022 atau Nomor 4222/EXT/PP/DKMR/2022 atau Nomor 0051/PERJ/DIRUT/HIP/X/2022, telah terjadi perjanjian novasi antara HIN, PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk dan PT Hotel Indonesia Properti (HIP) atas perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang, dalam perjanjian novasi sepakat bahwa HIN dan HIP dengan ini memberikan persetujuan atas penunjukan dan pengalihan kepada HIP atas kewajiban pembayaran perjanjian serta perubahannya sesuai dengan nilai yang dibukukan oleh HIN dan telah menjadi nilai valuasi HIP sebesar Rp9.252.582 sehingga pelaksanaan kewajiban pembayaran serta perubahannya yang akan dilaksanakan HIP kepada PP sebesar Rp9.252.582. Perjanjian novasi ini berlaku efektif sejak tanggal efektif dan akan tetap berlaku hingga pelaksanaan kewajiban sebesar Rp9.252.582 telah diselesaikan oleh HIP.

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain di atas adalah cukup.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Other receivables from PT Hotel Indonesia Properti related to debts of contractors whose contractual agreements are still with PT Hotel Indonesia Natour and have not been novated to PT Hotel Indonesia Properti. In addition, other receivables from PT Hotel Indonesia Properti are also related to the operational costs of PT Hotel Indonesia Properti which are borne by the Group for the period May 1 to September 30, 2021.

On October 31, 2022 through agreement Number 0060.1/PERJ/DF/HIN/X/2022 or Number 4222/EXT/PP/DKMR/2022 or Number 0051/PERJ/DIRUT/HIP/X/2022, there was a novation agreement between HIN, PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk and PT Hotel Indonesia Properti (HIP) for the contracting agreement for the redevelopment of the Inna Muara Padang Hotel, in the novation agreement agreed that HIN and HIP hereby give approval for the appointment and transfer to HIP of the obligations the payment of the agreement and its amendments is in accordance with the value recorded by HIN and has become the HIP valuation value of Rp9,252,582 so that the implementation of the payment obligations and the changes that will be carried out by HIP to PP is Rp9,252,582. This novation agreement is effective from the effective date and will remain in effect until the implementation of the obligation amounting to Rp9,252,582 has been settled by HIP.

Based on the review of the collectability of the other receivables at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of other receivables is sufficient.

8. Persediaan

8. Inventories

	2022 Rp	2021 Rp	
Alat Kantor dan Percetakan	11,944,178	11,657,477	Office and Equipment
Barang Dagang	11,461,766	15,485,867	Merchandise
Suku Cadang Pemeliharaan	9,800,118	18,799,700	Maintenance Sparepart
Bahan Bakar	4,767,901	3,751,508	Fuel
Hotel dan Lounge	4,655,906	3,482,925	Hotel and Lounge
Elektronika	3,076,276	2,466,000	Electronics
Mekanikal dan Pendingin Udara	1,781,719	1,954,000	Mechanical and Air Conditioning
Keamanan dan Pemadam Kebakaran	1,400,851	547,000	Secure and Firefighter
Pemeliharaan Alat Besar	74,750	257,000	Large Tool Maintenance
Lain-lain	1,588,087	1,669,215	Others
Subtotal	50,551,552	60,070,692	Subtotal
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,329,163)	(2,120,135)	Allowance for Impairment Losses
Total	49,222,389	57,950,557	Total

Persediaan barang dagang pada 31 Desember 2022 dan 2021 telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.729.041 dan Rp1.969.360.

Merchandise inventories as of December 31, 2022 and 2021 are insured against the risk of loss due to natural disasters, fire and other risks for a total coverage of Rp2,729,041 and Rp1,969,360, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Management believes that the sum insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	2,120,135	2,025,308	Beginning Balance
Penambahan	247,517	299,294	Addition
Pemulihan	(1,038,489)	--	Recovery
Penghapusan	--	(204,467)	Write-Off
Saldo Akhir	1,329,163	2,120,135	Ending Balance

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan di atas adalah cukup.

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi netonya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management believes that the carrying values of its inventories do not exceed their net realizable values as of December 31, 2022 and 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat yang dijaminkan sehubungan dengan liabilitas apapun.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no collateral for any obligations.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. Uang Muka

9. Advances

	2022 Rp	2021 Rp	
Pembelian	109,472,892	93,451,080	Purchases
Ekspedisi Muatan	35,204,000	11,526,000	Freight Forwarder
Dinas dan Operasional	25,367,962	1,204,495	Service and Operation
Karyawan	14,628,419	7,975,000	Employee
Lain-lain	10,151,563	6,923,000	Other
Subtotal	194,824,836	121,079,575	Subtotal
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(195,353)	(195,353)	Allowance for Impairment Losses
Total	194,629,483	120,884,222	Total

Akun ini merupakan biaya yang dibayar terlebih dahulu untuk kepentingan operasional Grup yang akan dipertanggungjawabkan atau akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

This account represents cost paid in advance for the benefit of the Group's operations that will be accounted for or due within the next year.

Uang muka pembelian merupakan uang muka pembelian beras dan *duty free*. Uang muka digunakan untuk pembelian barang dagangan, aset bernilai rendah, operasional dan lain-lain.

Advances for purchases represent advances for the purchase of rice and duty free. Advances are used for the purchase of merchandise, low value assets, operations and others.

10. Biaya Dibayar di Muka

10. Prepaid Expenses

	2022 Rp	2021 Rp	
Asuransi	53,903,945	50,361,698	Insurance
Umum	1,821,082	8,283,853	General
Pegawai	1,558,760	1,974,904	Personnel
Sewa	931,441	1,828,506	Rent
Lain-lain	17,978,970	23,083,462	Others
Total	76,194,198	85,532,423	Total

Beban umum dibayar di muka terdiri dari biaya pemeliharaan dan utilitas.

General purpose of prepaid expenses are consist of maintenance expenses and utility.

Asuransi terutama adalah asuransi dibayar di muka atas aset tetap Grup.

Insurance mainly represents prepaid expenses insurance for fixed assets of the Group.

Beban dibayar di muka lain-lain terutama sehubungan dengan pemakaian persediaan.

Prepaid expenses are mainly consist of the use of supplies.

11. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

11. Accrued Revenues

	2022 Rp	2021 Rp	
Aeronautika	414,338,906	283,354,355	Aeronautika
Non-Aeronautika	234,049,235	176,009,498	Non-Aeronautika
Lain-lain	29,794,927	4,567,437	Others
Subtotal	678,183,068	463,931,290	Subtotal
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(153,231,124)	(166,597,320)	Allowance for Impairment Losses
Total	524,951,944	297,333,970	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan yang masih harus diterima untuk aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U), Jasa *Aviobridge* dan *Extended Fee*.

Pendapatan yang masih harus diterima untuk non-aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas jasa sewa ruang, pemakaian jasa gudang, sewa tanah, konsesi, parkir, pemakaian listrik/telepon/air, pemakaian premium lounge dan jasa lainnya.

Pendapatan yang masih harus diterima lain-lain merupakan akrual atas pendapatan bunga deposito.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	166,597,320	92,477,923
Penambahan	18,821,691	74,119,397
Pemulihan	(32,187,887)	--
Saldo Akhir	153,231,124	166,597,320

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Accrued revenues of aeronautical consist of Aircraft Landing, Placing and Storing Service (PJP4U), Aircraft Passengers Handling Service (PJP2U), Cargo and Post Services (PJKP2U), Aviobridge Services and Extended Fee.

Accrued revenues of non-aeronautical consist of revenues for space rental services, use of warehouse, land rental, concessions, parking, electricity/telephone/water, the use of premium lounges and other services.

Other accrued revenues consist of the interest income on deposits

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

12. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2022 Rp	2021 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pasal 4(2)	14,600	--
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	921,210	2,006,574
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	98,156,952	1,278,684,091
Total	99,092,762	1,280,690,665

12. Taxation

a. Prepaid taxes

<u>The Company</u>
Article 4(2)
Value Added Tax (VAT)
<u>Subsidiaries</u>
Value Added Tax (VAT)
Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Estimasi Tagihan Pajak

	2022 Rp	2021 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 28A Tahun 2022	1,302,472	--
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 28A Tahun 2022	159,860,842	--
Pasal 28A Tahun 2021	130,143,764	137,978,286
Pasal 28A Tahun 2020	--	378,256,804
Pajak Pertambahan Nilai	65,601,637	--
Total	356,908,715	516,235,090

b. Estimated Claims for Refundable Tax

<u>The Company</u>
Income Taxes:
Article 28A Year 2022
<u>Subsidiaries</u>
Income Taxes:
Article 28A Year 2022
Article 28A Year 2021
Article 28A Year 2020
Value Added Tax
Total

c. Utang Pajak

	2022 Rp	2021 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	11,885	66,431
Pasal 15	--	21,777
Pasal 21	964,730	1,004,169
Pasal 23	332,073	567,028
SKPKB PPN yang Diangsur	2,045,595	4,141,747
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	32,590,461	24,050,038
Pasal 15	54,270	--
Pasal 21	46,208,908	49,358,819
Pasal 22	987,923	153,093
Pasal 23	17,480,495	13,754,988
Pasal 25	769,883	2,378,593
Pasal 26	2,635	--
Pasal 29	20,084,228	20,915,142
Pajak PB 1	6,485,048	4,771,937
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	139,612,972	80,177,854
PPH 15, STP dan Lainnya	6,370,714	8,923,192
Total	274,001,820	210,284,807

<u>The Company</u>
Income Taxes:
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 23
Installment SKPKB VAT
<u>Subsidiaries</u>
Income Taxes:
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29
PB Tax 1
Value Added Tax (VAT)
Article 15, STP, and Others
Total

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan

	2022 Rp	2021 Rp
Pajak Kini		
Perusahaan		
Entitas Anak		
Tahun Berjalan	(60,870,987)	(83,682,606)
Penyesuaian Periode Sebelumnya	(294,760)	(20,263,718)
Subtotal	(61,165,747)	(103,946,324)
Pajak Tangguhan		
Perusahaan	295,636	(1,931,615)
Entitas Anak	642,392,990	1,126,154,334
Subtotal	642,688,626	1,124,222,719
Total	581,522,879	1,020,276,395

d. Corporate Income Tax Benefit (Expense)

Current Tax
The Company
Subsidiaries
Current Year
Adjustment from Prior Year
Subtotal
Deferred Tax
The Company
Subsidiaries
Subtotal
Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Taksiran Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Rugi Sebelum Pajak		
Penghasilan Badan Menurut		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain Konsolidasian	(1,495,349,837)	(8,556,440,606)
Dikurangi:		
Rugi Entitas Anak Sebelum		
Beban Pajak Penghasilan Badan		
dan Efek Eliminasi serta Proforma	(1,404,928,012)	(8,517,324,531)
Rugi Perusahaan Sebelum		
Pajak Penghasilan Badan Setelah		
Beban (Penghasilan) yang Pajaknya		
Bersifat Final	(90,421,825)	(39,116,075)
Ditambah (Dikurangi):		
<u>Beda Tetap:</u>		
Sumbangan	--	450
Konsumsi	--	22,673
Umum Lainnya	23,864,417	69,958
Pajak Penghasilan 21	10,176,459	645,765
Denda Keterlambatan Pokok	--	6,987
Bunga Deposito dan Jasa Giro	(1,839,736)	(15,690)
Beban Pajak Tabungan Giro	2,972	3,138
<u>Beda Waktu:</u>		
Imbalan Pascakerja	1,288,298	65,834
Penyisihan Penurunan Nilai	55,500,000	--
Subtotal	88,992,410	799,115
Rugi Fiskal 2022	(1,429,415)	--
Rugi Fiskal 2021	(38,316,960)	(38,316,960)
Laba Fiskal 2020	339,586	339,586
Rugi Fiskal 2019	(6,824,194)	(6,824,194)
Rugi Fiskal 2018	(2,776,399)	(2,776,399)
Rugi Fiskal 2017	(1,883,785)	(1,883,785)
Total Rugi Fiskal	(50,891,167)	(49,461,752)
Dikurangi:		
Pajak Dibayar di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,302,472	--
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	(1,302,472)	--

Perhitungan taksiran pajak penghasilan kena pajak pada akhir tahun menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam group menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Provision for income tax

The reconciliation between profit before corporate income tax, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and the Company's estimated tax loss is as follows:

Loss Befor Corporate Income Tax in Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	
Less:	
Loss of Subsidiaries Before Corporate Income Tax Expense and Elimination and Proforma Effect	
Loss Before Corporate Income Tax After Expenses (Revenues) Subjected to Final Tax Attributable to the Company	
Add (Deduct):	
<u>Permanent Difference:</u>	
Donation	
Consumption	
Other General	
Income Tax Article 21	
Principal Late Penalty	
Interest on Deposits and Giro Services	
Bank Interest Tax	
<u>Timing Difference:</u>	
Post-employment Benefit	
Allowance for Impairment Losses	
Subtotal	
Fiscal Loss 2022	
Fiscal Loss 2021	
Fiscal Income 2020	
Fiscal Loss 2019	
Fiscal Loss 2018	
Fiscal Loss 2017	
Total Fiscal Loss	
Deducted:	
Prepaid Tax	
Income Tax Article 23	
Corporate Income Tax Overpayment	

The calculation of estimated taxable income at the end of the year is used as a basis in filing the annual corporate income tax return.

Based on the Taxation Laws of Indonesia, entities within the group calculate and pay tax on the basis of self assesment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku dan manfaat pajak penghasilan sebagai berikut:

The reconciliation between the result of the multiplication of accounting income before corporate income tax with the current tax rate and income tax benefit is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Rugi Sebelum Pajak			Loss Befor Corporate Income Tax
Penghasilan Badan Menurut			in Consolidated Statement
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan			of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian	(1,495,349,837)	(8,556,440,606)	Other Comprehensive Income
Dikurangi:			Less:
Rugi Entitas Anak Sebelum			Loss of Subsidiaries Before
Beban Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax Expense
dan Efek Eliminasi serta Proforma	(1,404,928,012)	(8,517,324,531)	and Elimination and Proforma Effect
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan -			Income Before Income Tax Expense -
Perusahaan	(90,421,825)	(39,116,075)	The Company
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	--	--	Income Tax Expense - The Company
Pajak Tangguhan - Perusahaan	295,636	(1,931,615)	Deferred tax - The Company
Pajak Tangguhan - Entitas Anak	642,392,990	1,126,154,334	Deferred tax - Entity Subsidiaries
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak	(61,165,747)	(103,946,324)	Income Tax Expense - Entity Subsidiaries
Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian	581,522,879	1,020,276,395	Income Tax Expense Consolidation

f. Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan beban (manfaat) dan aset pajak tangguhan sebagai berikut:

f. Deferred Tax Assets

The calculation of deferred tax expense (benefit) and deferred tax assets is as follows:

	1 Januari / January 1, 2022 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Ekuitas / Credited to Equity Rp	Penyesuaian / Adjustment Rp	Divestasi / Divestment Rp	31 Desember / December 31, 2022 Rp	
Liabilitas Pajak Tangguhan							Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak	(262,115,001)	186,760,001	75,355,000	--	--	--	Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
Entitas Anak	1,971,286,723	814,340,649	(25,238,705)	(346,861,621)	--	2,413,527,046	Subsidiaries
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan							Deferred Tax Asset (Liabilities)
Perusahaan:							The Company:
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	253,066	--	--	--	--	253,066	Allowance for Impairment of Trade Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,465,972	12,210	--	--	--	1,478,182	Allowance for Impairment of Other Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	34,546	--	--	--	--	34,546	Allowance for Impairment of Inventories
Penyisihan Penurunan Nilai Uang Muka	42,978	--	--	--	--	42,978	Allowance for Impairment of Advances
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi							Accumulated Depreciation and Amortization of
Aset Tetap, Properti Investasi dan							Fixed Assets, Property Investment and
Aset Tak Berwujud	6,449,369	--	--	--	--	6,449,369	Intangible Assets
Imbalan Kerja Karyawan	37,861	283,426	(16,831)	--	--	304,456	Employee Benefits
Subtotal	8,283,792	295,636	(16,831)	--	--	8,562,597	Subtotal
Total	1,979,570,515	814,636,285	(25,255,536)	(346,861,621)	--	2,422,089,643	Total

	1 Januari / January 1, 2021 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Rugi / Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Ekuitas / Credited to Equity Rp	Penyesuaian Tarif Pajak / Tax Rate Adjustment Rp	Divestasi / Divestment Rp	31 Desember / December 31, 2021 Rp	
Liabilitas Pajak Tangguhan							Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak	(231,024,839)	(33,873,162)	2,783,000	--	--	(262,115,001)	Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
Entitas Anak	812,344,977	1,079,759,773	9,888,252	79,680,715	(10,386,994)	1,971,286,723	Subsidiaries
Perusahaan:							The Company:
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	287,575	--	--	(34,509)	--	253,066	Allowance for Impairment of Trade Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,668,378	--	--	(202,405)	--	1,465,972	Allowance for Impairment of Other Receivable
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	39,257	--	--	(4,711)	--	34,546	Allowance for Impairment of Inventories
Penyisihan Penurunan Nilai Uang Muka	48,838	--	--	(5,861)	--	42,978	Allowance for Impairment of Advances
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi							Accumulated Depreciation and Amortization of
Aset Tetap, Properti Investasi dan							Fixed Assets, Property Investment and
Aset Tak Berwujud	3,920,667	982,454	--	1,546,248	--	6,449,369	Intangible Assets
Imbalan Kerja Karyawan	--	14,483	12,661	10,716	--	37,861	Employee Benefits
Rugi Fiskal	4,238,031	--	--	(4,238,031)	--	--	Fiscal Loss
Subtotal	10,202,745	996,937	12,661	(2,928,552)	--	8,283,792	Subtotal
Total	822,547,722	1,080,756,711	9,900,913	76,752,163	(10,386,994)	1,979,570,515	Total

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 28 Desember 2021, AP I menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPN masa Desember 2020 sebesar Rp952.396.513 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak sebesar Rp965.197.266. AP I menyetujui ketetapan pajak lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp12.800.752 dalam laba rugi tahun 2021. Pada tanggal 24 Januari 2022, AP I telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp913.977.858, dan sisanya dikompensasi dengan denda pajak sebesar Rp38.418.655.

Pada tanggal 15 April 2021, AP I menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sebesar Rp82.633.287 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak sebesar Rp102.897.005. AP I menyetujui ketetapan pajak lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp20.263.718 dalam laba rugi tahun 2021. Pada tanggal 21 Mei 2021, AP I telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp59.317.361, dan sisanya dikompensasi dengan denda pajak sebesar Rp23.315.926.

Pada tanggal 23 Juni 2021 Sarinah menerima SKPLB atas restitusi Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 senilai Rp7.868.698 dan telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp6.008.268 dikompensasikan terkait dengan kekurangan pajak PPN sebesar Rp1.826.244 dan mengakui beban sebesar Rp34.187 dalam laba rugi tahun 2021.

Pada tanggal 28 Desember 2021, AP I menerima ketetapan pajak lebih bayar atas PPN masa Desember 2020 sebesar Rp952.396.513 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak sebesar Rp965.197.266. AP I menyetujui ketetapan pajak lebih bayar tersebut dan mengakui beban sebesar Rp12.800.752 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021. Pada tanggal 24 Januari 2022, AP I telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp913.977.858.

g. Tax Assessment Letters

On December 28, 2021, AP I received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) of VAT for period December 2020 totalling to Rp952,396,513 compared to the overpayment reported in tax returns amounting to Rp965,197,266. AP I accepted these assessed overpayments and recognized expense amounting to Rp12,800,752 in 2021 profit or loss. On January 24, 2022, AP I has received the tax refund amounting to Rp913,977,858, and the rest was compensated with a tax penalty of Rp38,418,655.

On April 15, 2021, AP I received SKPLB on Corporate Income Tax year 2019 amounting to Rp82,633,287 compared to the reported amount in the tax return amounting to Rp102,897,005. AP I accepted this assessed overpayment and recognized expenses of Rp20,263,718 in profit or loss in 2021. On May 21, 2021, AP I has received the tax refund amounting to Rp 59,317,361, and the rest was compensated with a tax penalty of Rp23,315,926.

On June 23, 2021, Sarinah received SKPLB on Corporate Income Tax year 2019 for the 2019 corporate income tax refund amounting to Rp7,868,698 and has received the restitution on 17 June 2021 amounting to Rp6,008,268 compensated for the shortfall in VAT tax of Rp1,826,244 and recognized expenses of Rp34,187 in profit or loss in 2021.

On December 28, 2021, AP I received tax assessments reflecting overpayment of VAT for period December 2020 totalling to Rp952,396,513 compared to the overpayment reported in tax returns totalling to Rp965,197,266. AP I accepted these assessed overpayments and recognized expense amounting to Rp12,800,752 in 2021 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On January 24, 2022, AP I has received the tax return amounting to Rp913,977,858.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 1 April 2022, AP I menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas tahun pajak 2020. Berdasarkan Laporan SPT Badan tahun 2020, AP I mencatat rugi fiskal sebesar Rp2.770.534.577 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp98.365.149. Sedangkan menurut hasil pemeriksaan, rugi fiskal yang disetujui adalah sebesar Rp2.454.834.624 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp98.201.037. Selain itu, terdapat temuan pajak kurang bayar terhadap objek PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2020, sehingga nilai restitusi yang diterima oleh AP I setelah dikurangi oleh penyesuaian denda atau sanksi yang timbul adalah Rp93.261.756 dan telah diterima pada tanggal 9 Mei 2022.

Pada tanggal 24 Oktober 2022, AP I menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas tahun pajak 2021. Berdasarkan Laporan SPT Badan tahun 2021, AP I mencatat rugi fiskal sebesar Rp3.519.369.416 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp26.485.664. Sedangkan menurut hasil pemeriksaan, rugi fiskal yang disetujui adalah sebesar Rp3.437.071.479 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp25.397.079. Selain itu, terdapat temuan pajak kurang bayar terhadap objek PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN tahun 2021, sehingga nilai restitusi yang diterima oleh AP I adalah Rp25.397.079 dan telah diterima pada tanggal 30 November 2022.

Pada tahun 2022, AP II menerima surat ketetapan pajak badan untuk tahun pajak 2020. Atas ketetapan pajak tersebut terdapat penurunan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dalam lima tahun mendatang sebesar Rp6.467.000.

Pada tahun 2021, Gapura (entitas anak AP II) menerima surat ketetapan pajak badan untuk tahun pajak 2019. atas ketetapan pajak tersebut, AP II mengakui beban sebesar Rp5.304.000 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021 atas selisih hasil pemeriksaan sebesar Rp24.652.000 dengan nilai yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp29.956.000.

Pada tanggal 27 Juni 2022 Sarinah menerima SKPLB No. 0039/406/20/051/22 atas restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 senilai Rp9.735.986 dan Sarinah telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp8.743.877 dikompensasikan ke utang dan atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP sejumlah Rp992.108.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On the 1st of April 2022, AP I received an Audit Result Notification Letter regarding the results of the 2020 tax inspection. Based on the 2020 Corporate SPT, AP I recorded a fiscal loss amounting to Rp2,770,534,577 with an overpayment value of Rp98,261,149. Meanwhile, according to the results of the audit, the approved tax loss amounted to Rp2,454,834,624 with an overpayment value of Rp98,201,037. In addition, there were findings of underpayment of tax on objects of PPh article 23, PPh article 26, PPh article 4 paragraph 2 of 2020, so that the amount of restitution received by AP I after being deducted by adjustments to fines or sanctions arising was Rp93,261,756 and was received in May 9, 2022.

On October 24, 2022, AP I received an Audit Result Notification Letter regarding the results of the 2021 tax inspection. Based on the 2021 Corporate SPT Report, AP I recorded a fiscal loss amounting to Rp3,519,369,416 with an overpayment value of Rp26,485,664. Meanwhile, according to the results of the audit the approved tax loss amounted to Rp3,437,071,479. In addition, there were findings of underpayment of tax on objects of PPh article 23, PPh article 26, PPh article 4 paragraph 2 of 2021, so that the amount of restitution received by AP I after being deducted by adjustments to fines or sanctions arising was Rp25,397,079 and was received in November 30, 2022.

In 2022, AP II received a corporate tax assessment letter for the 2020 tax year. Based on this tax assessment, there is a decrease in compensable fiscal losses in the next five years amounting to Rp6,467,000.

In 2021, Gapura (AP II subsidiary) received tax assessment letter on corporate income tax for fiscal year 2019. In relation to the assessment, AP II recognized expenses amounted to Rp5,304,000 in the 2021 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on the difference between the assessment result of Rp24,652,000 with amount previously reported of Rp29,956,000.

On June 27, 2022 Sarinah received SKPLB No. 0039/406/20/051/22 for the 2020 corporate income tax refund of Rp9,735.986 and Sarinah has received the refund on July 28, 2022 in the amount of Rp8,743,877 compensated for debts and or taxes that will be payable through deductions SPMKP in the amount of Rp992,108.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2022, TWC menerima SKPLB No. 00034/406/20/093/22 tanggal 26 April 2022 dan SPMKP No. 00316A tanggal 30 Mei 2022. TWC menerima restitusi sebesar Rp12.955.337. Restitusi tersebut dikompensasi dengan SKPKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2) dan PPN masing-masing sebesar Rp2.868.249, Rp135.240, Rp176.258 dan Rp138.927. Sisa restitusi setelah kompensasi diterima TWC pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp9.636.662.

In 2022, TWC has received SKPLB No. 00034/406/20/093/22 dated April 26, 2022 and SPMKP No. 00316A dated May 30, 2022. TWC received a restitution amounting to Rp12,955,337. The restitution has been compensated with SKPKB PPh Article 21, PPh Article 23, Final Income Tax Article 4 (2) and VAT amounting to Rp2,868,249, Rp135,240, Rp176,258, and Rp138,927, respectively. The remaining restitution after compensation is received by TWC on June 7, 2022 amounting to Rp9,636,662.

13. Investasi Jangka Panjang

13. Long-Term Investments

	2022 Rp	2021 Rp	
Obligasi	18,630,441	21,389,078	Bonds
Penyertaan Saham	14,003,000	13,853,000	Investment in Shares
Total	32,633,441	35,242,078	Total

a. Obligasi

a. Bonds

	2022		2021		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Pihak Berelasi					Related Parties
Obligasi:					Bonds:
RI0148	15,206,000	13,630,441	15,206,000	16,389,078	RI0148
BEXI04CCN7	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	BEXI04CCN7
Subtotal	20,206,000	18,630,441	20,206,000	21,389,078	Subtotal

b. Penyertaan Saham

b. Investment in Shares

	2022 Rp	2021 Rp	
PT Sinergi Colomadu	8,600,000	8,600,000	PT Sinergi Colomadu
PT Putrantara Mitra Angkasa Dua	5,253,000	5,253,000	PT Putrantara Mitra Angkasa Dua
PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara	2,285,000	2,285,000	PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara
PT Manajemen CBT Nusantara	250,000	250,000	PT Manajemen CBT Nusantara
	16,388,000	16,388,000	
Perubahan Nilai Wajar Investasi Ekuitas yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Komprehensif Lain	(100,000)	(250,000)	Changes in the Fair Value of Equity Investments Measured at Fair Value Through Other Comprehensive
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2,285,000)	(2,285,000)	Allowance for Impairment Losses
Total	14,003,000	13,853,000	Total

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk dan TWC. Badan usaha ini bergerak dalam bidang jasa komersial area. TWC memiliki kepemilikan saham pada PT Sinergi Colomadu dengan persentase sebesar 10%.

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu is a joint venture company between PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk and TWC. This business entity is engaged in commercial area services. TWC owns shares in PT Sinergi Colomadu with a percentage of 10%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar investasi saham di PT Sinergi Colomadu ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 21 Maret 2023. Nilai wajar penyertaan saham pada PT Sinergi Colomadu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.750.000. Keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp150.000 diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Nilai investasi di PT Sinergi Colomadu pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.750.000 dan Rp8.600.000.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")
Kepemilikan AP II di PMAD sebesar 0,11% merupakan kompensasi sewa tanah selama periode 11 tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan perjanjian sewa tanah No.SPSW.02.1/TU.308/APII-2000 tanggal 1 Mei 2000 yang kemudian di adendum melalui surat perjanjian tambahan (addendum) I No. ADD.I. SPSW.12/TU.308/2002-AP II tanggal 15 April 2002.

Nilai investasi di PMAD pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.253.000.

PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara ("PPSU")

Investasi saham pada PPSU ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai surat No. S/114/M K.013/1991 tanggal 24 Januari 1991. Investasi saham pada PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) dengan kepemilikan sebesar 8,26%, berdasarkan Akta No. 23 tanggal 24 November 2008 Notaris Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H., PPSU sudah tidak menjalankan kegiatan operasinya.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen akibat tidak beroperasinya PPSU.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The fair value of the investment in shares in PT Sinergi Colomadu is determined using the discounted cash flow method. The fair value of the investment in shares is based on an assessment made by KJPP Suwendho Rinaldy and Partners, an independent appraiser registered with the OJK, in its report dated March 21, 2023. The fair value of the investment in shares in PT Sinergi Colomadu as of December 31, 2022 is Rp8,750,000. The unrealized gain of Rp150,000 was recognized in other comprehensive income.

The balance of investment in PMAD as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp8,750,000 and Rp8,600,000, respectively

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")
AP II's ownership in PMAD amounting to 0.11% represents a land lease compensation for 11 years and 3 (three) months in accordance with the land lease agreement No. SPSW.02.1/TU.308/APII-2000 dated May 1, 2000 which has been amended by letter of additional agreement (addendum) I No. ADD.I.SPSW.12/TU.308/2002-AP II dated April 15, 2002.

The balance of investment in PMAD as of December 31, 2022 and 2021 is Rp5,253,000, respectively.

PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara ("PPSU")

This share investment in PPSU has received approval from the Minister of Finance in accordance with letter No. S/114/M K.013/1991 dated January 24, 1991. Investment in shares in PT Pembangunan Wisata North Sulawesi (PPSU) with ownership of 8.26%, based on Deed No. 23 dated November 24, 2008 Notary Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. PPSU is no longer operating.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that may arise from permanent impairment due to PPSU not operating.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Manajemen CBT Nusantara

Investasi saham pada PT Manajemen CBT Nusantara ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sesuai surat No.SR-796/MRU/11/2018 tanggal 30 November 2018. Investasi saham pada PT Manajemen CBT Nusantara dengan kepemilikan sebesar 8,33% dengan penyeteroran saham yaitu sebesar Rp250.000.

PT Manajemen CBT Nusantara

This investment in shares in PT Management CBT Nusantara has received approval from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. SR-796/MRU/11/2018 dated November 30, 2018. Investment in shares in PT Manajemen CBT Nusantara with ownership of 8.33% with a share deposit of Rp250,000.

14. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

14. Investment in Associates and Joint Venture

2022								
Persentase Kepemilikan/ Percentage %	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of the Year Rp	Penambahan Investasi Periode Berjalan/ Additional Investment for the Period Rp	Penerimaan Dividen Periode Berjalan/ Dividend Received for the Year Rp	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss) Rp	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Share of Other Comprehensive Income Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ Carrying Value at End of the Period Rp	
Metode Ekuitas/ Equity Method								
Entitas Asosiasi/ Associates								
PT Wijaya Karya Realty	22.57%	1,755,999,882	1,752,748,285	--	--	(10,904,391)	718,631	1,742,562,525
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	16.76%	285,000,000	254,634,000	--	--	(26,270,571)	--	228,363,429
PT Railink	40.00%	316,000,000	138,265,000	--	--	(96,752,609)	1,000	41,513,391
PT Sariarthamas Hotel International	50.00%	63,809,675	45,700,264	--	--	(8,973,820)	336,362	37,062,806
PT Jasa Marga Bali Tol	6.31%	59,635,000	17,757,694	--	--	(6,500,310)	(12,999)	11,244,385
PT Sarinah Duffy Indonesia	40.00%	12,000,000	--	12,000,000	--	(1,541,943)	--	10,458,057
Ventura Bersama/ Joint Venture								
PT Bandara International Batam	51.00%	296,523,690	296,523,690	--	--	(21,490,683)	--	275,033,007
Total		2,788,968,247	2,505,628,933	12,000,000	--	(172,434,327)	1,042,994	2,346,237,600
2021								
Persentase Kepemilikan/ Percentage %	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of the Year Rp	Penambahan Investasi Periode Berjalan/ Additional Investment for the Period Rp	Penerimaan Dividen Periode Berjalan/ Dividend Received for the Year Rp	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss) Rp	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Share of Other Comprehensive Income Rp	Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Difference in the Value of Business Combination Under Common Control Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ Carrying Value at End of the Period Rp
Metode Ekuitas/ Equity Method								
Entitas Asosiasi/ Associates								
PT Wijaya Karya Realty	22.57%	1,755,999,882	--	1,755,999,882	--	(4,097,056)	845,459	1,752,748,285
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	16.76%	285,000,000	238,539,858	50,000,000	--	(33,905,858)	--	254,634,000
PT Railink	40.00%	316,000,000	182,769,299	19,760,000	--	(64,244,299)	(20,000)	138,265,000
PT Sariarthamas Hotel International	50.00%	63,809,675	91,594,388	--	(30,000,000)	(16,762,227)	868,103	45,700,264
PT Jasa Marga Bali Tol	6.31%	59,635,000	30,232,340	--	--	(12,468,708)	--	17,757,694
Ventura Bersama/ Joint Venture								
PT Bandara International Batam	51.00%	296,523,690	--	296,523,690	--	--	--	296,523,690
Total		2,776,968,247	543,135,885	2,122,283,572	(30,000,000)	(131,478,148)	1,693,562	2,505,628,933

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi dan ventura bersama di atas adalah sebagai berikut:

Summary of financial information of associates and joint venture above are as follows:

	2022			2021		
	Total Aset/ Total Assets Rp	Total Liabilitas/ Total Liabilities Rp	Laba (Rugi) Neto/ Net Profit (Loss) Rp	Total Aset/ Total Assets Rp	Total Liabilitas/ Total Liabilities Rp	Laba (Rugi) Neto/ Net Profit (Loss) Rp
PT Wijaya Karya Realty	20,269,621,949	13,865,961,149	(48,313,653)	19,025,915,518	12,570,306,721	10,027,028
PT Bandara Internasional Batam	576,633,452	37,340,933	(42,138,591)	581,431,111	--	12,111
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	2,924,301,000	1,928,056,000	(156,748,000)	3,065,671,000	1,917,362,000	(172,870,000)
PT Railink	560,542,000	387,704,000	(241,880,000)	1,000,069,000	658,647,000	(162,229,000)
PT Sariarthamas Hotel Internasional	208,441,662	133,860,938	(17,947,640)	176,960,933	85,105,293	(33,524,454)
PT Jasa Marga Bali Tol	1,909,162,000	1,696,686,000	(103,016,000)	1,827,452,099	1,511,754,790	(155,679,067)
PT Sarinah Duffy Indonesia	51,007,431	24,862,290	(3,854,859)	--	--	--

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")

JMBT bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Investasi dalam saham pada JMBT merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN.

AP I memiliki 59.635 saham atau sebesar Rp59.635.000 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400 dengan jumlah kepemilikan sebesar 8%.

AP I mencatat investasi saham pada JMBT menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 15 paragraf 6 dan 16.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 Tanggal 22 Oktober 2020 dari Leolin Jayanti, S.H. Notaris di Jakarta, pemegang saham sepakat melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp745.434.000 menjadi Rp1.440.434.000. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 November 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan setoran modal disetor sejumlah Rp 200.000.000, sehingga membuat persentase kepemilikan AP I di PT Jasamarga Bali Tol terdilusi dari 8,00% menjadi 6,31%.

PT Bandara Internasional Batam ("BIB")

BIB didirikan pada tanggal 13 September 2021 untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kegiatan kebandarudaraan di bandara Hang Nadim Batam.

AP I memiliki 296.523.690 saham atau sebesar Rp296.523.690 dengan persentase kepemilikan sebesar 51%. AP I mencatat investasi saham pada BIB menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 66 tentang Pengaturan Bersama.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Jasa Marga Bali Tol ("JMBT")

JMBT is engaged in the operation of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road.

The investment in shares in JMBT is an investment consortium for the construction of the Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road in the Bali area by several state-owned companies.

AP I has 59,635 shares or Rp59,635,000 and additional paid-in capital amounting to Rp14,908,400 with ownership of 8%.

AP I recorded its investments in shares in JMBT using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 15, paragraphs 6 and 16.

Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 46 dated October 22, 2020 from Leolin Jayanti, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to increase the authorized capital from Rp745,434,000 to Rp1,440,434,000. Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 24 dated November 12, 2020 from Leolin Jayanti, S.H., Notary in Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk made injection of Rp200,000,000, which made AP I's ownership in PT Jasamarga Bali Tol to be diluted from 8.00% to 6.31%.

PT Bandara Internasional Batam ("BIB")

BIB was established in September 13, 2021 to manage business activities in the development, operation, and management of airport activities at Hang Nadim airport, Batam.

AP I has 296,523,690 shares or Rp296,523,690 with percentage ownership of 51%. AP I recorded its investments in BIB using the equity method according to PSAK 66 about Joint Arrangements.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Railink ("Railink")

Berdasarkan Akta Notaris Hadijah S.H., No.14 tanggal 12 Mei 2020, Pemegang Saham menyetujui penambahan modal dasar PT Railink yang semula sebesar Rp790.000.000 yang terbagi atas 790.000 lembar saham menjadi Rp839.400.000 yang terbagi dalam 839.400 lembar saham dan menyetujui pengeluaran/ penempatan saham yang masih disimpan sebesar 29.640 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta dengan total Rp29.640.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga persentase kepemilikan saham AP II terdilusi menjadi 38,55%.

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H., No. 06 Tanggal 19 April 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/ penempatan saham yang masih disimpan sebesar 19.760 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta dengan total Rp19.760.000 yang seluruhnya diambil oleh AP II sehingga persentase kepemilikan saham AP II menjadi 40%.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB")

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BIJB yang telah diaktakan dengan akta notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 9 pada tanggal 15 Desember 2020, AP II menambah penyertaan saham di BIJB sebesar Rp85.000 sehingga meningkatkan persentase kepemilikan menjadi 15,41%. AP II telah melakukan pembayaran atas penambahan kepemilikan saham tersebut pada tanggal-tanggal 1 April 2020, 29 Mei 2020 dan 29 September 2020 dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp35.000.000, Rp15.000.000 dan Rp35.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 27 tanggal 29 September 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham sebesar 99.968 lembar yang masing-masing bernilai Rp1.000.000 dengan total Rp99.968.000 yang seluruhnya diambil oleh Pemprov Jabar sehingga persentase kepemilikan saham AP II terdilusi menjadi 14,62%.

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 10 Tanggal 29 Desember 2021, Pemegang Saham menyetujui penempatan saham sebesar 50.000 lembar yang masing-masing bernilai Rp1.000.000 dengan total Rp50.000.000 yang seluruhnya diambil oleh AP II sehingga persentase kepemilikan saham AP II menjadi 16,76%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Railink ("Railink")

Based on Notarial Deed of Hadijah S.H., No. 14, dated May 12, 2020, the Shareholders approved the addition of PT Railink's authorized capital from Rp790,000,000 which was consist of 790,000 shares to become Rp839,400,000 consist of 839,400 shares and approved the issuance or placement of unauthorized shares of 29,640 shares with a par value of Rp1 million with total value of Rp29,640,000, which all were acquired by PT Kereta Api Indonesia (KAI) and made AP II percentage of ownership decreased into 38.55%.

Based on Notarial Deed of Ariani L. Rachim, S.H., No. 06, dated April 19, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of unauthorized shares of 19,760 shares with a par value of Rp1 million with total value of Rp19,760,000, which all were acquired by AP II and made AP II percentage of ownership into 40%.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ("BIJB")

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of BIJB which has been notarized by notarial deed of Surjadi Jasin, S.H., No. 9 dated December 15, 2020, AP II made additional investment of Rp85,000 which increased their percentage ownership to 15.41%. AP II has fully paid the additional investment on April 1, 2020, May 29, 2020 and September 29, 2020 amounted Rp35,000,000, Rp15,000,000 and Rp35,000,000, respectively.

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H., No. 27 dated September 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 99,968 shares with a par value of Rp1,000,000 with total value of Rp99,968,000 which all were acquired by Pemprov Jabar and made AP II's percentage of ownership decreased into 14.62%.

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H., No. 10 dated December 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 50,000 shares with a par value of Rp1,000,000 with total value of Rp50,000,000 which all were acquired by AP II and made AP II percentage of ownership into 16.76%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Wijaya Karya Realty

Investasi saham pada PT Wijaya Karya Realty Berdasarkan Akta Notaris No.189 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHUAH.01.03-0460507 tanggal 13 Oktober 2021, sehubungan dengan penyerahan inbreng saham PT Hotel Indonesia Properti. HIN berhak menerima dari PT Wijaya Karya Realty hak atas kepemilikan sebanyak 16.566.614.132 lembar saham, dengan harga perolehan sebesar Rp1.755.999.882, sehingga persentase kepemilikan saham HIN menjadi 22,57%.

PT Sariarthamas Hotel International

Sarinah menguasai saham pada PT Sariarthamas Hotel International sebesar 50% atau 3.750 lembar saham dengan nilai nominal USD1,000 per lembar saham. Sehingga penyertaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Tanah yang merupakan bagian dari setoran modal inbreng Sarinah ke PT Sariarthamas Hotel International (SHI) yang luasnya 2.280 m² yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim Jakarta. Tanah setoran modal inbreng tersebut tertuang dalam beberapa perjanjian diantara pemegang saham PT Sarinah termasuk tetapi tidak terbatas dalam *Basic Agreement* tanggal 30 September 1970. Terkait dengan hal tersebut, PT Sarinah juga telah mengkonfirmasi kewajibannya kepada PT Sariarthamas Hotel International yang dituangkan dalam Memorandum Agreement tanggal 8 Maret 1983 diantara pemegang saham PT Sarinah.

PT Sarinah Duffry Indonesia ("SDI")

SDI didirikan sesuai dengan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn No. 234 tanggal 29 Juni 2022 dan telah disetujui oleh Kemenkumham Nomor AHU-0126328.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 04 Juli 2022. SDI merupakan hasil *joint venture* antara PT Sarinah, Duffry International AG dan Groupo Industrial Omega S.A. DE C.v.

Sarinah menempatkan investasi sebagai penyertaan pada SDI Indonesia dengan kepemilikan 40%. Sarinah mengakui bagian dari rugi SDI sebesar Rp3.854.858.743 sesuai dengan bagian investasi Perusahaan berdasarkan laporan laba rugi SDI 31 Desember 2022 (Tidak diaudit).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Wijaya Karya Realty

Investment in shares in PT Wijaya Karya Realty Based on Notarial Deed No.189 dated 30 September 2021 of Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Indonesia by Decree No.AHUAH.01.03-0460507 dated October 13, 2021, in connection with the transfer of shares in PT Hotel Indonesia Properti. HIN is entitled to receive from PT Wijaya Karya Realty the ownership rights of 16,566,614,132 shares, with acquisition cost of Rp1,755,999,882, so that the percentage of HIN share ownership becomes 22.57%.

PT Sariarthamas Hotel International

Sarinah owns 50% shares in PT Sariarthamas Hotel International or 3,750 shares with a par value of USD1,000 per share. Therefore, the investment is recorded using the equity method.

Land which is part of the Sarinah's inbreng capital injection to PT Sariarthamas Hotel International (SHI) with an area of 2,280 sqm located at Jalan H. Agus Salim Jakarta. The land for paid-in capital inbreng is contained in several agreements between PT Sarinah shareholders including but not limited to the *Basic Agreement* dated September 30, 1970. In this regard, PT Sarinah has also confirmed its obligations to PT Sariarthamas Hotel International as stated in the Memorandum Agreement dated March 8, 1983 among PT Sarinah shareholders.

PT Sarinah Duffry Indonesia ("SDI")

SDI was established in accordance with the Deed of Notary Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn No. 234 dated June 29, 2022 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0126328.AH.01.11.Tahun 2022 July 4, 2022. SDI is a joint venture between PT Sarinah, Duffry International AG and Groupo Industrial Omega S.A. DE C.v.

Sarinah places the investment as an investment in SDI Indonesia with 40% ownership. Sarinah recognized SDI's share of losses amounting to Rp3,854,858,743 in accordance with the Company's share of investment based on SDI's December 31, 2022 profit or loss statement (Unaudited).

15. Uang Muka Investasi

15. Advance for Investments

	2022 Rp	2021 Rp	
Entitas Anak HIN	235,223,003	--	HIN subsidiary
Railink	16,000,000	--	Railink
Total	251,223,003	--	Total

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Railink ("Railink")

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H., No. 05 Tanggal 27 Januari 2023 yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0017880 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham menyetujui perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor dengan penerbitan saham baru sebanyak 40.000 lembar saham yang masih-masing bernilai Rp1 juta, berdasarkan total nilai atas dana pinjaman PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp24.000.000 dan dana talangan dan injeksi kas dari AP II sebesar Rp16.000.000 yang telah disetorkan oleh AP II dalam dua tahap pada tanggal 30 Maret 2022 dan 4 Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp8.429.000 dan Rp7.571.000.

Per 31 Desember 2022, setoran modal tersebut masih dicatatkan pada uang muka setoran modal dikarenakan belum terdapat akta perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

Uang muka setoran modal adalah uang muka terkait dengan pembentukan Entitas Anak dan sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham. Pada tanggal 25 Oktober 2022 Melalui pemegang saham (PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)) proses pengajuan sudah disampaikan kepada Kementrian BUMN dan sampai dengan tanggal laporan keuangan belum mendapat tanggapan.

Penggunaan uang muka tersebut adalah untuk pembayaran Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur dan Pekerjaan Pembangunan tersebut akan dinovasikan kepada Entitas Anak setelah Entitas Anak Berdiri.

Per 31 Desember 2022, setoran modal tersebut masih dicatatkan pada uang muka setoran modal dikarenakan belum terdapat akta perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Railink ("Railink")

Based on Notarial Deed No. 05 of Ariani L. Rachim, S.H. dated January 27, 2023 which was legalized by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0017880 dated January 31, 2023, the Shareholders approved the amendment to increase the issued/paid-up capital with the issuance of 40,000 new shares with a value of Rp1 million each, based on the total value of PT Kereta Api Indonesia's loan fund of Rp24,000,000 and AP II cash injection of Rp16,000,000 which has been deposited by AP II in two phases on March 30, 2022 and August 4, 2022 amounting to Rp8,429,000 and Rp7,571,000, respectively.

As of December 31, 2022, the capital deposit is still recorded as capital deposit advance because there has not yet been a deed of change for the increase of issued/paid-up capital.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

Advances for paid-up capital are advances related to the formation of Subsidiaries and have received approval from the shareholders. On October 25, 2022 through the shareholders (PT Aviasi Wisata Indonesia (Persero)) the submission process was submitted to the Ministry of SOEs and up to the date of the financial statements had not received a response.

The use of the down payment is for the payment of Basic Infrastructure Development for the Sanur Health Special Economic Zone and the Development Work will be novated to the Subsidiary after the Subsidiary is Established.

As of December 31, 2022, the capital deposit is still recorded as capital deposit advance because there has not yet been a deed of change for the increase of issued/paid-up capital.

16. Uang Muka Pembelian Tanah

Uang muka pembelian tanah terutama untuk pembelian tanah sehubungan dengan perluasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 25 September 2008, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 48 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, di mana kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, membutuhkan lahan seluas kurang lebih 2.137,82 Ha untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara.

Berdasarkan Surat Gubernur Banten perihal Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang Nomor 050/1152-BAPP/2015 menerangkan bahwa proses pengadaan lahan untuk pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang harus memperhatikan pentahapan pengadaan lahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

AP II, melalui Surat AP II kepada Gubernur Provinsi Banten Nomor 06.02/00.1/10/2015/0799 tanggal 23 Oktober 2015 perihal permohonan penetapan lokasi untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, telah menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 130 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, AP II menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000.000 dalam rangka pembebasan lahan terkait dengan pembangunan landasan pacu (runway) 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

16. Advance for Land Acquisition

Advance for land acquisition mainly for land acquisition regarding expansion of Soekarno-Hatta International Airport.

On September 25, 2008, Ministry of Transportation issued a Ministry of Transportation Regulation Number: KM 48 Year 2008 on Soekarno-Hatta International Airport Master Plan that states the airport operation, service, management, and business as well as the development of airport following the master plan requires land area about 2,137.82 Ha. The plan to build and develop airport's facilities is to accommodate flight operations and airport services needs based on recent air traffic growth.

Based on Governor of Banten's letter about the Suitability for Utilization of Soekarno-Hatta Airport Development Space Recommendation number 050/1152-BAPP/2015 explains that the process for land acquisition for the development of Soekarno- Hatta Airport Tangerang must be based on the land acquisition phasing regulated in Act Number 2 year 2012 regarding Land Acquisition for Construction for Public Interest.

AP II, through AP II's Letter to Governor of Banten Number 06.02/00.1/10/2015/0799 dated October 23, 2015 concerning the proposal to determine the location for developing runway 3 of Soekarno-Hatta International Airport Tangerang, has submitted the document on land acquisition schemes to develop runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Tangerang.

Based on the Government Regulation ("PP") No. 130 Year 2015 dated December 28, 2015, AP II received additional capital investment of the Republic of Indonesia amounting to Rp2,000,000,000 in relation with the land acquisition related to the construction of runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 69 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, AP II menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000.000 dalam rangka pembebasan lahan terkait dengan pembangunan landasan pacu (*runway*) 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Selanjutnya, Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.83-Huk/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, menyatakan bahwa menetapkan lokasi pembangunan *runway* 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas ±173,19 Hektar (Ha) yang terletak di wilayah Kelurahan Benda, Kelurahan Selapajang Jaya, Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas dan Desa Bojong Renged.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.83-Huk/2016 dimaksud berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun dan diperpanjang selama 1 Tahun melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 598/Kep.19-Huk/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan *runway* 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan tersebut, AP II berkoordinasi dengan BPN Kanwil Banten terkait pelaksanaan pengadaan tanahnya, yang mana pada prosesnya pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dilaksanakan oleh BPN Kota Tangerang dan BPN Kabupaten Tangerang.

Pada tanggal 4 Maret 2019, BPN Kabupaten Tangerang telah menyerahkan hasil pembebasan tanah kepada AP II dengan total luas 134,06 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah No.263/BA-36.03.AT.02/III/2019.

Pada tanggal 11 Maret 2019, BPN Kota Tangerang telah menyerahkan hasil pembebasan tanah kepada AP II dengan total luas 33,46 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah No. 01/PH/RW.3/III/2019.

Dengan demikian, berdasarkan Berita Acara di atas, pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh AP II untuk pembangunan *runway* 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah seluas 167,52 Ha.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the Government Regulation ("PP") No. 69 Year 2016 dated December 29, 2016, AP II received additional capital investment of the Republic of Indonesia amounting to Rp2,000,000,000 in relation with the land acquisition related to the construction of runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport.

Then, Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.83-Huk/2016 dated February 5, 2016 concerning the Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Development Location Establishment, confirmed that the location for the development of Runway3 Soekarno-Hatta International Airport with an area of ±173.19 Hectare (Ha) located in Kelurahan Benda, Kelurahan Selapajang Jaya, Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas and Desa Bojong Renged.

The Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.83-Huk/2016 valid for 2 years period and has been extend for another 1 year through the Decree of Governor of Banten Number 598/Kep.19-Huk/2018 dated January 25, 2018 concerning the Extension of Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport Development Location Establishment.

In the process of land clearing, AP II coordinates with the National Land Agency (BPN) of Banten Regional Office related to the land acquisition process which conducted by BPN Kota Tangerang and BPN Kabupaten Tangerang.

On March 4, 2019 BPN Kabupaten Tangerang has handed over the results of the land acquisition to AP II with a total area 134.06 Ha based on the Minutes of Handover of the Results of Land Acquisition No.263/BA-36.03.AT.02/III/2019.

On March 11, 2019 BPN Kota Tangerang has handed over the results of the land acquisition to AP II with a total area 33.46 Ha based on the Minutes of Handover of the Results of Land Acquisition Number 01/PH/RW.3/III/2019.

Therefore, based on the Minutes above, the land acquisition that has been carried out by AP II for the development of Runway 3 Soekarno-Hatta International Airport is an area of 167.52 Ha.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Lahan yang telah diserahkan kepada Perusahaan di atas saat ini telah diajukan untuk proses Sertifikasi Lahan atas nama AP II di BPN Kanwil Banten berdasarkan Surat AP II Nomor. 06.04/00/10/2019/11388-11389 tanggal 7 Oktober 2019 untuk lahan yang terletak di wilayah Kota Tangerang dan Surat AP II Nomor. 06.04/00/10/2019/12216-12218 tanggal 28 Oktober 2019 untuk lahan yang terletak di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2021, AP II telah mendapatkan dua peta bidang tanah untuk area Benda dan Selapajang, sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.

Pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh AP II untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta masing-masing seluas 167,5 Ha dengan jumlah pembayaran kepada pemilik lahan total sebesar Rp3.269.013.000.

Pada tahun 2021, AP II mereklasifikasi uang muka tanah menjadi aset tetap sebesar Rp3.314.043.000 (Catatan 18). Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, sertifikat tanah tersebut masih dalam proses penerbitan oleh BPN.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Land that has been handed over to AP II has now been submitted for the process of Land Certification in BPN Banten Regional Office on behalf of AP II based on AP II Letter Number. 06.04/00/10/2019/11388-11389 dated October 7, 2019 for land located in Kota Tangerang area and AP II Letter Number. 06.04/00/10/2019/12216-12218 dated October 28, 2019 land located in Kabupaten Tangerang area.

In 2021, AP II has obtained land map for Benda and Selapajang as one of the requirements for the issuance of the land certificate.

The progress of completion of land acquisition by AP II for constructions of Runway 3 of Soekarno-Hatta International Airport are 167.5 Ha with total payments to land owners amounted to Rp3,269,013,000, in total.

In 2021, AP II has reclassified the advance for land into fixed assets of Rp3,314,043,000 (Note 18). Until the completion date of these consolidated financial statements, the land certificate is still in the process of being issued by BPN.

17. Properti Investasi

17. Investment Properties

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification (Catatan/ Note 18)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost
Tanah	104,376,168	--	(2,380,000)	2,434,340,569	2,536,336,737	Lands
Bangunan/ Lapangan	226,309,036	28,730,126	--	144,538,341	399,577,503	Building/ Fields
Total	330,685,204	28,730,126	(2,380,000)	2,578,878,910	2,935,914,240	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan/ Lapangan	86,234,761	10,987,494	--	10,233,561	107,455,816	Building/ Fields
Penurunan Nilai						Impairment Value
Bangunan/ Lapangan	23,007,461	--	--	--	23,007,461	Building/ Fields
Nilai Buku	221,442,982				2,805,450,963	Book Value

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification (Catatan/ Note 18)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost
Tanah	104,376,168	--	--	--	104,376,168	Lands
Bangunan/ Lapangan	179,804,985	--	--	46,504,051	226,309,036	Building/ Fields
Total	284,181,153	--	--	46,504,051	330,685,204	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan/ Lapangan	60,919,615	3,855,589	--	21,459,557	86,234,761	Building/ Fields
Penurunan Nilai						Impairment Value
Bangunan/ Lapangan	23,007,461	--	--	--	23,007,461	Building/ Fields
Nilai Buku	200,254,077				221,442,982	Book Value

Properti investasi Grup terutama terdiri dari:

- Tanah dan gedung di Jl. Majapahit No. 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jl. MH. Thamrin dan aset tanah di Braga yang terletak di Jalan Braga No. 10, Bandung yang dimiliki oleh Sarinah. Pada tahun 2022, Sarinah melakukan reklasifikasi atas bangunan yang sebelumnya tercatat pada aset tetap bangunan dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp144.538.340 (Catatan 18). Sarinah juga melakukan reklasifikasi atas tanah yang sebelumnya tercatat dalam aset tetap tanah sebesar Rp63.809.674 (Catatan 18)
- Tanah yang akan dikembangkan untuk kawasan wisata di sekitar Candi Ijo, Candi Sewu dan Candi Ratu Boko yang dimiliki oleh TWC.
- Tanah, gedung, dan fasilitas penunjang, eks-unit Hotel Indonesia serta Unit Inna Wisata dengan masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun yang dimiliki oleh HIN.
- Tanah ex Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) yang berada di Jalan Kramat Raya No. 21 DKI Jakarta seluas 16.101 m² dan di Jalan Batas II Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas 14.303 m² yang dimiliki oleh AP II. Nilai wajar dari properti investasi tanah ex-PPD di Jalan Kramat, tanah di Pasar Minggu, tanah di Deli Serdang, tanah dan bangunan di kawasan bandara Soekarno-Hatta dan bangunan di bandara Kualanamu pada tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp618.488, Rp72.874, Rp11.482, Rp61.781.812, dan Rp11.798.057 yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.
- Tanah yang berada di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 40.000 m² yang dimiliki oleh AP II.

The Group's investment properties mainly consist of:

- Land and building on Jl. Majapahit No. 8, South Petojo Village, Gambir District, Central Jakarta, Jl. MH. Thamrin and land assets in Braga which is located at Jalan Braga No. 10, Bandung which is owned by Sarinah. In 2022, Sarinah will reclassify buildings which were previously recorded as building fixed assets and construction in progress of Rp144,538,340 (Note 18). Sarinah also reclassified the land which was previously recorded in land fixed assets amounting to Rp63,809,674 (Note 18).
- The land which will be developed for tourist areas around Ijo Temple, Sewu Temple and Ratu Boko Temple which are owned by TWC.
- Land, building, and supporting facilities ex. Hotel Indonesia Unit and the Inna Wisata Unit with a 30-year term and with an Optional Extension of 20 years owned by HIN.
- Ex Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) land located in Kramat Raya Street No. 21 DKI Jakarta totaling 16,101 sqm and in Batas II Street Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan totaling 14,303 sqm which is owned by AP II. The fair value of the investment properties of ex-PPD land on Jalan Kramat, land in Pasar Minggu, land in Deli Serdang, land and buildings in the Soekarno-Hatta airport area and buildings in Kualanamu airport as of December 31, 2022 amounted to Rp618,488, Rp72,874, Rp11,482, Rp61,781,812, and Rp11,798,057, respectively which were determined based on the Sales Value of Taxable Objects (NJOP) on investment properties.
- Land located at Saentis Village, Sub-District Percut Sei Tuan, District Deli Serdang with an area of 40,000 sqm which is owned by AP II.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Tanah dan bangunan yang merupakan tanah, bangunan dan ruang yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk ruang tunggu di bandara, pergudangan, hotel dan perkantoran di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu yang dimiliki oleh AP II.
- Bangunan dan lapangan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Cabang Balikpapan yang dimiliki oleh AP I. Nilai wajar dari properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.403.005 dan Rp1.091.012 yang ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) atas properti investasi.

- Land and buildings which consist of land, building and space utilized by other parties for airport lounge, warehouse, hotel and office around Soekarno-Hatta and Kualanamu Airports area which is owned by AP II.
- Buildings and fields at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport Balikpapan Branch owned by AP I. The fair value of the investment property as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,403,005 and Rp1,091,012, respectively, which is determined based on the selling price of the taxable object (NJOP) of the investment property.

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation is allocated as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 35)	4,921,450	3,545,011	Cost of Revenues (Note 35)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 37)	6,066,154	310,578	General and Administrative Expenses (Note 37)
Total	10,987,604	3,855,589	Total

Pada tahun 2021, aset tetap berupa gudang Marunda dan gudang Bali Logistics Park (BLP) milik Angkasa Pura Logistik (APL) direklasifikasi ke properti investasi (Catatan 18).

In 2021, fixed assets in form of Marunda and Bali Logistics Park (BLP) warehouses owned by Angkasa Pura Logistik (APL) have been reclassified to investment properties (Note 18).

Pada tahun 2022, HIN dan Sarinah melakukan reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang sebelumnya tercatat pada aset tetap sebesar Rp2.432.496.049 dan Rp144.538.341.

In 2022, HIN and Sarinah will reclassify land and buildings which were previously recorded as fixed assets amounting to Rp2,432,496,049 and Rp144,538,341, respectively.

Tanah milik Sarinah dijadikan sebagai jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 26).

Land owned by Sarinah was used as collateral to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 26).

Nilai wajar properti investasi Grup ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), manajemen berkeyakinan bahwa NJOP telah mendekati nilai wajarnya.

The Group's fair value of investment properties is determined based on the Selling Value of Tax Object (NJOP), management believes that the NJOP is close to its fair value.

18. Aset Tetap

18. Fixed Assets

	2022						
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification/ Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan							Acquisitions Cost
Tanah	18,795,358,286	--	(21,156,000)	--	(2,414,140,850)	16,360,061,436	Lands
Bangunan Lapangan	27,139,957,201	8,919,315	(11,625,158)	--	528,016,289	27,665,267,647	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	21,218,429,023	33,435,914	(47,252,662)	--	636,252,278	21,840,864,553	Buildings
Pesawat	1,030,643	--	--	--	4,465,700	5,496,343	Aircraft
Kendaraan Bermotor	940,728,628	7,383,466	(15,924,583)	--	(59,913,160)	872,274,351	Vehicles
Mesin dan Peralatan	11,704,438,585	54,346,441	(140,806,596)	--	393,033,724	12,011,012,154	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5,755,297,077	91,478,000	(825,000)	--	1,108,710,705	6,954,660,782	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	10,396,645,400	24,040,638	(1,849,561)	--	(906,470,495)	9,512,365,982	Installation and Network
Overlay	1,545,985,000	30,134,000	--	--	73,121,000	1,649,240,000	Overlay
Renovasi Bangunan	30,640,630	23,893,827	--	--	1,566,064	56,100,521	Buildings Renovation
Lain-lain	351,628,956	18,000	(7,360,000)	--	(331,253,000)	13,033,956	Others
Aset dalam Penyelesaian	6,627,087,899	943,992,580	(65,701,551)	--	(1,752,554,799)	5,752,824,129	Assets Under Construction
Total	104,507,227,328	1,217,642,181	(312,501,111)	--	(2,719,166,544)	102,693,201,854	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2022							
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification/ Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
Bangunan Lapangan	5,392,723,044	960,880,892	(92,919,039)	--	11,580,897	6,272,265,794	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	3,885,782,930	772,648,639	(246,384,547)	--	(44,487,540)	4,367,559,482	Buildings
Pesawat	1,030,643	--	--	--	--	1,030,643	Aircraft
Kendaraan Bermotor	548,457,806	78,863,479	(13,665,920)	--	(57,340,997)	556,314,368	Vehicles
Mesin dan Peralatan	6,604,186,796	977,798,013	(187,368,504)	--	116,664,649	7,511,280,954	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	1,975,882,448	322,598,198	(825,000)	--	73,192,135	2,370,847,781	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	4,327,788,061	818,373,926	(8,620,367)	--	27,658,678	5,165,200,298	Installation and Network
Overlay	606,180,000	152,244,000	--	--	--	758,424,000	Overlay
Renovasi Bangunan	18,179,238	2,614,598	--	--	(3,867,698)	16,926,138	Buildings Renovation
Lain-lain	248,594,000	25,107,000	(7,360,000)	--	(261,025,487)	5,315,513	Others
Total	23,608,804,966	4,111,128,745	(557,143,377)	--	(137,625,363)	27,025,164,971	Total
Cadangan Penurunan Nilai	109,539,485	21,070,706	--	--	4,465,700	135,075,891	Allowance for Impairment
Nilai Buku	80,788,882,877					75,532,960,992	Book Value
2021							
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification/ Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan						Acquisitions Cost	
Tanah	16,307,795,296	--	(30,103)	(1,783,005,114)	4,270,598,207	18,795,358,286	Lands
Bangunan Lapangan	26,198,858,449	(5,317,875)	(606,249)	--	947,022,876	27,139,957,201	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	20,954,215,529	109,685,925	(1,294,084)	(894,461,019)	1,050,282,672	21,218,429,023	Buildings
Pesawat	5,496,343	--	--	--	(4,465,700)	1,030,643	Aircraft
Kendaraan Bermotor	1,123,217,301	68,484,019	(11,539,831)	(324,962,287)	85,529,426	940,728,628	Vehicles
Mesin dan Peralatan	11,299,604,319	84,687,911	(55,553,598)	(217,669,653)	593,369,606	11,704,438,585	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	5,459,809,827	124,372,388	(199,000)	(38,653,138)	209,967,000	5,755,297,077	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	9,718,937,968	86,186,196	(216,446)	--	591,737,682	10,396,645,400	Installation and Network
Overlay	1,432,353,000	5,255,000	--	--	108,377,000	1,545,985,000	Overlay
Renovasi Bangunan	29,356,016	1,284,614	--	--	--	30,640,630	Buildings Renovation
Lain-lain	350,538,814	11,142	(20,000)	--	1,099,000	351,628,956	Others
Aset dalam Penyelesaian	8,952,303,932	2,450,908,015	(77,388,709)	(66,299,051)	(4,632,436,287)	6,627,087,899	Assets Under Construction
Total	101,832,486,794	2,925,557,335	(146,848,020)	(3,325,050,263)	3,221,081,482	104,507,227,328	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
Bangunan Lapangan	4,499,849,820	892,500,651	(33,226)	--	405,799	5,392,723,044	Buildings/Fields
Bangunan Gedung	3,615,848,686	603,306,188	(447,381)	(309,420,877)	(23,503,686)	3,885,782,930	Buildings
Pesawat	1,030,643	--	--	--	--	1,030,643	Aircraft
Kendaraan Bermotor	739,458,779	75,863,311	(922,215)	(265,946,487)	4,418	548,457,806	Vehicles
Mesin dan Peralatan	5,945,623,802	923,528,346	(53,552,528)	(212,855,006)	1,442,182	6,604,186,796	Machinery and Equipments
Perlengkapan Terminal dan Gedung	1,661,958,097	326,351,236	(5,000)	(12,421,884)	--	1,975,882,448	Terminal dan Building Equipments
Instalasi dan Jaringan	3,507,515,114	820,159,092	(99,250)	--	213,105	4,327,788,061	Installation and Network
Overlay	511,308,000	94,872,000	--	--	--	606,180,000	Overlay
Renovasi Bangunan	15,651,968	2,527,270	--	--	--	18,179,238	Buildings Renovation
Lain-lain	207,668,000	40,945,000	(19,000)	--	--	248,594,000	Others
Total	20,705,912,909	3,780,053,095	(55,078,600)	(800,644,256)	(21,438,181)	23,608,804,966	Total
Cadangan Penurunan Nilai	109,127,129	412,356	--	--	--	109,539,485	Allowance for Impairment
Nilai Buku	81,017,446,756					80,788,882,877	Book Value

Beban penyusutan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 35)	4,101,812,666	3,771,773,654	Cost of Revenues (Note 35)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 37)	9,316,079	8,279,441	General and Administrative Expenses (Note 37)
Jumlah	4,111,128,745	3,780,053,095	Total

Pengurangan aset tetap terdiri dari penghapusan dan penjualan aset tetap sebagai berikut:

Disposal of fixed assets consist of write off and sale of fixed assets as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Harga Jual	49,987,109	106,246,512	Proceeds
Dikurangi: Nilai Buku Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap	29,856,168	91,769,420	Less: Net Book Value of Sale and Retirement of Fixed Assets
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 38)	20,130,941	14,477,092	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 38)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Assets under construction represents projects that have not been completed at the date of the consolidated statements of financial position with the details as follows:

2022			
	Perkiraan % Penyelesaian / Estimated % of Completion	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tahun Perkiraan Penyelesaian / Estimated Years of Completion
Landasan, Apron	82.12	65,457,404	2023
Lapangan, Jalan dan Pagar	92.50	665,260,712	2023
Bangunan	92.50	4,652,454,565	2024
Peralatan Mekanik	85.62	70,694,471	2023
Tanah	98.02	17,210,035	2023
Sistem Pengolahan Data Berbantuan Komputer	98.02	49,896,373	2023
Lain-lain	86.00	231,850,569	2024
Aset Dalam Penyelesaian		5,752,824,129	

Runways, Apron
Field, Roads, Fences
Buildings
Mechanical Equipments
Land
Computer Assisted Data
Processing System
Others

Assets Under Construction

2021			
	Perkiraan % Penyelesaian / Estimated % of Completion	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tahun Perkiraan Penyelesaian / Estimated Years of Completion
Landasan, Apron	92.85	377,671,558	2022
Lapangan, Jalan dan Pagar	86.13	853,430,839	2022
Bangunan	88.59	4,970,866,914	2022
Peralatan Mekanik	65.77	71,556,805	2022
Tanah	99.15	17,210,035	2022
Sistem Pengolahan Data Berbantuan Komputer	95.51	24,970,978	2022
Lain-lain	68.00	311,380,770	2022
Aset Dalam Penyelesaian		6,627,087,899	

Runways, Apron
Field, Roads, Fences
Buildings
Mechanical Equipments
Land
Computer Assisted Data
Processing System
Others

Assets Under Construction

Pada tahun 2021, aset tetap tanah sebesar Rp3.314.043.000 merupakan reklasifikasi dari uang muka pembelian tanah (Catatan 16).

In 2021, fixed assets of land amounting to Rp3,314,043,000 represents a reclassification of advances for land acquisition (Note 16).

Pada tanggal 30 April 2021, HIN telah melepas pengendalian terhadap HIPRO sehingga terjadi pengurangan pada aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp2.524.406.007.

On April 30, 2021, HIN has relinquished control of HIPRO, resulting in a reduction in fixed assets with a book value of Rp2,524,406,007.

Efektif 1 Januari 2022, Grup melakukan perubahan umur manfaat 20-60 untuk bangunan lapangan dan 20-50 untuk gedung untuk mencerminkan umur ekonomis pada saat ini. Dampak dari perubahan tersebut adalah beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp126.326.456.

Effective January 1, 2022, the Group changed the useful life of 20-60 for field buildings and 20-50 for buildings to reflect the current economic life. The impact of such changes is a reduction of depreciation expense by Rp126,326,456 for the year ended December 31, 2022.

Pada tahun 2022, beberapa aset bangunan, gedung, kendaraan, instalasi, peralatan, dan aset dalam konstruksi dilepas oleh Grup terutama disebabkan aset tetap tidak produktif dan pembongkaran untuk pekerjaan terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali.

In 2022, several assets such as buildings, vehicles, installations, equipments and assets under constructions were disposed by the Group mainly due to unproductivity of the fixed assets and demolition for VVIP terminal I Gusti Ngurah Rai Airport (DPS) – Bali.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 aset tetap berupa gedung terminal penumpang, gedung operasional, fasilitas terminal penumpang dan gedung operasi dan aset lainnya diasuransikan dengan nilai pertanggungan semua risiko, gempa bumi, kerusakan mesin dan peralatan elektronik masing-masing sebesar Rp40.583.487.644 dan Rp36.128.638.865. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.

On December 31, 2022 and 2021, fixed assets in the form of passenger terminal building, operational building, passenger terminal facility and operational building and other assets are insured with an all risk coverage, earthquake, machinery breakdown and electronic equipment amounting to Rp40,583,487,644 and Rp36,128,638,865 respectively. Management believes that the insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Management believes that the allowance for impairment as of December 31, 2022 and 2021 is adequate.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no fixed assets classified as terminated from active.

19. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

19. Right-of-Use Assets and Lease Liabilities

a. Aset Hak Guna

a. Right-of-Use

2022					
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan				Acquisitions Cost	
Tanah	592,470,008	13,776,000	(61,667,347)	544,578,661	Land
Bangunan	43,926,169	850,427,303	(36,501,988)	857,851,484	Building
Kendaraan	48,069,319	12,645,400	(11,694,274)	49,020,445	Vehicles
Peralatan	29,457,654	23,993,966	(208,000)	53,243,620	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	126,981,814	--	--	126,981,814	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	840,904,964	900,842,669	(110,071,609)	1,631,676,024	Subtotal
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Tanah	62,177,530	14,667,391	(19,103,685)	57,741,236	Land
Bangunan	50,742,421	19,731,381	(42,143,599)	28,330,203	Building
Kendaraan	31,541,786	13,098,315	(13,767,880)	30,872,221	Vehicles
Peralatan	11,573,931	12,190,496	(2,151,000)	21,613,427	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	2,539,636	5,079,273	--	7,618,909	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	158,575,304	64,766,856	(77,166,164)	146,175,996	Subtotal
Nilai Buku	682,329,661			1,485,500,029	Book Value

2021						
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Divestasi/ Divest Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan					Acquisitions Cost	
Tanah	866,241,297	16,424,407	(21,643,000)	(268,552,696)	592,470,008	Land
Bangunan	44,879,095	30,409,141	(31,362,067)	--	43,926,169	Building
Kendaraan	398,253,128	3,906,141	(354,089,950)	--	48,069,319	Vehicles
Peralatan	27,883,776	1,714,056	(140,178)	--	29,457,654	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	--	126,981,814	--	--	126,981,814	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	1,337,257,296	179,435,559	(407,235,195)	(268,552,696)	840,904,964	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah	62,112,521	29,784,488	--	(29,719,479)	62,177,530	Land
Bangunan	30,824,655	20,036,321	(118,555)	--	50,742,421	Building
Kendaraan	51,183,167	10,256,673	(29,898,054)	--	31,541,786	Vehicles
Peralatan	3,964,407	7,609,524	--	--	11,573,931	Equipment
Taman Mini Indonesia Indah	--	2,539,636	--	--	2,539,636	Taman Mini Indonesia Indah
Subtotal	148,084,750	70,226,641	(30,016,609)	(29,719,479)	158,575,304	Subtotal
Nilai Buku	1,189,172,546				682,329,661	Book Value

b. Liabilitas Sewa

	2022 Rp	2021 Rp
Liabilitas Sewa		
Bagian Jangka Pendek	153,970,716	91,080,336
Bagian Jangka Panjang	1,522,332,171	525,528,288
Total	1,676,302,887	616,608,624

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp94.960.792 dan Rp57.920.377 yang dicatat sebagai bagian dari beban keuangan.

Penyusutan aset hak guna dibebankan pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp64.766.856 dan Rp70.226.641 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 35).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

b. Lease Liabilities

Lease Liabilities
Current Portion
Non-Current Portion
Total

Interest expense on lease liabilities for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp94,960,792 and Rp57,920,377, respectively, recorded as part of financial expenses.

Depreciation of right-of-use assets is charged to cost of revenue amounting to Rp64,766,856 and Rp70,226.641 as of December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 35).

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

20. Aset Tidak Lancar Lain-lain

Aset Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) merupakan alat bantu navigasi yang belum diserahkan AP II kepada LPPNPI.

Uang jaminan merupakan uang jaminan atas petugas keamanan dan langganan listrik.

Saldo per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp100.572.182 dan Rp101.213.827.

20. Other Non-Current Assets

The assets of Perum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) are navigation support equipment that have not been transferred yet by AP II to LPPNPI.

Deposits represents guarantee deposits from security personnel and electricity.

The balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp100,572,182 and Rp101,213,827, respectively.

21. Utang Usaha

	2022 Rp	2021 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 43)	415,585,187	184,107,523
Pihak Ketiga	451,637,243	596,402,658
Total	867,222,430	780,510,181

Related Parties (Note 43)
Third Parties
Total

21. Account Payables

22. Utang Lain-lain

22. Other Payables

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 43)	289,231,354	866,199,845	Related Parties (Note 43)
Pihak Ketiga	1,461,228,002	2,718,321,020	Third parties
Total	1,750,459,356	3,584,520,865	Total

Utang lain-lain mayoritas terdiri dari perolehan aset tetap, jaminan pelanggan dan titipan pembayaran.

The majority of other payables consist of acquisitions of fixed assets, customer guarantees and payment deposits.

Perolehan aset tetap merupakan utang kepada kontraktor sehubungan proyek-proyek aset tetap Grup yang dibangun oleh kontraktor.

Acquisition of fixed asset payable mainly represent payable to contractors who build the Group's fixed assets.

Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan sehubungan dengan sewa ruangan, tanah, listrik, air dan telepon di awal perjanjian.

Customer deposit represent cash deposit given by customer that consists of deposits for space rental, land rental, electrical and water installation at the beginning of the contract.

Titipan pembayaran terutama merupakan penerimaan pembayaran dari DJPU sehubungan dengan stimulus subsidi tarif penerbangan PJP2U.

Payment deposit mainly represent receipt from DJPU in relation to PJP2U airline fare subsidy stimulus.

23. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Pendek

23. Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans

	2022 Rp	2021 Rp	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	788,946,344	801,596,344	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72,840,958	381,089,500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33,839,000	39,560,000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,130,760	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	500,000,000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Total	899,757,062	1,722,245,844	Total

PT Angkasa Pura I ("AP I") dan Entitas Anak

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 11 Desember 2014, PT Angkasa Pura Support (APS) memperoleh pinjaman jangka pendek sebesar Rp40.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat bunga 11,5% per tahun. Fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan surat dari BNI tanggal 22 Desember 2020, dimana pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga 10,00% per tahun. Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp38.946.344 dan Rp51.596.344.

PT Angkasa Pura I ("AP I") dan Subsidiaries

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On December 11, 2014, PT Angkasa Pura Support (APS) obtained short-term bank loan amounting to Rp40,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with 12 months term and bearing interest at 11.5%. This facility had been extended several times, last extension was based on letter from BNI dated December 22, 2020, where the loan will mature on December 10, 2022, bearing interest rate at 10.00% per annum. As of December 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp38,946,344 and Rp51,596,344.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

APS diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan berupa rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage ratio* minimum sebesar 1 kali dan *debt to equity ratio* (DER) maksimal sebesar 2,50 kali.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Pada tanggal 29 Desember 2020, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2021. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 24 Juni 2021.

Pada tanggal 5 Maret 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp13.839.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021 dengan bunga bagi hasil 4,75% ke BSI. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni 2022.

Pada tanggal 18 Juni 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021 dengan bunga bagi hasil 4,92% ke BSI. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni 2022 dengan bunga bagi hasil 0,62% ke BSI.

Seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh pada tahun 2022 dan 2021 dijamin dengan piutang usaha senilai Rp50.000.000 (Catatan 6).

Pada tanggal 2 Juli 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp5.721.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2022. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 17 Juni 2022. Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp33.839.000 dan Rp39.560.000.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Agustus 2020, AP I bersama dengan entitas anak menandatangani perjanjian fasilitas notional pooling Nomor: SP.DK.155/HK.06/2020 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Atas fasilitas ini, bank memberikan jasa giro efektif dan membebaskan biaya bunga

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

APS is required to maintain the debtor's financial ratios, minimum current ratio of 1 time, debt service coverage ratio minimum of 1 time, debt to equity ratio (DER) maximum of 2.50 times.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

On December 29, 2020, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp20,000,000 with 6 months term with due date on June 20, 2021. APS has repaid the outstanding loan on June 24, 2021.

On March 5, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp13,839,000 with 6 months term with due date on September 20, 2021 with sharing interest 4.75%. This facility had been extended until June 17, 2022.

On June 18, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting to Rp20,000,000 with 6 months term with due date on December 20, 2021 with sharing interest at 4.92% to BSI. This facility had been extended until June 17, 2022 with sharing interest 0.62% to BSI.

All working capital facilities obtained in 2022 and 2021 are secured by trade receivable amounting to Rp50,000,000 (Note 6).

On July 2, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting Rp5,721,000 with 6 months term with due date on January 20, 2022. This facility had been extended until June 17, 2022. As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp33,839,000 and Rp39,560,000.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On August 7, 2020, AP I and its subsidiaries signed a notional pooling facility agreement Number: SP.DK.155/HK.06/2020 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). The term of these facility is 1 year from the signing date of the agreement. For these facility the bank provides an effective charges of current account service and effective charges of interest which is

efektif yang dihitung atas dasar posisi saldo akhir harian. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp10.000.000.

calculated on the basis of the daily at ending balance. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balance of these facility are Rp21,000,000 and Rp10,000,000, respectively.

Pada tanggal 4 Maret 2021, PT Angkasa Pura Logistik (APL) memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp15.000.000. Pada tanggal 17 Maret 2021, APL telah melakukan penarikan pinjaman tersebut sebesar Rp15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat bunga 1% diatas tingkat suku bunga deposito counter. Seluruh fasilitas yang diperoleh dijamin dengan deposito sebesar Rp15.000.000 (Catatan 5). Saldo pinjaman per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp13.500.000.

On March 4, 2021, PT Angkasa Pura Logistik (APL) obtained short-term loan facility from Bank Mandiri with maximum credit facility limit of Rp15,000,000. On March 17, 2021, APL has withdrawn this loan amounted to Rp15,000,000 with 12 months term and the interest rate of 1% above the counter deposit rate. All facilities are secured by time deposits amounting to Rp15,000,000 (Note 5). As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp13,500,000.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Mei 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,50% - 6,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 7,50% pada tahun 2021.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
Based on a loan agreement dated May 29, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") with maximum credit facility limit of Rp750,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II's working capital. This loan bears interest at annual rates ranging from 6.50% - 6.75% in 2022 and ranging from 5,50% - 7,50% in 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 27 Mei 2022, AP II dan BNI setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 28 Mei 2023.

Based on a loan agreement dated May 27, 2022, AP II and BNI agreed to extend the loan period until May 28, 2023.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp750.000.000.

As of December 31, 2022 and 2021, the loan balance in this facility amounted to Rp750,000,000, respectively.

- b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk**
Berdasarkan akad line fasilitas pembiayaan Musyarakah tanggal 3 Juni 2020, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank") dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,36% - 6,77% pada tahun 2022 dan berkisar antara 6,60% - 6,36% pada tahun 2021.

- b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk**
Based on Musyarakah line financing facility agreement dated June 3, 2020, AP II obtained a financing facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank") with maximum financing facility limit of Rp500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's operation. This loan bears annual interest rates ranging from 6.36 - 6.77% in 2022 and ranging from 6.60% - 6.36% in 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Desember 2022, AP II dan Maybank setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 29 Desember 2025. Maybank juga menyetujui penyesuaian *financial covenants* yang akan diperhitungkan mulai kuartal pertama tahun 2025. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman ini disajikan sebagai utang bank jangka panjang (Catatan 26).

Based on a loan agreement dated December 29, 2022, AP II and Maybank agreed to extend the loan period until December 29, 2025. Maybank also agreed to adjust the financial covenants that will be required starting from the first quarter of 2025. Therefore, as of December 31, 2022, this loan is presented as a long-term loan (Note 26).

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp500.000.000.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to nil and Rp500,000,000.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 2021, AP II memperoleh *Supplier Financing Facility* dari Bank Mandiri dengan jumlah limit fasilitas Rp400.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal pengembangan bandar udara. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,75% - 8,68% pada tahun 2022.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on agreement dated November 29, 2021, AP II obtained a Supplier Financing Facility from Bank Mandiri with total limit of Rp400,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 6.75% - 8.68% in 2022.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal sebesar 1 kali yang diperhitungkan mulai periode Desember 2024.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 2 kali.

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time that started to be accounted on December 2024.*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2022, AP II telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang banknya.

As of December 31, 2022, AP II has complied with all covenant stated in its bank loan agreements.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 November 2022, AP II dan Bank Mandiri setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 28 November 2023.

Based on a loan agreement dated November 30, 2022, AP II and Mandiri agreed to extend the loan period until November 28, 2023.

AP II diwajibkan untuk membayar *provision fee* atau *up-front fee* sebesar 0,25% dari jumlah fasilitas pinjaman yang tersedia yang dibayarkan diawal masa peminjaman.

AP II is required to pay a provision fee or an up-front fee of 0.25% from the total loan facility, paid at the beginning of loan period.

Pada tanggal 14 Juni 2022 dan 19 Oktober 2022, AP II melakukan konversi penarikan pinjaman SF Mandiri menjadi fasilitas pinjaman berjangka, berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 2021 (Catatan 26), masing-masing sebesar Rp337.692.000 dan Rp26.561.000.

On June 14, 2022 and October 19, 2022, AP II converted SF Mandiri loan withdrawals into term loan facilities, based on the agreement dated November 29, 2021 (Note 26), for amounts of Rp337,692 and Rp26,561,000, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp18.443.458 dan Rp337.692.000.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

HIN mengadakan perjanjian kerjasama tentang penggunaan aplikasi Ecopay BRI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) berdasarkan perjanjian Nomor 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 atau Nomor B.43-CDD/CMA/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022. Bentuk kerjasama ini Bank BRI akan memberikan fasilitas *credit line* kepada HIN dengan tingkat suku bunga kartu kredit yang berlaku di Bank BRI dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini selambat-lambatnya 30 hari kalender.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.130.760 dan nihil.

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sarinah mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK/PK-KMK/2010 addendum XIII tanggal 28 Oktober 2022.

Fasilitas yang diperoleh Sarinah antara lain:

- Plafond pinjaman sebesar Rp20.000.000.
- Jangka waktu 1 tahun (28 Oktober 2022 – 27 Oktober 2023).
- Tingkat suku bunga 7,75%

Fasilitas ini dijamin dengan (Catatan 18), sebidang Tanah SHGB No.1.170 m² Terletak di Jl. Jend. Basuki Rahmat Nomor 2A Malang, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan:

- Menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal 110%.
- *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi 230%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

As of December 31, 2022 and 2021, the loan balance on this facility amounted to Rp18,443,458 and Rp337,692,000, respectively.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

HIN entered into a cooperation agreement regarding the use of the BRI Ecopay application with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) based on agreement Number 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 or Number B.43-CDD/CMA/10/2022 dated October 19, 2022. This form of cooperation, Bank BRI will provide a credit line facility to HIN at the credit card interest rate applicable at the Bank BRI for a period of 2 (two) years from the date the agreement was signed and will be automatically extended if there is no written notification for terminate this agreement no later than 30 calendar days.

As of December 31, 2022 and 2021, the loan balance on this facility amounted to Rp4,130,760 and nil, respectively.

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sarinah obtained a working capital loan from Bank Mandiri and the credit agreement has been amended several times with the latest amendment based on a letter from Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK-KMK/2010 addendum XIII dated October 28, 2022.

The facilities obtained by Sarinah among others:

- Loan ceiling of Rp20,000,000.
- 1 year period (28 October 2022 – 27 October 2023).
- Interest rate 7.75%

This facility is secured by (Note 18), plot of Land SHGB No.1.170 sqm Located on Jl. Gen. Basuki Rahmat Number 2A Malang, Kiduldalem Village, Klojen District, Malang City, East Java.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain:

- Maintain financial ratios, which is current ratio at least 110%.
- Debt to Equity Ratio does not exceed 230%.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp19.897.500.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp19,897,500, respectively.

24. Beban Akruai

24. Accrued Expense

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi	678,890	1,329,666	Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Umum	1,133,778,133	1,413,179,601	General
Pelayanan Bandara	441,593,557	459,710,044	Passenger Services
Penerimaan Negara Bukan Pajak	429,906,224	293,488,000	Non-Tax Revenue
Gaji dan Tunjangan	160,950,111	281,564,072	Salaries and Allowance
Sewa	110,325,610	142,100,586	Rent
Bunga	104,344,402	141,512,579	Interest
Jasa Profesional	68,432,510	26,568,378	Professional Services
Persediaan	49,941,572	75,070,253	Inventories
Utilitas	39,682,613	24,833,649	Utilities
Pajak	9,269,602	46,584,739	Taxes
Lain-lain	123,776,658	96,100,989	Others
Subtotal	2,672,000,992	3,000,712,890	Subtotal
Total	2,672,679,882	3,002,042,556	Total

Beban akrual - pelayanan bandara terutama merupakan biaya konsesi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU). Pada tanggal 15 Desember 2015, AP I mengadakan Perjanjian dengan DJPU (Catatan 45).

Accrued expenses - airport services mainly represents of concession charge to the Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) (Note 45)

Beban akrual umum terutama merupakan management fee atas kerjasama pengelolaan tenant dengan PT GVK Services Indonesia, beban penyediaan x-ray, jaringan telekomunikasi dan jasa tenaga kerja.

General accrued expenses consist of management fee on collaborative tenants management with PT GVK Services Indonesia, x-ray providing expense, telecommunication network and outsourcing services.

Beban akrual gaji dan tunjangan mencakup beban manfaat pegawai diantaranya beban bonus, beban cuti, beban kelebihan jam kerja, beban uang makan harian yang akan dibayarkan Grup kepada pegawai.

Accrued expenses related to salaries and allowance consist of employee benefits expenses including bonus expenses, leave expenses, overtime expenses, daily meal allowances which will be paid by the Group to employees.

25. Pendapatan Diterima di Muka

25. Unearned Revenues

	2022 Rp	2021 Rp	
Sewa Lahan dan Tanah	207,249,639	201,600,481	Space and Land Rental
Penjualan Impor Beras	112,988,500	113,777,000	Selling of Imported Rice
Konsesi dan Tiket Bandara	9,760,855	7,098,000	Concession and Airport Pass
Pemasangan Reklame	7,135,719	9,151,000	Advertising Installation
Lain-lain	47,343,581	30,314,856	Others
Total	384,478,294	361,941,337	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**26. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya –
Jangka Panjang**

**26. Long-Term Bank and Other Financial
Institutions Loans**

	2022 Rp	2021 Rp	
Perusahaan			The Company
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	360,115,000	270,115,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sub Total	360,115,000	270,115,000	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,758,221,365	7,143,243,825	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	6,119,130,833	5,195,415,691	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,465,913,720	4,486,678,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,161,757,042	2,189,811,222	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,551,694,076	1,597,170,707	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,542,241,834	1,461,332,216	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,166,799,016	1,297,941,000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk	795,075,345	1,138,053,737	PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk
Subtotal	25,560,833,231	24,509,646,398	Subtotal
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4,266,863,402	4,104,730,000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,758,562,519	2,759,810,780	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI	1,699,231,090	1,700,000,000	PT Bank DKI
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,249,434,625	1,250,000,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	999,547,700	1,000,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	700,000,000	413,891,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	255,659,540	257,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	499,773,850	499,999,999	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	385,861,314	--	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	99,954,770	100,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Subtotal	12,914,888,810	12,085,431,779	Subtotal
Total	38,835,837,041	36,865,193,177	Total
Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi	(340,730,560)	(64,315,110)	Unamortized cost of loans
Dikurangi : Bagian Jangka Pendek			Less:
Utang Bank Jangka Panjang	(3,209,336,141)	(1,463,087,314)	Current Portion Long-Term Bank Loans
Bagian Jangka Panjang	35,285,770,340	35,337,790,753	Long-Term Portion

Perusahaan

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 169 tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BTN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dengan plafond setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan *grace period* selama 3 (tiga) tahun, serta tingkat bunga Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) + 4,50% eq 8,00% per tahun.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp360.115.000 dan Rp270.115.000.

The Company

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

Based on the Credit Agreement No. 169 dated December 29, 2021, the Company obtained a credit facility from Bank BTN in order to support the implementation of the establishment of a Tourism SOEs Holding with a maximum ceiling of Rp500,000,000 with a term of 5 (five) years and a grace period of 3 (three) years, as well as a Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) interest + 4.50% eq 8.00% per annum.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp360,115,000 and Rp270,115,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Angkasa Pura I ("AP I")
Perjanjian Kredit Sindikasi
Restrukturisasi Pinjaman**

Sehubungan dengan kondisi operasi dan keuangan AP I, pada tanggal 30 Juni 2022, AP I telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Induk dengan Bank Mandiri, BNI, BSI, BTN, BPD Jawa Timur, DKI, BPD Papua, BPD DIY, BPD Bali, Danamon, untuk seluruh saldo pinjaman yang masih terutang. Pada tanggal 15 Juli 2022, BCA, IIF, BRI dan SMI telah menandatangani dokumen aksesori yang menyatakan penundukan diri terhadap perjanjian restrukturisasi pinjaman.

Perjanjian restrukturisasi pinjaman ini mengubah beberapa ketentuan-ketentuan dari perjanjian pinjaman sebelumnya dari masing masing kreditur yaitu perubahan jangka waktu pinjaman, suku bunga dan jadwal pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Dalam perjanjian ini, Bank Mandiri bertindak sebagai agen fasilitas, agen jaminan dan agen penampungan

Berdasarkan perjanjian restrukturisasi pinjaman ini, seluruh pinjaman dikenakan suku bunga dan indikasi bagi hasil sebesar 5% untuk tahun 2022 - 2023, LPS + margin 2% untuk tahun 2024 - 2028, dan LPS + margin 2,5% untuk tahun 2029 - 2031. Tingkat suku bunga yang dibayarkan selama tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 2%, dimana sisanya akan ditangguhkan dan dibayarkan pada tahun 2025-2026 (Catatan 27).

Selain itu, apabila selama tahun 2022 dan 2023 terdapat kenaikan tingkat suku bunga LPS dari tingkat suku bunga LPS yang berlaku pada 1 Juni 2022, maka AP I akan membayarkan selisih tingkat suku bunga tersebut setelah seluruh bunga yang tertunggak telah dilunasi atau paling lambat pada 2027 dan 2028.

Setelah tanggal efektif, AP I wajib untuk membayar angsuran pokok pinjaman secara triwulanan dengan tanggal jatuh tempo terakhir adalah pada tanggal 23 Desember 2031.

Terkait dengan perjanjian di atas, AP I juga telah menandatangani perjanjian gadai rekening dan pengelolaan rekening dengan Bank Mandiri. Rekening ini digunakan untuk pembayaran pinjaman dan dikelola penuh oleh Bank Mandiri.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Angkasa Pura I ("AP I")
Syndicated Credit Agreement
Loan Restructuring**

In connection with the operational and financial conditions of AP I, on June 30 2022, AP I has signed a Master Restructuring Agreement with Bank Mandiri, BNI, BSI, BTN, BPD East Java, DKI, BPD Papua, BPD DIY, BPD Bali, Danamon, for all outstanding loan balances. On July 15, 2022, BCA, IIF, BRI and SMI have signed accession document which acts as a proof of submission to loan restructuring agreement.

This loan restructuring agreement has changed several terms from previous loan agreements with its creditors such as changes in maturity date of loans, interest rates and payment schedules of loan principal and interests. Under this agreement, Bank Mandiri acts as a facility agent, guarantee agent and collecting agent.

Based on this loan restructuring agreement, all loans bear interest at 5% for 2022 - 2023, LPS + 2% margin for 2024 - 2028, and LPS + 2.5% margin for 2029 - 2031. Interest rate paid during 2022 and 2023 is 2%, of which the remaining will be deferred and paid in 2025 – 2026 (Note 27)

In addition, if during 2022 and 2023 there is an increase in interest rate from the LPS interest rate applicable on June 1, 2022, AP I will pay the difference in interest rates after all outstanding interest has been paid or in 2027 and 2028 at the latest.

After the effective date, AP I is required to pay the principal installments on a quarterly basis with the latest due date on December 23, 2031.

Related to the above agreement, AP I has also signed an account pawn agreement and account management with Bank Mandiri. These accounts will be used to pay the loans and are fully managed by Bank Mandiri.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pinjaman ini dijamin dengan setiap rekening pembayaran utang, rekening cadangan pembayaran utang dan rekening penerimaan program deleveraging kepada para pemberi fasilitas. Khusus sehubungan dengan gadai atas rekening penerimaan program deleveraging, jaminan gadai tersebut akan dilepaskan setelah nasabah telah menggunakan dana hasil program deleveraging tersebut sampai dengan jumlah kumulatif sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima) triliun untuk pelunasan dipercepat dan belanja modal sesuai ketentuan perjanjian.

This loan is guaranteed by each debt payment account, debt payment reserve account and deleveraging program receipt account to the facility providers. Particularly in relation to the pawning of deleveraging program receipt account, the collateral will be released after the customer has used the deleveraging program proceeds up to a cumulative amount of Rp10.5 (ten point five) trillion for early repayment and capital expenditures in accordance with the provisions of the agreement.

Utang bank jangka panjang terdiri dari:

Long-term bank loans consist of:

	Jumlah Utang Direstrukturisasi/ Amount of Loan restructured Rp	Saldo Pinjaman 31 Desember 2022/ Outstanding Balance as of December 31, 2022 Rp	
Sindikasi 2019 - BCA Mandiri	4,000,000,000	3,998,190,800	Syndicated 2019 - BCA Mandiri
Sindikasi Mandiri, BRI, BCA, SMI, IIF	3,799,053,899	3,797,335,586	Syndicated Mandiri, BRI, BCA, SMI, IIF
Bilateral 2019 - Mandiri	3,000,000,000	2,998,643,100	Bilateral 2019 - Independent
Sindikasi 2019 - BPD	2,500,000,000	2,498,869,250	Syndication 2019 - BPD
Bilateral 2018 - SMI	2,000,000,000	1,999,095,400	Bilateral 2018 - SMI
Bilateral 2018 - BTN	2,000,000,000	1,999,095,400	Bilateral 2018 - BTN
Bilateral 2020 - Danamon	1,250,000,000	1,249,434,625	Bilateral 2020 - Danamon
Bilateral 2020 - DKI (KMK)	1,000,000,000	999,547,700	Bilateral 2020 - DKI (KMK)
Bilateral 2019 - BTN	1,000,000,000	999,547,700	Bilateral 2019 - BTN
Bilateral 2019 - BSI	1,000,000,000	999,547,700	Bilateral 2019 - BSI
Bilateral 2018 - BSI	1,000,000,000	999,547,700	Bilateral 2018 - BSI
Bilateral 2021 - BNI	886,585,000	886,585,000	Bilateral 2021 - BNI
Total	23,435,638,899	23,425,439,961	Total

AP I diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal sebesar 1 kali sejak tahun 2023;
- *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 5 kali untuk tahun 2022-2024 dan maksimum sebesar 3 kali untuk tahun 2025;
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali berlaku sejak tahun 2024.

AP I is required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time since 2023 and after;
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 5 times for the year 2022-2024 and maximum of 3 times since 2025 and after;
- *Current Ratio* minimum of 1 time since 2024 and after.

**Sebelum Restrukturisasi Pinjaman
Perjanjian Kredit Sindikasi 2016**

Pada tanggal 18 Agustus 2016, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dimana Mandiri sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi sebelum restrukturisasi adalah sebagai berikut:

**Before Loan Restructuring
Syndicated Credit Agreement 2016**

On August 18, 2016, AP I signed Syndicated Credit Agreement with a Bank and a Non-Bank Financial Institution which Mandiri as an syndicated agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement before restructuring are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Plafond/ Plaforms Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1,350,000,000	1,349,663,885	336,115	1,282,180,691	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,000,000,000	999,751,026	248,974	949,763,475	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	800,000,000	799,800,821	199,179	759,810,780	PT Bank Central Asia Tbk
PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk	500,000,000	499,875,513	124,487	474,881,737	PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	350,000,000	349,912,859	87,141	332,417,216	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	4,000,000,000	3,999,004,104	995,896	3,799,053,899	Total

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 September 2021, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

The principal facility is payable in 40 installments starting on September 23, 2021, while the interest is paid monthly.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan dan atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/atau investasi.

Credit facilities is used for financing and/or refinancing airport and/or investment development projects.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,75% sampai dengan 6,75% pada tahun 2021 dan 7,25% sampai dengan 8,50% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

This loan bears annual interest ranging from 5.75% to 6.75% in 2021 and ranging from 7.25% to 8.50% in 2020 and represent unsecured loans.

Perjanjian Kredit Sindikasi BCA dan Mandiri 2019

Pada tanggal 23 Desember 2019, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dimana PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagai agen fasilitas. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi sebelum restrukturisasi adalah sebagai berikut:

BCA and Mandiri Syndicated Credit Agreement 2019

On December 23, 2019, AP I signed Syndicated Credit Agreement which PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as an facility agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement before restructuring are as follows:

	Plafond/ Plaforms Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	PT Bank Central Asia Tbk
Total	4,000,000,000	4,000,000,000	--	4,000,000,000	Total

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi dan belanja modal.

Credit facilities is used for investment financing and capital expenditure.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

This loan bears annual interest LPS + margin and represent unsecured loan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 5 tahun.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 including grace period of 5 years.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

Perjanjian Kredit Sindikasi Bank Pembangunan Daerah

Pada tanggal 23 Desember 2019, AP I menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Bank Pembangunan Daerah dimana Bank DKI sebagai agen sindikasi. Rincian utang jangka panjang atas perjanjian kredit sindikasi sebelum restrukturisasi adalah sebagai berikut:

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000
PT Bank DKI	700,000,000	700,000,000	--	700,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	500,000,000	500,000,000	--	500,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	200,000,000	200,000,000	--	200,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	100,000,000	100,000,000	--	100,000,000
Total	2,500,000,000	2,500,000,000	--	2,500,000,000

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2025, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi rutin, pengembangan bandara *existing* maupun bandara baru yang dikelola AP I tahun 2019 - 2022.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit sindikasi adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 3 kali.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time since 2024 and after.

Regional Development Banks Syndicated Credit Agreement

On December 23, 2019, AP I signed Regional Development Banks Syndicated Credit Agreement which Bank DKI as an syndicated agent. The details of long-term bank loans of syndicated credit agreement before restructuring are as follows:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Bank DKI	
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
Total	

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2025, while interest will be paid on monthly basis.

Credit facilities is used for routine investment financing, development of existing and new airport managed by AP I in 2019 - 2022.

This loan bears interest at annual rate of LPS + margin and represent unsecured loans.

The Syndicated Loan Agreement is valid for 15 years from December 23, 2019 until December 23, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Namun demikian pada tanggal 10 Desember 2021 dan 22 Desember 2020, AP I telah menerima surat persetujuan pengampunan dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya DSCR minimum 1 kali.

Pada tanggal 25 Februari 2021, 29 April 2021 dan 21 Mei 2021, AP I telah melakukan penarikan atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp85.373.366, Rp119.036.549 dan Rp150.000.000.

**PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
("SMI")**

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
SMI	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	SMI

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan dan investasi rutin bandar udara yang dikelola oleh AP I.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu kredit adalah 10 tahun sejak tanggal perjanjian kredit dengan opsi perpanjangan selama 5 tahun dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I can not meet the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) requirement minimum of 1 time as of December 31, 2021 and December 31, 2020. However, on December 10, 2021, and December 22, 2020, AP I has received waiver approval letter from the syndicated agent for not fulfilling the DSCR of minimum 1 time.

On February 25, 2021, April 29, 2021 and May 21, 2021, AP I has withdrawn the facility amounting to Rp85,373,366, Rp119,036,549 and Rp150,000,000, respectively

**PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
("SMI")**

On December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance development and routine investment of airports which are managed by AP I.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loans.

The loan period is 10 years started on the date of agreement with option to extend for 5 years with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("BTN")**

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000.

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("BTN")**

Based on a loan agreement dated December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BTN	2,000,000,000	2,000,000,000	--	2,000,000,000	BTN

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara dan investasi rutin AP I. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

On December 18, 2018, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp2,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP I's business operation, airport development and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and 7% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 18 Desember 2018 sampai 17 Desember 2033 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatangani perjanjian kredit.

The loan credit agreement is valid for 15 years from December 18, 2018 until December 17, 2033 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time.

Berdasarkan perjanjian, jika AP I tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu meminta pembayaran penuh atas seluruh saldo pinjaman.

Based on credit agreement, if AP I cannot fulfill such covenants, lender may request AP I to repay all outstanding loan balances at any times.

Pada tanggal 26 Juli 2019, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN dengan maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

On July 26, 2019, AP I obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BTN	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	BTN

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 7 September 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on September 7, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai aktivitas usaha, pengembangan bandara, *refinancing* dan investasi rutin AP I. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan. Pada tanggal 15 Oktober 2020, AP I telah menerima surat persetujuan untuk pembayaran kewajiban bunga secara triwulanan pada bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021.

The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP I's business operation, airport development, refinancing and routine investment. This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan. On October 15, 2020, AP I received approval letter for payment of interest on quarterly basis for period from September 2020 until March 2021.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 Juli 2019 sampai 26 Juli 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

The loan credit agreement is valid for 15 years from July 26, 2019 until July 26, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali (jumlah kewajiban jangka pendek tidak termasuk akrual kewajiban kepada kontraktor yang belum diterbitkan tagihannya).

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time (total current liabilities are not include accrual liabilities to contractors which not invoiced yet).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Pada tanggal 18 Desember 2018, AP I memperoleh fasilitas plafon pembiayaan dari BSI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

On December 18, 2018, AP I obtained a term plafond loan facility from BSI with Maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BSI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	BSI

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai investasi rutin, pengembangan dan pembangunan bandar udara baru serta bandara lainnya sesuai Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) yang dikelola oleh AP I.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali.

Pada tanggal 2 September 2019, AP I memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah dari BSI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BSI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000	BSI

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai dari tanggal 23 September 2024, sedangkan bagi hasil dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) tahun 2021 dan 2020. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 6,50% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 23 Juni 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The proceeds of the loan from this facility were used to finance routine investment, development and construction of new airports and other airport according to Work Plan and AP I Budget (RKAP) which is managed by AP I.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time.

On September 2, 2019, AP I obtained a Musyarakah financing facility from BSI with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

Financing facility is payable in 40 quarterly installments starting on September 23, 2024, while profit sharings will be paid on monthly basis.

The proceeds of the this facility were used for capital expenditure in 2021 and 2020 Work Plan and AP I Budget (RKAP). This facility represents unsecured facility.

This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and 6,50% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until June 23, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 26 September 2019, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
Mandiri	3,000,000,000	3,000,000,000	--	3,000,000,000	Mandiri

Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam 40 kali angsuran triwulanan mulai tanggal 23 Desember 2024, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai belanja modal atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran AP I (RKAP) tahun 2019 dan 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2021 dan 7,00% sampai dengan 8,25% pada tahun 2020 dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 15 tahun terhitung sejak 26 September 2019 sampai 25 September 2034 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 3 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali untuk periode 2024 dan setelahnya.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing facility agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time for period 2024 and after.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Based on a loan agreement dated September 26, 2019, AP I obtained a term loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp3,000,000,000.

Loan facility is payable in 40 quarterly installments starting on December 23, 2024, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the loan from this facility were used to capital expenditure to 2019 and 2020 Work Plan and AP I Budget (RKAP). This loan bears annual interest ranging from 5.50% to 6.50% in 2021 and ranging from 7.00% to 8.25% in 2020 and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 15 years from September 26, 2019 until September 25, 2034 with grace period and drawdown period of 5 years and 3 years, respectively from the signing date of loan agreement.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times.
- *Current Ratio* minimum of 1 time for period 2024 and after.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 3 Desember 2021, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp
Mandiri	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional sesuai RKAP 2021-2022. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

PT Bank DKI

Pada tanggal 18 Desember 2020, AP I memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DKI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.000.000.000

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp
Bank DKI	1,000,000,000	1,000,000,000	--	1,000,000,000

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam 4 kali angsuran triwulanan mulai dari tanggal 23 Maret 2023, sedangkan bunga dibayar secara bulanan.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional AP I yang terdampak Pandemi Covid-19. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 6,5% per tahun yang dapat direviu setiap saat dengan ketentuan yang berlaku di Bank DKI dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 36 bulan terhitung sejak 18 Desember 2020 sampai 17 Desember 2023 dengan masa *grace period* dan masa penarikan kredit masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On December 3, 2021, AP I obtained a financing facility from Bank Mandiri with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

The proceeds of the this facility were used for working capital to support operational activities according to Work Plan and Company Budget (RKAP) 2021-2022. This facility represents unsecured facility.

PT Bank DKI

On December 18, 2020, AP I obtained a financing working capital facility from Bank DKI with maximum limit facility of Rp1,000,000,000.

Financing facility is payable in 40 quarterly installments starting on March 23, 2023, while interest will be paid on monthly basis.

The proceeds of the this facility were used for additional working capital to support the operational activities of companies affected by the Covid-19 Pandemic. This facility represents unsecured facility.

This loan bears annual interest is 6.5% per annum which can be reviewed at any time with the provisions applicable in Bank DKI and represent unsecured loan.

The loan credit agreement is valid for 36 months from December 18, 2020 until December 17, 2023 with grace period and drawdown period of 2 years and 6 months, respectively from the signing date of loan agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu dari tahun 2022 sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali mulai berlaku pada tahun 2022.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maksimum sebesar 3 kali mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 April 2021, AP I telah melakukan penarikan atas pinjaman ini sebesar Rp150.000.000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2020, AP I memperoleh fasilitas kredit angsuran berjangka dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp500.000.000 dan Rp750.000.000.

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
Danamon - KAB 1	500,000,000	500,000,000	--	500,000,000	Danamon - KAB 1
Danamon - KAB 2	750,000,000	750,000,000	--	750,000,000	Danamon - KAB 2
Total	1,250,000,000	1,250,000,000	--	1,250,000,000	Total

Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang atau tetap yang disepakati.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum sebesar 1 kali mulai tahun 2022.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1 kali mulai tahun 2024.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 21 Juli 2021, AP I memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BNI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp1.500.000.000

	Plafond/ Plafonds Rp	Penarikan/ Drawdown Rp	Jumlah Sisa Fasilitas Pinjaman/ Remaining Amount of Loan Facilities Rp	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang/ Amount of Drawdown Rp	
BNI	1,500,000,000	886,585,000	613,415,000	886,585,000	BNI

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is also required to maintain certain financial ratios started from year 2022 as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time start from 2022.
- *Debt Equity Ratio (DER)* maximum of 3 times start from 2022.

On April 29, 2021, AP I has withdrawn this loan amounting to Rp150,000,000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On December 28, 2020, AP I obtained a financing term installment credit facility from Bank Danamon with maximum limit facility of Rp500,000,000 and Rp750,000,000.

This loan bears an agreed floating rate or fixed rate.

AP I is also required to maintain certain financial ratios as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum of 1 time starting 2022.
- *Current Ratio* minimum of 1 time starting 2024.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On July 21, 2021, AP I obtained a financing facility from Bank BNI with maximum limit facility of Rp1,500,000,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Fasilitas pembiayaan pokok akan dibayar dalam angsuran triwulanan mulai dari 21 Oktober 2023, sedangkan bunga dibayarkan secara triwulanan.

Financing facility will be paid in quarterly installments starting on October 21, 2023, while interest will be paid on quarterly basis.

Hasil penerimaan dari fasilitas ini digunakan untuk investasi sesuai dengan RKAP 2021. Fasilitas ini merupakan fasilitas tanpa jaminan.

The proceeds of the this facility were used for investments according to Work Plan and Company Budget (RKAP). This facility represents unsecured facility.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin dan merupakan pinjaman tanpa jaminan.

This loan bears interest at annual rate of LPS + margin and represent unsecured loans.

Entitas Anak AP I

Subsidiaries of AP I

Kreditur/ Lenders	Fasilitas/ Facility	Tanggal Efektif Pinjaman/ Effective Loan Date	Jadwal Pelunasan/ Repayment Schedule	Jaminan/ Security	Jaminan/ Security
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pinjaman Kredit Fasilitas Credit Term Loan Sebesar Rp185,000,000/ Credit Term Loan Amounting to Rp185,000,000	11 Desember 2014/ December 11, 2014	28 Mei 2024/ May 28, 2024	Beberapa aset tetap berupa Peralatan/ Secured by assets	10% per tahun/ 10% per annum
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pembiayaan Musyarakah/ Musyarakah Financing	7 November 2014/ November 7, 2014	20 November 2024/ November 20, 2024	Seluruh fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan seluruh obyek investasi yang dibiayai bank dan piutang usaha APS kepada Bank sebesar Rp50,000,000/ This facility is secured by all objected financing investment and account receivables APS to the Bank amounted Rp50,000,000	7,50% - 13% per tahun/ 7.50% - 13% per annum
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pembiayaan Musyarakah/ Musyarakah Financing	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	12 Februari 2027/ February 12, 2027	Aset tetap (garbarata)/ fixed assets (aviobridge)	8% per tahun/ 8% per annum

Kreditur/ Lenders	Persyaratan Rasio Keuangan/ Financial Ratio Covenant	Status per 31 Desember 2022/ Status as of December 31, 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	- Rasio lancar minimal sebesar 1 kali/ current ratio minimum of 1 time - Debt Service Coverage Ratio minimal 1 kali dihitung mulai 1 Januari 2022/ Debt Service Coverage ratio at minimum 1 times applies from January 1, 2022. - Debt to Equity Ratio maksimal 2,5 kali/ Debt to Equity ratio maximum 2.5 times	APS telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya/ the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	- Rasio lancar minimal sebesar 1 kali/ current ratio minimum of 1 time - Debt Service Coverage Ratio minimal 1 kali dihitung mulai 1 Januari 2022/ Debt Service Coverage ratio at minimum 1 times applies from January 1, 2022. - Debt to Equity Ratio maksimal 3 kali/ Debt to Equity ratio maximum 3 times.	APS telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya/ the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	- Rasio lancar minimal sebesar 1 kali/ current ratio minimum of 1 time - Debt Service Coverage Ratio minimal 1 kali dihitung mulai 1 Januari 2022/ Debt Service Coverage ratio at minimum 1 times applies from January 1, 2022. - Debt to Equity Ratio maksimal 3 kali/ Debt to Equity ratio maximum 3 times.	APP telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya/ the Company has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

Tujuan dari pinjaman-pinjaman di atas adalah untuk modal kerja AP I dan entitas anak terkait.

The purpose of the above loans is for working capitals of AP I and subsidiaries.

PT Angkasa Pura Suport ("APS")

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 Desember 2014, APS memperoleh fasilitas Credit Term Loan dengan pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000 yang digunakan sebagai pembiayaan kontrak penyewaan peralatan. Plafon fasilitas pinjaman ini mengalami kenaikan menjadi Rp185.000.000 pada tanggal 23 Oktober 2018 sesuai dengan surat persetujuan dari BNI No. BIN/2.1/263/R. Penarikan fasilitas pinjaman ini telah dilakukan beberapa kali oleh APS, antara lain sebagai berikut:

PT Angkasa Pura Suport ("APS")

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On December 11, 2014, APS obtained Credit Term Loan's facility with maximum of Rp100,000,000 which used to financing rental equipments projects. The ceiling of the loan facility has increased to Rp185,000,000 on October 23, 2018 in accordance with the approval letter from BNI No.BIN/2.1/263/R. Withdrawal of this loan facility has been made several times by APS, which are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 26 Oktober 2016, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp40.785.000. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 58 bulan. Pinjaman jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan suku bunga berkisar 9,75%-10,50% per tahun. APS telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp9.600.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa aset peralatan yang dimiliki oleh APS. Jangka waktu pinjaman ini adalah 54 bulan. Pinjaman jatuh akan tempo pada tanggal 16 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp1.955.555.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp13.000.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat *aflopend* dan dijamin dengan beberapa aset kendaraan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 34 bulan. APS telah melunasi pinjaman pada tanggal 16 Maret 2021.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp29.431.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 57 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp2.799.590 dan Rp8.838.752.
- Pada tanggal 5 Maret 2021, APS memperoleh pinjaman dari BNI sebesar Rp35.800.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Pinjaman bersifat aflopend dan dijamin dengan beberapa peralatan yang dimiliki oleh APS (Catatan 18). Jangka waktu pinjaman ini adalah 65 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp4.287.131 dan Rp14.989.966.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On October 26, 2016, APS obtained loan from BNI with amount of Rp40,785,000. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 58 months. This loan will be due on August 16, 2021 and bear interest at rates ranging 9.75%-10.50% per annum. APS have repaid the outstanding loan on August 25, 2021.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp9,600,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS. The term of this loan is 54 months. This loan will be due on November 16, 2022. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to nihil and Rp1,955,555, respectively.
- On June 4, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp13,000,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some vehicles assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 34 months. APS has fully repaid on March 16, 2021.
- On December 18, 2018, APS obtained loan from BNI with amount of Rp29,431,000 with bear interest 9.75% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 57 months and will be due on August 31, 2023. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp2,799,590 and Rp8,838,752, respectively.
- On March 5, 2021, APS obtained loan from BNI with amount of Rp35,800,000 with bear interest 10% per annum. This loan is an *aflopend* and secured by some equipments assets owned by APS (Note 18). The term of this loan is 65 months and will be due on April 30, 2023. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp4,287,131 and Rp14,989,966, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 6 Mei 2021, APS memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp2.499.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2022. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar nihil dan Rp1.249.500.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

APS memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan Murabahah dari BSI sebagai berikut:

- Pada 7 November 2014, APS memperoleh fasilitas pembiayaan dengan skema Murabahah sebesar Rp3.575.200 dengan margin sebesar 13% efektif *single price* per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko di Denpasar (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 20 November 2024. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.081.616 dan Rp1.548.089.
- Pada tanggal 28 Oktober 2015, APS memperoleh pembiayaan Murabahah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.650.000 dengan margin 12% efektif per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 2 unit ruko yang terdapat di Denpasar dan Makassar (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 16 dan 20 November 2025. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.540.036 dan Rp1.956.097.
- Pada tanggal 22 Agustus 2016 dari BSI, APS memperoleh pembiayaan Murabahah sebesar Rp1.800.000 dengan margin sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Agunan atas pinjaman ini adalah 1 unit ruko milik APS yang terdapat di Balikpapan (Catatan 18). Fasilitas pembiayaan akan jatuh akan tempo pada tanggal 20 Agustus 2026. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp905.062 dan Rp1.092.768.
- Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp112.512.000 dengan nisbah bagi hasil 11,14% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp57.751.512 dan Rp69.805.032.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On May 6, 2021, APS obtained financing working capital facility amounting Rp2,499,000 with due date on August 31, 2022. As of December 31, 2022 and 2021 the ending balance is nil and Rp1,249,500, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

APS obtained several Murabahah financing facilities from BSI as follows:

- On November 7, 2014, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme amounted to Rp3,575,200 with margin at 13% effective *single price* per annum and a period of 10 years. Loan's collateral is 1 unit shop house in Denpasar (Note 18). Financing facility will be due on November 20, 2024. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,081,616 and Rp1,548,089, respectively.
- On October 28, 2015, APS obtained financing facility of the Murabahah scheme totaling of Rp3,650,000 with margin 12% effective per annum and 10 year term. Loan's collateral of this loan are 2 unit shop houses in Denpasar and Makassar (Note 18). Financing facility will be due on November 16 and 20, 2025. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp1,540,036 and Rp1,956,097, respectively.
- On August 22, 2016, APS obtained Murabahah financing amounting to Rp1,800,000 with bear margin of 11.50% per annum and a period of 10 years. Loan's collateral of this loan are 1 unit shop house owned by APS in Balikpapan (Note 18). Financing facility will be due on August 20, 2026. As of December 31 2022 and 2021, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp905,062 and Rp1,092,768, respectively.
- On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp112,512,000 with profit sharing ratio at 11.14% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp57,751,512 and Rp69,805,032, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 31 Mei 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp15.949.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp11.916.501 dan Rp12.929.628.
- Pada tanggal 28 Juni 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp7.762.000 dan Rp807.000 dengan nisbah bagi hasil 12,06% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 36 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp316.006 dan Rp1.882.907.

APS memperoleh beberapa fasilitas Pembiayaan Investasi dengan Musyarakah Mutanaqishah dari BSI sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.109.000 dengan nisbah bagi hasil 10,93% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp564.439 dan Rp801.432.
- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp3.708.000 dengan nisbah bagi hasil 14,20% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp2.842.213 dan Rp3.076.265.
- Pada tanggal 31 Juli 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.572.000 dengan nisbah bagi hasil 12,16% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 34 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp341.612.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On May 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp15,949,000 with profit sharing ratio at 14.20% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on May 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp11,916,501 and Rp12,929,628 respectively.
- On June 28, 2019, APS obtained facility amounting to Rp7,762,000 and Rp807,000 with profit sharing ratio at 12.06% per annum. The term of this financing is 36 months with due date on June 28, 2022 including 9 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp316,006 and Rp1,882,907, respectively.

APS obtained several Musyarakah Mutanaqishah financing investment facilities from BSI as follows:

- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp2,109,000 with profit sharing ratio at 10.93% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on May 20, 2024 including 7 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp564,439 and Rp801,432, respectively.
- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp3,708,000 with profit sharing ratio at 14.20% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on July 20, 2024 including 9 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp2,842,213 and Rp3,076,265, respectively.
- On July 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp1,572,000 with profit sharing ratio 12.16% per annum. The term of this financing is 34 months term with due date on May 20, 2022 including 9 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to nil and Rp341,612, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp23.551.000 dengan nisbah bagi hasil 14,22% per tahun. Jangka waktu 57 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp18.290.127 dan Rp19.729.480.
- Pada tanggal 31 Oktober 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp5.283.000 dengan nisbah bagi hasil 11,13% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp3.213.174 dan Rp3.768.448.
- Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp8.944.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp5.910.366 dan Rp6.844.051.
- Pada tanggal 19 September 2019, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp27.807.000 dengan nisbah bagi hasil 14,08% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 58 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 7 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp21.501.346 dan Rp23.219.008.
- Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.115.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 29 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 2 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp44.011 dan Rp269.225.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp23,551,000 with profit sharing ratio 14.22% per annum. The term of this financing is 57 months with due date on July 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp18,290,127 and Rp19,729,480, respectively.
- On October 31, 2019, APS obtained facility amounting to Rp5,283,000 with profit sharing ratio at 11.13% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on October 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp3,213,174 and Rp3,768,448, respectively.
- On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp8,944,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on January 27, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp5,910,366 and Rp6,844,051, respectively.
- On September 19, 2019, APS obtained facility amounting to Rp27,807,000 with profit sharing ratio at 14.08% per annum. The term of this financing is 58 months with due date on July 20, 2024 including 7 months grace period. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp21,501,346 and Rp23,219,008, respectively.
- On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp1,115,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 29 months with due date on June 28, 2022 with grace period of 2 months. As of December 31 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp44,011 and Rp269,225, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 24 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.775.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.833.773 dan Rp2.123.461.
- Pada tanggal 28 Januari 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp19.267.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2025 termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp13.076.584 dan Rp15.080.751.
- Pada tanggal 30 April 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp14.602.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp10.430.804 dan Rp11.938.903.
- Pada tanggal 30 April 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp9.775.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 50 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2024 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp7.109.741 dan Rp8.338.409.
- Pada tanggal 25 Agustus 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp1.358.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 56 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 April 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp1.039.445 dan Rp1.188.565.
- Pada tanggal 25 Agustus 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.152.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 54 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2025 termasuk masa tenggang waktu selama 9 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kredit fasilitas ini adalah sebesar Rp1.622.329 dan Rp1.869.007.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On January 24, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,775,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on January 27, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,833,773 and Rp2,123,461, respectively.
- On January 28, 2020, APS obtained facility amounting to Rp19,267,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on February 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp13,076,584 and Rp15,080,751, respectively.
- On April 30, 2020, APS obtained facility amounting to Rp14,602,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 60 months with due date on April 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp10,430,804 and Rp11,938,903, respectively.
- On April 30, 2020, APS obtained facility amounting to Rp9,775,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 50 months with due date on October 20, 2024 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp7,109,741 and Rp8,338,409, respectively.
- On August 25, 2020, APS obtained facility amounting to Rp1,358,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 56 months with due date on April 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,039,445 and Rp1,188,565, respectively.
- On August 25, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,152,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 54 months with due date on February 20, 2025 with grace period of 9 months. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,622,329 and Rp1,869,007, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada tanggal 29 September 2020, APS memperoleh fasilitas sebesar Rp2.361.000 dengan nisbah bagi hasil 10,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 45 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp1.672.959 dan Rp2.008.074.

Seluruh fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan seluruh obyek investasi yang dibiayai bank dan piutang usaha APS kepada Bank sebesar Rp50.000.000 (Catatan 6).

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Pada tanggal 1 Agustus 2019, APP memperoleh fasilitas Pembiayaan Musyarakah dari Muamalat sebesar Rp15.500.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Pinjaman ini bersifat *revolving* dan dijamin dengan aset garbarata yang dimiliki oleh APP. Jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp11.969.824 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 11 Februari 2020, APP memperoleh fasilitas Pembiayaan dari Bank Muamalat sebesar Rp224.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Pinjaman ini bersifat *non-revolving* dan dijamin dengan piutang usaha dan aset garbarata yang dimiliki oleh APP. Jangka waktu pembiayaan selama 84 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp73.435.521 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp20.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 78 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp19.417.053 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp20.000.000 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 78 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp19.800.366 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- On September 29, 2020, APS obtained facility amounting to Rp2,361,000 with profit sharing ratio at 10.00% per annum. The term of this financing is 45 months with due date on June 20, 2024. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of this loan facility amounted to Rp1,672,959 and Rp2,008,074, respectively.

This facility is secured by all objected financing investment and account receivables APS to the Bank amounted Rp50,000,000 (Note 6).

**PT Angkasa Pura Properti ("APP")
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

On August 1, 2019, APP obtained Musyarakah financing facility from Muamalat with amount of Rp15,500,000 with bear interest 9,50% per annum. This facility is a revolving and secured by assets (Aviobridges) owned by APP. The term of this facility is 48 months and will be due on August 1, 2023. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these financing facility amounted to Rp11,969,824 and has fully paid on January 18, 2021.

On February 11, 2020, APP obtained financing facility from Muamalat with amount of Rp224,000,000 with bear interest 9% per annum. This facility is a non-revolving and secured by account receivables and assets (Aviobridges) owned by APP. The term of this facility is 84 months. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these financing facility amounted to Rp73,435,521 and has fully paid on January 18, 2021.

On August 25 2020, APP obtained facility amounting to Rp20,000,000 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 78 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp19,417,053 and has fully paid on January 18, 2021.

On August 25, 2020, APP obtained facility amounting to Rp20,000,000 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 78 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp19,800,366 and has fully paid on January 18, 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 18 September 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp23.555.471 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 77 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp22.555.471 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp13.866.085 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 76 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp13.866.085 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

Pada tanggal 5 November 2020, APP memperoleh fasilitas sebesar Rp54.491.015 dengan suku bunga 9% per tahun. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 75 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2027. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar Rp54.491.015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2021.

APP diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila membagikan dividen kepada pemegang saham.

APP diwajibkan oleh Muamalat untuk menjaga rasio keuangan yaitu rasio lancar minimum sebesar 1 kali, *debt service coverage* (DSCR) minimum sebesar 1,5 kali, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 3 kali. Pada tanggal 31 Desember 2021, APP telah memenuhi semua persyaratan pinjaman.

Pada tanggal 18 Januari 2021, seluruh saldo pinjaman fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya oleh APP.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 11 Agustus 2014, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Maybank dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 29 Desember 2025.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On September 18, 2020, APP obtained facility amounting to Rp23,555,471 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 77 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp22,555,471 and has fully repaid on January 18, 2021.

On October 27, 2020, APP obtained facility amounting to Rp13,866,085 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 76 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp13,866,085 and has fully repaid on January 18, 2021.

On November 5, 2020, APP obtained facility amounting to Rp54,491,015 with bear interest at 9% per annum. The term of this financing is 75 months with due date on February 12, 2027. As of December 31, 2020, the outstanding balances of these loan facilities amounted to Rp54,491,015 and has fully repaid on January 18, 2021.

APP is required to made written-notice once there are any dividend distributed to shareholders.

APP is required by Muamalat to maintain the financial ratios, minimum current ratio of 1 time, *debt service coverage* (DSCR) at least 1.5 time, *debt to equity ratio* (DER) maximum of 3 times. As of December 31, 2021, APP complies with all of the loan covenants.

On January 18, 2021, the outstanding balances of these loan facilities has fully repaid by APP.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Based on a loan agreement dated August 11, 2014, AP II obtained a term loan facility from Maybank with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until December 29, 2025

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 3 Juni 2020, Maybank setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Maybank juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.
- Penyesuaian *Debt to Equity* (DER) sebesar 2 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 Oktober 2018, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Maybank dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,65% - 5,90% pada tahun 2022 dan 5,65% - 6,65% pada tahun 2021.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Berdasarkan akad line fasilitas pembiayaan Musyarakah tanggal 7 November 2019, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari Maybank dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000.000. AP II juga menandatangani akad Perjanjian Limit Gabungan No. PJJ.04.04./00/11/2019/0792 pada tanggal 7 November 2019 dengan Maybank dimana AP II tidak dapat menggunakan limit fasilitas perjanjian kredit yang disepakati sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2018 jika jumlah kewajiban AP II gabungan yang harus dibayar (Limit Kredit dan Limit Pembiayaan Musyarakah) kepada Maybank telah melebihi Rp3.000.000.000.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On June 3, 2020, Maybank agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on May 1, 2020 to April 30, 2021. In addition to the payment obligations, Maybank also agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- To adjust the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.
- To adjust *Debt to Equity* (DER) of 2 times will be calculated starting from December 2021.

Based on a loan agreement dated October 12, 2018, AP II obtained a term loan facility from Maybank with maximum credit facility limit of Rp3,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II's airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.65% - 5.90% in 2022 and 5.65% - 6.65% in 2021.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- Maximum *Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

Based on Musyarakah line financing facility agreement dated November 7, 2019, AP II obtained a financing facility from Maybank with maximum financing facility limit of Rp1,000,000,000. AP II also signed Combined Limit Agreement No. PJJ.04.04./00/11/2019/0792 dated November 7, 2019 with Maybank where AP II would not be able to use the credit facility limit which previously agreed on October 12, 2018 if the total AP II liability to Maybank (Credit limit and Financing Limit) has exceeded Rp3,000,000,000.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing agreement as follows:

- Minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- Maximum *Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 19 Mei 2020, Maybank setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Maybank juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penyesuaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.
- Penyesuaian *Debt to Equity* (DER) sebesar 2 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

Pada tanggal 26 Mei 2022, Maybank setuju untuk memberikan pengesampingan atas *financial covenant Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali selama tahun 2022.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.266.863.402 dan Rp4.104.730.000.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 20 Maret 2015, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 18 Desember 2030.

Pada tanggal 20 September 2018, SMI menyetujui untuk melakukan perubahan *financial covenant* menjadi sebagai berikut :

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 21 November 2018, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,65% - 5,90% pada tahun 2022 dan antara 5,65% - 6,65% pada tahun 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On May 19, 2020, Maybank agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on May 1, 2020 to April 30, 2021. In addition to the payment obligations, Maybank also agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- To adjust the *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.
- To adjust *Debt to Equity* (DER) of 2 times will be calculated starting from December 2021.

On May 26, 2022, Maybank agreed to waive financial covenant *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of minimum 1 time during 2022.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp4,266,863,402 and Rp4,104,730,000, respectively.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

Based on a loan agreement dated March 20, 2015, AP II obtained a financing facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until December 18, 2030.

On September 20, 2018, SMI agreed to adjust financial covenant to become as follows:

- Minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time.
- Maximum *Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

Based on a loan agreement dated November 21, 2018, AP II obtained a financing facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.65% -5.90% in 2022 and 5.65% - 6.65% in 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 19 Desember 2022, AP II memperoleh fasilitas pembiayaan dari SMI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar 8,45% pada tahun 2022.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali sejak tahun 2025.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.838.435.672 dan Rp1.913.235.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2015, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari LPEI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 1 April 2025.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1,20 kali.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2 kali.
- Rasio Lancar minimum sebesar 1,10 kali.

AP II juga diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada LPEI terkait dengan pembagian dividen.

Pada tanggal 29 Juli 2021, LPEI setuju untuk memberikan pengesampingan atas financial covenant *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali selama tahun 2022 hingga tahun 2024.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.166.799.016 dan Rp1.297.941.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

Based on a loan agreement dated December 19, 2022, AP II obtained a financing facility from SMI with maximum credit facility limit of Rp2,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging 8.45% in 2022.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time beginning in 2025.*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.*

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp2,838,435,672 and Rp1,913,235,000, respectively.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Based on a loan agreement dated April 1, 2015, AP II obtained a term loan facility from LPEI with maximum credit facility limit of Rp1,500,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until April 1, 2025.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.20 times.*
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.*
- *Minimum Current Ratio of 1.10 times.*

AP II is also required to provide written notification to LPEI regarding dividend declaration.

*On July 29, 2021, LPEI agreed to waive financial covenant *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of minimum 1 time during 2022 until 2024.*

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,166,799,016 and Rp1,297,941,000, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk ("IIF")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 15 Juli 2015, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari IIF dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp400.000.000. Hasil penerimaan dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengembangan bandar udara AP II khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 15 Juli 2025.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, IIF setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021.

Pada tanggal 29 September 2021, IIF setuju untuk memberikan pengesampingan atas financial covenant Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 1 kali selama tahun 2022 hingga tahun 2024.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp320.408.397 dan Rp663.172.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 30 Juli 2023.

Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BRI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian financial covenant atas Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Juli 2020, AP II memperoleh revolving loan facility dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,50% - 6,75% pada tahun 2022 dan antara 6,50% - 7,50% pada tahun 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Indonesia Infrastruktur Finance Tbk ("IIF")

Based on a loan agreement dated July 15, 2015, AP II obtained a term loan facility from IIF with maximum credit facility limit of Rp400,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development, especially in Soekarno-Hatta Airport. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until July 15, 2025.

On October 9, 2020, IIF agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021.

On September 29, 2021, IIF agreed to waive financial covenant Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of minimum 1 time during 2022 until 2024.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp320,408,397 and Rp663,172,000, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from BRI with maximum credit facility limit of Rp700,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until July 30, 2023.

In addition to the payment obligations, BRI also agreed to make financial covenant adjustments of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2021.

Based on a loan agreement dated July 30, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from BRI with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II working capital. This loan bears interest at annual rate ranging from 6.50% - 6.75% in 2022 and 6.50% - 7.50% in 2021.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- Menjaga ekuitas selalu positif.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 22 Desember 2021, BRI setuju untuk memberikan pengesampingan atas *financial covenant Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali selama tahun 2022 hingga tahun 2024.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.166.224.970 dan Rp1.079.415.000.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BNI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 31 Maret 2026.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 29 Mei 2020, BNI setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BNI juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas *financial covenant Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali baru akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp594.356.296 dan Rp662.740.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Maintain a positive equity.
- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.

On December 22, 2021, BRI agreed to waive financial covenant Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of minimum 1 time during 2022 until 2024.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,166,224,970 and Rp1,079,415,000, respectively.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("BNI")**

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from BNI with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until March 31, 2026.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time.
- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.

On May 29, 2020, BNI agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021. In addition to the payment obligations, BNI also agreed to make financial covenant adjustments of Deferral calculation of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time until December 2022.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp594,356,296 and Rp662,740,000, respectively.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 April 2016, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp700.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,50% - 5,75% pada tahun 2022 dan antara 5,50% - 6,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 28 November 2031.

Pada tanggal 25 Juni 2020, Mandiri setuju memberikan penangguhan pembayaran angsuran hutang pokok yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 15 Januari 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, Mandiri juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* atas *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2022.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 25 Juni 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,50% - 6,75% pada tahun 2022 dan antara 6,50% - 7,50% pada tahun 2021.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman atas *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.714.510.924 dan Rp1.105.984.000.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 September 2018, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BTN dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan bandar udara AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 5,65% - 5,90% pada tahun 2022 dan antara 5,65% - 6,65% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 6 Juli 2023.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Based on a loan agreement dated April 1, 2016, AP II obtained a term loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp700,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.50% - 5.75% in 2022 and 5.50% - 6.50% in 2021. The term of this agreement is until November 28, 2031.

On June 25, 2020, Mandiri agreed to postpone the payment of installments of principal debt due on July 15, 2020 to January 15, 2021. In addition to the payment obligations, Mandiri also agreed to make financial covenant adjustments of *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2022.

Based on a loan agreement dated June 25, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from Mandiri with maximum credit facility limit of Rp750,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to to finance AP II working capital. This loan bears interest at annual rates ranging from 6.50% - 6.75% in 2022 and 6.50% - 7.50% in 2021.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement of *Maximum Debt Equity Ratio* (DER) of 2 times.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,714,510,924 and Rp1,105,984,000, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)

Based on a loan agreement dated September 12, 2018, AP II obtained a term loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp1,000,000,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II airport development. This loan bears interest at annual rates ranging from 5.65% - 5.90% in 2022 and 6.25% - 7.50% in 2021. The term of this agreement is until July 6, 2023.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1 kali.
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2 kali.

Pada tanggal 13 Juli 2020, BTN setuju memberikan jadwal pembayaran pokok atau angsuran baru yang jatuh tempo mulai dari tanggal 12 Desember 2021. Disamping kewajiban pembayaran tersebut, BTN juga menyetujui untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* atas *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1 kali akan diperhitungkan mulai periode Desember 2023.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 6 Juli 2020, AP II memperoleh *revolving loan facility* dari BTN dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 6,25% - 6,50% pada tahun 2022 dan antara 6,25% - 7,50% pada tahun 2021.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Cash in Bank* minimum 2,50% dari Baki Debet.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.467.270.620 dan Rp1.486.678.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 22 Oktober 2021, AP II memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Jateng dengan jumlah limit kredit sebesar Rp700.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan 7,50% pada tahun 2021. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 22 Oktober 2025.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2,2 kali.
- Ekuitas positif.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, AP II telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time.
- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2 times.

On July 13, 2020, BTN agreed to provide a new schedule for payment of principal or installments due starting from December 12, 2021. In addition to these payment obligations, BTN also agreed to make financial covenant adjustments of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time will be calculated starting from December 2023.

Based on a loan agreement dated July 6, 2020, AP II obtained a revolving loan facility from BTN with maximum credit facility limit of Rp500,000. The proceeds of the loan from this facility were used to finance AP II working capital. This loan bears interest at annual rate ranging from 6.25% - 6.50% in 2022 and 6.25% - 7.50% in 2021.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Minimum Cash in Bank 2.50% of the outstanding balance.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,467,270,620 and Rp1,105,984,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Based on a loan agreement dated October 22, 2021, AP II obtained a working capital loan from BTN with credit limit of Rp700,000,000. This loan bears interest at annual rate of 7.50% in 2021. The term of this agreement is until October 22, 2025.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 2.2 times.
- Positive equity.

As of December 31, 2022 and 2021, AP II has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp700.000.000 dan Rp413.891.000.

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi II No. WCO.KP/592/KI/2021 pada tanggal 8 Desember 2021, PT Sarinah mendapatkan kredit investasi dari Bank Mandiri.

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Fasilitas kredit investasi 1 sebesar Rp98.800.000.
- Fasilitas kredit investasi 2 sebesar Rp3.000.000.
- Jangka waktu 5 tahun (31 Desember 2021 - 31 Desember 2026).
- Tingkat suku bunga 7,75%.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut (Catatan 18):

- Gedung parkir yang dibiayai dari fasilitas KI-1 akan diikat fidusia.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Margasari seluas 1.750 m² yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec klojen Kota Malang Jawa Timur.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Guna bangunan No. 112 seluas 4.135 m² yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No.2A Malang.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan *financial covenant* yaitu:

- *Current Ratio* minimum 110% selama masa konstruksi mulai dihitung sejak terbitnya Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022.
- *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak melebihi 230%.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp96.638.044 dan Rp87.496.350.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Berdasarkan Akta Kredit Investasi No 1 tertanggal 2 November 2021 dibuat dihadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., dan Surat Persetujuan Kredit No. BIN/3.2/112/R tanggal 19 Maret 2021 Bank setuju memberikan fasilitas kredit investasi kepada Sarinah.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp700,000,000 and Rp413,891,000, respectively.

PT Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Based on the Deed of Investment Credit Agreement II No. WCO.KP/592/KI/2021 on December 8, 2021, PT Sarinah received an investment credit from Bank Mandiri.

Facilities obtained by PT Sarinah include:

- Investment credit facility 1 amounting to Rp98,800,000.
- Investment credit facility 2 amounting to Rp3,000,000.
- 5 years period (31 December 2021 - December 31, 2026).
- Interest rate 7.75%.

This facility is secured by the following collaterals (Note 18):

- The parking building financed from the KI-1 facility will be tied on fiduciary basis.
- A plot of land with Building Use Rights Certificate Number 163/Margasari covering an area of 1,750 sqm located at Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec Klojen Malang City, East Java.
- A plot of land with a Right of Use certificate for building No. 112 covering an area of 4,135 sqm located on Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2A Malang.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain financial covenants namely:

- A minimum Current Ratio of 110% during the construction period starting from the publication of the Financial Statements for the position of December 31, 2022.
- Debt to Equity Ratio does not exceed 230%.

The loan balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp96,638,044 and Rp87,496,350, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Based on the Investment Credit Deed No. 1 dated November 2, 2021, it was drawn up before Fessy Farizqoh Alwi, S.H., and the Credit Approval Letter No. BIN/3.2/112/R dated March 19, 2021, the Bank agreed to provide an investment credit facility to Sarinah.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Fasilitas yang diperoleh PT Sarinah antara lain:

- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp65.000.000.
- Jangka waktu 8 tahun (2 November 2021 - 2 November 2029).
- Tingkat suku bunga 9%.

Fasilitas ini dijamin dengan (Catatan 18), sebidang tanah dan bangunan ruko diatasnya yang terletak di Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan menjaga rasio keuangan yaitu:

- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 3 (tiga) kali.
- *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp64.067.061 dan Rp20.811.933.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 5 tertanggal 26 April 2021 dibuat di hadapan Sri Budi Lestariningsih, S.H., BRI setuju memberikan fasilitas kredit transaksi khusus kepada PT Sarinah, sebagai berikut:

- Plafond pinjaman sebesar Rp50.000.000.
- Jangka waktu 5 tahun (26 April 2021 - 26 April 2026).
- Tingkat suku bunga 9,25%

Fasilitas ini dijamin (Catatan 18), sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1725 Petojo Selatan, seluas 1.159 m² yang terletak di provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, kecamatan Gambir, kelurahan petojo Selatan.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, PT Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan rasio keuangan yaitu:

- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%.
- *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp43.750.000 dan Rp49.500.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Facilities obtained by PT Sarinah include:

- *Investment Credit Facility* amounting to Rp65,000,000.
- *8 years period* (November 2, 2021 - November 2, 2029).
- *9% interest rate.*

This facility is secured by (Note 18), a plot of land and a shophouse building on it which is located on Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain:

- *Debt Equity Ratio (DER) a maximum of 3 (three) times.*
- *Current ratio at least 1 (one) time.*
- *Debt Service Coverage Ratio at least 100%.*

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp64,067,061 and Rp20,811,933.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on the Deed of Credit Agreement No. 5 dated April 26, 2021, made in presence of Sri Budi Lestariningsih, S.H., BRI agreed to provide a special transaction credit facility to PT Sarinah, as follows:

- *Loan ceiling of Rp50,000,000.*
- *5 years period* (April 26, 2021 – April 26, 2026).
- *Interest rate 9.25%*

This facility is secured by (Note 18), a plot of land with Building Use Rights Certificate Number 1725 Petojo Selatan, covering an area of 1,159 sqm which is located in the province of the Special Capital Region of Jakarta, Central Jakarta Administrative City, Gambir sub-district, Petojo Selatan sub-district.

In connection with the credit agreement, PT Sarinah has an obligation to maintain financial ratio:

- *Debt Equity Ratio (DER) of a maximum of 300%.*
- *Current ratio at least 1 (one) time.*
- *Debt Service Coverage Ratio at least 100%.*

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp43,750,000 and Rp49,500,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

**PT Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 3 November 2021 yang dibuat di hadapan Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notaris di Sleman, TWC memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai maksimum sebesar Rp57.000.000 dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk *refinancing* Hotel The Manohara. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun (*floating*).

Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 1.835 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 9.529 m² (Catatan 18).

TWC harus memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan, antara lain:

- Rasio utang terhadap modal paling tinggi sebesar 200%.
- Rasio likuiditas paling rendah sebesar 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 TWC dapat memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang dinyatakan dalam perjanjian.

Selama kredit belum lunas, TWC tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan aset, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan operasional TWC dan/ atau sekuritas aset sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan penggabungan atau akuisisi, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan perubahan bidang usaha, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan pihak Bank.
- Mengubah periode pelaporan keuangan.

Per 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp55.750.000 dan Rp57.000.000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

**PT Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta**

Based on the Deed of Credit Agreement No. 2 dated November 3, 2021, made in presence of Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notary in Sleman, TWC obtained an investment credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta with a maximum value of Rp57,000,000 with a period of 36 months.

The purpose of using this facility is for *refinancing* Hotel The Manohara. This facility bears interest at 9% per annum (*floating*).

This loan is secured by land with an area of 1,835 sqm and a building that stands on it with an area of 9,529 sqm (Note 18).

TWC must fulfill its financial obligations, including:

- Debt to equity ratio maximum of 200%.
- Liquidity ratio minimum of 100%.

As of December 31, 2022 and 2021, TWC is able to fulfill all financial obligations thant stated in the agreement.

As long as the credit has not been paid off, TWC is not allowed to do the following:

- Selling assets, except for carrying out TWC's operations and/or asset securities in accordance with the articles of association and the provisions of the applicable laws and regulations.
- Perform mergers or acquisitions, unless carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.
- Make changes to the business field, unless it is carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.
- Conduct transactions that cause conflicts of interest with the interests of the Bank.
- Change the financial reporting period.

As of December 31, 2022 and 2021 the outstanding balance of this facility amounting to Rp55,750,000 and Rp57,000,000.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

27. Bonds Payable And Sukuk Ijarah

	2022 Rp	2021 Rp	
Utang Obligasi	6,793,900,000	6,793,900,000	Bonds Payable
Utang Sukuk Ijarah	728,000,000	728,000,000	Sukuk Ijara Payable
Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi	(14,618,987)	(16,346,812)	Unamortized Cost of Loans
Total	7,507,281,013	7,505,553,188	Total
	2022 Rp	2021 Rp	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	1,126,000,000	--	Current Maturities of Long-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	6,381,281,013	7,505,553,188	Long Term Liabilities - Net of Current Maturities
Total	7,507,281,013	7,505,553,188	Total

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2016

Pada tanggal 10 November 2016, AP I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I AP I Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2016

On November 10, 2016, AP I has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Bonds I AP I Year 2016 with detail as follows:

Obligasi/ Bonds					
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri B	389,000,000	8.40%	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	1,489,000,000	8.55%	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	1,878,000,000				Total
Sukuk Ijarah/Sukuk Ijarah					
	Nominal	Imbalan per Tahun/ Benefit per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri B	55,000,000	4,620,000	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	177,000,000	15,133,500	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	232,000,000	19,753,500			Total

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dan utang sukuk ijarah, 75% dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu bandara baru Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin, Juanda Surabaya dan Sultan Hasanudin Makassar.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP I, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, 75% of fund received will be used for the development of 5 (five) airports there are the new airport in Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Banjarmasin Syamsudin Noor, Juanda Surabaya and Makassar Sultan Hasanuddin.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP I wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 3 kali.
- Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal 29 November 2022, seluruh pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan pada poin (a) dan (c) untuk periode tahun 2022 dan 2023, serta poin (b) untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024.

Pada tanggal 1 Agustus 2022, peringkat obligasi AP I yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ untuk Obligasi dan idAA+(sy) untuk Sukuk Ijarah.

b. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2021

Pada tanggal 8 September 2021, AP I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

- Ratio of current assets to current liabilities not less than 1 time.
- Ratio of total debt to total equity not more than 3 times.
- Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time.

AP I was unable to meet these requirements on December 31, 2022 and December 31, 2021. Based on the General Meeting of Bondholders and General Meeting of Sukuk Ijarah on November 29, 2022, all bond and sukuk ijarah holders agreed to waive the fulfilment of the financial covenants in points (a) and (c) for the 2022 and 2023 periods, as well as point (b) for the 2022, 2023 and 2024 periods

On August 1, 2022, AP I bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+ for Bond Payable and idAA+(sy) for Sukuk Ijarah.

b. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2021

On September 8, 2021, AP I has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2021 with detail as follows:

Obligasi/ Bonds					
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	272,500,000	6.70%	3 Tahun/Years	2024	Seri A
Seri B	66,000,000	7.10%	5 Tahun/Years	2026	Seri B
Seri C	280,400,000	8.00%	7 Tahun/Years	2028	Seri C
Seri D	497,000,000	8.60%	10 Tahun/Years	2031	Seri D
Total	1,115,900,000				Total

Sukuk Ijarah/ Sukuk Ijarah					
	Nominal	Imbalan per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	215,000,000	14,405,000	3 Tahun/Years	2024	Seri A
Seri B	215,000,000	15,265,000	5 Tahun/Years	2026	Seri B
Seri B	52,000,000	4,160,000	7 Tahun/Years	2028	Seri B
Seri C	14,000,000	1,204,000	10 Tahun/Years	2031	Seri C
Total	496,000,000	35,034,000			Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dan sukuk ijarah, bahwa dana sebesar Rp622.000.000 dan Rp199.900.205 akan digunakan untuk melunasi surat utang Obligasi Seri A 2016, dana sisa hasil penawaran umum obligasi sebanyak 73% akan digunakan untuk investasi antara lain overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal beserta fasilitas penunjang, dan lain-lain. Sedangkan sebanyak 27% digunakan untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat utang obligasi dana sebesar Rp199.950.205 akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok utang Pinjaman Kredit Sindikasi 2016.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP I, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

AP I juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5 kali.
- b) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali yang dimulai pada tahun 2022.

AP I tidak dapat memenuhi persyaratan poin (b) pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal 29 November 2022, seluruh pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan pada poin (b) untuk periode tahun 2022 dan 2023.

Pada tanggal 1 Agustus 2022, peringkat obligasi AP I yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ untuk Obligasi dan idAA+(sy) untuk Sukuk Ijarah.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, Rp622,000,000 and Rp199,900,205 of funds will be used to pay off the 2016 Series A Bonds, the remaining 73% proceeds from the public offering of bonds will be used for investments including runway overlay, equipment replacement, terminal renovation and supporting facilities, and others. Meanwhile, 27% is used for working capital.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee for bonds payable, Rp199,950,205 of funds will be used to pay off part of the principal debt of the 2016 Syndicated Credit Loans.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP I wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

AP I is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

- a) Ratio of total debt to total equity not more than 5 times.
- b) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time starting from 2022.

AP I was unable to meet requirement for point (b) on December 31, 2022 and December 31, 2021. Based on the General Meeting of Bondholders and General Meeting of Sukuk Ijarah on November 29, 2022, all bond and sukuk ijarah holders agreed to waive the fulfilment of the financial covenants in 2022 and 2023 for point (b).

On August 1, 2022, AP I bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+ for Bond Payable and idAA+(sy) for Sukuk Ijarah.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Obligasi 2016

Pada tanggal 23 Juni 2016, AP II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 dengan 3 (tiga) seri yaitu:

Obligasi/ Bonds					
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	1,000,000,000	8.60%	5 Tahun/Years	2021	Seri A
Seri B	100,000,000	8.80%	7 Tahun/Years	2023	Seri B
Seri C	900,000,000	9.00%	10 Tahun/Years	2026	Seri C
Total	2,000,000,000				Total

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 30 Juni 2016 dari hasil penerbitan perdana Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP II, 92% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandara Soekarno-Hatta dan 8% akan digunakan untuk pengembangan bandara lainnya.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
- Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 25% dari ekuitas AP II.

Pada tanggal 14 Juni, 2021, AP II melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp1.000.000.000 atas Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 Seri A.

Pada tanggal 19 November 2020 dan 16 Desember 2020, Pemegang Obligasi I Angkasa Pura II 2016 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

PT Angkasa Pura II ("AP II")

a. Bonds 2016

On June 23, 2016, AP II has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 with 3 (three) series as follows:

Total fund received by AP II on June 30, 2016 from the first issuance of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and AP II prospectus for bonds payable, 92% of the funds will be used for the development of Soekarno-Hatta airport and 8% will be used for the development of other airports.

AP II is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.
- Ratio of Total Debt to Total Equity not more than 2 times.
- Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time.

AP II will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 25% of the AP II equity.

On June 14, 2021, AP II has paid the Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 Seri A of Rp1,000,000,000.

On November 19, 2020 and December 16, 2020, holders of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 agreed to make financial covenant adjustments as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Penghapusan Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

- *Invalidation of Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.*
- *Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

Pada tanggal 26 September 2022, peringkat obligasi AP II yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ untuk Obligasi.

- *On September 26, 2022, AP II bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+ for Bond Payable.*

b. Obligasi 2018

Pada tanggal 13 Desember 2018, AP II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 dengan 2 (dua) seri yaitu:

b. Bonds 2018

On December 13, 2018, AP II has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase I Year 2018 with 2 (two) series as follows:

Obligasi/ Bonds				
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date
Seri A	200,000,000	8.65%	3 Tahun/Years	2021
Seri B	550,000,000	8.95%	5 Tahun/Years	2023
Total	750,000,000			

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 12 Desember 2018 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 adalah sebesar Rp750.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP II, seluruh dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sisi udara dan sisi darat di Bandara Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh AP II.

Total funds received by AP II on December 12, 2018 from the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Year 2018 is Rp750,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and AP II bonds payable prospectus, all of the funds will be used for the development of airside and landside of Soekarno-Hatta Airport and other airports managed by AP II.

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a) Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
- b) Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP II is also obligated to maintain certain financial ratios along the bonds payable period as follows:

- a) Ratio of Total Debt to Total Equity not less than 2 times.*
- b) The comparison of Profit Before Income Tax and Depreciation and Amortisation to Debt Interest Expense not less than 1 time.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 30% dari ekuitas AP II.

AP II will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 30% of AP II equity.

Pada tanggal 4 November 2020, Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

On November 4, 2020, holders of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase I Year 2018 agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2022 dan 2021

- Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2022 and 2021.

Pada tanggal 30 November 2021, AP II melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp200.000.000 atas Obligasi II Angkasa Pura II tahun 2018 Seri A.

On November 30, 2021, AP II has paid the Bonds II Angkasa Pura II Year 2018 Seri A of Rp200,000,000.

Pada tanggal 12 September 2022, peringkat obligasi AP II yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ untuk Obligasi.

On September 12, 2022, AP II bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+ for Bond Payable.

c. Obligasi 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020, AP II menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 dengan 4 (empat) seri yaitu:

c. Bonds 2020

On August 13, 2020, AP II issued Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 with 4 (four) series as follows:

Obligasi/ Bonds					
	Nominal	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Jangka Waktu/ Periods	Jatuh Tempo/ Due Date	
Seri A	32,000,000	7.80%	3 Tahun/Years	2023	Seri A
Seri B	159,000,000	8.50%	5 Tahun/Years	2025	Seri B
Seri C	1,602,000,000	9.10%	7 Tahun/Years	2027	Seri C
Seri D	457,000,000	9.25%	10 Tahun/Years	2030	Seri D
Total	2,250,000,000				Total

Total dana yang diterima AP II pada tanggal 13 Desember 2020 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.250.000.000 Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP II, seluruh dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sisi udara dan sisi darat di Bandara Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh AP II.

Total funds received by AP II on December 12, 2020 from the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 is Rp2,250,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and AP II bonds payable prospectus, all funds will be used for the development of airside and landside of Soekarno-Hatta Airport and other airports managed by AP II.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2 kali dan
- Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP II juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sejumlah lebih dari 30% dari ekuitas AP II.

Pada tanggal 4 November 2020, Pemegang Obligasi Berkelanjutan I AP II Tahap II Tahun 2020 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Pengesampingan Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, AP II telah memenuhi semua kewajiban.

Pada tanggal 12 September 2022, peringkat obligasi AP II yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ untuk Obligasi.

AP II is also obligated to maintain certain financial ratios along the bonds payable period as follows:

- Ratio of Total Debt to Total Equity not less than 2 times and
- The comparison of Profit Before Income Tax and Depreciation and Amortisation to Debt Interest Expense not less than 1 time.

AP II will also be declared in compliance with its covenant relating to the bonds payable if there is any other long-term loan that is not in compliance with their covenant, totaling more than 30% of the AP II equity.

On November 4, 2020, holders of Obligasi Berkelanjutan I AP II Phase II Year 2020 agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2021 and December 31, 2022.

As of December 31, 2022 and 2021 AP II has complied with all covenant required.

On September 12, 2022, AP II bond rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) is idAA+ for Bond Payable.

28. Utang Jangka Panjang Lainnya

28. Other Long-Term Liabilities

	2022 Rp	2021 Rp	
Utang Bunga Ditangguhkan	649,002,768	--	Deferred Interest Expense
Utang Konstruksi	265,765,757	--	Construction Debt
Jaminan Pelanggan	316,658,479	281,987,622	Customer Deposit
Lain-lain	193,304,286	177,879,966	Others
Total	1,424,731,290	459,867,588	Total

Utang bunga ditangguhkan merupakan selisih lebih akrual beban bunga berdasarkan bunga yang dikenakan dengan bunga yang dibayar atas pinjaman utang bank dan lembaga keuangan lainnya - jangka panjang (Catatan 26).

Deferred interest payable represents the excess of accrued interest expense based on interest charged and interest paid on loans from banks and other financial institutions - long term (Note 26).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Utang jaminan pelanggan terutama merupakan jaminan yang diterima Grup dari para penyewa (*tenant*) atas sewa ruangan, tanah dan instalasi listrik, air dan telepon di awal perjanjian. Utang jaminan tersebut akan dibayar kembali kepada penyewa apabila hubungan sewa menyewa dan pemakaian fasilitas berakhir.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), utang konstruksi merupakan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Grup dan Gudang Garam penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Kediri (Catatan 45h).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Customer deposit payables mainly represent guarantees received by the Group from tenants for space, land and electricity, water and telephone installations at the beginning of the agreement. The security debt will be repaid to the lessee when the rental relationship and use of the facility ends.

Based on the Joint Operation Agreement (KSO), the construction debt represents the Management of Public Private Partnership Project (KPBU) on January 26, 2021 which was signed by the Group and Gudang Garam for providing airport services at Kediri Airport (Note 45h).

29. Utang Provisi

Utang provisi pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.814.557 Rp20.367.575.

Pada tanggal 31 Desember 2020, TWC melakukan pembentukan biaya provisi sehubungan dengan restrukturisasi aset program dana pensiun yang ditempatkan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Restrukturisasi tersebut mengakibatkan adanya kewajiban PT TWC yang belum dipenuhi sebelum dilakukannya restrukturisasi. Nilai provisi tersebut berdasarkan Surat dari PT Asuransi Jiwasraya (AJS) (Persero) No. 00017/S/CBR9/1220 tanggal 30 Desember 2020 mengenai besaran nilai top up premi sebesar Rp20.367.575 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 19 Januari 2021.

Pada tanggal 30 April 2021, terdapat Kesepakatan Bersama No. 88/KP.605/IV/2021 antara PT TWC dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Persetujuan Mengikuti Restrukturisasi Polis. Para pihak sepakat bahwa proses restrukturisasi polis akan berlaku efektif setelah diterbitkannya polis baru hasil restrukturisasi atas polis lama. Terhitung sejak tanggal 28 Juni 2022, polis PT TWC telah dialihkan pengelolaannya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

29. Provisions Payable

Provisions payable on December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp13,814,557 Rp20,367,575, respectively.

As of December 31, 2020, TWC established a provision expense regarding with the restructuring of the pension plan assets placed at PT Asuransi Jiwasraya (Persero). The restructuring resulted in PT TWC's obligations which had not been fulfilled prior to the restructuring. The value of the provision is based on a letter from PT Asuransi Jiwasraya (AJS) (Persero) No. 00017/S/CBR9/1220 dated December 30, 2020 regarding the top up premi amounting to Rp20,367,575 which was approved by the Board of Commissioners on January 19, 2021.

On April 30, 2021, there was a Joint Agreement No. 88/KP.605/IV/2021 between PT TWC and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Approval to Participate in Policy Restructuring. The parties agree that the restructuring process will be effective after the issuance of a new policy resulting from the policy restructuring of the old policy. Since June 28, 2022, PT TWC policy has been transferred to PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Program Anuitas Polis Peserta Anuitas Pasif PT TWC No. 193/KP.605/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, menyatakan besaran *top up* premi untuk peserta anuitas pasif yang dicatat oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebesar Rp4.725.439 sehingga terdapat penambahan provisi pada tahun 2022 sebesar Rp202.016 yang dicatat pada Beban Umum dan Administrasi (Catatan 37), dan telah diperhitungkan melalui perhitungan *net off* utang klaim dan telah dilakukan migrasi pembukuan ke IFG Life per tanggal 30 November 2022, sehingga utang provisi atas anuitas pasif pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Program Pendanaan Hari Tua Peserta Karyawan Aktif PT TWC No. 193/KP.605/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, menyatakan besaran *top up* premi untuk peserta karyawan aktif yang dicatat oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebesar Rp2.029.596 dan telah diperhitungkan melalui perhitungan *net off* utang klaim dan telah dilakukan migrasi pembukuan ke IFG Life per tanggal 27 Juni 2022, sehingga utang provisi atas karyawan aktif pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.939.093. Berdasarkan Surat No. 38/AJIFG/CBR4/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dari IFG Life kepada PT TWC perihal Penawaran Simulasi *Top Up*. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, PT TWC belum memutuskan pilihan alternatif *top up* premi yang diberikan oleh IFG Life.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the Minutes of Data Reconciliation Program of Passive Annuity Policy Participants of PT TWC No. 193/KP.605/I/2023 dated January 17, 2023, stated the amount of premium *top up* for passive annuity participants recorded by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Rp4,725,439 so that there is addition of provision in 2022 amounting to Rp202,016 recorded as General and Administrative Expenses (Note 37), and has been calculated through the calculation of *net off* claims payable and the bookkeeping migration has been carried out to IFG Life as of November 30, 2022, so that the provision payable for passive annuities as of December 31, 2022 amounting to nil.

Based on the Minutes of Data Reconciliation of the Old Age Funding Program for Active Employee Participants of PT TWC No. 193/KP.605/I/2023 dated January 17, 2023, stated that the amount of the *top up* premium for active employee participants recorded by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Rp2,029,596 and has been calculated through the calculation of *net off* claims debt and has bookkeeping migration was carried out to IFG Life as of June 27, 2022, so that the provision payable for active employees as of December 31, 2022 amounting to Rp10,939,093. Based on Letter No. 38/AJIFG/CBR4/I/2023 dated January 25, 2023 from IFG Life to PT TWC regarding the *Top Up* Simulation Offer. As of the date of the financial statements, PT TWC has not yet decided on alternative premium *top up* options provided by IFG Life.

30. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Tunjangan Hari Tua	135,723,357	123,415,567
Tunjangan Perumahan	30,923,320	16,134,616
Penghargaan Pengabdian	56,107,104	23,545,221
Kesehatan Pensiun	--	152,856,920
Program Pensiun	1,595,250,279	1,495,938,913
Program Imbalan Pascakerja	549,527,198	409,517,251
Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya	59,235,642	54,356,618
Total	2,426,766,900	2,275,765,106

30. Employee Benefits Liabilities

The employee benefits liabilities as of December 31, 2022 and 2021 were calculated using the *projected unit credit* method by the independent actuaries are as follows:

Pension
Housing Allowance
Service Award
Retirement Health
Retirement Program
Post-Employment Benefit Program
Other Long Term Benefit Programs
Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used in determining expenses and liabilities are as follows:

	2022	2021	
Tingkat Diskonto	5.17% - 7.60%	3.40% - 7.55%	Discount Rate
Tingkat Mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat	1%	1%	Disability Rate
Metode Aktuarial	Projected Unit Credit		Actuarial Method
Umur Pensiun	56 Tahun/Years	56 Tahun/Years	Retirement Rate
Tingkat Mengundurkan Diri	5% pada usia 20 - 25 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ 5% for employees with ages 20 - 25 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal pension 0,7% pada usia 20 tahun s.d 45 tahun dan sebesar 0,1% pada usia 46 tahun s.d 55 tahun pada 2021/ 0,7% at 20 years until 45 years old and 0,1% at 46 years until 55 years on 2021		Resignation Rate

a. Tunjangan Hari Tua

Tunjangan hari tua diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dan janda/duda dari karyawan yang meninggal dunia.

a. Retirement Allowance

Retirement allowance are given to employees who are dismissed and to widows/widowers of employees who die.

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	575,379,801	564,948,557	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(439,656,444)	(441,532,990)	Fair Value of Plan Assets
Total	135,723,357	123,415,567	Total

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	564,948,557	586,150,167	Beginning Balance
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	(29,582,827)	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Biaya Jasa Kini	34,652,977	36,191,929	Current Service Cost
Biaya Bunga	36,646,509	36,268,755	Interest Cost
Iuran Peserta Program	--	6,426,054	Plan Participant's Contribution
Pembayaran Imbalan	(52,772,885)	(73,247,154)	Benefits Paid
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	21,487,470	(26,841,194)	Actuarial (Gain)/ Loss
Saldo Akhir	575,379,801	564,948,557	Ending Balance

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	441,532,990	475,807,614	Beginning Balance
Iuran Peserta Program	7,370,269	6,426,054	Plan Participant's Contribution
Iuran Pemberi Kerja	39,683,009	23,299,071	Employer Contribution
Imbal Hasil Aset Program	31,584,469	29,967,076	Program Asset Return
Pembayaran Imbalan	(52,772,885)	(73,247,154)	Rewards Payment
Keuntungan Aktuarial	(27,741,408)	(20,719,671)	Actuarial Gain
Saldo Akhir	439,656,444	441,532,990	Ending Balance

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	34,652,977	36,191,929	Current Service Cost
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	(29,582,827)	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Biaya Bunga	36,646,509	36,268,755	Interest Cost
Iuran Peserta	(7,370,269)	--	Participant Contribution
Ekspektasi Hasil Program	(31,584,469)	(29,967,076)	Expectations Plan Assets
Total	2,761,921	42,493,608	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	123,415,567	110,342,553	Beginning Balance
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	2,761,921	42,493,608	Expense Recognized in Profit or Loss
Beban (Penghasilan) yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	49,228,878	(6,121,523)	Expense (Income) recognized in Other Comprehensive Income
Pembayaran Iuran	(39,683,009)	(23,299,071)	Contribution Paid
Saldo Akhir	135,723,357	123,415,567	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	530,428,821	517,354,880	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	613,435,682	620,661,375	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	617,710,727	628,566,481	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	526,136,679	510,117,282	If Rate -1%

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada deposito berjangka, piutang pinjaman, reksadana, obligasi dan aset lainnya.

The composition of management of planned asset are on time deposits, loan receivables, mutual funds, bonds and other assets.

b. Tunjangan Perumahan

Sesuai ketentuan Grup, karyawan AP I yang telah bekerja secara terus menerus selama 20 tahun diberikan tunjangan perumahan.

b. Housing allowance

Based on Groups provisions, AP I employees who have worked continuously for 20 years are given a housing allowance.

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	30,923,320	16,134,616	Present Value of Liabilities
Total	30,923,320	16,134,616	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai
kini liabilitas adalah sebagai berikut:

*The reconciliation of beginning and ending
balance of present value of liabilities is as
follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	16,134,616	20,375,494	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	3,528,451	2,722,959	Current Service Cost
Biaya Bunga	947,960	986,174	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(3,101,241)	(7,878,514)	Benefits Paid
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	13,413,534	(71,497)	Actuarial (Gain)/ Loss
Saldo Akhir	30,923,320	16,134,616	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi
adalah sebagai berikut:

*The details of expenses recognized in profit
or loss are as follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	3,528,451	2,722,959	Current Service Cost
Biaya Bunga	947,960	986,175	Interest Cost
Kerugian Aktuarial	13,413,534	--	Actuarial Loss
Total	17,889,945	3,709,134	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi
keuangan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

*The movements of the liabilities in the
consolidated statement of financial position
are as follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	16,134,616	20,375,493	Beginning Balance
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi (Penghasilan) Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	--	(71,497)	Expenses Recognized in Profit and Loss (Income) Expenses Recognized in Other Comprehensive Income
Pembayaran luran	(3,101,241)	(7,878,514)	Contribution Paid
Saldo Akhir	30,923,320	16,134,616	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa
sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

*The present values of liabilities after
the effect of sensitivity analysis on
December 31, 2022 and 2021 are as
follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	26,940,177	14,919,112	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	34,906,463	17,214,241	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	33,825,420	16,134,616	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	28,021,220	16,134,616	If Rate -1%

c. Penghargaan Pengabdian

Penghargaan pengabdian diberikan kepada
pegawai yang mengabdikan terus menerus
selama sekurang-kurangnya 25 tahun di
Grup termasuk masa kerja pada masa
penugasan di luar Grup yang diakui sebagai
bagian dari pola karir serta pegawai yang
mengakhiri masa tugas dan diberhentikan
dengan hormat karena mencapai batas usia
pensiun normal atau meninggal dunia.

c. Employee Appreciation

Employee appreciation are given to
employees who serve continuously for at
least 25 years in Group including the service
period during outside assignments that are
recognized as part of the career pattern and
employees who end their term of service
and are honorably terminated because they
reach the normal retirement age or die.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai kini liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

The present value of liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	56,107,104	23,545,221	Present Value of Liabilities
Total	56,107,104	23,545,221	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	23,545,221	23,612,467	Beginning Balance
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	48,407,787	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Biaya Jasa Kini	5,243,584	2,189,692	Current Service Cost
Biaya Bunga	4,927,744	1,491,534	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(7,024,243)	(2,026,927)	Benefits Paid
Keuntungan Aktuarial	(18,992,989)	(1,721,545)	Actuarial Gain
Saldo Akhir	56,107,104	23,545,221	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	5,243,584	2,189,692	Current Service Cost
Biaya Bunga	4,927,744	1,491,534	Interest Cost
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	48,407,787	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Total	58,579,115	3,681,226	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	23,545,221	23,612,467	Beginning Balance
Beban (Pendapatan) yang Diakui dalam Laba Rugi	58,579,115	3,681,226	Expense (Income) recognized in Profit or Loss
Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(18,992,989)	(1,721,545)	Expenses Recognized in Other Comprehensive Income
Pembayaran	(7,024,243)	(2,026,927)	Contribution
Saldo Akhir	56,107,104	23,545,221	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	48,885,901	21,786,169	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	62,062,908	25,566,691	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	56,154,401	25,854,761	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	53,756,362	21,415,006	If Rate -1%

d. Kesehatan Pensiun

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

	2022 Rp	2021 Rp
Nilai Kini Liabilitas	345,635,844	541,623,320
Nilai Wajar Aset Program	(392,205,561)	(388,766,400)
Batas Atas Aset	46,569,717	--
Total	--	152,856,920

*Present Value of Liabilities
Fair Value of Plan Assets
Upper Asset Limit
Total*

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	541,623,320	517,775,500
Biaya Jasa Kini	12,811,377	4,050,018
Biaya Bunga	40,914,636	38,529,946
Iuran Peserta Program	--	3,543,684
Pembayaran Imbalan	(6,545,700)	(8,085,769)
Keuntungan Aktuarial	(243,167,789)	(14,190,059)
Saldo Akhir	345,635,844	541,623,320

*Beginning Balance
Current Service Cost
Interest Cost
Plan Participant's Contribution
Benefits Paid
Actuarial Gain
Ending Balance*

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	388,766,400	387,090,980
Hasil Pengembangan Riil	4,102,000	3,543,684
Imbal Hasil Aset Program	29,453,386	28,861,495
Pembayaran imbalan	(6,545,700)	(8,085,769)
Keuntungan Aktuarial	(23,570,525)	(22,643,990)
Saldo Akhir	392,205,561	388,766,400

*Beginning Balance
Plan Participant's Contribution
Return on Plan Assets
Benefits Paid
Actuarial Gain
Ending Balance*

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Biaya Jasa Kini	8,709,376	4,050,018
Biaya Bunga	40,914,636	38,529,946
Ekspektasi Hasil Program	(29,453,386)	(28,861,495)
Total	20,170,626	13,718,469

*Current Service Cost
Interest Cost
Expectations Plan Assets
Total*

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	152,856,920	130,684,520
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	20,170,627	13,718,469
Beban yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(173,027,547)	8,453,931
Saldo Akhir	--	152,856,920

*Beginning Balance
Expenses Recognized in Profit and Loss
Expenses Recognized in Other
Comprehensive Income
Ending Balance*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	286,998,619	454,878,025	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	424,213,290	628,368,615	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	413,700,053	566,721,871	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	297,173,476	516,524,769	If Rate -1%

e. Program Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

e. Post-Employment Benefit Program

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	777,393,532	509,247,974	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(227,866,334)	(99,730,723)	Fair Value of Plan Assets
Total	549,527,198	409,517,251	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	509,247,974	538,046,139	Beginning Balance
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	20,103,442	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Biaya Jasa Kini	93,734,048	44,066,116	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	50,102,201	(36,486,818)	Past Service Cost
Biaya Bunga	37,011,807	35,390,771	Interest Cost
Dampak Mutasi Pegawai	--	(52,379,303)	Impact of Employee Transfer
Iuran Peserta Program	--	142,644	Plan Participant's Contribution
Imbalan Kerja yang Sudah Tercatat Bagi Pegawai Keluar	(26,162,175)	(4,437,820)	Recorded Employee Benefits for Exiting Employees
Pembayaran Imbalan	(179,663,465)	(33,829,377)	Benefits Paid
Kerugian Aktuarial	273,019,700	18,735,622	Actuarial Gain Loss
Saldo Akhir	777,393,532	509,247,974	Ending Balance

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan assets is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	99,730,723	102,774,287	Beginning Balance
Iuran Peserta Program	17,979,985	3,208,986	Plan Participant's Contribution
Iuran Pemberi Kerja	128,429,058	13,532,387	Employer Contribution
Imbal Hasil Aset Program	(2,746,521)	4,902,942	Program Asset Return
Pembayaran Imbalan	(11,174,162)	(16,667,294)	Benefit Paid
Keuntungan Aktuarial	(4,352,749)	(8,020,585)	Actuarial Gain
Saldo Akhir	227,866,334	99,730,723	Ending Balance

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	93,734,048	44,066,116	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	50,102,201	(36,486,818)	Past Service Cost
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	20,103,442	--	Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method
Biaya Bunga	37,011,807	35,390,771	Interest Cost
Selisih Imbalan Pascakerja	(23,415,654)	(9,340,762)	Difference in Post-Employment Benefits
Total	177,535,844	33,629,307	Total

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	409,517,251	435,271,852	Beginning Balance
Dampak Mutasi Pegawai	--	(52,379,303)	Impact of Employee Transfer
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	177,535,844	33,629,307	Expenses Recognized in Profit and Loss
Beban yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	277,372,449	26,756,207	Expenses Recognized in Other Comprehensive Income
Iuran Pemberi Kerja	(146,409,043)	(16,598,729)	Employer Contribution
Pembayaran Manfaat	(168,489,303)	(17,162,083)	Benefit Paid
Saldo Akhir	549,527,198	409,517,251	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	605,074,204	197,663,000	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	949,712,860	820,832,948	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	961,738,051	630,006,726	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	593,049,013	388,489,222	If Rate -1%

f. Program Pensiun

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

f. Retirement Program

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	3,623,205,747	3,413,090,372	Present Value of Liabilities
Nilai Wajar Aset Program	(2,027,955,468)	(1,917,151,459)	Fair Value of Plan Assets
Total	1,595,250,279	1,495,938,913	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai
kini liabilitas adalah sebagai berikut:

*The reconciliation of beginning and ending
balance of present value of liabilities is as
follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	3,413,090,372	3,480,483,207	<i>Beginning Balance</i>
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	(1,066,281)	--	<i>Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method</i>
Biaya Jasa Kini	55,256,933	37,813,357	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	(2,943,749)	(9,594,821)	<i>Past Service Cost</i>
Biaya Bunga	252,486,124	251,505,173	<i>Interest Cost</i>
Iuran Peserta Program	1,185,609	2,256,004	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Pembayaran Imbalan	(247,102,014)	(229,267,634)	<i>Benefits Paid</i>
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	152,298,753	(120,104,914)	<i>Actuarial (Gain)/ Loss</i>
Saldo Akhir	3,623,205,747	3,413,090,372	<i>Ending Balance</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai
wajar aset program adalah sebagai berikut:

*The reconciliation of beginning and ending
balance of fair value of plan assets is as
follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	1,917,151,459	2,077,318,493	<i>Beginning Balance</i>
Iuran Peserta Program	3,308,563	3,538,310	<i>Plan Participant's Contribution</i>
Iuran Pemberi Kerja	183,961,002	48,087,767	<i>Employer Contribution</i>
Imbal Hasil Aset Program	97,854,286	120,324,377	<i>Program Asset Return</i>
Pembayaran Imbalan	(229,737,440)	(224,716,264)	<i>Benefits Paid</i>
Kerugian/(Keuntungan) Aktuarial	55,417,598	(107,401,224)	<i>Actuarial (Gain)/ Loss</i>
Saldo Akhir	2,027,955,468	1,917,151,459	<i>Ending Balance</i>

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi
adalah sebagai berikut:

*The details of expenses recognized in profit
or loss are as follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	55,256,933	37,813,357	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	(2,943,749)	(9,594,821)	<i>Past Service Cost</i>
Dampak Perubahan Metode Atribusi Imbalan Kerja	(1,066,281)	--	<i>Impact of Changes on Employee Benefit Attribution Method</i>
Biaya Bunga	252,486,124	251,505,173	<i>Interest Cost</i>
Ekspektasi Hasil Program	(97,854,286)	(149,796,091)	<i>Expectations Plan Assets</i>
Total	205,878,741	129,927,618	<i>Total</i>

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi
keuangan konsolidasian adalah sebagai
berikut:

*The movements of the liabilities in the
consolidated statement of financial position
are as follows:*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	1,495,938,913	1,403,164,714	<i>Beginning Balance</i>
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	205,878,741	129,927,618	<i>Expenses Recognized in Profit and Loss</i>
Beban yang Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	96,881,155	9,417,943	<i>Expenses Recognized in Other Comprehensive Income</i>
Pembayaran Manfaat	(17,364,574)	(19,465,987)	<i>Benefit Paid</i>
Iuran Pemberi Kerja	(186,083,956)	(27,105,375)	<i>Employer Contribution</i>
Saldo Akhir	1,595,250,279	1,495,938,913	<i>Ending Balance</i>

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	1,026,685,775	1,001,699,601	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	1,897,817,828	1,830,909,332	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	1,552,376,031	1,417,807,360	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	1,372,127,571	1,370,063,462	If Rate -1%

g. Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya

g. Other Long Term Rewards Programs

Nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

The present value of liabilities and fair value of plan assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Kini Liabilitas	59,235,642	54,356,618	Present Value of Liabilities
Total	59,235,642	54,356,618	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	54,356,618	47,565,919	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	5,709,514	11,351,607	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	--	154,458	Past Service Cost
Biaya Bunga	1,261,742	3,534,615	Interest Cost
Pembayaran Imbalan	(3,497,130)	(3,482,598)	Benefits Paid
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	1,404,898	(4,767,383)	Actuarial (Gain)/ Loss
Saldo Akhir	59,235,642	54,356,618	Ending Balance

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya Jasa Kini	5,709,514	11,351,607	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	--	154,458	Past Service Cost
Biaya Bunga	1,261,742	3,534,615	Interest Cost
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	1,404,898	(4,767,383)	Actuarial (Gain)/ Loss
Saldo Akhir	8,376,154	10,273,297	Ending Balance

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo Awal	54,356,618	47,565,919	Beginning Balance
Beban yang Diakui dalam Laba Rugi	8,376,154	10,273,297	Expenses Recognized in Profit and Loss
Pembayaran Imbalan	(3,497,130)	(3,482,598)	Benefits Paid
Saldo Akhir	59,235,642	54,356,618	Ending Balance

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
Jika Tingkat +1%	37,100,493	45,515,000	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	81,370,791	63,198,236	If Rate -1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
Jika Tingkat +1%	81,356,414	74,655,383	If Rate +1%
Jika Tingkat -1%	37,114,870	34,057,853	If Rate -1%

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumption for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible change of the respective assumption occur at the end of the reporting period, while holding all other assumption constant.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada obligasi pemerintah jangka Panjang. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefit pension obligation is calculated using a discount rate determined by reference to Long-term government bonds. A reduction in the bond interest rate will increase the program liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salaries Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will enhance the program's liabilities.

31. Modal Saham

31. Capital Stock

2021 dan/ and 2022				
Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share Rp	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value Rp	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership %
Negara Republik Indonesia	65,164,367	1,000	65,164,367,000	100%

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the number of outstanding shares at the beginning and the end of the year is as follows:

	Lembar Saham/ Shares		
	2022	2021	
Saldo Awal	65,164,367	13,000	Beginning Balance
Penambahan	--	65,151,367	Addition
Saldo Akhir	65,164,367	65,164,367	Ending Balance

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 15 Desember 2021 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta telah diputuskan:

Based on Deed No. 65 dated December 15, 2021 by Notary Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta has been decided:

- Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perusahaan menjadi sejumlah Rp260.000.000 yang terbagi atas 260.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000;
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp65.164.367 oleh Negara Republik Indonesia.

- Approved the increase in the Company's Authorized Capital to Rp260,000,000 which is divided into 260,000.000 shares with a nominal value of Rp1,000;
- The issued and fully paid-up capital of Rp65,164,367 by the Republic of Indonesia.

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02. TAHUN 2021.

The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02. YEAR 2021.

32. Tambahan Modal Disetor

32. Additional Paid in Capital

Perusahaan telah melakukan kombinasi bisnis atau akuisisi dengan AP I, AP II, HIN, Sarinah dan TWC yang merupakan entitas dalam pengendalian yang sama dengan Perusahaan, yaitu entitas di bawah pengendali Pemerintah Republik Indonesia. Kombinasi bisnis ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

The Company has entered into a business combination or acquisition with AP I, AP II, HIN, Sarinah and TWC which are entities under the same control as the Company, namely entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia. This business combination is recognized at carrying amount based on the pooling of interest method in accordance with PSAK 38: Business Combinations of Entities Under Common Control.

Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih masing-masing entitas sepengendali tersebut dengan biaya perolehan investasi dicatat sebagai Selisih Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

The difference between the Company's ownership interest in the net assets of each entity under common control and the acquisition cost of the investment is recorded as difference between business combinations of entities under common control with details as follows:

	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost Rp	Nilai Aset Bersih/ Net Asset Value Rp	Total/ Total Rp
PT Angkasa Pura I	16,750,717,972	10,060,881,637	6,689,836,335
PT Angkasa Pura II	36,200,821,092	17,509,402,904	18,691,418,188
PT Hotel Indonesia Nataour	8,736,217,019	8,190,986,543	545,230,476
PT Sarinah	448,527,127	76,114,969	372,412,158
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	3,015,083,575	548,004,680	2,467,078,895
Total	65,151,366,785	36,385,390,733	28,765,976,052

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. Kepentingan Non Pengendali

33. Non-Controlling Interest

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Laba Tahun Berjalan/ Current Year Profit Rp	Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan/ Total Other Comprehensive Income for the Year Rp	Dividen/ Dividend Rp	Penambahan Modal Entitas Anak/ Additional Capital of the Subsidiary Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
PT Angkasa Pura I dan Entitas Anak	3,734,736	176,125	2,179	--	--	3,913,040
PT Angkasa Pura II dan Entitas Anak	(1,548,372)	8,175,765	7,996,652	(1,055,000)	173,666,000	187,235,045
PT Hotel Indonesia Natour dan Entitas Anak	(784,049)	737,047	(8,957)	--	--	(55,959)
PT Sarinah dan Entitas Anak dan Entitas Anak	66,869	13,533	(188)	(10,984)	--	69,230
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Entitas Anak	226,219	(58,261)	23	--	--	167,981
Total	1,695,403	9,044,209	7,989,709	(1,065,984)	173,666,000	191,329,337

	2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Akuisisi Saham Entitas Sepengendali/ Acquisition of Under Common Entities Shares Rp	Laba Tahun Berjalan/ Current Year Profit Rp	Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan/ Total Other Comprehensive Income for the Year Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
PT Angkasa Pura I dan Entitas Anak	--	3,734,736	--	--	3,734,736
PT Angkasa Pura II dan Entitas Anak	--	(1,548,372)	--	--	(1,548,372)
PT Hotel Indonesia Natour dan Entitas Anak	--	(784,049)	--	--	(784,049)
PT Sarinah dan Entitas Anak dan Entitas Anak	--	66,869	--	--	66,869
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Entitas Anak	--	226,219	--	--	226,219
Total	--	1,695,403	--	--	1,695,403

34. Pendapatan

34. Revenues

a. Berdasarkan Jenis

a. By Type

	2022 Rp	2021 Rp	
Aviasi			Aviation
Aeronautika	7,437,003,914	3,244,932,590	Aeronautical
Non Aeronautika	6,090,964,450	5,189,295,659	Non Aeronautical
Kargo	796,515,984	169,384,038	Cargo
Sub Total	14,324,484,348	8,603,612,287	Sub Total
Perhotelan			Hospitality
Jasa Hotel	7,544,960	55,502,329	Hotel Services
Jasa Non Hotel	59,149,268	30,547,840	Non Hotel Services
Sub Total	66,694,228	86,050,169	Sub Total
Pariwisata			Tourism
Taman Nasional	158,090,585	36,415,553	Heritage Park
Fasilitas Pariwisata	65,136,392	33,556,889	Tourism Amenities
Taman Budaya	30,712,335	17,008,860	Cultural Park
Atraksi	13,036,232	1,080,736	Attraction
Sub Total	266,975,544	88,062,038	Sub Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Retail			Retail
Jasa Money Changer	302,322,551	604,623,008	Money Changer Service
Perdagangan (Ekspor dan Impor)	389,544,131	310,648,407	Trading (Ekspor and Import)
Property Management	92,659,941	31,175,419	Property Management
Penjualan Ritel	50,509,566	8,662,256	Retail Sales
Sub Total	835,036,189	955,109,090	Sub Total
Management Fee			Management Fee
Lain-lain	5,344,483	--	Others
Sub Total	5,344,483	--	Sub Total
Total	15,498,534,792	9,732,833,584	Total

b. Berdasarkan Transaksi

b. By Transaction

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi	2,797,221,830	2,157,252,280	Related Parties
Pihak Ketiga	12,701,312,962	7,575,581,304	Third Parties
Total	15,498,534,792	9,732,833,584	Total

35. Beban Pokok Pendapatan

35. Cost of Revenues

	2022 Rp	2021 Rp	
Aviasi			Aviation
Penyusutan (Catatan 17 dan 18)	4,106,734,116	3,775,318,665	Depreciation (Note 17 dan 18)
Pemeliharaan	839,768,067	886,423,369	Maintenance
Utilitas	766,250,861	642,547,562	Utilities
Jasa Alih Daya	688,841,412	589,517,132	Outsourcing Services
Groundhandling and Aircraft Handling Additional Note (AHAN)	505,985,000	531,595,000	Ground handling and Aircraft Handling Additional Note (AHAN)
Logistik	462,163,987	261,479,033	Logistic
Sewa	158,934,912	171,937,834	Rent
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 19)	59,441,707	67,632,975	Depreciation of Right of Use Assets (Note 19)
Lain-lain	644,301,983	746,672,723	Others
Subtotal	8,232,422,045	7,673,124,293	Subtotal
Perhotelan			Hospitality
Travel Management	17,052,288	--	Travel Management
Kamar	6,073,974	20,745,262	Room
Makanan dan Minuman	5,659,232	28,765,656	Food and Beverages
Management Fee	1,517,722	761,957	Management Fee
Lain-lain	329,820	8,410,736	Others
Subtotal	30,633,036	58,683,611	Subtotal
Pariwisata			Tourism
Taman Nasional	64,699,131	55,626,339	Heritage Park
Taman Budaya	54,473,197	26,061,882	Cultural Park
Fasilitas Pariwisata	33,606,629	30,457,810	Tourism Amenities
Atraksi	10,404,451	9,207,542	Attraction
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 19)	5,325,149	2,593,666	Depreciation of Right of Use Assets (Note 19)
Subtotal	168,508,557	123,947,239	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Retail			Retail
Penukaran Uang	302,098,629	604,212,788	Money Changer
Ekspor dan Impor	350,910,401	288,060,309	Export and Import
Sewa	25,504,412	6,574,513	Rent
Canvassing	5,105,742	3,959,853	Canvassing
Digital Bisnis	707,629	365,492	Digital Business
Distribusi	616,887	964,739	Distribution
Specialty Store	563,248	627,605	Merchandise
Subtotal	685,506,948	904,765,298	Subtotal
Total	9,117,070,586	8,760,520,441	Total

36. Beban Pemasaran

36. Marketing Expenses

	2022 Rp	2021 Rp	
Pegawai	2,878,318,445	2,699,286,625	Employee
Promosi/Pemasaran	41,708,229	24,618,903	Promotion/Marketing
Total	2,920,026,674	2,723,905,528	Total

37. Beban Umum dan Administrasi

37. General and Administrative Expenses

	2022 Rp	2021 Rp	
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 6 dan 7)	285,034,063	1,749,956,728	Impairment of Receivable (Notes 6 and 7)
Pajak	441,765,675	417,158,374	Tax
Imbalan Pascakerja dan Iuran Pensiun	412,048,612	399,774,743	Post-Employment Benefits and Pension Contributions
Gaji dan Tunjangan	439,333,417	312,071,801	Salaries and Allowances
Jasa Profesional	246,691,498	155,796,992	Professional Services
Asuransi	135,662,784	125,112,709	Insurance
Kantor	81,611,102	55,892,144	Office
Collection Fee	72,671,839	18,851,000	Collection Fee
Perjalanan Dinas dan Transportasi	62,140,183	38,863,964	Business Travel and Transportation
Keamanan	57,559,199	16,689,923	Security
Pendidikan dan Pelatihan	43,192,570	36,970,507	Education and Training
Pemakaian Persediaan	33,248,390	27,034,450	Inventory Usage
Air, Listrik dan Gas	19,859,858	33,819,851	Water, Electricity and Gas
Aset Dibiayakan	18,301,759	30,157,967	Financed Assets
Penyusutan (Catatan 17 dan 18)	15,382,233	8,590,019	Depreciation (Note 17 and 18)
Pemeliharaan	6,326,201	16,264,923	Maintenance
Lain-lain	282,409,013	276,839,812	Others
Total	2,653,238,396	3,719,845,907	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

38. Pendapatan Lain-Lain

38. Other Income

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Pembalikan Beban Akrua	252,467,733	27,626,641	Reversal of Accrued Expense
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai	221,178,890	79,656,930	Impairment Reserve Recovery
Laba Penjualan Aset Tetap (Catatan 18)	20,130,941	14,477,092	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 18)
Denda	11,753,236	12,511,406	Penalty
Laba Selisih Kurs	5,557,572	6,259,261	Profit on Foreign Exchange
Lelang	1,571,677	--	Auction
Pendapatan atas Penghapusan Utang	1,101,357	7,410,209	Income on Debt Elimination
Klaim Asuransi	980,933	2,134,730	Insurance Claim
Keuntungan Modifikasi Kontrak Sewa	--	15,872,107	Gain on Lease Contract Modification
Pendapatan atas Ganti Rugi Tenant	--	13,138,578	Income on Tenant Compensation
Pendapatan atas Pengelolaan Wisma Atlet	--	7,908,001	Income on Athlete Village Management
Lain-lain	232,652,860	146,660,213	Others
Total	747,395,199	333,655,168	Total

39. Beban Lain-Lain

39. Other Expenses

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban TJSL	30,807,537	55,995,060	TJSL Expense
Penurunan Nilai Aset Tetap	19,687,874	8,266,082	Impairment of Fixed Assets
Beban Asuransi Pensiunan	9,457,200	7,970,000	Retired Employees Insurance Expense
Beban dokter jaga	2,731,333	3,160,000	Doctor Expense
Sanksi Denda	1,235,497	6,594,731	Penalty Sanctions
Sumbangan	1,056,205	948,724	Donation
Penghapusan PPN Masukan	--	61,440,975	Write off of VAT In
Beban Ganti Rugi Sewa	--	22,732,500	Rent Compensation Expense
Konsultan Holding	--	5,043,500	Holding Consultant
Lain-lain	144,795,420	171,759,846	Others
Total	209,771,066	343,911,418	Total

40. Pendapatan Keuangan

40. Financial Income

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Keuntungan Restrukturisasi Pinjaman	311,588,936	--	Gain on Loan Restructuring
Bunga Jasa Giro	66,291,588	46,235,336	Giro Service Interest
Bunga Deposito	23,036,557	27,295,758	Time Deposit Interest
Bunga Obligasi dan Reksadana	8,386,547	10,258,515	Bonds and Mutual Funds Interest
Bunga Pinjaman	767,761	131,793	Loan Interest
Total	410,071,389	83,921,402	Total

41. Beban Keuangan

41. Financial Expense

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Beban Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi	2,765,826,375	2,709,597,982	Bank Loans and Bonds Interest Expense
Beban Bunga Liabilitas Sewa	94,960,792	57,920,377	Interest on Lease Liabilities
Beban Pendanaan	20,342,278	--	Financing Expenses
Beban Administrasi Bank	14,556,532	10,352,850	Bank Administrative Expense
Lain-lain	5,325,828	2,926,803	Others
Total	2,901,011,805	2,780,798,012	Total

42. Rugi Operasi yang Dihentikan

Berdasarkan Akta Notaris No.189 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelepasan hak atas 79% kepemilikan saham HIN di PT Hotel Indonesia Properti kepada PT Wijaya Karya Realty dengan nilai akuisisi Rp1.755.999.882. Serta berdasarkan akta No.190 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelepasan hak atas 20% kepemilikan saham HIN di PT Hotel Indonesia Properti kepada PT Wijaya Karya Realty dengan nilai akuisisi Rp439.998.887.

	2021 Rp
Pendapatan	58,035,287
Beban Pokok Pendapatan	(36,758,330)
Laba Kotor dari Operasi yang Dihentikan	21,276,957
Beban Usaha	(76,800,352)
Rugi Usaha dari Operasi yang Dihentikan	(55,523,395)
Beban Lain-lain	(29,040,610)
Rugi Sebelum Pajak dari Operasi yang Dihentikan	(84,564,005)
Manfaat Pajak Penghasilan	447,855
Rugi Setelah Pajak dari Operasi yang Dihentikan	(84,116,150)
Pendapatan Komprehensif Lain	--
Rugi Komprehensif Lain dari Operasi yang Dihentikan	(84,116,150)

42. Loss of Discontinued Operations

Based on Notarial Deed No.189 dated September 30, 2021 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in connection with the opening of the rights to 79% share ownership of HIN in PT Hotel Indonesia Properti to PT Wijaya Karya Realty with a value of acquisition of Rp1,755,999,882. And based on deed No.190 dated September 30, 2021 from Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in connection with the disclosure of the rights to 20% ownership of HIN in PT Hotel Indonesia Properti to PT Wijaya Karya Realty with acquisition value Rp439,999,887.

	Revenues
	Cost of Revenues
	Gross Profit from Discontinued Operations
	Operating expenses
	Loss from Discontinued Operations
	Other Expenses
	Loss Before Tax from Discontinued Operations
	Income Tax Benefit
	After-Tax Loss from Discontinued Operations
	Other Comprehensive Income
	Other Comprehensive Loss from Discontinued Operations

43. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

a. Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of The Republic of Indonesia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang Saham/ Shareholders Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank KB Bukopin Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities

43. Transaction With Related Parties

a. Nature of Relationship

Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Setoran Saham/ Share Capital
Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Account Receivables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Account Receivables/ Banking Services, Account Receivables, Account Payables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Account Receivables, Other Receivables, Account Payables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Account Receivables, Other Receivables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Pendapatan/ Revenues
Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues
Pendapatan/ Revenues
Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ Banking Services, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Jasa Perbankan/ Banking Services
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Citilink Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Aerofood Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Other Receivables, Revenues
PT Merpati Nusantara Airlines	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Railink	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha/ Account Receivables, Account Payables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Other Payables, Revenues
PT Propernas Griya Utama	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Aero Wisata	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Yapro Artha Perdana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PP KSO	Kerjasama Operasi/ Joint Operation	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Pertamina (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Perum LPPNPI	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Beban Akrua/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Accrued Expenses
PT Merpati Maintenance Facility	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Perum DAMRI	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Revenues
PT Pertamina Bina Medika IHC	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Pendapatan/ Account Receivables, Revenues
PT Antam (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Other Payables, Revenues
PT Utama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues
PT ITDC Nusantara Utilitas	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
Kementerian Perhubungan/ Ministry of Transportation	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Lain-lain/ Account Receivables, Other Payables
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha/ Account Receivables
PT Sariarthamas Hotel Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Percetakan Negara RI (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Perum Produksi Film Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Jasa Raharja Putera	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Kementerian Sekretariat Negara RI/ Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Pelita Air Service (PAS)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Pendapatan/ Account Payables, Revenues
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain, Utang Usaha/ Other Receivable, Account Payable
Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko	Entitas Sepengendali/ Entities Under Common Control	Utang Usaha/ Account Payables
PT PP Urban	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Aero System Indonesia Konstruksi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Payables, Other Payables, Revenues
PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ Account Payables, Other Payables, Revenues
PT Yodya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Utang Lain-lain/ Account Payables, Other Payables
PT Kimia Farma Apotek	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PDAM Tirta Mangutama	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
BPJS Kesehatan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Pendapatan/ Account Payables, Revenues
PT Taspen (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Berdikari Meubel Nusantara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha, Utang Lain-lain/ Account Payables, Other Payables
BPJS Ketenagakerjaan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Usaha/ Account Payables
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ Account Receivable, Account Payables, Revenues
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Lain-lain/ Other Payables
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Lain-lain/ Other Payables, Beban Akrua/ Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ Accrued Expenses, Short- Term Bank and Other Financial Institution Loans
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Lain-lain/ Other Payables
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Lain-lain/ Other Payables
PT Kadomas Aviasindo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Lain-lain/ Other Payables
PT Pratama Persada Airborne	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Beban Akrua/ Accrued Expenses
PT Inaca	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Beban Akrua/ Accrued Expenses, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha dan Pendapatan/ Account Receivable and Revenues
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Wijaya Karya Realty	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues
PT Badak Natural Gas Liquefaction	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Pendapatan/ Revenues

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

b. Transaction with Related Parties

In the normal course of business, Group entered into transactions with related parties.

	2022 Rp	2021 Rp	
Bank			Cash in Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,118,373,203	702,183,977	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	283,947,244	546,978,977	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	444,218,990	545,834,425	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	395,846,773	373,806,488	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	192,695,896	217,629,658	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	<u>2,435,082,106</u>	<u>2,386,433,525</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	161,802,498	163,536,633	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,313,158	18,834,424	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,168,692	1,061,532	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	314,359	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	<u>183,284,348</u>	<u>183,746,948</u>	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,540	119,270	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	27,637	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>15,540</u>	<u>146,907</u>	
Euro			Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,061	21,270	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>22,061</u>	<u>21,270</u>	
Subtotal	2,618,404,055	2,570,348,650	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Deposito Berjangka			Time Deposits
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	540,200,000	161,084,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	520,800,000	112,800,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	454,254,760	369,461,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	410,475,000	176,500,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20,000,000	--	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	--	5,000,000	PT Bank Mandiri Taspen
	1,945,729,760	824,845,000	
Total Kas dan Setara Kas	4,564,133,815	3,395,193,650	Total Cash and Cash Equivalent
Persentase Terhadap Total Aset	4.82%	3.59%	Percentage to Total Assets
	2022 Rp	2021 Rp	
Piutang Usaha			Account Receivables
Lancar			Current
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	214,864,379	160,944,260	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
PT Citilink Indonesia	206,800,477	265,221,868	PT Citilink Indonesia
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	188,196,535	1,502,545,845	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Merpati Nusantara Airlines	56,867,036	56,460,446	PT Merpati Nusantara Airlines
PT Railink	52,268,266	22,530,000	PT Railink
PT Pertamina Patra Niaga	40,399,882	62,741,672	PT Pertamina Patra Niaga
PT Aerofood Indonesia	29,424,815	116,506,799	PT Aerofood Indonesia
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	17,534,000	--	PT Purantara Mitra Angkasa Dua
PT Percetakan Negara RI (Persero)	9,647,587	9,647,587	PT Percetakan Negara RI (Persero)
PT Telekomunikasi Seluler	8,745,640	1,907,484	PT Telekomunikasi Seluler
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,366,000	5,023,333	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,743,241	1,886,617	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,139,578	10,310,558	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Merpati Maintenance Facility	3,883,664	--	PT Merpati Maintenance Facility
PP KSO	3,449,291	1,418,019	PP KSO
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,039,000	4,022,083	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Aero Wisata	1,234,275	1,965,510	PT Aero Wisata
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	740,228	1,977,506	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20,495	1,737,834	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	15,750	706,915	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	850	15,750	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	7,126,311	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	--	4,441,278	Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)
PT Propernas Griya Utama	--	2,405,306	PT Propernas Griya Utama
PT Yapro Artha Perdana	--	1,858,833	PT Yapro Artha Perdana
Instansi Pemerintah	--	1,749,324	Instansi Pemerintah
PT Pertamina (Persero)	--	1,330,723	PT Pertamina (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	1,122,217	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Perum LPPNPI	--	827,418	Perum LPPNPI
PT Nindya Karya (Persero)	--	810,865	PT Nindya Karya (Persero)
Perum DAMRI	--	595,313	Perum DAMRI
PT Pertamina Bina Medika IHC	--	570,048	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Antam (Persero) Tbk	--	496,065	PT Antam (Persero) Tbk
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	--	463,549	PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	376,994	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Hutama Karya (Persero)	--	361,214	PT Hutama Karya (Persero)
PT ITDC Nusantara Utilitas	--	306,130	PT ITDC Nusantara Utilitas
Kementerian Perhubungan	--	279,382	Kementerian Perhubungan
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	--	255,082	PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	--	126,314	PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk
Lain-lain	44,436,097	39,801,543	Others
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(154,856,294)	(1,716,222,260)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	746,960,792	576,651,735	Subtotal

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Tidak Lancar			Non-Current
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1,435,604,027	--	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Aerofood Indonesia	121,212,971	--	PT Aerofood Indonesia
PT Barata Indonesia (Persero)	14,236,550	--	PT Barata Indonesia (Persero)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,329,023,476)	--	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	242,030,072	--	Subtotal
Total Piutang Usaha	988,990,864	576,651,735	Total Account Receivables
Persentase Terhadap Total Aset	1.04%	0.61%	Percentage to Total Assets
Piutang Lain-lain			Other Receivables
PT Railink	17,897,362	--	PT Railink
PT Sariarthamas Hotel Indonesia	15,000,000	15,000,000	PT Sariarthamas Hotel Indonesia
Kementerian Sekretariat Negara RI	8,787,633	2,284,282	Kementerian Sekretariat Negara RI
Perum Produksi Film Negara (Persero)	4,545,455	4,545,455	Perum Produksi Film Negara (Persero)
PT Jasa Raharja Putera	1,425,000	2,275,000	PT Jasa Raharja Putera
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	1,146,981	--	PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	857,469	857,469	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	532,219	--	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	87,719	87,719	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina Patra Niaga	55,000	55,000	PT Pertamina Patra Niaga
PT Percetakan Negara RI (Persero)	--	9,647,587	PT Percetakan Negara RI (Persero)
Lain-lain	9,679,934	26,119,000	Others
Total Piutang Lain-lain	60,014,772	60,871,512	Total Other Receivables
Persentase Terhadap Total Aset	0.06%	0.06%	Percentage to Total Assets
	2022 Rp	2021 Rp	
Utang Usaha			Account Payables
PT Waskita Karya (Persero)	100,609,479	18,285,219	PT Waskita Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	89,206,307	29,651,818	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	82,914,453	13,643,000	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero)	75,290,581	--	PT Adhi Karya (Persero)
PT Nindya Karya	23,994,024	17,516,886	PT Nindya Karya
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	12,052,563	--	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	5,129,000	2,874,612	Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)
PT Berdikari Meubel Nusantara	3,647,876	--	PT Berdikari Meubel Nusantara
PT Pelita Air Service (PAS)	3,274,804	14,648,505	PT Pelita Air Service (PAS)
PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	2,594,574	6,561,000	PT Garuda Daya Pratama Sejahtera
Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko	777,002	8,145,167	Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
PT Jasa Raharja (Persero)	659,793	21,845	PT Jasa Raharja (Persero)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	514,364	514,364	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
BPJS Ketenagakerjaan	123,936	--	BPJS Ketenagakerjaan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	74,737	--	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
BPJS Kesehatan	49,501	254,917	BPJS Kesehatan
PT Utama Karya (Persero)	--	22,229,299	PT Utama Karya (Persero)
PT PP Urban	--	7,200,000	PT PP Urban
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	--	7,035,258	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Aero System Indonesia Konstruksi	--	6,992,000	PT Aero System Indonesia Konstruksi
PT Asuransi Jasa Indonesia	--	6,794,714	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Sucofindo (Persero)	--	3,215,727	PT Sucofindo (Persero)
PT Amarta Karya (Persero)	--	2,550,047	PT Amarta Karya (Persero)
PT Garuda Maintenance Facility Aerosia Tbk	--	1,718,000	PT Garuda Maintenance Facility Aerosia Tbk
PT Yodya Karya (Persero)	--	1,145,373	PT Yodya Karya (Persero)
PT Kimia Farma Apotek	--	972,055	PT Kimia Farma Apotek
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	592,900	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PDAM Tirta Mangutama	--	293,412	PDAM Tirta Mangutama

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp
Utang Usaha		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	200,000
PT Pos Indonesia (Persero)	--	109,940
PT Taspen (Persero)	--	109,451
Perum DAMRI	--	109,099
PT Telekomunikasi Seluler	--	108,165
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	--	97,200
Lain-lain	14,672,193	10,517,550
Total Utang Usaha	415,585,187	184,107,523
Persentase Terhadap Total Liabilitas	0.70%	0.32%
Utang Lain-lain		
PT Utama Karya (Persero)	84,404,032	37,323,376
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	58,785,518	159,206,571
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	48,364,579	287,793,189
PT PP (Persero) Tbk	22,940,306	91,530,957
PT Nindya Karya	14,953,569	67,303,892
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14,400,430	147,210,722
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	11,995,546	15,302,649
PT Amarta Karya (Persero)	8,980,953	11,440,098
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	3,672,439	15,073,024
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3,554,007	5,945,374
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,963,618	2,734,937
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	1,815,021	2,543,202
PT Surveyor Indonesia (Persero)	982,808	915,372
PT Yodya Karya (Persero) Tbk	500,919	4,444,509
PT Kadomas Aviasindo	430,091	430,091
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	--	15,525,233
Lain-lain	9,487,518	1,476,648
Total Utang Lain-lain	289,231,354	866,199,845
Persentase Terhadap Total Liabilitas	0.49%	1.48%
	2022 Rp	2021 Rp
Beban Akruai		
PT Pratama Persada Airborne	654,890	654,890
PT Inaca	24,000	24,000
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	--	650,776
Total Beban Akruai	678,890	1,329,666
Persentase Terhadap Total Liabilitas	0.00%	0.00%
Utang Bank Jangka Pendek		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	788,946,344	801,596,344
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33,839,000	39,560,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,130,760	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72,840,958	381,089,500
Total Utang Bank Jangka Pendek	899,757,062	1,222,245,844
Persentase Terhadap Total Liabilitas	1.52%	2.10%
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,758,221,365	7,143,243,825
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	6,119,130,833	5,195,415,691
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,826,028,720	4,756,793,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,161,757,042	2,189,811,222
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,551,694,076	1,597,170,707
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,542,241,834	1,461,332,216
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,166,799,016	1,297,941,000
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	795,075,345	1,138,053,737
Total	25,920,948,231	24,779,761,398
Persentase Terhadap Total Liabilitas	43.67%	42.48%

Account Payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Taspen (Persero)
Perum DAMRI
PT Telekomunikasi Seluler
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Others
Total Account Payables
Percentage to Total Liabilities
Other Payables
PT Utama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
PT Nindya Karya
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Amarta Karya (Persero)
PT Istaka Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Yodya Karya (Persero) Tbk
PT Kadomas Aviasindo
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Lain-lain
Total Other Payables
Percentage to Total Liabilities
Accrued Expenses
PT Pratama Persada Airborne
PT Inaca
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Total Accrued Expenses
Percentage to Total Liabilities
Short-Term Bank Loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Short-Term Bank Loan
Percentage to Total Liabilities
Bank Loan and Other Financial Institutions
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk
Total
Percentage to Total Liabilities

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan Usaha			Revenues
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1,272,405,651	967,111,870	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	716,522,286	637,848,962	PT Citilink Indonesia
PT Pertamina Patra Niaga	206,982,563	53,242,932	PT Pertamina Patra Niaga
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	96,581,854	98,143,571	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
PT Aerofood Indonesia	63,340,054	54,075,856	PT Aerofood Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54,908,319	38,942,567	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Pelita Air Service (PAS)	46,850,317	2,502,395	PT Pelita Air Service (PAS)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45,282,853	42,378,991	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	44,636,699	32,059,378	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pos Logistik Indonesia	29,545,055	39,271,312	PT Pos Logistik Indonesia
Perum LPPNPI	24,581,478	28,022,297	Perum LPPNPI
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	11,175,128	10,462,671	PT Purantara Mitra Angkasa Dua
PT Pertamina (Persero)	5,809,645	96,728,572	PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Seluler	3,591,619	18,594,818	PT Telekomunikasi Seluler
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,581,617	937,964	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Hutama Karya (Persero)	2,544,348	397,091	PT Hutama Karya (Persero)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,678,766	121,000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Perum DAMRI	1,422,624	1,205,580	Perum DAMRI
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	987,564	2,469,237	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Realty	984,493	2,288,520	PT Wijaya Karya Realty
PT Pertamina Bina Medika IHC	486,688	3,719,654	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	309,334	240,398	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	236,702	35,160	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pupuk Kalimantan Timur	93,063	92,568	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	89,462	4,761,157	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Badak Natural Gas Liquefaction	70,049	77,876	(formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	67,548	342,722	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	101,248	790,476	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	--	631,797	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Bank KB Bukopin Tbk	--	275,100	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Aero Wisata	--	111,084	PT Aero Wisata
PT Asuransi Jasa Indonesia	--	3,600	PT Asuransi Jasa Indonesia
Lain-lain	163,354,803	19,365,103	Lain-lain
Total Pendapatan Usaha	2,797,221,830	2,157,252,280	Total Revenues
Persentase Terhadap Total Pendapatan	18.05%	22.16%	Percentage to Total Revenues

Kompensasi Personil Manajemen Kunci

Total manfaat yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp24.805.906 dan Rp4.163.215 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit).

**Key Management Personnel
Compensation**

Total benefits paid by the Company for the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp24,805,906 and Rp4,163,215 for the years ended December 31, 2022 and 2021 respectively (unaudited).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

44. Informasi Segmen Operasi

44. Operation Segmen Operation

	2022					
	Aviasi/ Aviation Rp	Jasa dan Perdagangan Umum/ Services and Trading Rp	Pariwisata Lainnya/ Other Tourism Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Total Rp	
PENDAPATAN	14,381,023,158	840,615,109	415,158,289	(138,261,764)	15,498,534,792	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8,361,644,891)	(688,077,518)	(200,809,941)	133,461,764	(9,117,070,586)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	6,019,378,267	152,537,591	214,348,348	(4,800,000)	6,381,464,206	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	(2,871,086,970)	(13,112,865)	(35,826,839)	--	(2,920,026,674)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(2,222,838,174)	(120,083,694)	(313,785,686)	3,469,158	(2,653,238,396)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	(208,143,066)	(1,811,167)	(1,007,736,091)	1,007,919,258	(209,771,066)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	732,730,947	6,348,464	17,205,568	(8,889,780)	747,395,199	Other Income
LABA USAHA	1,450,041,004	23,878,329	(1,125,794,700)	997,698,636	1,345,823,269	OPERATING GAIN
Pendapatan Keuangan	404,951,057	362,323	4,758,009	--	410,071,389	Finance Income
Beban Keuangan	(2,816,388,337)	(54,359,403)	(30,264,065)	--	(2,901,011,805)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(146,494,382)	(10,515,764)	(10,904,391)	(4,519,790)	(172,434,327)	Equity Loss of Associates Entities
Pajak Final	(177,798,363)	--	--	--	(177,798,363)	Final Tax
RUGI SEBELUM	(1,285,689,021)	(40,634,515)	(1,162,205,147)	993,178,846	(1,495,349,837)	LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN BADAN	553,345,583	14,576,593	13,600,703	--	581,522,879	CORPORATE INCOME TAX
Manfaat Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	Income Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH	(732,343,438)	(26,057,922)	(1,148,604,444)	993,178,846	(913,826,958)	LOSS FOR THE YEAR AFTER
EFEK PENYESUAIAN PROFORMA						EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(147,573,685)	(7,750,245)	905,626,180	(905,336,745)	(155,034,495)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH	(879,917,123)	(33,808,167)	(242,978,264)	87,842,101	(1,068,861,453)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER
Aset Segmen	83,489,521,346	1,439,262,472	46,235,479,835	(36,500,372,395)	94,663,891,258	Segment Assets
Liabilitas Segmen	56,608,645,956	1,409,120,595	15,418,880,111	(14,076,326,087)	59,360,320,575	Segment Liabilities

	2021					
	Aviasi/ Aviation Rp	Jasa dan Perdagangan Umum/ Services and Trading Rp	Pariwisata Lainnya/ Other Tourism Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Total Rp	
PENDAPATAN	8,652,601,458	956,002,840	174,112,207	(49,882,921)	9,732,833,584	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7,723,007,214)	(904,765,297)	(182,630,851)	49,882,921	(8,760,520,441)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	929,594,244	51,237,543	(8,518,644)	--	972,313,143	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	(2,696,016,015)	(3,617,190)	(24,272,323)	--	(2,723,905,528)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(3,338,764,491)	(121,593,833)	(246,715,357)	(12,772,226)	(3,719,845,907)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	(262,634,206)	(9,102,891)	(43,599,102)	(28,575,219)	(343,911,418)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	293,745,528	20,671,214	19,238,426	--	333,655,168	Other Income
RUGI USAHA	(5,074,074,940)	(62,405,157)	(303,867,000)	(41,347,445)	(5,481,694,542)	OPERATING LOSS
Pendapatan Keuangan	81,095,196	412,545	2,413,661	--	83,921,402	Finance Income
Beban Keuangan	(2,757,802,033)	(5,162,272)	(17,833,707)	--	(2,780,798,012)	Finance Costs
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(149,635,777)	(16,762,227)	(4,097,056)	39,016,912	(131,478,148)	Equity Loss of Associates Entities
Rugi Operasi yang Dihentikan	--	--	(84,116,150)	--	(84,116,150)	Loss of Discontinued Operations
Pajak Final	(162,275,156)	--	--	--	(162,275,156)	Final Tax
RUGI SEBELUM	(8,062,692,710)	(83,917,111)	(407,500,252)	(2,330,533)	(8,556,440,606)	LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN BADAN	981,319,570	13,907,651	25,049,174	--	1,020,276,395	CORPORATE INCOME TAX
Manfaat Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	Income Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH	(7,081,373,140)	(70,009,460)	(382,451,078)	(2,330,533)	(7,536,164,211)	LOSS FOR THE YEAR AFTER
EFEK PENYESUAIAN PROFORMA						EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT
RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(25,173,750)	(876,582)	2,861,299	--	(23,189,033)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH	(7,106,546,890)	(70,886,042)	(379,589,779)	(2,330,533)	(7,559,353,244)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR YEAR AFTER
Aset Segmen	84,391,575,784	514,231,153	46,103,552,160	(36,471,544,549)	94,537,814,548	Segment Assets
Liabilitas Segmen	56,815,611,411	438,049,316	11,669,820,513	(10,585,498,812)	58,337,982,428	Segment Liabilities

45. Perjanjian-Perjanjian Penting

45. Significant Agreements

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pada tanggal 15 Desember 2015, AP I mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 dan No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Perjanjian Konsesi).

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation

On December 15, 2015, AP I entered into an agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP I to conduct airport services as stated in agreement No. HK.201/2/8/DRJU.kum-2015 and No. SP.333/HK.06.03/2015/DU (Concession Agreement).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

DJPU memberikan hak kepada AP I melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut, antara lain:

- AP I diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan AP I, setelah AP I mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

DJPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Konsesi berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang.

Pada tahun 2022, AP I mencatat besaran untuk konsesi untuk tahun 2022 sebesar 1% dari pendapatan jasa kebandarudaraan berdasarkan proposal yang disepakati oleh AP I dan AP II yang telah diajukan ke Kementerian Perhubungan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan perjanjian dan persetujuan proposal tersebut masih dalam proses.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

DJPU granted the right to AP I to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass for the provision and/or development of:

- *Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;*
- *Terminal facilities for passenger transport services, cargo, and mail;*
- *Electronic facilities, electricity, water, and waste disposal installations; and*
- *Areas for the building, grounds, and industry as well as buildings provided to support air transportation.*

Important conditions in the Concession Agreement, among others, are as follows:

- *AP I is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% from revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years.*
- *The Concession Agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the Concession Agreement is signed, and extended for 30 years as agreed by DJPU and AP I, after AP I received approval from Shareholders General Meeting.*

DJPU has the authority to supervise and control the implementation of the Concession based on Concession Agreement in accordance with its authority which is regulated by the Law.

In 2022, AP I recognized concession fee for the year 2022 of 1% of airport service revenue based on a proposal agreed upon by AP1 and AP2 that has been submitted to the Ministr of Transportation. Up until the date of completion of the consolidated financial statements, the extension of the agreement and approval of those proposal is still in process.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran tagihan tersebut di atas, AP I telah membayar denda sebesar Rp33.586.076 pada tanggal 1 Juli 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, AP I mencatat akrual beban konsesi masing-masing sebesar Rp209.295.910 dan Rp287.070.364.

- b) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani

Pada tanggal 17 Juni 2014, AP I dan TNI AD menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian tanah Milik TNI AD di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip prinsip korporasi.

Ruang lingkup kerjasama adalah:

- Pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 m² dimana tanah seluas 676.089 m² akan digunakan untuk areal pengembangan bandar udara dan tanah seluas 208.411 m² akan digunakan untuk areal resapan pada sisi utara areal pengembangan bandar udara.
- Pembayaran kontribusi kepada negara oleh AP I berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.
- Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh AP I kepada TNI AD setelah perjanjian berakhir yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP I akan diserahkan kepada TNI AD.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

In relation with the late payment of the invoice as stated above, AP I has paid the penalty amount of Rp33,586,076 on July 1, 2022.

On December 31, 2022 and 2021, AP I has recorded accrued concession expense amounted to Rp209,295,910 and Rp287,070,364, respectively.

- b) Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport*

On June 17, 2014 AP I and TNI AD signed into cooperation agreement utilization of some of the land owned by TNI AD in Ahmad Yani International Airport for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement has the sole purpose to enable the development of facilities and infrastructure Ahmad Yani International Airport in Semarang for civil aviation and military aviation with the principles of the corporation.

The scope of cooperation are:

- *The utilization of land owned by TNI AD area of 885,500 sqm where the land of 676,089 sqm will be used for airport development area and the land of 208,411 sqm will be used for recharge areas on the north side of the airport development area.*
- *Payment of contributions to the country by AP I is in the form of fixed contributions and profit sharing on land use.*
- *Assets obtained from this utilization cooperation will be handed over by AP I to TNI AD after the agreement ends which is stated in the minutes of handover.*

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP I will be handed over to TNI AD.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP I dikenakan kontribusi tetap kepada negara atas pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut yakni sebesar 0,6% dari nilai wajar tanah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan atau sebesar 0,6% x Rp219.471.288 yakni Rp1.316.827. Dimana diasumsikan kenaikan nilai tanah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebesar 4,14% setiap tahun. Selain itu juga terdapat pembagian keuntungan sebesar 12,29% dari arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi per tahun. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi Bandara International Ahmad Yani Semarang masing-masing adalah arus kas negatif Rp55.660.844 dan arus kas negatif Rp35.831.522.

- c) Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

Pada tanggal 13 Februari 2014, AP I dan TNI AL menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dan fasilitas milik TNI AL di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan TNI AL.

Objek perjanjian kerjasama ini adalah tanah seluas 3.143.352 m² beserta fasilitas di atasnya milik TNI AL yang akan dimanfaatkan oleh AP I.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP I akan diserahkan kepada TNI AL. AP I diwajibkan melaksanakan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanah beserta fasilitasnya dari hasil pembangunan dan pengembangan Terminal 2 Bandara.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP I is subject to a fixed contribution to the state for the utilization of the land belonging to the Indonesian Army, which is 0.6% of the fair value of the land that is the object of the joint utilization or 0.6% x Rp219,471,288, which is Rp1,316,827. Where it is assumed that the increase in land value which is the object of the Utilization Cooperation (KSP) is 4.14% every year. In addition, there is also a profit sharing of 12.29% of the net cash flow from operating and investing activities per year. For the years ended December 31, 2022 and 2021, the net cash flows from operating and investment activities at Ahmad Yani International Airport Semarang were negative cash flows of Rp55,660,844 and negative cash flows of Rp35,831,522, respectively.

- c) Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (TNI AL) Juanda International Airport in Surabaya

On February 13, 2014, AP I and TNI AL signed into cooperation agreement utilization of and facilities owned by TNI AL in International Airport Juanda Surabaya for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement intended to carry out the development of Juanda International Airport for the benefit of civil aviation and aviation Indonesian Navy.

The object of this cooperation agreement is an area of 3,143,352 sqm and the facilities on it owned by TNI AL which will be utilized by AP I.

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP I will be handed over to TNI AL. AP I is required to pay fixed contribution and profit sharing from land use and its facilities from the results of the construction and development of Airport Terminal 2.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d) Perjanjian jasa kontruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Surabaya Internasional Juanda

Pada tanggal 4 Juli 2019, AP I dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003930 untuk melakukan perluasan dan pembenahan interior gedung terminal 1 dan fasilitas penunjangnya di Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan addendum terakhir, yaitu addendum II Nomor : 253-AD/4700019318/PL.02/2021 tanggal 16 April 2021 dengan nilai kontrak termasuk addendum sebesar Rp770.358.053 (termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian selama 420 hari terhitung sejak 4 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020 dan diperpanjang hingga tanggal 30 Agustus 2021. Pada Tanggal 31 Desember 2021, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 100% dari keseluruhan pekerjaan.

- e) Perjanjian jasa kontruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Pada tanggal 19 Maret 2019, AP I dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa No. PJKP-19003608 untuk melakukan konstruksi dan pengembangan gedung terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.666.418.700 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 27 Februari 2019 sampai dengan 11 Mei 2021 dan sudah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2022. Pada tanggal 28 September 2022, terdapat addendum nilai kontrak sehubungan peningkatan pajak dari 10% ke 11%. Pada tanggal 31 Desember 2022, persentase penyelesaian atas pengerjaan konstruksi tersebut telah mencapai 65,06% dari keseluruhan pekerjaan.

- f) Perjanjian dengan PT Angkasa Pura Propertindo ("APP")

- Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 12.000 m² di Sunset Road Bali antara AP I dengan APP

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d) Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Juanda International Airport Surabaya

On July 4, 2019, AP I and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. signed a construction service agreement No. PJKP- 19003930 to expand and revamp terminal building and its supporting facilities of Juanda International Airport Surabaya with the last addendum, namely addendum II Number : 253-AD/4700019318/PL.02/2021 dated April 16, 2021 with a contract value including an addendum of Rp770,358,053 (including VAT). The agreement period is 420 days from July 4, 2019 to August 26, 2020 and is extended until August 30, 2021. As of December 31, 2021, the percentage of completion of the construction has reached 100% from total construction.

- e) Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar

On March 19, 2019, AP I and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. signed construction service agreement No. PJKP19003608 to construct and develop terminal building and its supporting facilities of Sultan Hasanuddin Airport Makassar with contract value of Rp2,666,418,700 (include VAT). The term of the agreement started on February 27, 2019 until May 11, 2021 and has ended on October 24, 2022. On September 28, 2022, there is an addendum to the contract value in connection with the increase in taxes from 10% to 11%. As of Desember 31, 2022, the percentage of completion of the construction has reached 65.06% from total construction.

- f) Agreements with PT Angkasa Pura Propertindo ("APP")

- Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 12,000 m² in Sunset Road Bali between AP I and APP

Pada tanggal 19 September 2012, AP I dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No.SP/96.HK.06.03/ 2012/DU dan No. APP.001/PKS/2012/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 12.000 m² di Sunset Road Bali dimana tanah milik AP I akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan dengan kompensasi yang akan diterima AP I adalah sebesar Rp39.168.000.

- Perjanjian kerjasama tentang bangun guna serah (BOT) atas tanah seluas 16.386 m² di Sunset Road Bali antara AP I dan APP

Pada tanggal 4 Agustus 2014, AP I dan APP menandatangani perjanjian kerjasama No. SP.187/KB.03.02/2014/PD dan No. APP. 001/PKS/2014/DU tentang bangun serah guna (BOT) atas tanah seluas 16.386 m² di Sunset Road Bali dimana tanah milik AP I akan diserahkan kepada APP untuk dibangun kondotel, vilatel, area komersial dan fasilitas penunjang yang selanjutnya dikelola dan diusahakan oleh APP.

Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan sejak tanggal 4 Agustus 2014. Kompensasi yang akan diterima AP I adalah sebesar Rp54.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 September 2020, perjanjian kerjasama tersebut telah diakhiri tanggal 30 September 2020 dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh APP kepada AP I sebesar Rp5.400.000.

- g) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Sentani

Pada tanggal 13 Oktober 2019, AP I dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 dan SP.314/HK.09.01/2019/DU. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

On September 19, 2012, AP I and APP signed into cooperation agreement No.SP/96.HK.06.03/2012/DU and No. APP.001/PKS/2012/DU regarding the use of building (BOT) on land of 12,000 sqm on Sunset Road Bali where AP I's land will be handed over to APP to build condotels and supporting facilities which managed by APP. The period of the cooperation agreement is 32 (thirty two) years with 6 (six) months of preparation with the compensation to be received by AP I amounting to Rp39,168,000.

- *Cooperation agreement on build operation transfer (BOT) on land covering an area of 16,386 m² in Sunset Road Bali between AP I and APP*

On August 4, 2014, AP I and APP signed into cooperation agreement No. SP.187/KB.03.02/ 2014/PD and No. APP. 001/PKS/2014/DU regarding the use of building (BOT) on area of 16,386 sqm on Sunset Road Bali where AP I's land will be handed over to APP to build condotel, vilatel, commercial areas and supporting facilities which are managed by APP.

The term of this agreement is 32 (thirty two) years with 6 (six) months from the date of preparation of August 4, 2014. Compensation for AP I amounted Rp54,000,000.

Based on Minutes of Agreement dated September 28, 2020, the agreement was terminated on September 30, 2020 with the compensation to be paid by APP to AP I amounted to Rp5,400,000.

- g) *Cooperation Agreement of Utilization of Sentani Airport*

On October 13, 2019, AP I and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Main Class I Sentani Airport Jayapura No. HK.201/0027/KUM/BRJU/X/2019 and SP.314/HK.09.01/2019/DU. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Sentani Jayapura sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap (Catatan 10) dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Sentani Jayapura sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Sentani Jayapura dari AP I kepada Dephub.

AP I dikenakan kontribusi tetap tahun pertama sebesar Rp10.206.694 dengan kenaikan sebesar 3,60% setiap tahun serta pembagian keuntungan sebesar 7,43% dari pendapatan per tahun apabila BMN yang menjadi objek KSP telah menghasilkan keuntungan.

Sehubungan dengan penurunan kinerja keuangan akibat pandemi Covid-19, AP I mengajukan permohonan keringanan kontribusi tetap atas KSP Bandara Sentani, dimana AP I telah mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan keringanan kontribusi tetap sebesar 50% untuk tahun 2022 dan 2023.

Pada tanggal 18 Maret 2022, AP I telah melakukan pembayaran kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp5.477.848.

- h) Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Kediri

Pada tanggal 26 Oktober 2020, AP I dan PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam) menandatangani Perjanjian Induk tentang Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek KPBU Bandar Udara Kediri dimana kerjasama akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- Tahap penetapan badan usaha pemrakarsa dan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP);
- Tahap pembangunan dan pengelolaan bandar udara Kediri.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Manage and optimize provision and development of Sentani Airport Jayapura as the result increase its role in developing the economy activities.*
- *Provide permanent contribution (Note 10) and profit sharing for management of Sentani Airport Jayapura as non-tax state revenue (PNBP).*
- *Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Sentani Airport Jayapura from AP I to Dephub.*

AP I is subject to a fixed contribution in first year amounted Rp10,206,694 with an annual increase of 3.60% as well as a profit sharing of 7.43% of annual revenue if BMN as the KSP object has made a profit.

In connection with the decline in financial performance due to the Covid-19 pandemic, AP I applied for permanent contribution relief for the Sentani Airport KSP, where AP I has obtained approval to obtain a fixed contribution relief of 50% for 2022 and 2023.

On March 18, 2021, AP I has paid the second year fixed contribution amounting to Rp5,477,848.

- h) *Cooperation Agreement of Support and Operation of Government and Business Entity Cooperation Project (KPBU) Kediri Airport*

On October 26, 2020, AP I and PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam) signed a Master Agreement regarding the Cooperation Agreement for Providing Support and Operation of Kediri Airport KPBU Project, whereas the cooperation will be carried out in 2 (two) stages:

- *The appointment stage of the initiating business entity and the procurement of the Implementation Business Entity (BUP);*
- *The construction and operation stage of Kediri airport.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Atas kerjasama tersebut, Gudang Garam akan membayarkan kompensasi kepada AP I sebagai berikut:

- *Upfront fee/Technical Expertise Fee* atas advis yang diberikan oleh AP I pada proses pengadaan BUP dan *technical know-how* dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kebandarudaraan;
- *Management fee* atas biaya pengelolaan bandar udara Kediri;
- *Variable Incentives*, yaitu bagi hasil atas pendapatan kegiatan pengelolaan bandar udara Kediri.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian sampai dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bandar Udara Kediri berlaku efektif dan mengikat para pihak.

Pada tanggal 11 Februari 2021, AP I telah menerima 25% pembayaran *Upfront Fee/Technical Expertise Fee* sebesar Rp22.028.500.

Sehubungan dengan telah keluarnya Surat Pengumuman Hasil Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri Nomor: PL.104/02/07/Panpel-Kediri-2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT Gudang Garam sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 16 Agustus 2022, AP I telah menerima sisa 75% pembayaran *Upfront Fee/ Technical Expertise Fee* sebesar Rp66.085.500.

Pada tanggal 26 Januari 2021, AP I dan Gudang Garam menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kediri dimana Gudang Garam menyerahkan pengoperasian bandar udara Kediri kepada AP I. Atas kegiatan pengoperasian tersebut, AP I memperoleh *management fee* dan *variable incentives* sebagaimana dijelaskan di atas. Jangka waktu perjanjian ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan perjanjian KPBU antara Gudang Garam dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yaitu DJPU.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

For the cooperation, Gudang Garam will pay compensation to AP I as follows:

- *Upfront fee/Technical Expertise Fee* for the advice given by AP I on the BUP procurement process and technical know-how in the development and operation of the airport sector;
- *Management fee* for the operation fee of Kediri airport;
- *Variable Incentives*, which is revenue sharing from the operation of Kediri airport

This Agreement is valid from the signing of the agreement until the Kediri Airport Operation Cooperation Agreement becomes effective and binding on the parties.

On February 11, 2021, AP I has received 25% of the *Upfront Fee/Technical Expertise Fee* amounted to Rp22,028,500.

In connection with the issuance of the Letter of Announcement on the Procurement of Business Entities Implementing the Public Private Partnership Project (PPP) for the New Airport in Kediri Regency Number: PL.104/02/07/Panpel-Kediri-2022 dated July 29, 2022 stating that PT Gudang Garam as the winner of the auction, on August 16, 2022, AP I has received the remaining 75% payment of the *Upfront Fee/Technical Expertise Fee* of Rp66,085,500.

On January 26, 2021, AP I and Gudang Garam signed Joint Operation Agreement of Operating Airport Services at Kediri Airport whereas Gudang Garam handover the operation of Kediri airport to AP I. For the operational activities, AP I will obtain management fee and variable incentives as explained above. The period of the agreement will be determined later based on KPBU agreement between Gudang Garam and the Representation of of the Project Cooperation, which is DJPU.

- i) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Progres Termin VI atas Pekerjaan *Design & Build* Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Tahap 1 – Stage I – Paket 1.

Pada tanggal 30 Desember 2022, AP I dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menandatangani Perjanjian Penyelesaian Pembayaran atas tagihan progress termin VI untuk pekerjaan *design & build* pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Tahap I – Stage I – Paket 1 dimana disepakati untuk pembayaran kewajiban oleh AP I kepada WIKA akan dilakukan melalui penggunaan instrumen/fasilitas perbankan oleh AP I yang akan jatuh tempo setelah 15 (lima belas) bulan.

- j) Perjanjian dengan Perusahaan
Pada tanggal 28 Desember 2021, AP I dan Perusahaan menandatangani perjanjian No: PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0118 tentang Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan sejak 1 Januari 2022. Dalam perjanjian ini, AP I berkewajiban untuk:

- Melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Layanan Manajemen dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- Menyiapkan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh Aviata untuk pelaksanaan pekerjaan atas layanan manajemen yang akan diberikan oleh Aviata kepada AP I.
- Melakukan pembayaran atas jasa layanan manajemen kepada Aviata sebesar nilai bersih 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan usaha terkonsolidasi dengan mengacu kepada RKAP tahunan AP I termasuk perubahannya. Apabila biaya jasa layanan manajemen yang dibayarkan berdasarkan poin tersebut menjadi kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibayarkan, maka selisih kurang atau lebih dari biaya jasa layanan manajemen akan direkonsiliasi dan dibuat berita acara untuk diperhitungkan sesuai dengan laporan keuangan auditan AP I.

- i) Settlement Agreement for Payment Term VI Progress for project related the Design & Build the Development of Sultan Hasanuddin Airport Makassar, South Sulawesi Phase 1 – Stage I – Package 1.

On December 30, 2022, AP I and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) signed Settlement Agreement for Payment Term VI Progress for project related the Design & Build the Development of Sultan Hasanuddin Airport Makassar, South Sulawesi Phase 1 – Stage I – Package 1, where it was agreed that the payment of obligations by AP I to WIKA would be carried out through the use of banking instruments/facilities by AP I which would due after 15 (fifteen) months.

- j) Agreement with the Company
On December 28, 2021, AP II and the Company signed an agreement No: PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0118 regarding the Holding Company for State-Owned Tourism and Supporting Management Services. The term of this agreement is 12 months starting from January 1, 2022. Under this agreement, AP II is obligated to:

- Fulfill all obligations under this Agreement to ensure that the Management Services are carried out in accordance with the terms and conditions of this agreement.
- Prepare and provide the necessary data and information to Aviata for the implementation of the work on the management services that will be provided by Aviata to AP I.
- Make payment for management service fees to Aviata in the amount of net value of 0.5% calculated based on consolidated business revenue referring to AP I annual RKAP including changes. If the management service fee paid based on this point becomes less or more than the amount that should be paid, then the difference of less or more than the management service fee will be reconciled and made into a report to be calculated in accordance with AP I audited financial statements.

PT Angkasa Pura ("AP II")

a) Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pada tanggal 15 Desember 2015, AP II mengadakan Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian No. HK.201/2/6/DRJU.kum 2015 dan PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Perjanjian Konsesi).

DJPU memberikan hak kepada AP II melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut, antara lain:

- AP II diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Nilai yang dibayarkan tersebut akan diakui sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan AP II setelah AP II mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

*For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

PT Angkasa Pura ("AP II")

a) Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation

On December 15, 2015, AP II entered into Agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP II to conduct airport services as stated in agreement No. HK.202/2/6/DRJU.kum 2015 and PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 (Concession Agreement).

DJPU granted the right to AP II to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass for the provision and/or development of:

- Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;*
- Terminal facilities for passenger transport services, cargo and mail;*
- Electronic facilities, electricity, water and waste disposal installations; and*
- Areas for the building, grounds and industry as well as buildings provided to support air transportation.*

Important conditions in the Concession Agreement, among others, are as follows:

- AP II is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% from revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years. The amount paid will be recognized as Non Tax Revenue (PNBP).*
- The Concession Agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the Concession Agreement is signed and extended for 30 years as agreed by DJPU and AP II, after AP II received approval from shareholders general meeting.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

DJPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Konsesi berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang.

Per 31 Desember 2022, AP II mencatat estimasi perhitungan akrual beban konsesi kepada DJPU untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan Jan-Mei 2021 sebesar 2,5% serta untuk Jun-Des 2021 dan 2022 sebesar 1% dari pendapatan aeronautika dan kargo berdasarkan informasi baru yang diterima pada tahun 2022. Sehingga saldo beban akrual per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk PNPB adalah Rp429.906.000 dan Rp270.174.000.

Pada tanggal 28 Juni 2018, AP II telah menerima tagihan pembayaran konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2016 dari DJPU sebesar Rp102.578.000. Berdasarkan surat tagihan tersebut setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, setelah 30 hari sejak dikeluarkannya tagihan tersebut.

Pada tanggal 13 Mei 2022, AP II telah menerima surat tagihan konsesi tahun 2017 dan denda atas tagihan konsesi tahun 2016 masing-masing sebesar Rp128.898.000 dan Rp41.190.000.

b) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

i. Pada tanggal 3 Juli 2014, AP II mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah No.PJJ.15.02.01/00/07/ 2014/119 dengan Garuda, dimana AP II bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa. Beberapa isi perjanjian sebagai berikut:

- Lahan yang dimanfaatkan seluas 164.742 m².
- Tujuan pemanfaatan lahan untuk administrasi perkantoran, penunjang kegiatan operasional penerbangan berikut fasilitas penunjangnya.
- Jangka waktu perjanjian adalah 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

DJPU has the authority to supervise and control the implementation of the Concession based on Concession Agreement in accordance with its authority regulated by the Law.

As of December 31, 2022, AP II records the estimated calculation of the concession fee to DJPU for 2018, 2019, 2020, and Jan-May 2021 by 2.5%, and for Jun-Dec 2021 and 2022 by 1% of aeronautics and cargo revenue, based on new information received in 2022. As a result, the accrual expense balance as of December 31, 2022, and 2021 for PNPB was Rp429,906,000 and Rp270,174,000, respectively.

On June 28, 2018, AP II has received a payment bill for aeronautical service concession for year 2016 from DJPU amounted to Rp102,578,000. Based on the bill, every late payment will be subjected to penalty of 2% for each month, 30 days after the bill issue date.

On May 13, 2022, AP II received a bill for the 2017 concession and a penalty for the 2016 concession amounting to Rp128,898,000 and Rp41,190,000, respectively.

b) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

i. On July 3, 2014, AP II entered into Land Use Agreement No.PJJ.15.02.01/00/07/2014/119 with Garuda, where AP II acts as lessor and Garuda as lessee. Some terms of the agreement are as follows:

- Area utilization of 164,742 sqm.
- Land use objectives are for the administrative offices, flight operations, including its supporting facilities.
- The agreement is valid from January 1, 2012 until December 31, 2016.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 29 Juli 2020, AP II dan Garuda telah melakukan perpanjangan Perjanjian Nomor PJJ.04.04/00/07/2020/0258 dan IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG dengan jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Berita Acara No. BAC.06.04/00/12/202/6935 Garuda tidak lagi memperpanjang sewa lahan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersil AP II (Persero) Nomor PJJ.04.04/00/07/2020/0258 dan IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG tanggal 29 Juli 2020.

Atas bangunan di atas lahan tersebut, yang bukan merupakan objek yang harus dikembalikan sesuai perjanjian, AP II setuju untuk membayar bangunan tersebut sebesar Rp142.500.000 melalui mekanisme penjumlahan utang atas tagihan yang dimiliki oleh AP II kepada Garuda. Nilai bangunan tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan pada tanggal 15 Desember 2021. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pemindahan kepemilikan aset tersebut masih dalam proses.

- ii. Pada tanggal 13 Oktober 2016, AP II mengadakan perjanjian dengan Garuda No. PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 dan No. WI/PERJ/DG-3368 tentang pemanfaatan fasilitas komersial, yaitu ruangan di gedung 510, 520 dan 530, dimana AP II bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa.

Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 28 Juni 2022, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial AP II Nomor PJJ.04.04/00/06/2022/A.0320 dan IG/PERJ/DO-4155/2022/NON-LEG dengan jangka waktu terhitung sampai dengan 30 Juni 2024.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On July 29, 2020, AP II and Garuda agreed to extend the agreement Number PJJ.04.04/00/07/2020/0258 and IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG with period up to December 31, 2021.

On December 31, 2021, based on Minutes No. BAC.06.04/00/12/202/6935, Garuda did not extend the Utilization of Commercial Facilities Agreement of AP II (Persero) Number PJJ.04.04/00/07/2020/0258 and IG/PERJ/DI-4173/2020/NON-LEG dated July 29, 2020.

Regarding the building built on the land, which is not an object that must be returned to AP II according to the agreement, AP II agreed to pay the building totalling to Rp142,500,000 through a set off with the outstanding receivables of AP II from Garuda. The value of the building is based on the Valuation Report conducted by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners on December 15, 2021. As of the completion date of the consolidated financial statements, the transfer of ownership of the assets is still in process.

- ii. On October 13, 2016, AP II entered into agreement with Garuda No. PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 and No. WI/PERJ/DG-3368 regarding the use of commercial facility, such as building 510, 520 and 530, where AP II acts as lessor and Garuda as lessee.

This agreement has been extended on June 28, 2022, based on the AP II Commercial Facility Utilization Cooperation Agreement Number PJJ.04.04/00/06/ 2022/A.0320 and IG/PERJ/DO-4155/2022/NON-LEG with period until June 30, 2024.

c) PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")

- i. Pada tanggal 4 Mei 2018, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. PJJ.04.04/00/05/2018/0170 dan 007/F20100/2018-SO untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara dan sewa pemanfaatan fasilitas Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) milik AP II di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2024 berdasarkan Perjanjian Nomor PJJ.04.04/00/08/2022/ A.0220 dan KTR-026/PN0000000/2022-SO Tanggal 5 Agustus 2022.

- ii. Pada tanggal 4 Mei 2018, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. PJJ.04.04/00/05/2018/0171 dan 007/F20100/ 2018-SO untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Minangkabau, Sultan Syarif Kasim II, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Banyuwangi. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023.

- iii. Pada tanggal 31 Maret 2015, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. 008/F20100/2015-SO dan No. PJJ.04.04/ 00.04/03/2015/0048 untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Kualanamu. Perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan perjanjian No. PJJ.04.04/00/08/2018/0626 dan No. 013/F20100/2018-SO tanggal 7 Agustus 2018.

- iv. Pada tanggal 14 Desember 2015, AP II dan Pertamina mengadakan perjanjian No. 041/F00000/2015-03 dan No. PJJ.04.04/00.02/ 12/2015/0106 untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Husein Sastranegara, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir dan Silangit. Perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2022 berdasarkan perjanjian No. PJJ.04.04/00/03/2018/0069 dan No. 003/F20100/2018-S3 tanggal 14 Maret 2018.

c) PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")

- i. On May 4, 2018, AP II and Pertamina entered into an agreement No. PJJ.04.04/00/05/2018/0170 and 007/F20100/2018-SO to perform the airline refueling services and Aircraft Charging Depot (DPPU) facilities rental at Soekarno-Hatta International Airport.

The agreement was extended until March 31, 2024 based on Agreement Number PJJ.04.04/00/08/2022/A.0220 and KTR-026/PN0000000/2022-SO dated August 5, 2022.

- ii. On May 4, 2018, AP II and Pertamina entered into an agreement No. PJJ.04.04/00/05/2018/0171 and 007/F20100/2018-SO to perform the airline refueling services at Halim Perdanakusuma, Minangkabau, Sultan Syarif Kasim II, and Sultan Mahmud Badaruddin II and Banyuwangi Airport. This agreement is valid for 5 years starting on April 1, 2018 until March 31, 2023.

- iii. On March 31, 2015, AP II and Pertamina entered into an agreement No. 008/F20100/2015-SO and No. PJJ.04.04/00.04/03/2015/0048 to perform the airline refueling services at Kualanamu Airport. The agreement was extended until July 24, 2023 based on agreement No. PJJ.04.04/00/08/2018/ 0626 and No. 013/F20100/2018-SO dated August 7, 2018.

- iv. On December 14, 2015, AP II and Pertamina entered into an agreement No. 041/F00000/2015-03 and No. PJJ.04.04/00.02/12/2015/0106 to perform the airline refueling services at Husein Sastranegara, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir and Silangit Airport. The agreement was extended until September 30, 2022 based on agreement No. PJJ.04.04/00/03/2018/0069 and No. 003/F20100/2018-S3 dated March 14, 2018.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan dan sudah diterbitkan Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersil AP II No. BAC.15.04/00/09/2022/A.4100 tanggal 19 September 2022 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023.

d) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Banyuwangi

Pada tanggal 30 Agustus 2018, AP II dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Pengusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi No. 188/524/429.012/2018 dan PJJ.04.04/00/08/2018/0754. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan tanah dan bangunan dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Banyuwangi.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Banyuwangi.
- Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah khusus untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Banyuwangi.
- Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSP tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

e) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Tjilik Riwut

Pada tanggal 19 Desember 2018, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Tjilik Riwut Palangka Raya No. AU.2136/KUM/DJU/XII/2018 dan PJJ.04.04/00/12/2018/1246. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The agreement is still in the process of being extended and the Minutes of Commercial Facilities Utilization Agreement AP II No. BAC.15.04/00/09/2022/ A.4100 dated September 19, 2022 started from October 1, 2022 to September 30, 2023.

d) Cooperation Agreement of Utilization of Banyuwangi

On August 30, 2018, AP II and Government of Banyuwangi signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Organizing Unit Banyuwangi Airport No. 188/524/429.012/2018 and PJJ.04.04/00/08/2018/0754. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Utilize land and building with known situation and condition for commercial activities and/or development of Banyuwangi Airport.*
- *Provide fixed contribution and profit sharing for management of Banyuwangi Airport.*
- *Planning for land and building utilization is specific for commercial activities and/or development of Banyuwangi Airport.*
- *Land and/or building that become objects of KSP should not be guaranteed and/or burdened with dependent rights of any kind to other parties.*

e) Cooperation Agreement of Utilization of Tjilik Riwut Airport

On December 19, 2018, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Organizing Unit Tjilik Riwut Airport (UPBU) Palangka Raya No. AU.2136/KUM/DJU/XII/2018 and PJJ.04.04/00/12/2018/1246. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya dari AP II kepada Kementerian Perhubungan.

f) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Kelas I Radin Inten II Lampung

Pada tanggal 12 Oktober 2019, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung No. HK.201/0030/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0917. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2049.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung.
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Kelas I Radin Inten II Lampung dari AP II kepada Kementerian Perhubungan.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Manage and optimize provision and development of Tjilik Riwut Airport Palangka Raya as the result increase its role in developing the economy activities.
- Provide fixed contribution and profit sharing for management of Tjilik Riwut Airport Palangka Raya as non-tax state revenue (PNBP).
- Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Tjilik Riwut Palangka Raya Airport from AP II to Ministry of Transportation.

f) Cooperation Agreement of Utilization of Radin Inten II Class I Airport Lampung

On October 12, 2019, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of Raden Inten II Class I Airport Lampung No. HK.201/0030/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0917. This agreement is effective for 30 years start from January 1, 2020 to December 31, 2049.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Manage and optimize provision and development of Radin Inten II Class I Airport Lampung as the result increase its role in developing the economy activities.
- Provide fixed contribution and profit sharing for management of Radin Inten II Class I Airport Lampung.
- Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of Radin Inten II Class I Airport Lampung from AP II to Ministry of Transportation.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- g) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu

Pada tanggal 13 Oktober 2019, AP II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Dephub) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan No. HK.201/0029/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0918 dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu No. HK.201/0028/KUM/DRJU/X/2019 dan PJJ.04.04.01/00/10/2019/0919. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2049.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu sehingga meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan perekonomian.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan Bandar Udara Kelas I Fatmawati Soekarno Bengkulu oleh AP II kepada Kementerian Perhubungan.

- h) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Siborong-Borong

Pada tanggal 7 Oktober 2021, AP II dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Pengusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Siborong-Borong No.16/SKB/TU/X/2021 dan PJJ.04.04/00/10/2021/0389. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- g) *Cooperation Agreement of Utilization of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu*

On October 13, 2019, AP II and Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation Republic Indonesia (Dephub) signed Cooperation Agreement of State Property Utilization of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan No. HK.201/0029/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0918 and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu No. HK.201/0028/KUM/DRJU/X/2019 and PJJ.04.04.01/00/10/2019/0919. This agreement is effective for 30 years start from January 1, 2020 to December 31, 2049.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Manage and optimize provision and development of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu as the result increase its role in developing the economy activities.*
- Provide fixed contribution and profit sharing for management of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu.*
- Hand over of the result of the development, construction and addition facilities of H. AS. Hanandjoeddin Class I Airport Tanjung Pandan and Fatmawati Soekarno Class I Airport Bengkulu from AP II to Ministry of Transportation.*

- h) *Cooperation Agreement of Utilization of Siborong-Borong Airport*

On October 7, 2021, AP II and District Government of Tapanuli Utara signed Cooperation Agreement of Land Utilization for the commercial activities and/or development of Siborong-Borong Airport No.16/SKB/TU/X/2021 and PJJ.04.04/00/10/2021/0389. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan tanah dan bangunan dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui untuk kegiatan perusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Siborong-Borong.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Siborong-Borong.
- Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah khusus untuk kegiatan perusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Siborong-Borong.
- Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek kerjasama tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

i) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara Sultan Thaha Jambi

Pada tanggal 26 Februari 2015, AP II dan Pemerintah Provinsi Jambi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Perusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi No. 03/PK.GUB/BPKAD/2015 dan No. PJJ.04.04/00.04/02/2015/0012. Perjanjian ini berlaku selama 50 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, sebagaimana diubah dengan:

- Addendum I Nomor PJJ.04.04/00.04/07/2015/0074 dan 07/PK.GUB/BPKAD/2015 tanggal 10 Juli 2015.
- Addendum II Nomor 01 tanggal 4 Desember 2018.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan tanah dan bangunan dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui untuk kegiatan perusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.
- Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah khusus untuk kegiatan perusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.
- Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek kerjasama tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Utilize land and building with known situation and condition for commercial activities and/or development of Siborong-Borong Airport.
- Provide fixed contribution and profit sharing for management of Siborong-Borong Airport.
- Planning for land and building utilization is specific for commercial activities and/or development of Siborong-Borong Airport.
- Land and/or building that become objects of agreement should not be guaranteed and/or burdened with dependent rights of any kind to other parties.

i) Cooperation Agreement of Utilization of Sultan Thaha Airport

On February 26, 2015, AP II and Provincial Government of Jambi signed Cooperation Agreement of Land Utilization for the commercial activities and/or development of Sultan Thaha Jambi Airport No. 03/PK.GUB/BPKAD/2015 and No. PJJ.04.04/00.04/02/2015/0012. This agreement is effective for 50 years from signing date of the agreement as amended with:

- Addendum I No. PJJ.04.04/00.04/07/2015/0074 and 07/PK.GUB/BPKAD/2015 dated July 10, 2015.
- Addendum II Number 01 dated December 4, 2018.

Scopes of the cooperation are as follows:

- Utilize land and building with known situation and condition for commercial activities and/or development of Sultan Thaha Jambi Airport.
- Provide fixed contribution and profit sharing for management of Sultan Thaha Jambi Airport.
- Planning for land and building utilization is specific for commercial activities and/or development of Sultan Thaha Jambi Airport.
- Land and/or building that become objects of agreement should not be guaranteed and/or burdened with dependent rights of any kind to other parties.

- j) Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma ("HLP") dengan PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")

Pada tanggal 31 Agustus 2022, AP II menandatangani Perjanjian Induk dengan ATS No. PJJ.04.04/00/08/2022/A.0237. AP II dengan pihak ATS melakukan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian HLP di Jakarta dengan skema pembagian keuntungan dan dengan Jangka waktu perjanjian sampai dengan 30 September 2022 atau hingga ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Administratif.

Selama jangka waktu perjanjian, seluruh pendapatan HLP akan ditampung dalam Rekening Bersama, dan akan dibagikan kepada Para Pihak setelah adanya kesepakatan terkait besaran pembagian keuntungan. Sementara, seluruh Biaya Operasional HLP di bulan September sebesar Rp8.100.000 ditanggung oleh para pihak dengan proporsi AP II sebesar 50% dan ATS sebesar 50%.

Pada tanggal 7 Oktober 2022, AP II dan ATS menandatangani Addendum dimana kedua belah pihak menyetujui untuk memperpanjang perjanjian kerjasama hingga tanggal 14 Oktober 2022 dan penggunaan pendapatan yang tertampung dalam Rekening Bersama untuk pengeluaran pengelolaan HLP, jika biaya operasional yang telah disetorkan tidak mencukupi.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, AP II dan ATS menandatangani Addendum dimana kedua belah pihak menyetujui untuk memperpanjang perjanjian kerjasama hingga tanggal 31 Oktober 2022.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, AP II dan ATS menandatangani Addendum dimana kedua belah pihak menyetujui untuk memperpanjang perjanjian kerjasama hingga ditandatanganinya perjanjian KSO.

- j) *Management and Operation Cooperation Agreement for the Halim Perdanakusuma International Airport ("HLP") with PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")*

On August 31, 2022, AP II signed a Master Agreement with ATS No. PJJ.04.04/00/08/2022/A.0237. AP II collaborated with ATS to manage and operate HLP in Jakarta with a profit-sharing scheme and a term of agreement until September 30, 2022, or until the signing of the Administrative Joint Operation Agreement (JO).

During the term of the agreement, all HLP revenues will be collected in a Joint Account and distributed among the Parties after an agreement is reached regarding the profit-sharing amount. Meanwhile, all HLP operational costs in September amounted to Rp8,100,000 will be borne by the parties with a proportion of 50% for AP II and 50% for ATS.

On October 7, 2022, AP II and ATS signed an Addendum in which both parties agreed to extend the cooperation agreement until October 14, 2022, and to use the revenue collected in the Joint Account for HLP operational expenditures if the deposited operational costs are insufficient.

On October 14, 2022, AP II and ATS signed an Addendum in which both parties agreed to extend the cooperation agreement until October 31, 2022.

On October 31, 2022, AP II and ATS signed an Addendum in which both parties agreed to extend the cooperation agreement until the signing of the KSO agreement.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

k) Perjanjian Kerjasama Strategis Bandara
Kualanamu

Pada tanggal 23 Desember 2021, AP II, PT Angkasa Pura Aviassi (APA) dan GMR Airport Netherlands B.V telah menandatangani *Shareholders Agreement* (SHA) dan *Subscription of Share Agreement* (SSA) terkait pengelolaan dan pengembangan bandara Kualanamu.

Pada tanggal 3 Juni 2022, AP II menandatangani Perjanjian Induk dengan APA No. PJJ.04.04/00/06/2022/A.0077. Perusahaan memberikan hak tunggal dan eksklusif kepada APA untuk mengembangkan, mengoperasikan, mengelola, dan memiliki hak guna usaha atas Bandara Kualanamu dan lahan proyek, termasuk hak eksklusif untuk melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu kerjasama. Jangka waktu kerjasama adalah jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial kecuali diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan perjanjian.

Sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, APA wajib, paling lambat saat Tanggal Wajib Operasi Komersial, membayar kepada AP II sejumlah Rp162.078.000. APA telah melakukan pembayaran pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal tersebut juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Operasi Nomor BAC.04.04/00/07/2022/A.2586 antara AP II dan APA yang berisikan bahwa tanggal operasi komersial dan perjanjian kerja sama aset berlaku efektif sejak tanggal berita acara ini ditandatangani dan pada tanggal ini AP II dengan ini mengalihkan kepada APA dan APA dengan ini menerima pengalihan atas hak dan kewajiban dari pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan dari Bandar Udara Kualanamu.

Pada tahun pertama sampai dengan tahun kedua dari Tanggal Operasi Komersial, APA wajib membayar kepada AP II dalam jumlah Rp162.078.000 sebagai cicilan kedua dan ketiga dari Pembayaran Sewa Dimuka.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

k) Strategic Partnership Agreement
Kualanamu Airport

On December 23, 2021, AP II, PT Angkasa Pura Aviassi (APA) and GMR Airport Netherlands B.V had signed *Shareholders Agreement* (SHA) and *Subscription of Share Agreement* (SSA) regarding Kualanamu airport's operation and development.

On June 3 2022, AP II signed Master Agreement with APA No. PJJ.04.04/00/06/2022/A.0077. AP II grants APA the sole and exclusive rights to develop, operate, manage, and leasehold right to the existing Kualanamu Airport and project land, including the exclusive rights to carry out its obligations for the duration of the co-operation period. the cooperation period shall be a period of 25 years commencing from the commercial operation date unless otherwise extended or terminated in accordance with the agreement.

As a condition further to the fulfilment of conditions precedent APA must, no later than the Required Commercial Operation Date, provide payment to AP II in the amount of Rp162,078,000. APA has made the payment on July 7, 2022. On that date, Minutes of Operation Handover Number BAC.04.04/00/07/2022/A.2586 was signed between AP II and APA which contains that the date of commercial operation and asset cooperation agreement is effective from the date this minutes is signed and on this date AP II hereby transfers to APA and APA hereby accepts the transfer of all rights and obligations from the operation, management and maintenance of Kualanamu Airport.

On the first until the second year of the Commercial Operation Date, APA shall pay to AP II in the amount of Rp162,078,000 as the second and third installment of the Advance Site Rent.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun ketiga sampai dengan tahun kelima dari Tanggal Operasi Komersial, APA wajib membayar kepada Perusahaan dalam jumlah Rp405.195.000 sebagai cicilan keempat, kelima dan keenam Pembayaran Sewa Dimuka.

Pada tahun keenam sampai dengan tahun ketujuh dari Tanggal Operasi Komersial, APA wajib membayar kepada AP II dalam jumlah Rp769.871.000 sebagai cicilan ketujuh dan kedelapan Pembayaran Sewa Dimuka.

Selain itu, pada Perjanjian Induk juga diatur bahwa AP II akan menerima bagi hasil sejumlah 19% dari pendapatan bruto APA.

- I) Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat

Pada tanggal 22 Januari 2018, AP II, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat, dimana para pihak sepakat menunjuk AP II sebagai operator untuk melaksanakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 17 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak.

Pada tanggal 14 Mei 2018, AP II menerima Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hasil Pekerjaan Direktorat Bandar Udara di Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat dari DJPU dengan No. BA. 503 Tahun 2018 atas fasilitas sisi udara dengan nilai total sebesar Rp831.757.000. Aset Bandar Udara Kertajati yang dinyatakan dalam BASTO akan dicatat sebagai aset AP II dan penyertaan modal Negara pada saat telah diterbitkan Peraturan Pemerintah.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On the third until the fifth year of the Commercial Operation Date, APA shall pay to AP II in the amount of Rp405,195,000 as the fourth, fifth and sixth installment of the Advance Site Rent.

On the sixth until the seventh year of the Commercial Operation Date, APA shall pay to AP II in the amount of Rp769,871,000 as the seventh and eighth installment of the Advance Site Rent.

In addition, the Master Agreement also stipulates that AP II will receive a revenue share of 19% of APA's gross revenue.

- I) *Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport*

On January 22, 2018, AP II, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) and PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) signed a Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport, whereby the parties agreed to appoint AP II as operator to carry out the service airport, including the operation and maintenance of West Java International Airport in Kertajati Sub-district. The term of this agreement is valid for 17 years commencing from the signing of the agreement and may be extended upon the parties' written agreement.

On May 14, 2018, AP II received Minutes of Operational Handover (BASTO) of the Work Results of the Airport Directorate at Kertajati International Airport, West Java from DJPU with No. BA. 503 Tahun 2018 for air side facilities amounted to Rp831,757,000. Asset of Kertajati Airport which stated in the BASTO will be recorded as AP II asset and government's investment when Government Regulation is issued.

m) PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP II mengadakan perjanjian penggunaan tanah di area Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m² dengan SDM sesuai Perjanjian Sewa Tanah No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 tanggal 30 Maret 2000 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 1 Mei 2000 sampai dengan 6 Januari 2019. AP II menyewakan tanah tersebut kepada SDM untuk dikelola sebagai fasilitas usaha yaitu lapangan golf, taman niaga dan pusat pertokoan berikut fasilitas penunjangnya.

AP II juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan kotor dengan persentase konsesi. Pada akhir periode perjanjian, SDM wajib mengembalikan tanah tersebut kepada AP II dan AP II wajib membayar kepada SDM sebesar nilai pasar yang wajar dari bangunan gedung serta kelengkapannya yang melekat termasuk infrastruktur yang terdapat di pusat pertokoan dan taman niaga tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2017, AP II dan SDM menandatangani addendum I No. PJJ.04.04/00.02/05/2017/0011 atas Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 tanggal 30 Maret 2000, dimana AP II dan SDM sepakat antara lain:

- Seluruh fasilitas usaha yang dibangun SDM, pada akhir masa perjanjian diserahkan dan menjadi milik AP II tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.
- Mengubah objek perjanjian yang dikenakan kompensasi dan besaran kompensasi penggunaan tanah.
- Mengubah objek perjanjian yang dikenakan konsesi dan prosentase konsesi.
- Mengembalikan sebagian tanah seluas ±57.000 m² yang telah disewa SDM kepada AP II sehingga luas objek perjanjian menjadi 963.000 m².
- SDM melakukan pembongkaran dan/atau relokasi aset milik SDM yang berlokasi di area lahan seluas ±57.000 m². Bentuk dan cara kompensasi yang akan dibayarkan oleh AP II kepada SDM antara lain dapat diperhitungkan dari pembebasan kewajiban kompensasi dan/atau pembebasan nilai konsesi.

m) PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP II entered into land use agreement at Soekarno-Hatta Airport area covering 1,020,000 sqm with SDM in accordance with Land Lease Agreement No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 dated March 30, 2000 and valid for 20 (twenty) years from May 1, 2000 until January 6, 2019. AP II leased the land to SDM to be used as business facilities such as golf course, park and shopping centre, including its supporting facilities.

AP II also obtained a concession income calculated based on the amount of gross income with the percentage of concession. At the end of the agreement, SDM is required to return the land to AP II and AP II shall pay to SDM for the fair market value of the building as well as the accessories attached including infrastructure located in the shopping centre and commercial parks.

On May 31, 2017, AP II and SDM signed addendum I No. PJJ.04.04/00.02/05/2017/0011 of Land Use Cooperation Agreement No. SPKS.07.1/TU.208/APII-2000 dated March 30, 2000, whereas AP II and SDM agreed:

- All business facilities that were built by SDM, at the end of the agreement shall be returned and become the property of AP II without any compensation.
- Changes the object of the agreement subject to compensation and the amount of land use compensation.
- Changes the object of the agreement subject to concession and percentages of concession.
- Returns part of the land that has been rented by SDM measuring ±57,000 sqm to AP II and changes the object of agreement to 963,000 sqm.
- SDM dismantling and/or relocating assets owned by SDM located in an area of ±57,000 sqm. The form and method of compensation that will be paid by AP II to SDM may be calculated from the exemption of compensation and/or exemption of the concession.

- Memperhitungkan jangka waktu perjanjian antara lain:
 - i. Tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.
 - ii. Tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 untuk objek perjanjian seluas ± 643.000 m².
 - iii. Tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 untuk objek perjanjian seluas ± 320.000 m². Jangka waktu tersebut akan diperpanjang otomatis sampai dengan maksimal tanggal 6 Januari 2024 apabila AP II tidak menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 22 Februari 2018, AP II dan SDM menandatangani addendum II Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah No. PJJ.04.04/00/02/2018/0043 dimana AP II dan SDM menyepakati antara lain:

- Rincian aset yang akan direlokasi.
- Total biaya pembongkaran dan/atau aset yang akan direlokasi.
- Bentuk dan cara kompensasi yang akan diberikan dan/atau dibayarkan oleh AP II kepada SDM atas biaya pembongkaran dan/atau aset yang akan direlokasi.

Pada tanggal 7 Januari 2021, AP II dan SDM menandatangani addendum III Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah No. PJJ.04.04/00/01/2021/0322 yang menyatakan:

- AP II dan SDM menyepakati masa perpanjangan selama 3 (tiga) tahun atas objek perjanjian seluas ± 643.000 m² (lahan golf) dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan maksimal tanggal 6 Januari 2024.
- Bahwa AP II belum melaksanakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, sehingga Para Pihak menyepakati untuk melaksanakan Masa Perpanjangan II sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Penggunaan Tanah AP II (Persero) Nomor BAC.15.02/00/01/2021/0405 Tanggal 4 Januari 2021.
- AP II dapat melakukan survei topografi dan *soil investigation* serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di area Obyek Perjanjian, dan SDM akan memberikan akses dan mengizinkan AP II untuk melakukan kegiatan tersebut.

- *Considering term of agreement among others:*

- i. *May 1, 2000 until January 6, 2019.*
- ii. *January 7, 2019 until January 6, 2021 for the object of the agreement of $\pm 643,000$ sqm.*
- iii. *January 7, 2019 until January 6, 2021 for the object of the agreement of $\pm 320,000$ sqm. The term will automatically be extended until January 6, 2024 if AP II does not use the object of the agreement for the construction of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport.*

On February 22, 2018, AP II and SDM signed addendum II of Land Use Cooperation Agreement No. PJJ.04.04/00/02/2018/0043 whereas AP II and SDM agreed:

- *Details of the assets to be relocated.*
- *Total cost of dismantling and/or assets to be relocated.*
- *The method of compensation to be provided and/or paid by AP II to SDM for the costs of dismantling and/or assets to be relocated.*

On January 7, 2021, AP II and SDM signed addendum III of Land Use Cooperation Agreement No. PJJ.04.04/00/01/2021/0322 that state:

- *AP II and SDM agreed the extend the agreement for 3 (three) years for the object of the agreement of $\pm 643,000$ sqm (golf land) from January 7, 2021 to the maximum of January 6, 2024.*
- *AP II has not performed the construction of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport as the parties agree to carried out the extension period II as agreed on Minutes of AP II Land Use Agreement No. BAC.15.02/00/01/2021/0405 dated January 4, 2021.*
- *AP II may conduct topography and soil investigation surveys and other activities related to the development planning of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport in the Agreement Object area and SDM provides access and allows AP II to carry out these activities.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

n) Perjanjian dengan Perusahaan

Pada tanggal 28 Desember 2021, AP II dan Perusahaan menandatangani perjanjian No. PJJ.04.04/00/12/2021/0615 tentang Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan sejak 1 Januari 2022.

Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perjanjian No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0107 tanggal 30 Desember 2022.

Dalam perjanjian ini, AP II berkewajiban untuk:

- Melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Layanan Manajemen dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- Menyiapkan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh Aviata untuk pelaksanaan pekerjaan atas layanan manajemen yang akan diberikan oleh Aviata kepada AP II.
- Melakukan pembayaran atas jasa layanan manajemen kepada Aviata sebesar nilai bersih 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan usaha terkonsolidasi dengan mengacu kepada RKAP tahunan AP II termasuk perubahannya. Apabila biaya jasa layanan manajemen yang dibayarkan berdasarkan poin tersebut menjadi kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibayarkan, maka selisih kurang atau lebih dari biaya jasa layanan manajemen akan direkonsiliasi dan dibuar berita acara untuk diperhitungkan sesuai dengan laporan keuangan auditan AP II.

o) Perjanjian Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") dengan CIMB Niaga

PT Gapura Angkasa melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam bentuk fasilitas pembiayaan langsung IMBT, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 092/CB/JKT/2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 02 tanggal 9 Agustus 2017 oleh Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pembiayaan ini ditandatangani dalam rangka penyewaan alat *ground support equipment* (GSE) untuk keperluan operasi PT Gapura

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

n) Agreement with the Company

On December 28, 2021, AP II and the Company signed agreement No. PJJ.04.04/00/12/2021/0615 concerning Tourism and Support BUMN Holding Management Services. The term of this agreement is 12 months from January 1, 2022.

The agreement has been extended until December 31, 2023 based on agreement No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0107 dated 30 December 2022.

In this agreement, AP II is obliged to:

- Fulfill all obligations under this Agreement to ensure that the Management Services are carried out in accordance with the terms and conditions of this agreement.
- Prepare and provide the necessary data and information to Aviata for the implementation of the work on the management services that will be provided by Aviata to AP II.
- Make payment for management service fees to Aviata in the amount of net value of 0.5% calculated based on consolidated business revenue referring to AP II annual RKAP including changes. If the management service fee paid based on this point becomes less or more than the amount that should be paid, then the difference of less or more than the management service fee will be reconciled and made into a report to be calculated in accordance with AP II audited financial statements.

o) Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") Agreement with CIMB Niaga

PT Gapura Angkasa entered into a financing partnership with PT Bank CIMB Niaga Tbk in the form of an IMBT direct financing facility, based on the Financing Agreement Number 092/CB/JKT/2017 as stated in the Notary Deed. 02 dated August 9, 2017 by Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This financing was signed in the context of ground support equipment (GSE) leasing for PT Gapura Angkasa's operations. The contract value of the

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Angkasa. Nilai kontrak atas pokok sewa adalah sebesar Rp425.803.142 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 120 bulan, atau jatuh tempo pada 7 Agustus 2027. Kepemilikan atas GSE tersebut akan berpindah dari bank kepada PT Gapura Angkasa seiring dengan berakhirnya kontrak.

principal lease amounted to Rp425,803,142 with a maximum financing term of 120 months, or due on August 7, 2027. The ownership of the GSE will be transferred from the bank to PT Gapura Angkasa along with the end of the contract.

Pada 12 April 2021, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan dalam surat No. 025/EXT/KPP/CBTVIII/CBGII/IV/2021 yang berisi perpanjangan masa *grace period* selama 12 bulan (April 2021 - Maret 2022) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan hingga 7 Maret 2028.

On April 12, 2021, both parties signed the agreement on Letter No. 025/EXT/KPP/CBTVIII/CBGII/IV/2021 which contains extension of grace period for 12 months (April 2021 - March 2022) and extension of financing period until March 7, 2028.

Pada 31 Mei 2022, kedua belah pihak menandatangani addendum keempat atas Perjanjian Pembiayaan No. 092/CB/JKT/2017 yang berisi perubahan skedul pembayaran bulanan pada periode setelah masa *grace period* hingga tanggal jatuh tempo yang diperpanjang hingga Juli 2028.

On May 31, 2022, both parties signed the fourth addendum to Financing Agreement No. 092/CB/JKT/2017 which contains change of monthly payment schedule after grace period for until the due date, which extended until July 2028.

Total komitmen IMBT pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

IMBT's total commitments as of December 31, 2022 and 2021 are as follows.

	2022 Rp	2021 Rp	
< 1 Tahun	50,422,000	55,049,000	< 1 Year
1-5 Tahun	328,673,000	304,705,000	1 - 5 Years
> 5 Tahun	82,599,000	118,272,000	> 5 Years
Total	461,694,000	478,026,000	Total

p) Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara

Pada tanggal 7 Juli 2015, AP II mengadakan perjanjian No. HK.223/VII/5/KA2015, PJJ.15.01/00.1/07/2015/0061 dan RL/DIR/028/VII/2015 dengan KAI dan Railink ("Para Pihak"). Perjanjian ini berlaku sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan berakhirnya Masa Konsesi. Ruang Lingkup Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara ialah Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha sarana.

p) Cooperation Arrangement of Airport Railway

On July 7, 2015, AP II entered into an agreement No. HK.223/VII/5/KA-2015, PJJ.15.01/00.1/07/2015/0061 and RL/DIR/028/VII/2015 with KAI and Railink ("the Parties"). This agreement is valid since the signing of the Agreement until the end of the Concession Period. The scope of Cooperation Arrangement of Airport Railway is Railway Infrastructure Implementation service including construction, procurement, operation, maintenance and operation of infrastructure.

AP II beserta para Pihak sepakat bahwa Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara ini menggunakan skema bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

AP II and the Parties agreed that the Cooperation Arrangement of Airport Railway will use the following profit sharing scheme:

- Perhitungan nilai bagi hasil adalah berdasarkan EBITDA dikurangi dengan pembayaran utang;

- The calculation of the profits is based on EBITDA less the payment of the debt;

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Nilai bagi hasil yang ditentukan, mengacu kepada laporan keuangan Railink dan dilakukan berdasarkan proporsi realisasi AP II dan para Pihak;
- Pembayaran Bagi Hasil mulai dilakukan pada tahun ketiga setelah penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta beroperasi penuh untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tanggal 25 April 2022, para pihak melaksanakan Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), AP II, PT Railink dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang menyepakati sehubungan dengan adanya pelaksanaan transaksi pengalihan aset KA Basoetta dari PT Railink.

Perjanjian turunan antara AP II dan PT Railink Nomor PJJ.04.04/00/06/2022.A.0221 dengan jangka waktu kerjasama tanggal 2 Februari 2018 s.d. 31 Desember 2022. Menunjuk Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Railink tentang persetujuan transaksi pengalihan bisnis kereta api Bandara Soekarno-Hatta No. PT KAI: KL.310/XII/18/KA-2022 tanggal 26 Desember 2022 dan AP II: kep.08.03.01/00/12/ 2022/A.0623 tanggal 27 Desember 2022, telah disetujui pengalihan bisnis pengoperasian kereta api Bandara Soekarno-Hatta termasuk pemanfaatan fasilitas penyelenggaraan perkeretaapian di area *Airport Railways Station (ARS)* dari PT Railink kepada KCI.

q) PT Mandara Jasindo Sena ("MJS")

Pada tanggal 15 Maret 1991, AP II mengadakan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Bandara Soekarno-Hatta dengan MJS berdasarkan Perjanjian No. SPKPL.01/TU.308/PAPII-91 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum IV No. ADD.IV.SPKS.004/KM.103/2006-APII Tanggal 30 Januari 2006 ("SPKL.01"), seluas 150.000 m².

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *The profit sharing portions are referred to the Railink's financial statements and is based on the proportion of the realization of AP II and the Parties;*
- *Revenue Sharing Payment began to be made in the third year after the implementation of the Soekarno-Hatta Airport Railway fully operational for 1 (one) fiscal year.*

On April 25, 2022, the parties perform the Amandement and Restatement of Master Agreement between PT Kereta Api Indonesia (Persero), AP II, PT Railink and PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) that agreed the implementation of KA Basoetta asset transfer transaction from PT Railink.

Derivative agreement between AP II and PT Railink Number PJJ.04.04/00/06/2022/A.0221 period February 2, 2018 until December 31, 2022. Based on the general meeting of shareholder (cirkuler) PT Railink regarding approval of transaction for the transfer of Soekarno-Hatta Airport train business No. PT KAI:KL.310/XII/18/KA-2022 dated December 26, 2022, the transfer of the railroad Soekarno-Hatta International Airport has been approved including utilization of the railroad operation facilities in Airport Railways Station (ARS) from PT Railink to KCI.

q) PT Mandara Jasindo Sena ("MJS")

On March 15, 1991, AP II entered into a Letter of Agreement on Land Use of Soekarno-Hatta Airport with MJS based on Agreement No. SPKPL.01/TU.308/PAPII-91 as last amended through Addendum IV No. ADD.IV.SPKS.004/KM.103/2006-APII Dated January 30, 2006 ("SPKL.01"), covering an area of 150,000 sqm.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

MJS menggunakan lahan tersebut untuk membangun serta mengusahakan fasilitas hotel, balai sidang, perkantoran, pertokoan, restoran, fasilitas olah raga, perparkiran dan sarana rekreasi ("fasilitas"). Jangka waktu perjanjian adalah 30 tahun. Pemanfaatan lahan dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama dibahas dalam perjanjian ini sedangkan tahap kedua dibahas terpisah dalam Perjanjian Sewa Tanah No. SPKS.21/TU.208/APII-96 ("SPKS.21") tanggal 1 Maret 1996.

- Tahap pertama meliputi lahan seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir bulan Maret 2021. AP II memperoleh kompensasi sebesar Rp10.800.000 dan konsesi sebesar persentase tertentu dari pendapatan bersih MJS atas hasil operasi komersial dari fasilitas, dihitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas.
- Tahap kedua meliputi lahan seluas 100.000 m² untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir tanggal 8 Februari 2026. AP II memperoleh kompensasi yang setiap lima tahun meningkat mulai dari Rp600 hingga Rp3.226,94 (nilai penuh) per m² per bulan atau seluruhnya sebesar Rp58.766.000 dan konsesi sebesar persentase tertentu dari pendapatan bersih atas hasil operasi komersial dari fasilitas, dihitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas.
- Pada akhir periode perjanjian, MJS akan mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun di atas lahan tersebut kepada AP II.

Sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai dengan 2003, MJS terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut sehingga MJS tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah untuk mengembangkan lahan 100.000 m² yang telah disebutkan dalam perjanjian sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka AP II melalui Surat Direksi No. 15.02.01/00/10/2007/004 tanggal 4 Oktober 2007 telah membatalkan Perjanjian SPKL.01 dan SPKS.21 yang menyangkut lahan seluas 100.000 m².

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

MJS used the land to build and commercialize facilities of hotel, convention center, offices, stores, restaurant, sport facilities, parking and recreation ("facilities"). The agreement is valid for 30 years. Land utilization is divided into 2 phases. The first phase was described in this agreement while the second phase was described in Land Lease Agreement No. SPKS.21/TU.208/APII-96 ("SPKS.21") dated March 1, 1996.

- The first phase covers an area of 50,000 sqm for period of 30 years ending in March 2021. AP II received compensation amounted Rp10,800,000 and concession for a certain percentage of MJS net income over the commercial operation of the facility, starting from the commencement of the commercial operation of the facility.
- The second phase covers a land area of 100,000 sqm for a period of 30 years which expired on February 8, 2026. AP II received compensation increases every five years starting from Rp600 to Rp3,226.94 (full amount) per sqm per month or total amounted Rp58,766,000 and concession for a certain percentage of net income over the commercial operation of the facility, starting from the commencement of commercial operation of the facility.
- At the end of the agreement period, MJS will restore the land and transfer ownership of the entire facility that was built on the land to AP II.

With the economic crisis from year 1997 to 2003, MJS was affected by the crisis hence MJS could not meet the requirements in the land use agreement to develop 100,000 sqm of land that has been mentioned in the previous agreement.

By considering the matter, AP II through Director Letter No. 15.02.01/00/10/2007/004 dated October 4, 2007 has canceled SPKL.01 and SPKS.21 Agreement concerning a land area of 100,000 sqm.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 15.02.01/00/05/2008/101 tanggal 21 Mei 2008, MJS menyerahkan secara fisik lahan seluas 100.000 m² dan 4 (empat) buah sertifikat HGB kepada AP II.

Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 4 oleh Notaris Muhammad Taufiq, S.H., tanggal 16 April 2009.

Pada tahun 2021, masa Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Bandara Soekarno-Hatta seluas 50.000 m² telah berakhir seperti dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.02/00/10/2021/4815 Tanggal 13 Oktober 2021. Sesuai dengan perjanjian, pada akhir periode perjanjian, MJS telah mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun di atas lahan tersebut kepada AP II. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian lahan dan Pengalihan Pemilikan Fasilitas Bandara Internasional Hotel Nomor BAC.06.04/00/07/2021/4651 tanggal 28 Juli 2021.

Selain menerima kembali lahan yang dikerjasamakan, AP II juga menerima seluruh fasilitas yang dibangun di atas lahan tersebut dengan total nilai sebesar Rp94.031.000. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Joko Suratno sesuai dengan laporannya per tanggal 23 Juli 2021. AP II mencatat penerimaan aset tersebut pada aset tetap dan mengakui pendapatan lain-lain pada laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2021.

Berdasarkan Berita Acara Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial AP II Nomor BAC.15.02/00/10/2021/4815 tanggal 13 Oktober 2021, telah dilaksanakan pengakhiran kerja sama antara AP II (Persero) dengan PT Mandara Jasindo Sena sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Nomor SPKL.01/TU.308/PAP II-91 yang dimulai pada tanggal 5 Maret 1991.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on Acceptance of Land Transfer and Land Rights ("HGB") No. 15.02.01/00/05/2008/101 dated May 21, 2008, MJS physically submit a land area of 100,000 sqm and 4 (four) HGB to AP II.

Such release of Land Rights has been ratified by the Deed No. 4 of Muhammad Taufiq, S.H., dated April 16, 2009.

In 2021, the period of Land Use Agreement of Soekarno-Hatta Airport has ended as documented in Berita Acara Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.02/00/10/2021/4815 dated October 13, 2021. In accordance with the agreement, at the end of the agreement period, MJS has returned the land and transfer the ownership of all the facilities that have been built on the land to AP II. This has been documented in the Minutes of Land Return and Transfer of Ownership of Hotel International Airport Facilities Number BAC.06.04/00/07/2021/4651 dated July 28, 2021.

In addition to receiving back the land, AP II also received all the facilities built on the land with a total value of Rp94,031,000. The value is based on the Valuation Report conducted by KJPP Joko Suratno as reported in its report as of July 23, 2021. AP II records the receipt of these assets as fixed assets and recognizes other income in the 2021 consolidated financial statements.

Based on the Minutes of Termination AP II Number BAC.15.02/00/10/2021/4815 dated October 13, 2021, regarding the Utilization of Commercial Facilities Agreement, the termination agreement between AP II and PT Mandara Jasindo Sena has been carried out as stated in Land Use Agreement Number SPKL.01/TU.308/PAP II-91 that started on March 5, 1991.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

- a) Pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui nomor perjanjian 0060.1/PERJ/DF/HIN/X/2022 atau nomor 4222/EXT/PP/DKMR/2022 atau nomor 0051/PERJ/DIRUT/HIP/X/2022, telah terjadi perjanjian novasi antara HIN, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIP) atas perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang. Dalam perjanjian novasi sepakat bahwa HIN dan HIP dengan ini memberikan persetujuan atas penunjukan dan pengalihan kepada HIP atas kewajiban pembayaran perjanjian serta perubahannya sesuai dengan nilai yang dibukukan oleh HIN dan telah menjadi nilai valuasi HIP sebesar Rp9.252.582 sehingga pelaksanaan kewajiban pembayaran serta perubahannya yang akan dilaksanakan HIP kepada PP sebesar Rp9.252.582. Perjanjian novasi ini berlaku efektif sejak tanggal efektif dan akan tetap berlaku hingga pelaksanaan kewajiban sebesar Rp9.252.582 telah diselesaikan oleh HIP.
- b) HIN mengadakan perjanjian kerjasama penerbitan BRI Corporate Card dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) berdasarkan perjanjian Nomor 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 atau nomor B.43-CDD/CMA/10/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022. Bentuk kerjasama ini Bank BRI akan memberikan fasilitas *credit line* kepada HIN dengan tingkat suku bunga kartu kredit yang berlaku di Bank, dengan ketentuan bahwa suku bunga tersebut tidak berlaku jika pembayaran tagihan untuk penggunaan BRI Corporate Card dilakukan secara penuh/lunas sebelum atau pada saat jatuh tempo, besarnya iuran tahunan senilai Rp200 per tahun untuk setiap tahun sementara biaya keterlambatan pembayaran dihitung sesuai ketentuan Bank BRI.
- c) HIN mengadakan perjanjian kerjasama tentang penggunaan aplikasi Ecopay BRI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian nomor 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 atau nomor B.43-CDD/CMA/10/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022. Bentuk kerjasama ini Bank BRI akan memberikan fasilitas *credit line* kepada HIN dengan tingkat suku bunga kartu kredit yang berlaku di Bank dengan jangka

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

- a) On October 31, 2022 through agreement number 0060.1/PERJ/DF/HIN/X/2022 or number 4222/EXT/PP/DKMR/2022 or number 0051/PERJ/DIRUT/HIP/X/2022, a novation agreement has taken place between HIN, PT Pembangunan Perumahan PP (Persero) Tbk (PP) and PT Hotel Indonesia Properti (HIP) for the contracting agreement for the redevelopment of the Inna Muara Padang Hotel. In the novation agreement agreed that HIN and HIP hereby give approval for the appointment and transfer to HIP for the payment obligations of the agreement and the changes are in accordance with the value recorded by HIN and has become HIP's valuation value of Rp9,252,582 so that the implementation of payment obligations and changes to HIP to PP is Rp9,252,582. This novation agreement is effective from the effective date and will remain valid until the implementation of the obligation amounting to Rp9,252,582 has been completed by HIP.
- b) HIN entered into a cooperation agreement the issuance of the BRI Corporate Card with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) based on agreement Number 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 or number B.43-CDD/CMA/10/2022 on October 19, 2022. This form of cooperation, Bank BRI will provide a credit line facility to HIN at the credit card interest rate that applies to the Bank, provided that the interest rate does not apply if the bill payment for using the BRI Corporate Card is made in full/paid off before or at maturity, the amount of the annual contribution is Rp200 per year for each year while the late payment fee is calculated according to Bank BRI regulations.
- c) HIN entered into a cooperation agreement regarding the use of the BRI Ecopay application with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on agreement number 0056/PERJ/VPCAFIS/HIN/X/2023 or number B.43-CDD/CMA/10/2022 on the October 19, 2022. This form of cooperation, Bank BRI will provide a credit line facility to HIN at the credit card interest rate that applies to the Bank for a period of 2 (two)

waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

years from the date the agreement was signed and will be automatically extended if there is no written notification to terminate this agreement no later than 30 (thirty) calendar days.

- d) Pada tanggal 18 Oktober 2021, HIN dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) menandatangani perjanjian No. 0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 perihal kerjasama Jasa Konstruksi Infrastruktur Dasar Untuk Revitalisasi Kawasan Sanur. Dalam kontrak tersebut, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT PP adalah Fase I: Konsultan Reverse Engineering, Konsultan Operator Area, Konsultan Detail Engineering Design dan Pekerjaan Ground Breaking dan Fase II: Kontraktor Infrastruktur Dasar. Jenis kontraknya adalah kontrak turn key dan merupakan gabungan antara lump sum dan harga satuan dengan total nilai perjanjian sebesar Rp289.304.594 dengan jangka waktu 365 hari kalender atau sejak terpenuhinya syarat dimulainya pekerjaan. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal 17 Oktober 2022.

- d) On October 18, 2021, HIN and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) signed an agreement No. 0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 regarding cooperation in Basic Infrastructure Construction Services for Revitalization of the Sanur Area. In the contract, the scope of work to be carried out by PT PP is Phase I: Reverse Engineering Consultant, Area Operator Consultant, Detail Engineering Design Consultant and Ground Breaking Work and Phase II: Basic Infrastructure Contractor. The type of contract is a turn key contract and is a combination of lump sum and unit price with a total agreement value of Rp289,304,594 with a period of 365 calendar days or from the fulfillment of the requirements for the commencement of work. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 5 working days after October 17, 2022.

Pada tanggal 8 Juli 2022, HIN dan PP melakukan perubahan perjanjian No. ADD.1.0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 dalam beberapa hal terkait dengan nilai perjanjian seluruhnya menjadi Rp284.027.610 dengan jangka waktu 397 hari kalender atau sejak terpenuhinya syarat-syarat mulai bekerja. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal 18 November 2022.

On July 8, 2022, HIN and PP amended the agreement No. ADD.1.0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 in several respects related to the total agreement value being Rp284,027,610 with a period of 397 calendar days or since fulfillment conditions for starting work. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 14 working days after November 18, 2022.

Pada tanggal 10 November 2022, HIN dan PT PP melakukan amendemen perjanjian No. ADD.2.0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 dalam beberapa hal terkait dengan nilai perjanjian sebesar Rp257.481.459 dengan jangka waktu 440 hari kalender atau karena syarat untuk memulai pekerjaan telah terpenuhi dan PPN tidak dipungut. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal 31 Desember 2022.

On November 10, 2022, HIN and PT PP amended the agreement No. ADD.2.0079.1/PERJ/DA/HIN/X/2021 in several matters related to the agreement value of Rp257,481,459 with a period of 440 calendar days or because of conditions for starting work has been fulfilled and VAT is not collected. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 14 working days after December 31, 2022.

e) Pada tanggal 20 April 2022, HIN dan PT Nindya Karya (Persero) menandatangani perjanjian No. 0018/PERJ/DA/HIN/IV/2022 perihal perjanjian jasa konstruksi Revitalisasi Hotel GIBB di kawasan Sanur. Dalam kontrak tersebut, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT NK adalah rancang bangun antara lain Revitalisasi Grand Inna Bali Beach (GIBB) dan Inna Bali Beach Garden (IBBG) serta Pembangunan Bung Karno Convention Center (BKCC) di kawasan Sanur dan fasilitas penunjangnya. Jenis perjanjian adalah kontrak *turn key* dan merupakan kombinasi *lump sum* dengan total nilai kontrak sebesar Rp898.572.910 dengan jangka waktu 16 bulan dengan pekerjaan dimulai pada tanggal 20 April 2022 dan selesai serta siap beroperasi pada tanggal 20 Agustus 2023. Pembayaran nilai kontrak dilakukan sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, yaitu paling lambat 30 hari setelah penyerahan pembayaran.

f) HIN mengadakan Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang dengan PT Cipta Karya Bumi Indah dan PT Grand Indonesia berdasarkan Akta No. 141 Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2004. Bentuk kerjasama yang disepakati dalam rangka mengembangkan Eks. Unit Hotel Indonesia dan Unit Inna Wisata dengan pola *Build Operate and Transfer* (BOT) untuk masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun.

Kompensasi yang akan diterima HIN terdiri dari penggantian biaya pindah kantor pusat selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan. Besarnya kompensasi tahunan pada 9 tahun pertama sebesar Rp10.000.000 pertahun dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp355.000.000.

Pada tanggal 22 Desember 2010, HIN menerima kompensasi sebesar Rp400.000.000 atas Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan atas Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang berdasarkan Akta No. 195 Notaris Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti di Jakarta.

e) On April 20, 2022, HIN and PT Nindya Karya (Persero) signed an agreement No. 0018/PERJ/DA/HIN/IV/2022 regarding the GIBB Hotel Revitalization construction service agreement in the Sanur area. In the contract, the scope of work to be carried out by PT NK is design and construction, including the Revitalization of Grand Inna Bali Beach (GIBB) and Inna Bali Beach Garden (IBBG) and the Development of the Bung Karno Convention Center (BKCC) in the Sanur area and its supporting facilities. The type of agreement is a turn key contract and is a lump sum combination with a total contract value of Rp898,572,910 with a period of 16 months with work starting on April 20, 2022 and completed and ready to operate on August 20, 2023. Payment of the contract value is made at once after the News Handover Event (BAST) 1 received, ie no later than 30 days after submission of payment.

f) HIN entered into Development, Ownership, Management, and Handover Agreements of Land, Buildings, and Supporting Facilities with PT Cipta Karya Bumi Indah and PT Grand Indonesia based on Deed No. 141 Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta on May 13, 2004. The agreed form of cooperation in the context of developing Ex. Hotel Indonesia Units and Inna Wisata Units with a Build Operate and Transfer (BOT) pattern for 30 years and with Optional Extension Rights for 20 years.

The compensation to be received by HIN consists of reimbursement of the cost of moving the head office during the construction period and annual compensation. Annual compensation for the first 9 years is Rp10,000,000 per year and will continue to increase in the following years so that the total becomes Rp355,000,000.

On December 22, 2010, HIN received compensation amounting to Rp400,000,000 for the Exercise of Extension of Option Rights on Development, Ownership, Management, and Handover of Land, Buildings, and Supporting Facilities based on Deed No. 195 Notary Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., substitute Notary in Jakarta.

- g) HIN mengadakan Perjanjian Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Tanah dengan cara Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*) dengan PT Karya Cipta Balindo berdasarkan Akta No. 6 Notaris Betsil Untajana, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004. Kesepakatan tersebut untuk merenovasi Golf Course dan pembangunan Club House di Unit Inna Grand Bali Beach, Bali dengan pola kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) untuk jangka waktu 25 tahun. Dengan kesepakatan ini, HIN harus menyerahkan hak penguasaan Golf Course dan Club House selama masa BOT. Sebaliknya HIN akan menerima kompensasi untuk kerugian selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan selama masa BOT. Dengan kerja sama ini HIN akan mendapat kompensasi sebesar Rp42.000.000 yang terdiri dari kompensasi kerugian selama masa konstruksi sebesar Rp1.500.000 dan kompensasi selama masa BOT sebesar Rp40.500.000.

Pada 22 Desember 2021, PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") dan PT Karya Cipta Balindo ("KCB") menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama BOT Pengembangan Bali Beach Golf Course ("BA Pengakhiran"), adapun BA Pengakhiran ini didasari atas rencana HIN untuk melakukan Revitalisasi Grand Inna Bali Beach menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan, sehingga pada 21 Juli 2021 HIN dan KCB menandatangani Komitmen Bersama penunjukan KJPP Pengakhiran Kerja Sama BOT, guna melakukan penilaian dan penghitungan atas sisa investasi yang akan dibayarkan.

Berdasarkan hasil perhitungan KJPP, didapat nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp24.000.000 terhadap nilai ini dikurangi biaya kompensasi BOT Juli – Desember 2021 sebesar Rp840.000 dan biaya novasi tenant ruko sebesar Rp427.500, sehingga total nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp22.732.500.

- g) HIN entered into a Land Use and/or Utilization Agreement through Build Operate and Transfer (BOT) with PT Karya Cipta Balindo based on Deed No. 6 Notary Betsil Untajana, S.H., Notary in Jakarta on July 14, 2004. The agreement is to renovate the Golf Course and build a Club House at the Inna Grand Bali Beach Unit, Bali with a Build Operate and Transfer (BOT) cooperation pattern for 25 years. With this agreement, HIN must transfer the ownership rights to the Golf Course and Club House during the BOT period. In return, HIN will receive compensation for losses during the construction period and annual compensation during the BOT period. With this collaboration, HIN will receive compensation of Rp42,000,000 consisting of compensation for losses during the construction period of Rp1,500,000 and compensation during the BOT period is Rp40,500,000.

On December 22, 2021, PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") and PT Karya Cipta Balindo ("KCB") signed the Minutes of Termination of the BOT Cooperation for the Development of Bali Beach Golf Course ("Termination of BA"), while the termination of BA was based on the HIN plan to revitalize Grand Inna Beach Bali into a Special Economic Zone for Health Tourism, so that on July 21, 2021, HIN and KCB signed a Joint Commitment to appoint KJPP for Termination of BOT Cooperation, to evaluate and calculate the remaining investment to be paid.

Based on the results of the KJPP calculation, the compensation value for the early termination of the BOT cooperation is Rp24,000,000 against this value less the cost of compensation for BOT in July – December 2021 of Rp840,000 and the novation fee for shophouse tenants of Rp427,500 so the total value of compensation for early termination of BOT cooperation is Rp22,732,500.

- h) Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang No. 38/PERJ/DIRUT/HIN/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan telah dilakukan addendum Pertama Kontrak Sewa Ruang tanggal 10 Oktober 2016, HIN menyewakan sebuah ruangan di Menara BCA Lantai 39 kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), yaitu zona F, G, dan H yang menghadap ke sisi jalan Teluk Betung dengan luas $\pm 605 \text{ m}^2$ selama 5 tahun. Harga sewa ruangan sebesar Rp556 per meter persegi per bulan (belum termasuk PPN). Sehingga total biaya sewa 605 meter persegi untuk 5 tahun adalah sebesar Rp18.120.040 belum termasuk biaya lainnya seperti *service charge*, parkir, pemakaian listrik dan telepon yang akan disesuaikan tarif yang berlaku umum untuk sewa di gedung Menara yang ditagih dari PT Grand Indonesia. Kontrak berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dimulai sejak tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut, kontrak dapat diperpanjang dengan melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pada 26 Oktober 2021, HIN dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) telah menandatangani Addendum Ketiga Kontrak Sewa Ruang No. 0083/ADD/PERJ/DZ/HIN/X/2021 adapun dalam perjanjian ini disepakati sewa ruangan di Menara BCA Lantai 39 untuk Zona A, Zona F, Zona G, dan Zona H, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026. Adapun total nilai sewa ruangan yang disepakati untuk jangka waktu tersebut adalah sebesar Rp15.724.800 adapun terhadap nilai tersebut disepakati untuk *set-off* dengan sebagian nilai tunggakan kewajiban HIN berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan, adapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Restrukturisasi Utang dan Pengalihan Kewajiban antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour dan PT Hotel Indonesia Properti, No. 0076/PERJ/DF/HIN/IX/2021 tanggal 24 September 2021.

- h) Based on the Room Rental Agreement No. 38/PERJ/DIRUT/HIN/XXI/2015 dated December 15, 2015, and the First Addendum to the Room Rental Contract was made on October 10, 2016, HIN leased a room at Menara BCA 39th Floor to PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero), namely zones F, G, and H facing the side of Teluk Betung road with an area of $\pm 605 \text{ sqm}$ for 5 years. The room rental price is Rp556 per square meter per month (excluding VAT). So that the total rental fee of 605 square meters for 5 years is Rp18,120,040 not including other costs such as service charges, parking, electricity, and telephone usage which will be adjusted to the generally accepted rate for rent in the Menara building which is billed from PT Grand Indonesia. The contract is valid for 5 years starting from the date of signing the contract, the contract can be extended by giving written notification at least 3 months before the contract period ends.

On October 26, 2021, HIN and PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) signed the Third Addendum to the Room Lease Contract No.: 0083/ADD/PERJ/DZ/HIN/X/2021, while in this agreement it was agreed to rent a room in the Tower BCA Floor 39 for Zone A, Zone F, Zone G, and Zone H, for 5 (five) years starting from December 15, 2021, until December 14, 2026. The total agreed rental value for this period is Rp15,724,800 as for that value, it was agreed to set off with a portion of the value of the arrears of HIN's obligations based on the Land Utilization Agreement, while this is as stipulated in Article 7 of the Debt Restructuring and Transfer of Liability Agreement between PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour and PT Hotel Indonesia Properti, No. 0076/PERJ/DF/HIN/IX/2021 dated September 24, 2021.

- i) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. LHE-282/PW22/2017 Tanggal 10 Juli 2017 mengenai hambatan kelancaran pembangunan atas klaim tambahan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pelaksanaan proyek Inaya Putri Bali, Kedua belah pihak sepakat untuk menerima hasil evaluasi BPKP untuk menerima klaim tambahan atas *cost of money* sebesar Rp5.915.072, hasil perhitungan tersebut telah disesuaikan dengan basis tingkat suku bunga BI. Semula, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan 6 item atas biaya kompensasi/ganti rugi perihal IMB akibat penambah luasan, CAR (*Contractor All Risk*), biaya perencanaan dan pengembangan, *Overhead* Kontrak Induk, *Overhead* Kontrak Lanjutan, dan *Cost of Money*. Namun, hanya *Cost of Money* yang disepakati atas klaim Tambahan kepada pihak HIN. Jumlah total keseluruhan utang HIN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sesuai dengan surat Direktur Operasi Waskita, No. 1273/WK/DIR/2017 tanggal 28 Juli 2017, perihal kepastian pembayaran Tagihan Proyek Inaya Putri Bali, adalah sebesar Rp41.161.105 dan ditambahkan dengan klaim atas *Cost of Money* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebesar Rp5.915.072.
- j) HIN mengadakan perjanjian pembangunan Hotel Grand Inna Muara Padang dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Dalam proses pembangunan tersebut, terjadi pekerjaan tambah kurang yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero). Atas nilai dari pekerjaan tambah kurang tersebut masih belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan perbedaan pengakuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan kajian atas pekerjaan tambah kurang tersebut. Sampai dengan tanggal laporan ini, masih dalam proses kajian dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- i) *Based on the Evaluation Report of the Financial and Development Supervisory Agency for the Province of Bali No. LHE-282/PW22/2017 dated July 10, 2017 regarding the obstacles to the smooth development of PT Waskita Karya (Persero) Tbk's additional claims on the implementation of the Inaya Putri Bali project, both parties agreed to accept the results of the BPKP evaluation to receive an additional claim on the cost of money amounting to Rp5,915,072, the calculation results have been adjusted to the basis of the BI rate. Initially, PT Waskita Karya (Persero) Tbk proposed 6 items for compensation/ compensation costs regarding the IMB due to the increase in area, CAR (Contractor All Risk), planning and development costs, Master Contract Overhead, Continuation Contract Overhead, and Cost of Money. However, only the Cost of Money was agreed upon for the Additional claim to HIN. 1273/WK/DIR/2017 dated July 28, 2017, regarding the certainty of payment of the Inaya Putri Bali Project Bill, amounting to Rp41,161,105 and added to the claim for Cost of Money as previously explained of Rp5,915,072.*
- j) *HIN entered into an agreement to build Grand Inna Muara Padang Hotel with PT Pembangunan Perumahan (Persero). In the development process, there was additional work carried out by PT Pembangunan Perumahan (Persero). On the value of the added work less there is still no agreement between the two parties. To resolve the difference in recognition, both parties agreed to appoint the Financial and Development Supervisory Agency to conduct a study on the added or less work. As of the date of this report, it is still in the process of being reviewed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).*

Merujuk pada surat PT PP Nomor 364/EXT/PP/DU/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Penyelesaian Piutang Proyek HIN Padang yang dimana dalam surat tersebut disampaikan Hasil Laporan Audit BPKP dengan total sebesar Rp17.073.575 ditambah dengan Pekerjaan Up Grade yang sudah di sepakati oleh HIN melalui surat No. 742/DIOPSDM/HIN/08/2011 sebesar Rp2.027.741 dengan *Grand Total* Rp19.101.316 Berdasarkan hal tersebut PT PP mengajukan permohonan untuk dilakukannya pertemuan erjasa dalam penyelesaian kewajiban piutang PT PP. Sampai dengan tanggal laporan ini, belum ada pertemuan antara HIN dengan PP.

Referring to PT PP's letter Number 364/EXT/PP/DU/2019 dated September 10, 2019, regarding the Settlement of Receivables for the Padang HIN Project, which in the letter submitted the results of the BPKP Audit Report with a total of Rp17,073,575 plus the work Up Grade which has been approved by HIN through letter No. 742/DIOPSDM/HIN/08/2011 amounting to Rp2,027,741 with a Grand Total of Rp19,101,316 Based on this, PT PP applied to a joint meeting to settle PT PP's debt obligations. As of the date of this report, there has been no meeting between HIN and PP.

- k) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sewa tanah dan bangunan (ex Suzuki) di kawasan Grand Inna Bali Beach No. 0006/PERJ/DIRPB/HIN/II/2021 antara HIN dengan Bapak Ketut Bagus Angga Yudistira, adapun tanah dan bangunan seluas ±739 m² tersebut akan dimanfaatkan sebagai *café, fashion boutique, penyewaan motor, UTV dan Storage Jet Ski*, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak 15 Maret 2021 hingga 14 Maret 2026, dengan nilai sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp550.000.
- l) Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan antara HIN dengan PT Pertamina Bina Medika IHC No. 0099/PERJ/DZ/HIN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, disepakati sewa lahan di kawasan Grand Inna Bali Beach seluas ±5 Ha (lima hektar) untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m² per tahun sebesar Rp172 dengan total nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp258.000.000. HIN dan PT Pertamina Bina Medika IHC sepakat bahwa harga sewa lahan tersebut akan tetap berlaku selama periode sewa lahan dan tidak akan dilakukan kenaikan atas harga sewa lahan dalam kondisi apapun dan sepakat bahwa pembayaran harga sewa lahan akan dibayarkan sekaligus untuk periode sewa dan dilakukan pada tanggal efektif.

- k) Based on the Cooperation Agreement for renting land and buildings (ex Suzuki) in the Grand Inna Bali Beach area No. 0006/PERJ/DIRPB/HIN/II/2021 between HIN and Mr. Ketut Bagus Angga Yudistira, as for the land and building covering an area of ±739 sqm will be used as a café, fashion boutique, motorbike rental, UTV, and Storage Jet Ski, for a period of 5 (five) years, starting from March 15, 2021, to March 14, 2026, with a 5 (five) year rental value of Rp550,000.*
- l) Based on the Land Lease Agreement between HIN and PT Pertamina Bina Medika IHC No. 0099/PERJ/DZ/HIN/ XII/2021 dated December 10, 2021, it was agreed to lease land in the Grand Inna Bali Beach area of ±5 Ha (five hectares) for 30 years, with a rental value per sqm per year of Rp172 with a total rental value of Rp258,000,000. HIN and PT Pertamina Bina Medika IHC agreed that the land rental price would remain in effect during the land lease period and there would be no increase in the land rental price under any circumstances and agreed that payment of the land rental price would be paid all at once for the rental period and made on the effective date.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- m) Pada tanggal tanggal 16 Maret 2022 PT Hotel Indonesia Group menandatangani perjanjian sewa kendaraan dengan Koperasi Tamansari berdasarkan perjanjian No. 023/SPK/KOPTAM/2022 atas sewa mobil Honda CRV nomer polisi B 1895 TJW dengan jangka waktu sewa kendaraan selama tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2027 besar biaya sewa Tahun I (Satu) Rp15.300, Tahun II (Dua) Rp14.800, Tahun III (Tiga) Rp14.300, Tahun IV (Empat) Rp13.800, Tahun V (Lima) Rp13.300.
- n) Pada tanggal tanggal 20 April 2022 PT Hotel Indonesia Group menandatangani perjanjian sewa kendaraan dengan Koperasi Tamansari berdasarkan perjanjian No. 035/SPK/KOPTAM/2022 atas sewa mobil Honda CRV nomer polisi B1958TJW dengan jangka waktu sewa kendaraan selama tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2027 besar biaya sewa Tahun I (Satu) Rp15.600, Tahun II (Dua) Rp15.100, Tahun III (Tiga) Rp14.600, Tahun IV (Empat) Rp14.100, Tahun V (Lima) Rp13.600.
- o) HIN Pada tanggal 20 April 2022 melalui perjanjian Nomor 006/LGL-HIG/PERJ/IV/ 2022 atau Nomor Perjanjian APH.027/HK.09.01/IV/ 2022/DUTA, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Angkasa Pura Hotel (APH) yaitu pengelolaan dan pengoperasian cordia hotel di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin sesuai dengan standar Hotel HIG, Jangka waktu perjanjian adalah sebelum Hotel beroperasi dan tahap persiapan pembukaan (*pre-opening*) sampai dengan dimulainya *trial/soft opening* Hotel dan tahap setelah Hotel beroperasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pembukaan hotel dengan menerima tamu berbayar (*soft opening*).
- p) Pendapatan jasa yang diterima oleh PT Hotel Indonesia Group (HIG) dari HIN adalah *joining fee* sebesar Rp75.000.000, *Basic Management Fee* sebesar 2,5% dari pendapatan kotor Hotel perbulan, selain itu HIG juga akan mendapatkan *Insentif Fee* sebesar 3% jika *Gross Operating Profit* (GOP) mencapai 30% s/d 35%, 4% jika GOP mencapai 36% s/d 40%, 5% jika GOP mencapai 41% s/d 45%, dan 6% jika GOP mencapai 46% atau lebih. HIG juga akan mendapatkan *Marketing Fee* sebesar 1% dari pendapatan kamar hotel perbulan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- m) On March 16, 2022 PT Hotel Indonesia Group signed a vehicle rental agreement with the Tamansari Cooperative based on agreement No. 023/SPK/KOPTAM/2022 for the rental of a Honda CRV car, police number B 1895 TJW with a vehicle rental period of March 6, 2022 up to March 16, 2027 the rental fee for Year I (One) is Rp15,300, Year II (Two) is Rp14,800, Year III (Three) is Rp14,300, Year IV (Four) Rp13,800, Year V (Five) Rp13,300.
- n) On April 20, 2022 PT Hotel Indonesia Group signed a vehicle rental agreement with the Cooperative Tamansari based on agreement No. 035/SPK/KOPTAM/2022 for renting a Honda CRV car with police number B1958TJW with a vehicle rental period from 20 April 2022 to 20 April 2027, the amount of the rental fee for Year I (One) is Rp15,600, Year II (Two) Rp15,100, Year III (Three) Rp14,600, Year IV (Four) Rp14,100, Year V (Five) Rp13,600.
- o) HIN On April 20, 2022 through agreement Number 006/LGL-HIG/PERJ/IV/2022 or Agreement Number APH.027/HK.09.01/IV/ 2022/DUTA, an agreement has been made between PT Hotel Indonesia Group and PT Angkasa Pura Hotel (APH), namely the management and operation of cordia hotels at Syamsudin Noor International Airport - Banjarmasin in accordance with HIG Hotel standards, the term of the agreement is before the hotel operates and the pre-opening stage until the start of the trial/soft opening of the hotel and the stage after The hotel operates for 10 (ten) years from the opening date of the hotel by accepting paid guests (*soft opening*).
- p) Service income received by HIG from HIN is a *joining fee* of Rp75,000,000, a *Basic Management Fee* of 2.5% of the hotel's gross income per month, in addition to that HIG will also receive an *Incentive Fee* of 3% if the GOP reaches 30% to 35%, 4% if the Gross Operating Profit (GOP) reaches 36% to 40%, 5% if the GOP reaches 41% to 45%, and 6% if the GOP reaches 46% or more. HIG will also receive a *Marketing Fee* of 1% of hotel room revenue per month.

q) Pada tanggal 1 Februari 2021 melalui perjanjian Nomor 002/DIRUT/HIG-PERJ/II/2021 atau Nomor Perjanjian 0018/PERJ/DIRUT/HIN/II/2021, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group (HIG) dengan HIN mengenai kerjasama manajemen hotel milik HIN yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang bernama Grand Inna Bali Beach, Inaya Putri Bali, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Inna Parapat, Grand Inna Padang. Jangka waktu perjanjian adalah sebelum hotel beroperasi dan tahap persiapan pembukaan (*pre-opening*) sampai dengan dimulainya *trial/soft opening* Hotel dengan besarnya Jasa *Technical Assistant* adalah sebesar nihil dan hotel beroperasi adalah 10 (sepuluh) tahun dengan besaran *basic management fee* adalah sebesar 3% pendapatan kotor/*Gross Revenue* perbulan. Selain *Basic Management Fee*, HIG juga akan mendapatkan *Incentive Fee* sebesar 3% jika GOP mencapai 30% s.d. 35%, 4% jika GOP mencapai 35% s.d. 40%, 5% jika GOP mencapai 41% s.d. 45%, dan 6% jika GOP mencapai 45% atau lebih. HIG juga akan mendapatkan *Marketing Fee* sebesar Rp329.242 termasuk pajak setiap bulan dan pembayaran tersebut akan dilakukan dalam 12 (dua belas) tahap. Setelah ditandatangani dokumen transaksi kepemilikan dalam rangka pembentukan *Holding* Hotel BUMN, biaya jasa *Sales* dan *Marketing* diatas dinyatakan tidak berlaku seiring dengan berlakunya pembayaran *Basic Fee* dan *Incentive Fee*.

Pada tanggal 3 Mei 2021 melalui perjanjian Nomor 014/DIRUT/HIG-PERJ/X/2021 atau Nomor Perjanjian 0045.3/ADD/PERJ/DIRUT/HIN/V/2021, adanya kerjasama I terkait perjanjian kerjasama antara PT Hotel Indonesia Group dengan PT Hotel Indonesia Natour bahwa sehubungan dengan Program *Holding Hotel* BUMN, melalui Akta Pemisahan Aktiva dan Passiva Perusahaan Perseroan PT Hotel Indonesia Natour kedalam PT Hotel Indonesia Properti Nomor 31, tanggal 30 April 2021 HIN telah melakukan pemisahan Aktiva dan Passiva 11 Aset hotelnya kepada PT Hotel Indonesia Properti. Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pemisahan maka seluruh kebijakan atas 11 Aset Hotel menjadi kewenangan PT Hotel Indonesia Properti. Maka dari itu, perjanjian kerjasama

q) On February 1, 2021, through Agreement Number 002/DIRUT/HIG-PERJ/II/2021 or Agreement Number 0018/PERJ/DIRUT/HIN/II/2021, there has been an agreement between PT Hotel Indonesia Group (HIG) and HIN regarding hotel management collaboration that uses one of HIG hotel brands, namely Grand Inna Bali Beach, Inaya Putri Bali, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Inna Parapat, Grand Inna Padang. The term of the agreement is before the Hotel operates and the pre-opening preparation stage until the start of the *trial/soft opening* Hotel with a *Technical Assistant* Services amount of nil and the Hotel operates for 10 (ten) years with a basic management fee of 3% of revenue. Gross / Gross Income per month. In addition to the *Basic Management Fee*, HIG will also get an *Incentive Fee* of 3% if GOP reaches 30% to 35%, 4% if GOP reaches 35% to 40%, 5% if GOP reaches 41% to d 45%, and 6% if GOP reaches 45% or more. HIG will also get a *Marketing Fee* of Rp329,242 including tax every month and payment will be made in 12 (twelve) stages. After signing the ownership transaction document in the context of establishing a *SOEs Holding Hotel*, the *Sales* and *Marketing* service fees above are declared invalid by the payment of the *Basic Fee* and *Incentive Fee*.

On May 3, 2021 through agreement Number 014/DIRUT/HIG-PERJ/X/2021 or Agreement Number 0045.3/ADD/PERJ/DIRUT/HIN/V/2021, there is an addendum I related to the cooperation agreement between PT Hotel Indonesia Group and PT Hotel Indonesia Natour that in connection with the *SOEs Hotel Holding Program*, through the *Deed of Separation of the Company's Assets and Liabilities* of the Company PT Hotel Indonesia Natour into PT Hotel Indonesia Properti Number 31, dated April 30, 2021 HIN has separated the *Assets and Liabilities* of 11 of its hotel assets to PT Hotel Indonesia Properti. That as of the signing of the *Deed of Separation*, all policies on 11 Hotel Assets become the authority of PT Hotel Indonesia Properti. Therefore, the HIN-owned Hotel management cooperation

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

manajemen Hotel milik HIN yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang bernama Grand Inna Bali Beach. Dengan adanya perubahan di bagian biaya *Sales and Marketing Fee*.

- r) Pada tanggal 3 Mei 2021 melalui perjanjian Nomor 0001.1b/PERJ/DIR/HIP/V/2021, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group (HIG) dengan PT Hotel Indonesia Properti (HIP) yaitu menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG yang bernama Merusaka Nusa Dua, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Khas Parapat dan Truntum Padang. Jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga penandatanganan Akta Jual Beli Saham antara PT Hotel Indonesia Natour dan Koperasi Grand Inna Bali Beach, selaku pemegang saham dengan PT Wijaya Karya Realty dalam rangka program integrasi dan peningkatan nilai hotel BUMN.
- s) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui Nomor Perjanjian HK.02.09/A.DIR.WR.4414/2021 atau Nomor 016/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, HIG dan PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel. Dalam perjanjian tersebut, WIKA Realty memberikan izin pengelolaan hotel milik WIKA Realty kepada PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan HIG setuju untuk mengelola Hotel-hotel milik WIKA Realty sebagai berikut: Hotel Khas Ampel Surabaya, Hotel Khas Pekalongan, Hotel Khas Semarang, Hotel Khas Malioboro, Hotel Khas Makasar, Hotel Khas Pekanbaru, Hotel Khas Tugu Yogyakarta, Hotel Khas Gresik, dan Hotel Khas Tegal. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel. Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif. Sebagai kontra prestasi atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban HIG dengan baik dan sesuai dengan perjanjian maka HIG mendapatkan imbalan jasa sebagai berikut:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

agreement uses one of HIG's hotel brands named Grand Inna Bali Beach. With the change in the cost of *Sales and Marketing Fee*.

- r) On May 3, 2021, through agreement Number 0001.1b/PERJ/DIR/HIP/V/2021, there has been an agreement between PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIP), namely using one of the hotel brands owned by HIG named Merusaka Nusa Dua, Inna Bali Heritage, Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, Grand Inna Tunjungan, Inna Tretes, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Samudra, Grand Inna Medan, Khas Parapat and Truntum Padang. The term of the agreement is from the signing of this agreement until the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares between PT Hotel Indonesia Natour and the Grand Inna Bali Beach Cooperative, as shareholders with PT Wijaya Karya in the context of the integration program and increasing the value of SOEs hotels.
- s) On December 10, 2021 through Agreement Number HK.02.09/A.DIR.WR.4414/2021 or Number 016/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, HIG and PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) agreed to make and bind themselves in the hotel management agreement. In the agreement WIKA Realty gave PT Hotel Indonesia Group (HIG) a hotel management license owned by WIKA Realty and HIG agreed to manage the hotels owned by WIKA Realty as follows: Hotel Khas Ampel Surabaya, Hotel Khas Pekalongan, Hotel Khas Semarang, Hotel Khas Malioboro, Hotel Khas Makasar, Hotel Khas Pekanbaru, Hotel Khas Tugu Yogyakarta, Hotel Khas Gresik, dan Hotel Khas Tegal. This agreement is effective from the effective date with HIG's obligation to carry out hotel management. Minutes of Operation until December 31, 2021, plus the first management period and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results. As a counter achievement for implementing HIG's obligations properly and in accordance with the agreement, HIG will receive the following service fees:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Biaya dasar pengelolaan (*Basic Fee*) adalah sebesar 2,5% dari Laba Kotor Usaha (*Gross Operating Profit*) setiap bulan kalender yang bersangkutan.
- Biaya Insentif pengelolaan hotel dimana imbalan yang diterima adalah 0% dari *Gross Operating Profit* (GOP) jika GOP hotel tidak mencapai 30%, 2% dari GOP jika GOP hotel mencapai 30% s.d. 35%, atau 3% dari GOP jika GOP hotel mencapai >35% s.d. 40%, atau 4% dari GOP jika GOP hotel mencapai >40%.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh WIKA Realty dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah WIKA Realty menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh WIKA Realty secara lengkap dan benar.

- t) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui Nomor Perjanjian 0023/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau Nomor 019/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel milik HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel-hotel milik HIPRO sebagai berikut: Truntum Padang. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel setak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- The basic management fee (*Basic Fee*) is 2.5% of Gross Operating Profit for each calendar month concerned.
- Incentive costs for hotel management where the reward received is 0% of Gross Operating Profit (GOP) if the GOP of the hotel does not reach 30%, 2% of the GOP if the GOP of the hotel reaches 30% to 30%. 35%, or 3% of GOP if the hotel's GOP reaches >35% to 40%, or 4% of GOP if the hotel's GOP reaches >40%.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by WIKA Realty within 30 calendar days of the following month after WIKA Realty receives from HIG the monthly management report for the relevant calendar month, along with invoices and other supporting documents. Which has been verified by WIKA Realty completely and correctly.

- t) On December 10, 2021, through Agreement Number 0023/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or Number 019/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in an agreement hotel management, in the agreement PT HIPRO granted HIPRO's hotel management license to HIG and HIG agreed to manage HIPRO's hotels as follows: Truntum Padang. This agreement is valid from the effective date with the obligation of HIG to carry out hotel management from the date of the Minu'es of Operation until December 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

- u) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui Nomor Perjanjian 0021/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau Nomor 017/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut PT HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel milik PT HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel milik PT HIPRO yaitu Hotel Merusaka Nusa Dua. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Sebagai kontraprestasi atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban HIG dengan baik dan sesuai dengan perjanjian maka HIG mendapatkan imbalan jasa sebagai berikut:

- Biaya dasar pengelolaan (*Basic Fee*) adalah sebesar 2,5% dari Laba Kotor Usaha (*Gross Operating Profit*) setiap bulan kalender yang bersangkutan.
- Biaya Insentif pengelolaan hotel dimana imbalan yang diterima adalah 0% dari *Gross Operating Profit* (GOP) jika GOP hotel tidak mencapai 30%, 2% dari GOP jika GOP hotel mencapai 30% s.d. 35%, atau 3% dari GOP jika GOP hotel mencapai >35% s.d. 40%, atau 4% dari GOP jika GOP hotel mencapai >40%.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

- u) On December 10, 2021 through Agreement Number 0021/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or Number 017/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in a hotel management agreement, in the agreement PT HIPRO grants a hotel management permit belonging to PT HIPRO to HIG and HIG agrees to manage a hotel owned by PT HIPRO, namely the Merusaka Nusa Dua Hotel. This agreement is valid from the effective date with the obligation of HIG to carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until December 31, 2021 plus the first management period and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

As a contravention of the implementation of HIG's obligations properly and in accordance with the agreement, HIG receives the following compensation for services:

- The basic management fee (*Basic Fee*) is 2.5% of Gross Operating Profit for each calendar month concerned.
- Incentive costs for hotel management where the reward received is 0% of Gross Operating Profit (GOP) if the GOP of the hotel does not reach 30%, 2% of the GOP if the GOP of the hotel reaches 30% to 30%. 35%, or 3% of GOP if the hotel's GOP reaches >35% to 40%, or 4% of GOP if the hotel's GOP reaches >40%.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

- v) Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui Nomor Perjanjian 0022/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 atau Nomor 018/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Grup (HIG) dan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan hotel, dalam perjanjian tersebut HIPRO memberikan ijin pengelolaan hotel milik HIPRO kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola Hotel-hotel milik PT HIPRO sebagai berikut: Khas Parapat. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh PT HIPRO dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah PT HIPRO menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh PT HIPRO secara lengkap dan benar.

- w) Tanggal 10 Desember 2021 PT Hotel Indonesia Group menandatangani perjanjian Pengelolaan Hotel dengan PT Senggigi Pratama Internasional (SPI) dengan Nomor Perjanjian 020/DIRUT/HIGPERJ/XII/2021 dan 8005/PERJ/SPI-DIR/XII/2021 dalam perjanjian tersebut SPI memberikan izin pengelolaan hotel milik SPI kepada HIG dan HIG setuju untuk mengelola hotel milik SPI yaitu Hotel Merumatta. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif dengan kewajiban HIG melaksanakan pengelolaan hotel sejak tanggal Berita Acara Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ditambah masa pengelolaan pertama dan dapat di perpanjang untuk masa pengelolaan kedua apabila pengelolaan pertama menunjukkan Hasil Evaluasi Kinerja Positif.

Sebagai kontraprestasi atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban HIG dengan baik dan sesuai dengan perjanjian maka HIG mendapatkan imbalan jasa sebagai berikut:

- v) On December 10, 2021, through Agreement Number 0022/PERJ/DIRUT/HIP/XII/2021 or Number 018/DIRUT/HIG-PERJ/XII/2021, PT Hotel Indonesia Group (HIG) and PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) agreed to make and bind themselves in an agreement hotel management, in the agreement HIPRO granted HIPRO hotel management license to HIG and HIG agreed to manage HIPRO hotels as follows: Khas Parapat. This agreement is effective from the effective date with HIG obligation to Carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until december 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

Payment for service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by PT HIPRO within 30 calendar days of the following month after PT HIPRO receives from HIG a monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents which has been verified by PT HIPRO completely and correctly.

- w) On December 10, 2021, PT Hotel Indonesia Group signed a Hotel Management Agreement with PT Senggigi Pratama Internasional (SPI) with agreement numbers 020/DIRUT/HIG PERJ/XII/2021 and 8005/PERJ/SPI-DIR/XII/2021 in the agreement SPI provides SPI's hotel management license to HIG and HIG agreed to manage SPI's hotel, Merumatta Hotel. This agreement is effective from the effective date with HIG's obligation to carry out hotel management from the date of the Minutes of Operation until December 31, 2021, plus the first management period, and can be extended for a second management period if the first management shows Positive Performance Evaluation Results.

As a contravention of the implementation of HIG's obligations properly and in accordance with the agreement, HIG receives the following compensation for services:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Biaya dasar pengelolaan (*Basic Fee*) adalah sebesar 2,5% dari Laba Kotor Usaha (*Gross Operating Profit*) setiap bulan kalender yang bersangkutan.
- Biaya Insentif pengelolaan hotel dimana imbalan yang diterima adalah 0% dari *Gross Operating Profit* (GOP) jika GOP hotel tidak mencapai 30%, 2% dari GOP jika GOP hotel mencapai 30% s.d. 35%, atau 3% dari GOP jika GOP hotel mencapai >35% s.d. 40%, atau 4% dari GOP jika GOP hotel mencapai >40%.

Pembayaran atas imbalan jasa dapat diajukan setiap bulan kalender dalam satu tahun buku oleh HIG dan dibayarkan oleh SPI dalam waktu 30 hari kalender pada bulan berikutnya setelah SPI menerima dari HIG laporan manajemen bulanan untuk bulan kalender yang relevan, berikut tagihan *invoice* dan dokumen pendukung lainnya yang telah di verifikasi oleh SPI secara lengkap dan benar.

- x) Pada tanggal 18 April 2019, melalui perjanjian Nomor 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 atau Nomor Perjanjian 002/IFPRO/PKS/IV/2019, telah terjadi perjanjian antara PT Hotel Indonesia Group (HIG) dengan PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) yaitu kerjasama manajemen Hotel milik IFPRO yang menggunakan salah satu merek Hotel milik HIG, yang terletak di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores Barat.

Jangka waktu perjanjian adalah sebelum Hotel Beroperasi dan tahap persiapan pembukaan (*pre-opening*) sampai dengan dimulainya *trial/soft opening* Hotel dengan besarnya Jasa *Technical Assistant* adalah sebesar Rp735.000 yang akan dibayarkan selama 4 tahap dan setelah Hotel beroperasi adalah 10 (sepuluh) tahun dengan besaran *basic management fee* adalah sebesar 2% pendapatan kotor/*Gross Revenue* perbulan. Selain *Basic Management Fee*, HIG Juga akan mendapatkan *Insentif Fee* sebesar 3% jika GOP mencapai 35%, 4% jika GOP mencapai 36% s.d. 40%, 5% jika GOP mencapai 41% s.d. 45%, dan 6% jika GOP mencapai 46% atau lebih.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- The basic management fee (*Basic Fee*) is 2.5% of Gross Operating Profit for each calendar month concerned.
- Incentive costs for hotel management where the reward received is 0% of Gross Operating Profit (GOP) if the GOP of the hotel does not reach 30%, 2% of the GOP if the GOP of the hotel reaches 30% to 35%, or 3% of GOP if the hotel's GOP reaches >35% to 40%, or 4% of GOP if the hotel's GOP reaches >40%.

Payment of service fees can be submitted every calendar month in one financial year by HIG and paid by SPI within 30 calendar days of the following month after SPI receives from HIG the monthly management report for the relevant calendar month, including invoices and other supporting documents that have been submitted. Verified by SPI completely and correctly.

- x) On April 18, 2019, through agreement Number 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 or Agreement Number 002/IFPRO/PKS/IV/2019, there was an agreement between PT Hotel Indonesia Group (HIG) with PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) is a hotel management collaboration owned by IFPRO that uses one of the hotel brands owned by HIG, which is located in Labuan Bajo, West Manggarai, West Flores.

The term of the agreement is before the Hotel Operates and the pre-opening stage until the start of the trial/soft opening of the Hotel with the amount of Technical Assistant Services is Rp735,000 which will be paid in 4 stages and after the hotel operates is 10 (ten) years with a basic management fee of 2% gross income per month. In addition to the Basic Management Fee, HIG will also get an Incentive Fee of 3% if the GOP reaches 35%, 4% if the GOP reaches 36% to 40%, and 5% if the GOP reaches 41% to 45%, and 6% if the GOP reaches 46 % or more.

HIG juga akan mendapatkan *Marketing Fee* sebesar 1,5% dari pendapatan kamar Hotel, dan akan dibayarkan setiap bulannya paling lambat dalam waktu 30 hari setelah HIG menyampaikan secara tertulis laporan bulanan mengenai hasil pendapatan kotor dan besarnya Biaya Operasional Hotel, berikut tagihan kepada IFPRO secara lengkap.

HIG will also receive a Marketing Fee of 1.5% of hotel room revenue and will be paid every month no later than 30 days after HIG submits a written monthly report regarding the results of gross income and the amount of Hotel Operational Costs, along with invoices to IFPRO in full.

- y) Tanggal 12 Oktober 2019 PT Hotel Indonesia Group (HIG) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perum Jasa Tirta II atas pengelolaan Hotel, Restoran dan Bungalow yang terletak di Hotel Pesangrahan, Jatiluhur, Purwakarta. HIG berhak untuk memperoleh *joining fee* sebesar Rp150.000.000. HIG juga berhak untuk memperoleh *management fee* sebesar 2%-5% dari laba usaha kotor, tergantung dari *Gross Operating Profit* (GOP) dari hotel yang dikelola, bila GOP 30-35% maka *management fee* adalah sebesar 2%, bila GOP 36-40% maka *management fee* adalah 3%, bila GOP adalah 41-45% maka *management fee* sebesar 4%, bila GOP melebihi 46% maka *management fee* adalah sebesar 5% selain itu HIG juga berhak untuk mendapatkan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 2% dari pendapatan kamar per bulan, dan 10% dari nilai transaksi bila terdapat penjualan melalui portal HIG.

- y) On October 12, 2019, PT Hotel Indonesia Group (HIG) signed a cooperation agreement with Perum Jasa Tirta II for the management of the Hotel, Restaurant and Bungalow located at Hotel Pesangrahan, Jatiluhur, Purwakarta. HIG has the right to obtain a joining fee of Rp150,000,000. HIG is also entitled to receive a management fee of 2%-5% of gross operating profit, depending on the Gross Operating Profit (GOP) of the hotel being managed, if the GOP is 30-35%, the management fee is 2%, if the GOP is 36-40% then the management fee is 3%, if the GOP is 41-45% then the management fee is 4%, if the GOP exceeds 46% then the management fee is 5% besides that HIG is also entitled to get sales fees and marketing of 2% of room revenue per month, and 10% of transaction value if there are sales through the HIG portal.

- z) Pada tanggal 15 Agustus 2018 HIN Membuat Perjanjian Kerjasama pengelolaan Hotel dengan PT Bukit Asam Tbk (PT BA) dengan Nomor Perjanjian T/062.J/0400/HK.03/VIII/2018 dan No. 32.a.PERJ/DIRUT/HIN/VIII/2018 dimana maksud dan tujuan perjanjian ini sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama pengelolaan hotel yang menggunakan merek Hotel milik HIN, untuk kepentingan PT BA sesuai dengan standar perhotelan pada umumnya dan sesuai standar hotel HIN pada khususnya, antara lain standar pemberian nama di hotel dan lain-lain.

- z) On August 15, 2018, HIN made a Hotel Management Cooperation Agreement with PT Bukit Asam Tbk (PT BA) with agreement numbers T/062.J/0400/HK.03/VIII/2018 and No. 32.a. PERJ/DIRUT/HIN/VIII /2018 where the intent and purpose of this agreement is as a guideline in conducting cooperation in hotel management using the Hotel brand belonging to HIN, for the benefit of PT BA by hospitality standards in general and according to HIN hotel standards in particular, including naming standards in hotels and others.

Objek perjanjian yang dimanfaatkan oleh HIN adalah Hotel yang bernama Hotel Ombilin, dengan jumlah kamar sebanyak 21 kamar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Sawahlunto Sumatera Barat, Atas pengelolaan aset milik PT BA oleh HIN, PT BA bersedia membayar biaya jasa pengelolaan HIN melakukan jasa asistensi teknis atas persiapan hotel maupun saat

The object of the agreement used by HIN is a hotel called Hotel Ombilin, with a total of 21 rooms having its address at Jl. Ahmad Yani, Sawahlunto sub-district, West Sumatra, For the management of PT BA's assets by HIN, PT BA is willing to pay the HIN management service fee to provide technical assistance services for the hotel preparation and when the hotel is ready to

Hotel sudah siap dikelola sepenuhnya. Biaya jasa pengelolaan hotel yang berupa Biaya Dasar Pengelolaan (*Basic Fee*) dan Biaya Insentif Pengelolaan akan di berikan oleh PT BA kepada HIN dengan besaran, mekanisme, dan perhitungan sebagaimana akan dituangkan kemudian pada Berita Acara Kesepakatan.

be fully managed. Hotel management service fees in the form of Basic Management Fees and Management Incentive Fees will be given by PT BA to HIN with the amount, mechanism, and calculation as will be stated later in the Minutes of Agreement.

- aa) Pada tanggal 27 Agustus 2018 terdapat Berita Acara Kesepakatan antara PT BA dengan HIN melalui Nomor 09.2/BA/DIRUT/HIN/VIII/2018 atau Nomor T/068.1.J/0400/HK.03/VIII/2018 dimana PT BA dan HIN sepakat bahwa objek perjanjian yang dimanfaatkan oleh HIN adalah hotel sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama adalah berjumlah 21 kamar, ditambah dengan 8 kamar yang ditetapkan oleh PT BA, biaya dasar pengelolaan hotel adalah sebesar 15% dari total pendapatan kotor (*Gross Revenue*) hotel perbulan. Biaya Insentif Pengelolaan yang akan diberikan oleh PT BA kepada HIN adalah 5% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai sampai dengan 30% s.d. 35%, 6% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai sampai dengan 35% s.d. 40%, 7% dari Laba Usaha Kotor (*Gross Operating Profit*) hotel perbulan jika GOP Hotel mencapai lebih dari 40%.

- aa) On August 27, 2018, there was a Minutes of Agreement between PT BA and HIN through Number 09.2/BA/DIRUT/ HIN/VIII/2018 or Number T/068.1.J/0400/ HK.03/VIII/2018 where PT BA and HIN agrees that the object of the agreement used by HIN is the hotel as stipulated in the cooperation agreement which is 21 rooms, plus 8 rooms set by PT BA, the basic cost of hotel management is 15% of the total gross revenue of the hotel per month. Management Incentive Fee that will be given by PT BA to HIN is 5% of the hotel's Gross Operating Profit per month if the GOP of the hotel reaches 30% to 35%, 6% of Gross Operating Profit) hotel per month if the hotel's GOP reaches up to 35% to 40%, 7% of the hotel's Gross Operating Profit per month if the hotel's GOP reaches more than 40%.*

- bb) Pada tanggal 8 September 2020 melalui Nomor Perjanjian 0058/PERJ/DIRPB/HIN/IX/2020 atau Nomor 002/DIRUT/HIG-PERJ/IX/2020, atau Nomor T/404A/14300/HK.03/IX/2020, atau Nomor 004/PJJ-BMP.02/IX/2020, telah terjadi Perjanjian Novasi antara PT HIG dengan PT Bukit Multi Properti (PT BMP) atas perjanjian kerjasama pengelolaan hotel antara PT Bukit Asam Tbk (PT BA) dan HIN para pihak dalam perjanjian novasi sepakat bahwa HIN dan PT BA dengan ini memberikan persetujuan atas penunjukan dan pengalihan seluruh tugas dan tanggung jawab serta hak-hak dan manfaat yang di terima oleh Assignor berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Kesepakatan untuk sepenuhnya beralih, dilaksanakan, dan diterima manfaatnya oleh PT BMP dan PT HIG.

- bb) On September 8, 2020, through agreement Number 0058/PERJ/DIRPB/HIN/IX/2020 or Number 002/DIRUT/HIG-PERJ/IX/2020, or Number T/404A/14300/HK.03/IX/2020, or Number 004/PJJ-BMP.02/IX/2020, there has been a Novation Agreement between PT HIG and PT Bukit Multi Properti (PT BMP) on a hotel management cooperation agreement between PT Bukit Asam, Tbk (PT BA), and HIN, the parties in the novation agreement agree that HIN and PT BA hereby agree to the appointment and transfer of all duties and responsibilities as well as the rights and benefits received by the Assignor based on the Cooperation Agreement and the Minutes of Agreement to fully transfer, implement, and receive benefits by PT BMP and PT HIG.*

cc) Perjanjian dengan Perusahaan

Pada tanggal 28 Desember 2021, HIN dan Perusahaan menandatangani perjanjian No. Perjj-21.3/AVIATA-HIN/12/2021 tentang Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan sejak 1 Januari 2022. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perjanjian No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0109 tanggal 30 Desember 2022.

Dalam perjanjian ini, HIN berkewajiban untuk:

- Melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Layanan Manajemen dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- Menyiapkan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh Aviata untuk pelaksanaan pekerjaan atas layanan manajemen yang akan diberikan oleh Aviata kepada HIN.
- Melakukan pembayaran atas jasa layanan manajemen kepada Aviata sebesar nilai bersih 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan usaha terkonsolidasi dengan mengacu kepada RKAP tahunan HIN termasuk perubahannya. Apabila biaya jasa layanan manajemen yang dibayarkan berdasarkan poin tersebut menjadi kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibayarkan, maka selisih kurang atau lebih dari biaya jasa layanan manajemen akan direkonsiliasi dan dibuat berita acara untuk diperhitungkan sesuai dengan laporan keuangan auditan HIN.

PT Sarinah

- a) Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS)
Berdasarkan surat tertanggal 8 Juni 2020 Nomor 607/DIREKSI/E/VI/2020 perihal Kerjasama Bangun Guna Serah (*Building Operating Transfer*) transformasi sarinah Thamrin, PT Sarinah telah menunjuk PT Wijaya Karya Realty sebagai mitra kerjasama BOT atas Obyek BOT yaitu lantai basement sampai dengan dan termasuk lantai 5 gedung Sarinah Thamrin dengan luas total ±28.864 m².

cc) Agreement with the Company

On December 28, 2021, HIN and the Company signed agreement No. Perjj-21.3/AVIATA-HIN/12/2021 concerning Tourism and Support BUMN Holding Management Services. The term of this agreement is 12 months from January 1, 2022. The agreement has been extended until December 31, 2023 based on agreement No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0109 dated December 30, 2022.

In this agreement, HIN is obliged to:

- Fulfill all obligations under this Agreement to ensure that the Management Services are carried out in accordance with the terms and conditions of this agreement.
- Prepare and provide the necessary data and information to Aviata for the implementation of the work on the management services that will be provided by Aviata to HIN.
- Make payment for management service fees to Aviata in the amount of net value of 0.5% calculated based on consolidated business revenue referring to HIN annual RKAP including changes. If the management service fee paid based on this point becomes less or more than the amount that should be paid, then the difference of less or more than the management service fee will be reconciled and made into a report to be calculated in accordance with HIN audited financial statements.

-

PT Sarinah

- a) Build to Handover Cooperation
Based on a letter dated June 8, 2020 Number 607/Directors/E/VI/2020 regarding the collaboration to hand up (*Building Operating Transfer*) Transformation of the Sarinah Thamrin Building, PT Sarinah has visited PT Wijaya Karya Realty Cooperation with and incenses the 5th floor of the Sarinah Thamrin building with a vast A total of ± 28,864 sqm.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Total Investasi yang dilakukan atas proyek BOT tersebut ialah sebesar Rp560.723.090 dengan jangka waktu selama 30 tahun dengan *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 13,85%, para pihak sepakat bahwa nilai investasi tersebut adalah berdasarkan gambar *visioning*, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya dari pelaksanaan pemugaran objek BOT.

PT Sarinah berhak atas kompensasi bisnis dari PT Wijaya Karya Realty yang nilainya dihitung sebesar 3% dari pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah penghasilan kotor tidak termasuk PPN dan *Service Charge* dengan syarat setelah terbitnya laporan audit tahunan atas pengelolaan proyek BOT dan PT Sarinah telah membayarkan biaya sewa ruangan dan biaya-biaya lainnya atas penggunaan objek BOT.

PT Sarinah berhak melakukan audit teknis obyek BOT setiap 5 tahun sekali, dengan biaya yang ditanggung PT Sarinah sendiri dan PT Wijaya Karya Realty berhak atas Hak Melakukan Pengelolaan (HMP) selama masa BOT.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Sarinah antara PT Sarinah dengan PT Wijaya Karya Realty No. 15 tanggal 6 Mei 2021 yang menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan pelaksanaan atas kesepakatan para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dengan demikian perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir (pelengkap/turunan dari Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS).

PT Sarinah setuju untuk menyewakan bangunan kepada PT Wijaya Karya Realty seluas 22.985 m² yang terdiri dari lantai *basement*, lantai *ground*, dan lantai 1 sampai 6. Dimana jangka waktu sewa adalah selama 30 tahun dihitung sejak ditanda tangani Berita Acara Mulai Beroperasi.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The total investment made on the BOT project is Rp560,723,090 with a period of 30 years with the Internal Rate of Return (IRR) of 13.85%, the parties agreed that the investment value was based on visioning images, the scope of work, Technical specifications, and budget plans from the implementation of the restoration of objects.

PT Sarinah is entitled to business compensation from PT Wijaya Karya Realty whose value is calculated at 3% of rental income. Rental income is gross income excluding VAT and Service Charges provided that after the publication of the annual audit report on the management of the BOT project and PT Sarinah has paid the room rental fee and other costs for the use of the BOT object.

PT Sarinah has the right to conduct a technical audit of the BOT object once every 5 years, with the costs being borne by PT Sarinah itself and PT Wijaya Karya Realty entitled to the Right to Manage (HMP) during the BOT period.

Based on the Sarinah Building Lease Agreement between PT Sarinah and PT Wijaya Karya Realty No. 15 dated 6 May 2021 which states that this agreement is an implementation of the agreement of the parties as regulated in Article 11 of the Build-to-Transfer Agreement (BGS).

PT Sarinah agreed to lease a building with PT Wijaya Karya Realty with an area of 22,985 sqm consisting of a basement floor, ground floor, and floors 1 to 6. Where the lease term is 30 years from the signing of the Minutes of Operation Start.

- b) Kerjasama Operasi Hotel D'Braga
PT Sarinah melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah (*Bulid, Operate, and Tranfer/BOT*) dengan PT Wijaya Karya Gedung Tbk tentang Pengembangan Properti di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat. Pembangunan tersebut tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 649 seluas 1.763 m².

Untuk melakukan kerjasama dengan PT Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Gedung Tbk No. MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015. Sedangkan Sarinah telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara seperti tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham No. s-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah di Jl. Braga No. 10, Bandung Jawa barat.

PT Sarinah berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan ruang komersial seluas 132 m² selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan *service charge*. Sedangkan PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp81.192.000 dengan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun.

PT Sarinah tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada PT Wijaya Karya Gedung Tbk sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer, yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini. Sedangkan PT Wijaya Karya Gedung Tbk berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah kepada PT Sarinah.

- b) *D'Braga Hotel Operation Cooperation*
PT Sarinah entered into a Build, Use, Transfer (Build, Operate, and Transfer/BOT) agreement with PT Wijaya Karya Gedung Tbk regarding Property Development at Jalan Braga No. 10 Bandung - West Java. The construction of the building is stated in the Hak Guna certificate with Number 649 covering an area of 1,763 sqm.

To cooperate with PT Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has obtained the approval of the Shareholders as stated in the Shareholders' Decision outside the PT Wijaya Karya Gedung Tbk Meeting No. MJ.01.00/PS.WG.037/2015 dated November 13, 2015. Meanwhile, Sarinah has obtained approval from the Minister of State-Owned Enterprises as stated in the General Meeting of Shareholders No. s-89/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, concerning Approval for the Utilization of Assets Owned by PT Sarinah on Jl. Braga No. 10, Bandung, West Java.

PT Sarinah is entitled to a land lease payment of 3.33% of the NJOP value of the land annually as stated in the Ministry of Finance Regulation No. 33/PMK.06/2012 and is entitled to a commercial space of 132 sqm for the duration of the cooperation agreement without being charged a space rental fee and service charges. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has planned the amount of investment to be invested in building a hotel and supporting facilities with an initial investment of Rp81,192,000 with a management period of 25 years.

PT Sarinah has no obligation to provide compensation to PT Wijaya Karya Gedung Tbk as a form of submission and or transfer, which arises in this cooperation agreement. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk is obliged to return and transfer the BOT object on the date of the transfer of the building and the handover of the land to PT Sarinah.

c) Kuota Impor

PT Sarinah dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan terutama usaha impor telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan Nomor 04.PI-11.22.0438 perihal Persetujuan Impor Beras untuk keperluan lainnya (BUMN), dimana PT Sarinah diberikan alokasi kuota sebagai berikut:

- Beras Basmati dengan alokasi kuota sebesar 5.300 metrik ton.
- Beras Ketan dengan alokasi kuota sebesar 21.700 metrik ton.
- Beras Kukus dengan alokasi kuota sebesar 950 metrik ton.
- Beras Japonica dengan alokasi kuota sebesar 7.000 metrik ton.
- Beras Hom Mali dengan alokasi kuota sebesar 1.000 metrik ton.
- Beras Jasmine dengan alokasi kuota sebesar 7.300 metrik ton.

d) Perjanjian dengan Perusahaan

Pada tanggal 28 Desember 2021, Sarinah dan Perusahaan menandatangani perjanjian No. Perjj-21.4/AVIATA-SARINAH/12/2021 tentang Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan sejak 1 Januari 2022. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perjanjian No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0108 tanggal 30 Desember 2022.

Dalam perjanjian ini, Sarinah berkewajiban untuk:

- Melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Layanan Manajemen dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- Menyiapkan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh Aviata untuk pelaksanaan pekerjaan atas layanan manajemen yang akan diberikan oleh Perusahaan kepada Sarinah.
- Melakukan pembayaran atas jasa layanan manajemen kepada Perusahaan sebesar nilai bersih 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan usaha terkonsolidasi dengan mengacu kepada RKAP tahunan Sarinah termasuk perubahannya. Apabila biaya jasa layanan manajemen yang dibayarkan

c) Import Quotas

PT Sarinah in carrying out its business in the trading sector, especially the import business, has obtained approval from the Directorate General of Foreign Trade with Number 04.PI-11.22.0438 concerning the Approval for Importing Rice for Other Purposes (BUMN), in which PT Sarinah is given a quota allocation as follows:

- *Basmati rice with a quota allocation of 5,300 metric tons.*
- *Glutinous Rice with a quota allocation of 21,700 metric tons.*
- *Steamed Rice with a quota allocation of 950 metric tons.*
- *Japonica rice with a quota allocation of 7,000 metric tons.*
- *Hom Mali rice with a quota allocation of 1,000 metric tons.*
- *Jasmine rice with a quota allocation of 7,300 metric tons.*

d) Agreement with the Company

On December 28, 2021, Sarinah and the Company signed agreement No. Perjj-21.4/AVIATA-SARINAH/12/2021 concerning Tourism and Support BUMN Holding Management Services. The term of this agreement is 12 months from January 1, 2022. The agreement has been extended until December 31, 2023 based on agreement No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0108 dated December 30, 2022.

In this agreement, Sarinah is obliged to:

- *Fulfill all obligations under this Agreement to ensure that the Management Services are carried out in accordance with the terms and conditions of this agreement.*
- *Prepare and provide the necessary data and information to Aviata for the implementation of the work on the management services that will be provided by the Company to Sarinah.*
- *Make payment for management service fees to the Company in the amount of net value of 0.5% calculated based on consolidated business revenue referring to Sarinah annual RKAP including changes. If the management service fee paid based on this point becomes less or more than the amount that should be*

berdasarkan poin tersebut menjadi kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibayarkan, maka selisih kurang atau lebih dari biaya jasa layanan manajemen akan direkonsiliasi dan dibuar berita acara untuk diperhitungkan sesuai dengan laporan keuangan auditan Sarinah.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a) Perjanjian Pemanfaatan Materi Promosi "Prambanan Jazz Festival" (PJF) dengan PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)

TWC melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan materi promosi PJF dengan Rajawali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 361/HM.301/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa TWC berhak menggunakan Invensi Materi Promosi PJF selama jangka waktu 8 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian. TWC memiliki hak sebagai Co-Promotor PJF untuk turut serta mencari dan mendapatkan sponsor dari pihak lain di luar perjanjian dengan menggunakan Invensi Materi Promosi PJF.

Apabila akan diadakan event PJF, TWC dapat mencari *sponsorship* dengan usaha sendiri dengan kesepakatan nilai minimal sebesar Rp3.000.000. Atas pemanfaatan materi promosi tersebut, TWC telah melakukan pembayaran sebesar Rp36.548.616. Pembayaran tersebut merupakan jasa penyelenggaraan PJF ke 5 sekaligus merupakan pembayaran Royalti Invensi Materi Promosi PJF dengan *branding value* sebesar Rp37.000.000. Atas pembayaran tersebut TWC berhak mencatat sebagai aset selama masa perjanjian.

- b) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja kepada Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN)
TWC mengadakan perjanjian kerjasama pembuatan dan komersialisasi film layar lebar berdurasi 90 menit berjudul "Akhir Pekan Panjang" dengan Perum PFN berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 272/OP.302/XI/2017 pada 16 November 2017 dan Addendum Pertama

paid, then the difference of less or more than the management service fee will be reconciled and made into a report to be calculated in accordance with Sarinah audited financial statements.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a) *Agreement on the Utilization of Promotional Materials "Prambanan Jazz Festival" (PJF) with PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)*

TWC entered into a cooperation agreement for the use of PJF promotional materials with Rajawali in accordance with the Cooperation Agreement No. 361/HM.301/XI/2019 dated November 26, 2019.

In the agreement, it was agreed that TWC has the right to use PJF's Promotional Material Inventions for a period of 8 years from the date of signing the agreement. TWC has the right as Co-Promoter of PJF to participate in seeking and obtaining sponsorship from other parties outside the agreement by using PJF Promotional Material Inventions.

If a PJF event will be held, TWC can seek sponsorship with its own business with an agreement of a minimum value of Rp3,000,000. For the use of these promotional materials, TWC has made a payment amounting to Rp36,548,616. The payment is a service for organizing the 5th PJF as well as a royalty payment for the Invention of PJF Promotional Materials with a branding value amounting to Rp37,000,000. For this payment, TWC has the right to record it as an asset during the term of the agreement.

- b) *Working Capital Financing Agreement to the Produksi Film Negara Public Company (Perum PFN)*
TWC entered into a cooperation agreement for the production and commercialization of a 90-minute widescreen film entitled "Akhir Pekan Panjang" with Perum PFN based on Cooperation Agreement No. 272/OP.302/XI/2017 on November 16, 2017 and First Addendum No.

No. 160/PL.102/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018. Produksi film sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibiayai oleh Para Pihak dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebesar Rp10.000.000, dengan rincian pembiayaan dalam bentuk modal untuk produksi film berdasarkan Perjanjian ini oleh TWC sebesar Rp5.000.000, sedangkan pembiayaan dari Perum PFN sebesar Rp5.000.000 yang berasal dari pihak sponsor. Perum PFN menyatakan bahwa proses produksi film selesai dalam 1 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian.

Komponen pendapatan berdasarkan perjanjian ini terbagi atas:

- Pendapatan pra-proyek adalah pendapatan yang diterima oleh para pihak sebelum produksi film selesai sesuai jangka waktu Perjanjian, yang meliputi kelebihan penerimaan sponsorship setelah digunakan untuk menutup biaya sesuai RAB.
- Pendapatan pasca-proyek adalah pendapatan yang diterima oleh para pihak setelah produksi film dinyatakan selesai sesuai jangka waktu Perjanjian, yang meliputi penjualan tiket film.
- Pembagian Pendapatan dimaksud diatas menggunakan dasar perhitungan Bagi Hasil sebesar 25% untuk TWC dan 75% untuk Perum PFN, khusus bagi pendapatan pasca proyek akan dibagi setelah dikurangi beban biaya dan pajak Perum PFN terkait operasional film.

- c) Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2021 oleh Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan TWC tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN berupa tanah dan bangunan serta aset lainnya TMII milik Kementerian Sekretariat Negara dengan melakukan pengelolaan sesuai kesepakatan para pihak.

160/PL.102/VI/2018 dated June 29, 2018. The film production as referred to in this Agreement is financed by the Parties with a Budget and Cost Plan (RAB) of Rp10,000,000, with details of financing in the form of capital for film production based on the Agreement. In this case TWC is Rp5,000,000, while the financing from Perum PFN is Rp5,000,000 which comes from the sponsor. Perum PFN stated that the film production process was completed within 1 year from the signing of the agreement.

The revenue components under this agreement are divided into:

- Pre-project income is income received by the parties before film production is completed according to the term of the Agreement, which includes the excess of sponsorship receipts after being used to cover costs according to the RAB.
- Post-project income is the income received by the parties after the film production is declared completed according to the term of the Agreement, which includes the sale of film tickets.
- Revenue sharing referred to above using the calculation basis for Profit Sharing of 25% for TWC and 75% for Perum PFN, specifically for post-project income, it will be divided after deducting the costs and taxes of Perum PFN related to film operations.

- c) Cooperation Agreement regarding of Cooperation in the Utilization of Owned State Property (BMN) in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) with Ministry of State Secretariat

Based on Deed No. 1 dated July 1, 2021 by Notary Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notary in Jakarta, of Cooperation Agreement between Ministry of State Secretariat Negara Republik Indonesia with TWC regarding of Cooperation in the Utilization of Owned State Property on Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia in Taman Mini Indonesia Indah. Utilization cooperation (KSP) intended for optimize the usability of BMN in the form of land and buildings and other assets of TMII belonging to the Ministry of State Secretariat by managing according to the agreement of the parties.

Kerjasama yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Nilai dan objek KSP:
 - i. Nilai wajar BMN Objek KSP adalah sebesar Rp12.824.485.985.
 - ii. Objek KSP yaitu tanah, bangunan eksisting fasilitas lainnya sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan KSP yang berada dalam Kawasan KSP.
 - iii. Dalam hal terdapat perubahan atas Objek KSP, Para Pihak sepakat akan melakukan addendum dan memperhitungkan kembali kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas Objek KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ruang lingkup pelaksanaan KSP sebagai berikut: penggunaan atau pemanfaatan, pembangunan, renovasi dan pemeliharaan, pengelolaan, laporan tahunan, dan pembayaran kontribusi kepada negara oleh TWC berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan Objek KSP.
- TWC berhak membangun, merenovasi dan memelihara Objek KSP dengan didasarkan pada Program Pengajuan KSP TMII.
- Pembayaran Kontribusi Tetap:
 - i. Kontribusi tetap dihitung mulai dari awal KSP dan dibayarkan mulai tahun 2021 sebesar Rp1.385.044.486, untuk tahun pertama dan untuk tahun berikutnya dihitung dengan kenaikan sebesar 2,91% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya.
 - ii. TWC diberikan keringanan untuk kontribusi tetap 3 tahun pertama sebesar 50%.
 - iii. selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lambat 30 Juni pada tahun berjalan.
- Pembagian keuntungan KSP dihitung sebesar 40,54% dari Laba Bersih KSP per tahun.
- Jangka waktu pelaksanaan KSP selama 25 tahun terhitung mulai berlaku 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2046 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

The agreed collaborations include the following:

- *Values and object of KSP:*
 - i. *The fair value of KSP Object BMN amounting to Rp12,824,485,985.*
 - ii. *KSP objects are land, existing buildings and other facilities in accordance with the attachment to the Letter of the Minister of Finance concerning the KSP Approval located in the KSP Area.*
 - iii. *In the event that there is a change in the KSP Object, the Parties agree to make an addendum and recalculate the fixed contribution and profit sharing on the KSP Object in accordance with the provisions of the laws and regulations*
- *The scope of the KSP implementation as follows: use or utilization, construction, renovation and maintenance, management, annual reports, and payment of contributions to the state by TWC in the form of fixed contributions and profit sharing on the utilization of KSP Objects.*
- *TWC has the right to build, renovate and maintain KSP Objects based on the TMII KSP Submission Program.*
- *Fixed Contribution Payment:*
 - i. *Fixed contributions are calculated starting from the beginning of the KSP and paid started in 2021 amounting tp Rp1,385,044,486, for the first year and for the following year calculated with an increase of 2.91% per year from the previous year's fixed contributions.*
 - ii. *TWC is given discount for the first 3 years fixed contribution of 50%.*
 - iii. *Subsequent fixed contribution payments are made annually no later than June 30 of the current year.*
- *KSP profit sharing is calculated at 40.54% of KSP Net Profit per year.*
- *The KSP implementation period is 25 years starting from July 1, 2021 until June 30, 2046 and can be extended in accordance with the provisions of this Agreement and the prevailing laws and regulations.*

- d) Perjanjian Kerjasama dengan PT Dapur Film Production tentang Produksi Film Layar Lebar "Ibu".
- TWC mengadakan Perjanjian tentang Produksi Film Layar Lebar (PKS Produksi) No. 03/PL.102/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 beserta Addendum Perjanjian No. 363/PL.102/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
 - TWC mengadakan Perjanjian tentang Promosi dan Pemasaran Film (PKS Markom) No. 04/HM.301/I/2020, No. 01/FILM-MKT/DFP/IBU/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
 - Para Pihak melakukan pengakhiran Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerjasama No. 2158/PL.1021/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.
 - TWC melakukan Perjanjian Baru tentang Produksi Film Layar Lebar No. 124/PL.102/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Jo. Addendum Perjanjian tentang Produksi Film Layar Lebar No. 286/PL.102/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Produksi film sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibiayai oleh Para Pihak dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebesar Rp6.959.184 dengan rincian pembiayaan dalam bentuk modal untuk produksi film berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam perjanjian tersebut disepakati porsi kepemilikan diantara kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun pertama dan 50%-50% untuk tahun berikutnya.

- e) Perjanjian Sewa Mobil Listrik di Taman Mini Indonesia antara PT Bhiva dan PT Bathara Mobilindo Transportasi
- PT Bhiva melakukan perjanjian sewa mobil listrik dengan PT Bathara Mobilindo Transportasi sesuai dengan surat Perjanjian No. 977/PL.10/XI/2022 tanggal 18 November 2022. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT Bhiva menyewa mobil listrik selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 18 November 2025. PT Bhiva berhak menggunakan dan mengoperasikan sepenuhnya sewa mobil listrik di lokasi TMII.

- d) *Cooperation Agreement with PT Dapur Film Production regarding the Production of the Wide Screen Film "Ibu".*
- *TWC entered into an Agreement on Wide Screen Film Production (PKS Production) No. 03/PL.102/I/2019 dated January 24, 2019 along with Addendum to Agreement No.363/PL.102/XI/2019 dated November 28, 2019.*
 - *TWC entered into Agreement on Film Promotion and Marketing (PKS Markom) No. 04/HM.301/I/2020, No. 01/FILM-KT/DFP/IBU/I/2020 dated January 9, 2020.*
 - *The parties terminate the Agreement as outlined in the Minutes of Termination of the Cooperation Agreement No. 2158/PL.1021/VII/2020 dated July 22, 2020.*
 - *TWC entered into a New Agreement on Widescreen Film Production No. 124/PL.102/VIII/2020 dated August 19, 2020 Jo. Addendum to the Agreement on Widescreen Film Production No. 286/PL.102/XII/2020 on December 30, 2020.*

The film production as referred to in this Agreement is financed by the Parties with a Budget and Cost Plan (RAB) of Rp6,959,184 with details of financing in the form of capital for film production based on this Agreement.

In the agreement, the share of ownership between the two parties is agreed for the first 5 (five) years and 50%-50% for the following year.

- e) *Electric Car Rental Agreement at Taman Mini Indonesia between PT Bhiva and PT Bathara Mobilindo Transportasi*
- PT Bhiva entered into an electric car rental agreement with PT Bathara Mobilindo Transportasi in accordance with the Agreement Letter No. 977/PL.10/XI/2022 dated November 18, 2022. In the agreement, it was agreed that PT Bhiva rents an electric car for a period of 3 years start from November 18, 2022 to November 18, 2025. PT Bhiva has the right to fully use and operate the electric car rental in the are of TMII.*

- f) Perjanjian dengan Perusahaan
Pada tanggal 28 Desember 2021, TWC dan Perusahaan menandatangani perjanjian No. Perjj-21/AVIATA-TWC/12/2021 tentang Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan sejak 1 Januari 2022. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan perjanjian No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0110 tanggal 30 Desember 2022.

Dalam perjanjian ini, TWC berkewajiban untuk:

- Melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Layanan Manajemen dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- Menyiapkan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh Aviata untuk pelaksanaan pekerjaan atas layanan manajemen yang akan diberikan oleh Perusahaan kepada TWC.
- Melakukan pembayaran atas jasa layanan manajemen kepada Perusahaan sebesar nilai bersih 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan usaha terkonsolidasi dengan mengacu kepada RKAP tahunan TWC termasuk perubahannya. Apabila biaya jasa layanan manajemen yang dibayarkan berdasarkan poin tersebut menjadi kurang atau lebih dari biaya yang seharusnya dibayarkan, maka selisih kurang atau lebih dari biaya jasa layanan manajemen akan direkonsiliasi dan dibuar berita acara untuk diperhitungkan sesuai dengan laporan keuangan auditan TWC.

- f) *Agreement with the Company*
On December 28, 2021, TWC and the Company signed agreement No. Perjj-21/AVIATA-TWC/12/2021 concerning Tourism and Support BUMN Holding Management Services. The term of this agreement is 12 months from January 1, 2022. The agreement has been extended until December 31, 2023 based on agreement No. PJJ.INJ.05.03/23/12/2022/A.0110 dated December 30, 2022.

In this agreement, TWC is obliged to:

- *Fulfill all obligations under this Agreement to ensure that the Management Services are carried out in accordance with the terms and conditions of this agreement.*
- *Prepare and provide the necessary data and information to Aviata for the implementation of the work on the management services that will be provided by the Company to TWC.*
- *Make payment for management service fees to the Company in the amount of net value of 0.5% calculated based on consolidated business revenue referring to TWC annual RKAP including changes. If the management service fee paid based on this point becomes less or more than the amount that should be paid, then the difference of less or more than the management service fee will be reconciled and made into a report to be calculated in accordance with TWC audited financial statements.*

46. Kontinjensi

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Gugatan Paulus Wuwungan

AP I menerima gugatan perdata dari Paulus Wuwungan melalui Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Mei 2019 sehubungan dengan dua bidang tanah di Douna Sekolah, Manado dengan total luas tanah 33.500 m² dan nilai gugatan sebesar Rp10.000 per m² atau sebesar Rp335.000.000. Adapun sebagai tergugat lainnya adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia.

46. Contingencies

PT Angkasa Pura I ("AP I")

a) Paulus Wuwungan's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Paulus Wuwungan through the Manado District Court on May 28, 2019 in connection with two parcels of land at Douna Sekolah, Manado with a total land area of 33,500 sqm and a claim value of Rp10,000 per sqm or Rp335,000,000. The other defendants are the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Juni 2020, gugatan dikabulkan dan AP I serta Menteri BUMN Republik Indonesia diharuskan melakukan pembayaran secara tanggung renteng ganti kerugian atas tanah sebesar Rp1.000 per m² atau sebesar Rp33.500.000.

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perusahaan AP I kepada Pengadilan Tinggi Manado. Pada tanggal 2 Juli 2021, telah terbit putusan banding yang membatalkan putusan tingkat pertama.

Pada tanggal 23 Februari 2022, Paulus Wuwungan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. AP I juga telah mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2022.

Per 31 Desember 2022, perkara tengah diperiksa pada tingkat Kasasi dan AP I menunggu Putusan.

b) Gugatan Maria Nellie Awuy

AP I menerima gugatan perdata dari Maria Nellie Awuy Sumakul melalui Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 November 2016 sehubungan dengan tanah seluas 26.880 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Manado dengan nilai gugatan sebesar Rp64.123.200. Adapun sebagai tergugat lainnya adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan turut tergugat adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Juli 2018, sebagian gugatan dikabulkan dan AP I diharuskan melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah sebesar Rp17.203.200 dan uang paksa sebesar Rp1.000 per hari jika lalai melaksanakan putusan.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, AP I mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Manado. Pada tanggal 17 Desember 2019, putusan Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Juli 2018.

Based on the decision of the Manado District Court dated June 29, 2020, the lawsuit was granted and AP I and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia are required to jointly pay compensation for land amounting to Rp1,000 per sqm or Rp33,500,000.

On August 13, 2020, AP I submitted an appeal to the Manado High Court. On July 2, 2021, an appeal decision has been issued which annuls the decision of the first instance.

On February 23, 2022, Paul Wuwungan made an extraordinary legal remedy in the form of a Judicial Review. AP I has also filed a counter memory Review on April 11, 2022

As of December 31, 2022, the case is being examined at the Cassation level and AP I is awaiting a Verdict.

b) Maria Nellie Awuy's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Maria Nellie Awuy Sumakul through the Manado District Court on November 18, 2016 in connection with a land area of 26,880 sqm located in Mapanget Barat Village, Manado with a claim value of Rp64,123,200. The other defendants are the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia and also the co-defendants are the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Minister of State-Owned Entities of the Republic of Indonesia.

Based on the decision of the Manado District Court dated July 31, 2018, part of the lawsuit was granted and AP I was required to pay compensation for land amounting to Rp17,203,200 and subject money of Rp1,000 per day if fail to implement the decision.

On October 19, 2018, AP I submitted an appeal to the Manado High Court. On December 17, 2019, the Manado High Court decision strengthened the Manado District Court decision on July 31, 2018.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 12 Februari 2020, AP I mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 2022 telah diterbitkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Kasasi AP I, dimana AP I dibebaskan dari hukuman membayar ganti kerugian sebesar Rp17.203.200.

On February 12, 2020, AP I filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. On March 21, 2022, a Supreme Court Cassation Decision was issued granting AP I Cassation Application, in which AP I was exempted from the penalty of paying compensation of Rp17,203,200

c) Gugatan Sylvana Yunita

AP I menerima gugatan perdata dari Sylvana Yunita sehubungan dengan sebidang tanah Pasini (*Individual Bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di tempat yang terdahulu bernama Koyawas, di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk wilayah Manado) dengan nilai gugatan sebesar Rp11.850.200.

c) Sylvana Yunita's lawsuit

AP I received a civil lawsuit from Sylvana Yunita for a piece of land Pasini (Individual Bezit) covering an area of 19,300 sqm which was located in a place previously called Koyawas, in Mangapet Barat Village, Dimembe sub-district, Minahasa (currently included in Manado area) with a claim value of Rp11,850,200.

Pada tanggal 7 Januari 2021, telah disampaikan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2021, Penggugat mengajukan upaya hukum banding. Pada tanggal 24 Maret 2021, AP I mengajukan kontra memori banding. Pada tanggal 21 September 2021, telah ada Putusan Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Sylvana Yunita mengajukan permohonan kasasi. Adapun saat ini AP I sedang menunggu Putusan Kasasi.

On January 7, 2021, the Decision made by Manado District Court has been delivered, which states that the Plaintiff's Claim cannot be accepted. Furthermore, on January 14, 2021, the Plaintiff filed an appeal. On March 24, 2021, AP I filed a counter memorandum of appeal. On September 21, 2021, there has been an Appeals Decision which affirms the Court's Decision on the first instance. On October 22, 2021, Sylvana Yunita filed an appeal. As for now, AP I is awaiting a Cassation Ruling

Angkasa Pura II

a) AJB Bumiputera 1912 ("AJB")

Pada tanggal 25 Juli 2018, AP II mengajukan permohonan ke Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terhadap AJB Bumiputera 1912 ("AJB") sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 41072/VIII/ARV-BANI/2018. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan kewajiban AJB dalam melakukan pembayaran atas manfaat pengelolaan dana Tunjangan Hari Tua (THT) kepada pegawai AP II.

Angkasa Pura II

a) AJB Bumiputera 1912 ("AJB")

On July 25, 2018, AP II submitted an application to the Indonesian National Arbitration ("BANI") against AJB Bumiputera 1912 ("AJB") as registered in case number 41072/VIII/ARV-BANI/2018. The application was submitted in relation with AJB's obligation to provide benefit payment of retirement funds to the AP II's employees.

Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 4 Februari 2019, BANI memberikan putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menghukum AJB untuk membayar kewajiban kepada AP II atas klaim asuransi sebesar Rp30.469.

In regard with the application, on February 4, 2019, BANI has made decision, among others, is as follows:

1. *Convict AJB to paid its obligation to AP II for the insurance benefit claim of Rp30,469.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Menghukum dan memerintahkan AJB untuk mengganti kerugian AP II sebesar Rp104.298 yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan AJB.

Pada tanggal 28 Maret 2019, AJB mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pada tanggal 6 Agustus 2019, PN Jaksel telah menolak Permohonan AJB tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2019, AJB mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PN Jaksel kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengajukan memori permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019. Berdasarkan nomor putusan kasasi nomor 98B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 29 Januari 2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut.

Pada tanggal 22 Februari 2021, AP II mengirimkan surat permohonan eksekusi atas keputusan BANI tanggal 4 Februari 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan eksekusi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022.

b) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("AJS")

Program imbalan pascakerja - THT AP II bagi karyawannya diantaranya dikelola oleh AJS dalam bentuk program asuransi kumpulan untuk 1.118 karyawan.

Pada tanggal 23 Desember 2020, AJS mengirimkan surat kepada AP II dimana AJS menyampaikan Penawaran Restrukturisasi Polis Asuransi Kumpulan. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham AJS bekerjasama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) telah merancang Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya dengan cara:

1. Restrukturisasi Polis Asuransi
2. Pendirian IFG Life dan Transfer Portofolio dari AJS ke IFG Life
3. Pemerintah akan melakukan *bail-in* berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG sebagai holding asuransi dan penjaminan untuk kemudian IFG akan mendirikan IFG Life untuk menyelamatkan polis asuransi Jiwasraya.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. *Convict and instruct AJB to compensate AP II loss of Rp104,298 which must appoint new retirement fund manager to replace AJB.*

On March 28, 2019, AJB has submitted a revocation letter on the BANI's Decision to the South Jakarta District Court. On August 6, 2019, the South Jakarta District Court rejected the AJB request. On August 20, 2019, AJB filed an appeal against the South Jakarta District Court's decision to the Supreme Court of the Republic of Indonesia by submitting a memorandum of cassation on September 2, 2019. Based on cassation decision number 98B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dated January 29, 2020, the Supreme Court rejected that appeal request.

On February 22, 2021, AP II send execution request letter for BANI's decision dated February 4, 2019 to South Jakarta District Court. The execution request is granted by South Jakarta District Court on January 20, 2022.

b) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("AJS")

One of AP II post employment benefits - THT is being managed by AJS in the form of collective insurance program for 1,118 employees.

On December 23, 2020, AJS send a letter to AP II, where AJS present The Restructurisation of Collective Insurance Policy Proposal. Ministry of State-owned Enterprises (SOE) as the shareholder of AJS cooperate with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) had devised a Plan to Financially Restructure Jiwasraya, which is as follows:

- 1. Restructuring the Insurance Policy*
- 2. Establishment of IFG Life and Transfer Portofolio from AJS to IFG Life*
- 3. The Government will bail-in in the form of State Equity Participation (PMN) to IFG as the insurance holding and guarantor, where IFG will then establish IFG Life to bail insurance policy of Jiwasraya.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Restrukturisasi polis asuransi dilakukan dengan menawarkan penghentian polis asuransi eksisting, dimana 95% dari Nilai Tunai menjadi saldo awal produk Pendanaan Hari Tua yang disebut JS PHT.

Pada tanggal 10 Maret 2021, AP II kembali menerima surat dari AJS terkait tindak lanjut penawaran restrukturisasi polis, dimana dalam surat tersebut AJS menyatakan bahwa nilai tunai program THT adalah sebesar Rp128.281.000.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Kementerian Negara BUMN mengirimkan surat kepada BUMN-BUMN terkait dukungan restrukturisasi polis BUMN dan Afiliasi yang akan dilakukan oleh AJS. Dalam surat tersebut dihimbau kepada BUMN-BUMN yang memiliki polis di AJS untuk turut mendukung program tersebut.

Pada tanggal 4 Juli 2022, AP II menerima surat dari AJS yang memberitahukan bahwa polis asuransi AP II telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG.

c) PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")

Pada tahun 2010, terdapat gugatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS") kepada AP II dan Induk Koperasi Angkatan Udara ("INKOPAU") sehubungan dengan pengelolaan lahan seluas 21 Ha di Bandara Halim Perdanakusuma. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 492/PDT.G/2010, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 10/PDT/2012/PT/DKI dan Putusan Mahkamah Agung No. 688K/PDT/2013, AP II dan INKOPAU dinyatakan kalah.

Pada tanggal 28 April 2015, AP II mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK"). Pada tanggal 26 Juli 2016, AP II telah menerima Putusan Mahkamah Agung No. 527 PK/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016, dimana permohonan PK AP II telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The restructuring of insurance policy will be performed by offering the termination of the existing insurance policy, where 95% of cash value will be the beginning balance of Pendanaan Hari Tua product called JS PHT.

On March 10, 2021, AP II received letter from AJS in relation to the restructuring of insurance policy proposal's response, where in the letter, AJS stated that the cash value for the THT program is amounting to Rp128,281,000.

On March 26, 2021, Ministry of SOEs sent a letter to BUMNs to endorse the BUMN's and their Affiliations insurance policy restructuring done by AJS. In the letter, SOEs are appealed to own policy in AJS to support the program.

On July 4, 2022, AP II received a letter from AJS informing that AP II insurance policy has been transferred to PT Asuransi Jiwa IFG.

c) PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")

In 2010, there was claim made by PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS") to AP II and Induk Koperasi Angkatan Udara ("INKOPAU") relating to land operation of 21 Ha in Halim Perdanakusuma Airport. Based on Decision No. 492/PDT.G/2010 of East Jakarta District Court, Decision No. 10/PDT/2012/PT/DKI of DKI Jakarta High Court and Decision No. 688K/PDT/2013 of Supreme Court, AP II and INKOPAU were declared in lost position.

On April 28, 2015, AP II submitted Judicial Review ("PK"). On July 26, 2016, AP II received Supreme Court Decision No. 527 PK/Pdt/2015 dated February 11, 2016, where the application for the PK of AP II was rejected.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

AP II merupakan pemegang izin BUBU berdasarkan KM No 107 tahun 2021 dan KP No 1230 tahun 2022. Sehingga, AP II merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Selain itu, AP II adalah pemilik sah atas beberapa objek yang berdiri di atas lahan seluas 21 Ha. Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya Putusan PK MA No. 527, AP II perlu melakukan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian Bandar Udara Halim Perdanakusuma di lahan seluas 21 Ha dengan PT ATS.

AP II telah menandatangani Perjanjian Induk Nomor: PJJ.04.04/00/08/2022/A.0237 dan Nomor: 0003/HOA/ATS-APII/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Kerja Sama Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta beserta perubahannya. Perjanjian Induk ini merupakan dasar Para Pihak untuk melakukan pembahasan kesepakatan lanjutan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian Bandara Udara Halim Perdanakusuma di atas lahan 21 Ha dan sebagai tindaklanjutnya AP II telah menandatangani Kerja Sama Operasional dengan PT ATS (Catatan 45).

d) PT Taurus Gemilang ("TG")

Pada tanggal 29 Juli 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") mengajukan gugatan kepada AP II atas Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial AP II di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/PDT.G/2020 PN.TNG tanggal 2 Agustus 2021, AP II dinyatakan menang dan TG diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp58.471. Pada tanggal 12 Oktober 2021, TG mengajukan banding atas keputusan Pengadilan tersebut.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

AP II is a BUBU permit holder based on KM No 107 tahun 2021 and KP No 1230 tahun 2022, AP II is the authorized party to operate airport services at Halim Perdanakusuma Airport. In addition, AP II is the legal owner of several objects that stand on an area of 21 hectares. Therefore, regarding to PK MA Decision No. 527, AP II needs to cooperate in the management and operation of Halim Perdanakusuma International airport with an area of 21 hectares with PT ATS.

AP II signed the Joint Operation Head of Agreement Number PJJ.04.04/00/08/2022/A.0237 and Number: 0003/HOA/ATS-APII/VIII/2022 dated August 31, 2022 regarding Management Cooperation and Operation of Halim Perdanakusuma International Airport Jakarta and its amendments. This Head of Agreement is the basis for the Parties to do discussion of further agreements of Halim Perdanakusuma International Airport Management and Operations and as a follow-up AP II signed Joint-Operation Cooperation Agreement with PT ATS (Note 45).

d) PT Taurus Gemilang ("TG")

On July 29, 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") filed a lawsuit against the Company in regards with the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities of PT Angkasa Pura II at Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta Airport. Based on the decision of the Tangerang District Court Number 638/PDT.G/2020PN.TNG dated August 2, 2021, AP II was declared victorious and TG was asked to pay compensation amounting to Rp58,471. On October 12, 2021, TG filed an appeal against the Court's decision.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Putusan tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 53/PDT/2022/PT.BTN tanggal 13 April 2022 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 638/PDT.G/2020/PN.TNG tanggal 2 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2022, TG mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada hasil putusan tingkat kasasi yang diinformasikan kepada AP II.

e) PT Bunga Tanjung Raya ("BTR")

Pada tanggal 31 Juli 2019, BTR mengajukan permohonan arbitrase atas AP II sehubungan dengan Pekerjaan Perluasan Apron Bandara Husein Sastranegara kepada BANI. BANI melalui Keputusan Nomor 14/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 tanggal 22 Februari 2020 memutuskan perkara dalam tingkat pertama dan terakhir yang menyatakan bahwa AP II telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk membayar progress pekerjaan BTR sebesar Rp5.196.000.

Pada 16 Juni 2020, terdapat gugatan yang dilakukan oleh AP II terhadap BTR sehubungan dengan Pekerjaan Perluasan Apron Bandara Husein Sastranegara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 216/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg tanggal 19 November 2020 menyatakan bahwa AP II kalah. Pada tingkat banding melalui putusan Nomor 92/PDT/2021/PT.BDG tanggal 9 Maret 2021 membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan AP II menang. Pada tingkat kasasi melalui putusan Nomor 1914K/PDT/2022 tanggal 22 Juni 2022 menyatakan bahwa Perusahaan kalah. Saat ini, AP II sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

f) PT Pharma Kasih Sentosa ("PKS")

Pada tanggal 31 Juli 2019, PKS mengajukan permohonan arbitrase atas AP II sehubungan dengan Pekerjaan Tentang Overlay Taxiway B, C, D dan Paralel Taxiway Serta Lanjutan Perluasan Apron B-C Bandara Husein Sastranegara kepada BANI.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The appeal level decision based on the Banten High Court Decision Number 53/PDT/2022/PT.BTN dated April 13, 2022 stated that it upheld the Tangerang District Court Decision Number 638/PDT.G/2020/PN.TNG dated August 2, 2021 which was appealed. On August 5, 2022, TG filed a cassation appeal against the Banten High Court Decision. Until the completion date of these consolidated financial statements, there is no result of the cassation level decision that has been informed to AP II.

e) PT Bunga Tanjung Raya ("BTR")

On July 31, 2019, BTR filed a request for arbitration against AP II in connection with the Husein Sastranegara Airport Apron Expansion Work to BANI. BANI through Decision Number 14/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 dated February 22, 2020 decided the case in the first and last level which stated that AP II had defaulted and ordered to pay BTR's work progress in the amount of Rp5,196,000.

On June 16, 2020, there was a lawsuit filed by AP II against BTR in connection with the Husein Sastranegara Airport Apron Expansion Work. Based on the Bandung District Court Decision Number 216/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg dated November 19, 2020, AP II lost. At the appeal level through decision Number 92/PDT/2021/PT.BDG dated March 9, 2021 canceled the previous decision and stated that AP II won. At the cassation level through decision Number 1914K/PDT/2022 dated June 22, 2022 stated that AP II lost. Currently, AP II is in the process of filing a Judicial Review (PK).

f) PT Pharma Kasih Sentosa ("PKS")

On July 31, 2019, PKS filed a request for arbitration against AP II in connection with the Work on Overlay Taxiway B, C, D and Parallel Taxiway and Continued Expansion of Apron B-C of Husein Sastranegara Airport to BANI.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BANI melalui Keputusan Nomor 15/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 tanggal 22 Februari 2020 memutuskan perkara dalam tingkat pertama dan terakhir yang menyatakan bahwa AP II telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk membayar progress pekerjaan PKS sebesar Rp951.000.

Pada 16 Juni 2020, terdapat gugatan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap PKS sehubungan dengan Pekerjaan Tentang Overlay Taxiway B, C, D dan Paralel Taxiway Serta Lanjutan Perluasan Apron B-C Bandara Husein Sastranegara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 217/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg tanggal 19 November 2020 menyatakan bahwa AP II kalah. Pada tingkat banding melalui putusan Nomor 134/PDT/2021/PT BDG tanggal 19 April 2021 menyatakan AP II kalah. Pada tingkat kasasi melalui putusan Nomor 1915K/PDT/2022 tanggal 22 Juni 2022 menyatakan bahwa AP II kalah. Saat ini, AP II sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

g) PT Yamin Duta Makmur ("YDM")

Pada tanggal 19 Januari 2021, YDM mengajukan gugatan kepada AP II sehubungan dengan pengelolaan jasa handling pelayanan wisata dan umroh di Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Tng, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa pada intinya AP II menang. YDM kemudian mengajukan banding kepada AP II melalui Pengadilan Tinggi Banten. Berdasarkan putusan Nomor 183/PDT/2021/PT BTN tanggal 5 Oktober 2021, diputuskan bahwa AP II kalah dan menghukum AP II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp59.531.000. AP II kemudian mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.G/ 2021/PN Tng tanggal 5 Juli 2022, permohonan kasasi oleh Perusahaan ditolak. Saat ini, AP II sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BANI through Decision Number 15/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 dated February 22, 2020 decided the case in the first and last level which stated that AP II had defaulted and ordered to pay PKS's work progress of Rp951,000.

On June 16, 2020, there was a lawsuit filed by the Company against BTR in connection with the Husein Sastranegara Airport Work on Overlay Taxiway B, C, D and Parallel Taxiway and Continued Expansion of Apron B-C. Based on the Bandung District Court Decision Number 217/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg dated November 19, 2020, AP II lost. At the appeal level through decision Number 217/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg dated April 19, 2021 stated that AP II lost. At the cassation level through decision Number 1915K/PDT/2022 dated June 22, 2022 stated that AP II lost. Currently, AP II is in the process of filing a Judicial Review (PK).

g) PT Yamin Duta Makmur ("YDM")

On January 19, 2021, YDM filed a lawsuit against AP II in relation to the management of handling services for tourism and umrah services at Soekarno Hatta Airport. Based on decision Number 70/Pdt.G/2021/PN.Tng, the Tangerang District Court determined that in essence AP II won. YDM then made an appeal to AP II through the Banten High Court. Based on decision Number 183/PDT/2021/PT BTN dated October 5, 2021, it is determined that AP II lost and ordered AP II to pay compensation of Rp59,531,000. AP II then filed an appeal through the Tangerang District Court. Based on decision Number 70/Pdt.G/ 2021/PN Tng dated July 5, 2022, the cassation request by AP II was rejected. Currently, AP II is in the process of Judicial Review (PK).

h) Klaim kontraktor

AP II menandatangani kontrak pengadaan jasa konstruksi dengan beberapa kontraktor.

Pada tahun 2020, Direksi AP II menerbitkan instruksi tentang Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (*Force Majeure*) yang dialami Perusahaan akibat pandemi Covid-19 kepada kontraktor diantaranya:

- Menghentikan sementara waktu seluruh kegiatan perencanaan dan konstruksi yang sedang berjalan.
- Mengajukan permohonan penundaan pembayaran.

Para pihak sepakat untuk melakukan penghentian sementara waktu pelaksanaan pekerjaan namun hingga saat ini belum ada keputusan dari AP II terkait kelanjutan pelaksanaan kontrak sehingga AP II menerima klaim dari beberapa kontraktor.

Atas klaim tersebut di atas, AP II meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ("Jamdatun") terkait dengan penyesuaian harga, biaya kompensasi dan material on site di mana para pihak dapat melakukan kesepakatan dan melakukan renegotiasi kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola Perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, AP II belum melakukan kesepakatan dengan para kontraktor.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

- a) Perkara Perkara Perdata No. 363/PDT.G/2012/PN.JKT.UT atas objek tanah sesuai Sertifikat HGB No.4480 dan No.4481 di Kelapa Gading Jakarta Utara milik HIN sudah diputus pada tingkat kasasi, tetapi saat ini amar/salinan putusannya masih belum dikeluarkan. Perkara ini bermula dari rencana Dinas Bina Marga (PU) Provinsi DKI Jakarta akan memberikan ganti rugi atas tanah milik HIN yang terkena rencana jalan koridor busway. Pembayaran ganti rugi tersebut belum dapat dibayarkan karena objek tanah tersebut masih dalam sengketa/perkara No. 577/PDT/2009/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2010 antara HIN dengan Ahli waris Alm H.

h) Contractor claim

AP II has signed a contract for construction services with multiple contractors.

In 2020, AP II Board of Directors issued instructions regarding the Notification of Force Majeure circumstances experienced by AP II due to the Covid-19 pandemic to its contractors, which include:

- Temporarily halting all ongoing planning and construction activities.
- Applying for a payment deferral.

The parties have agreed to temporarily suspend the work, but so far, there has been no decision from AP II regarding the continuation of the contract implementation, resulting in AP II receiving claims from several contractors.

Regarding the aforementioned claims, AP II has requested legal advice from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia - Deputy Attorney General for Civil and State Administrative Affairs ("Jamdatun") regarding price adjustments, compensation costs, and on-site materials, where the parties can reach an agreement and renegotiate the contract based on the applicable laws and regulations, good corporate governance, and the principle of prudence in decision-making.

Up to the date of issuance of the financial statements, AP II has not entered into an agreement with the contractors.

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

- a) Civil Case No. 363/PDT.G/2012/PN.JKT.UT regarding Land Objects According to HGB Certificates No.4480 and No.4481 in Kelapa Gading, North Jakarta, belonging to HIN have been decided at the cassation, but at this time the order/decision has not been issued. It starts from DKI Jakarta Provincial Toll Road (PU) plans to provide compensation for owned land HIN was affected by the planned busway corridor road. Compensation payment has not been received because the land object is still in dispute/case No. 577/PDT/2009/PT.DKI dated August 2, 2010, between HIN and the heirs of the late H. Hanafi. Therefore handed

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hanafi. Oleh karena itu, diajukan Permohonan Penetapan Konsinyasi atau penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri. Perkara ini sebenarnya telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi No. 1459 k/Pdt/2013 tanggal 26 Agustus 2016 karena objek konsinyasi adalah HGB No. 4480 dan No. 4481, namun karena adanya Perkara No. 588/Pdt.G/ 2015/PN.JKT.UT maka status hukum atas objek tanah sesuai SHGB No. 4480 dan No. 4481 di Kelapa Gading masih sengketa.

- b) Pada tanggal 17 Desember 2015, HIN (Tergugat I) menghadapi gugatan perdata dari ahli waris Alm. H. Hanafi bin H. Mursid, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor : 588/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tanggal 17 Desember 2015 atas kepemilikan lahan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan RW.05 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. HIN digugat atas dasar penguasaan lahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4481 dengan luas 10.000 m² atas nama PT Hotel Indonesia Natour.

Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 588/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan para Penggugat. Berdasarkan putusan tersebut, HIN telah mengajukan upaya banding namun hasil putusan banding masih belum sesuai dengan harapan, untuk itu atas Putusan Banding PT Hotel Indonesia Natour telah mengajukan Akta Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi.

Sampai saat ini masih berperkara di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Penggugat ahli waris Alm. H. Hanafi dengan HIN sebagai salah satu tergugat. Adapun objek gugatan adalah tanah milik di Kelapa Gading sesuai Sertifikat HGB No. 4481 yang tertulis atas nama PT Hotel Indonesia Natour. Salinan putusan No. 151/PDT/2020/PT.DKI Jo. No. 588/PDT/G/2015/PN.JKT.UTR telah dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2020. Dan atas hal tersebut HIN telah mengajukan Pernyataan Kasasi dan Permohonan Memori Kasasi tertanggal 23 Desember 2020; Pengajuan Permohonan Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2020.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

over an application for Determination of Consignment or Compensation in the District Court. This matter has been equipped with the Decision of Cassation No. 1459 k/Pdt/2013 dated August 26, 2016, because the object of the deposit is HGB No. 4480 and No. 4481, but because of Case No. 588/Pdt.G/2015/ PN.JKT.UT, the legal status of the land object is SHGB No. 4480 and No. 4481 in Kelapa Gading is still a dispute.

- b) On December 17, 2015, HIN (Defendant I) faced a civil lawsuit from the heirs of Alm. H. Hanafi bin H. Mursid, through the North Jakarta District Court with number: 588/Pdt.G/ 201/pn.jkt.UTR dated December 17, 2015, for land ownership located on Pioneer Independence St RW.05 Kel. East Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, North Jakarta. HIN was sued on the basis of land tenure with the Certificate of Building Use Rights No. 4481 with an area of 10,000 sqm on behalf of PT Hotel Indonesia Natour.

Based on a copy of the North Jakarta District Court Decision No. 588/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, North Jakarta District Court granted Plaintiff's lawsuit. Based on the verdict, HIN has submitted an appeal effort but the results of the appeal verdict are still not in line with expectations, for that on the decision of the appeal of PT Hotel Indonesia Natour has submitted a Cassation and Cassation Statement Deed.

Until now, it is still lawful at the North Jakarta District Court, with the Plaintiff of the Almy Heirs. H. Hanafi with HIN as one of the Defendants. The lawsuit object island owned in Kelapa Gading according to the certificate of HGB No. 4481 written in the name of PT Hotel Indonesia Natour. Copies of Decision No. 151/PDT/2020/PT.DKI JO. No. 588/Pdt/g/ 2015/pn.jkt.UTR has been issued on December 15, 2020. And on the case of HIN has submitted a Cassation Statement and Cassation Memory Application dated December 23, 2020; Submission of a memory appeal on December 26, 2020.

- c) Berdasarkan Perkara Perdata antara HIN sebagai Penggugat, melawan PT Mahkota Mulia Mumpuni sebagai Tergugat atas perkara terkait Karaoke Crown di Unit Hotel Grand Inna Malioboro, dengan tuntutan Materiil sebesar Rp649.723 dan bunga moratoir sebesar 6% x Rp649.723 setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan hingga Tergugat melunasi seluruh kerugian yang dialami Penggugat.

- c) *Based on the Civil Case between HIN as the Plaintiff, against PT Mahkota Mulia Mumpuni as a Defendant for the case regarding Karaoke Crown in the Grand Inna Malioboro hotel unit, with material demands of Rp649,723 and Moratoir interest of 6% x Rp649,723 Every year since the lawsuit is registered until the Defendant pays off all the losses experienced by the Plaintiff.*

PT Sarinah

- a) PT Dutaswara Berkah Pratama (Masterpiece)

Bahwa antara PT Sarinah dengan Masterpiece telah ditandatangani suatu perjanjian sewa menyewa Nomor: 056IDIREKSI/Perj./IIIJ2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Addendum I/Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: Add-I-081.1/DIREKSI/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dengan masa sewa terhitung sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan 14 Oktober 2016 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019. Setelah masa sewa ruangan Masterpiece berakhir di PT Sarinah, Masterpiece belum melakukan pengosongan ruangan sewa dan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa kepada PT Sarinah yang berdasarkan catatan di bagian keuangan PT Sarinah saat ini berjumlah sebesar Rp2.466.995 dikarenakan tindakan Masterpiece yang melalaikan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, maka PT Sarinah melalui kuasa hukum mengajukan gugatan wanprestasi kepada Masterpiece di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara tercatat Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.JKT.PST tanggal 17 Januari 2022.

Pada tanggal 5 Juli 2022 perkara perdata wanprestasi antara PT Sarinah dengan PT Dutaswara Berkah Pratama telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan gugatan PT Sarinah untuk sebagian dengan verstek dan PT Sarinah telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pt tanggal 5 Juli 2022. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri tersebut PT Sarinah akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Pusat.

PT Sarinah

- a) PT Dutaswara Berkah Pratama (Masterpiece)

That between PT Sarinah and Masterpiece a lease agreement has been signed Number: 056IDIREKSI/Perj./IIIJ2016 dated March 14, 2016 and Addendum I to Lease Agreement Nomor: Add-I-081.1/DIREKSI/ IV/2017 dated April 25, 2017 with the lease term starting from October 15, 2015 to October 14, 2016 and then extended to October 29, 2019. After the Masterpiece space lease period ended at PT Sarinah, Masterpiece has not vacated the leased space and has not completed the lease payment obligations to PT Sarinah based on the current records in PT Sarinah's finance section in the amount of Rp2,466,995 due to the actions of Masterpiece which neglected its obligations as contained in the agreement signed by the parties, PT Sarinah through its attorneys filed a lawsuit for default against Masterpiece at the Central Jakarta District Court with the registered case Number 26/PDT.G/2022/ PN.JKT.PST dated January 17, 2022.

On July 5, 2022 the civil default case between PT Sarinah and PT Dutaswara Berkah Pratama was decided by the Central Jakarta Court which essentially granted PT Sarinah's lawsuit in part with verstek and PT Sarinah has received an official copy of the Central Jakarta District Court Decision Number: 26/PDT .G/2022/ PN.Jkt.Pt dated July 5, 2022. Following up on the District Court's decision, PT Sarinah will submit a request for execution to the Central Jakarta Court.

b) Ahli Waris Alm. Togi Situmorang

PT Sarinah memiliki tanah seluas 223 m² dari keseluruhan tanah seluas 860 m². Tanah seluas 860 m² tersebut berasal dari SHGB No. 250/Gondangdia seluas 2.754 atas nama Johanna Maria Tambajong Manotutu dan tanah seluas 2.754 m² tersebut berasal dari tanah Negara Konversi Eigendom Verponding Nomor 14983.

Selanjutnya SHGB No. 250/Gondangdia dipisahkan tidak sempurna sehingga tersisa tanah 1.021 m², atas sisa seluas 1.021 m² tersebut terdapat SHGB No.129/Kebon Sirih seluas 303 m² atas nama Togi Situmorang juga tanah seluas 860 m² milik PT sarinah. Pada awalnya Tubagus Moh. Joeseop membeli tanah seluas 860 m² tersebut dari Johanna Maria Tambajong Manotutu berdasarkan surat jual beli tanggal 29 April 1961, selanjutnya PT Sarinah memberikan uang kerugian kepada Tubagus Moh. Joeseop pada tahun 1964 atas tanah seluas 860 m².

Kemudian ahli waris Maria Tambajong Manotutu bernama G.M.E. Tambajong mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah milik PT Sarinah yang berasal dari SHGB No. 250/Gondangdia. Perkara ini kemudian dimenangkan oleh PT Sarinah sebagaimana dimuat dalam salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 191 PKIPdt/2004.

Ahli waris Aim. Togi Situ morang, yaitu Ny. Meta Situmorang pada tahun 2005 mengajukan permohonan perpanjangan SHGB No. 129/Kebon Sirih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Pusat tidak mengeluarkan perpanjangan SHGB No. 129/Kebon Sirih tersebut dan menyatakan bahwa:

- Tanah seluas 303 m² overlaap dengan sebagian tanah dalam SHGB No. 250/Gondangdia seluas 223 m².
- Pada tahun 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat dalam suratnya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas tanah dalam SHGB No. 129/Kebon Sirih sedang dalam sengketa di Pengadilan Tinggi dan putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah seluas 303 m² merupakan bagian dari milik PT Sarinah.

b) Heirs of the Alm. Togi Situmorang

PT Sarinah owns 223 sqm of land out of a total land area of 860 sqm. The land area of 860 sqm comes from SHGB No. 250/Gondangdia with an area of 2,754 in the name of Johanna Maria Tambajong Manotutu and the land area of 2,754 sqm comes from Eigendom Verponding State Conversion land Number 14983.

Furthermore, SHGB No. 250/Gondangdia was separated imperfectly so that 1,021 sqm of land remained, of the remaining 1,021 sqm there was SHGB No.129/Kebon Sirih with an area of 303 sqm in the name of Togi Situmorang as well as 860 sqm of land belonging to PT Sarinah. At first, Tubagus Moh. Joeseop bought the 860 sqm of land from Johanna Maria Tambajong Manotutu based on a sale and purchase agreement dated April 29, 1961, then PT Sarinah subsequently paid the loss to Tubagus Moh. Joeseop in 1964 on a land area of 860 sqm.

That later the heir of Maria Tambajong Manotutu was named G.M.E. Tambajong filed a lawsuit over the ownership of land owned by PT Sarinah which came from SHGB No. 250/Gondangdia. This case was later won by PT Sarinah as contained in a copy of the Judicial Review Decision No. 191 PKIPdt/2004.

The heir of Aim. Togi Situ morang, namely Mrs. Meta Situmorang in 2005 submitted an application for an extension of SHGB No. 129/Kebon Sirih to the Head of the Central Jakarta Administrative City Land Office, however, the Head of the City Land Office Adm. Jakarta Pusat did not issue an extension of SHGB No. 129/Kebon Sirih and stated that:

- Land area of 303 sqm overlapped with part of the land in SHGB No. 250/Gondangdia covering an area of 223 sqm.
- In 2009 the Head of City Land Office Jakarta Pusat in his letter to the Head of DKI Jakarta Provincial BPN Regional Office stated that the land under SHGB No. 129/Kebon Sirih is currently under dispute at the High Court and the court's decision states that the land area of 303 sqm is part of the property of PT Sarinah.

Sehingga pihak ahli waris Alm. Togi Situmorang selanjutnya mengajukan gugatan tata usaha negara agar Pengadilan dalam putusannya mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat menerbitkan perpanjangan SHGB No. 129/Kebon Sirih dan dalam hal ini pihak ahli waris beranggapan bahwa SHGB No. 129/Kebon Sirih dan SHGB No. 250 adalah objek yang berbeda, kemudian BPN dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa terdapat kesalahan administrasi atas SHGB No. 250/Gondangdia dari yang seharusnya adalah SHGB No. 250/Kebon Sirih dan dalam SHGB No. 129/Kebon Sirih adalah bagian dari kepemilikan PT Sarinah. Sengketa Tata Usaha Negara ini telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali Ny. Meta Situmorang Tobing.

Pada tahun 2021, pihak ahli waris Alm. Meta Situmorang Tobing mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara tercatat Nomor 327/PDT.G/2021/PNJKT.PST tanggal 28 Mei 2021, dalam gugatan tersebut pada intinya Penggugat menyatakan bahwa PT Sarinah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas klaim kepemilikan tanah seluas 223 m² yang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat dinyatakan overlaap dan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum antara PT Sarinah (Tergugat) dengan Ny. Meta Situmorang Tobing Cs (penggugat) ini telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 327/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 7 April 2022. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sertifikat Nomor 250/Gondangdia tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan tanggal 12 Mei 1994 di dalam Sertifikat tersebut;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik hak yang sah dan sesuai ketentuan hukum atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 303 m² bekas SHGB Nomor 129/Kebun Sirih;

So that the heirs of Alm. Togi Situmorang then filed a state administrative lawsuit so that the Court in its decision required the Head of the City Land Office Jakarta Pusat issued an extension of SHGB No. 129/Kebon Sirih and in this case the heirs assumed that SHGB No. 129/Kebon Sirih and SHGB No. 250 were different objects, then BPN in the answer to the lawsuit stated that there was an administrative error over the SHGB SHGB No. 250/Gondangdia from what should have been SHGB No. 250/Kebon Sirih and in SHGB No. 129/Kebon Sirih is part of the ownership of PT Sarinah. This State Administrative Dispute has obtained a Decision with permanent legal force at the Judicial Review level which essentially rejects Mrs. Meta Situmorang Tobing.

In 2021, the heirs of Alm. Meta Situmorang Tobing filed a lawsuit for Unlawful Acts at the Central Jakarta District Court with the registered case Number 327/PDT.G/2021/PNJKT.PST dated May 28 2021, in the lawsuit in essence the Plaintiff stated that PT Sarinah has committed an unlawful act over a claim to ownership of 223 sqm of land by the Head of the City Land Office, Jakarta Pusat was declared overlapped and the unlawful act civil case between PT Sarinah (Defendant) and Mrs. Meta Situmorang Tobing Cs (the plaintiff) has obtained a District Court Decision Number: 327/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst dated April 7 2022. In the decision of the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court stated:

- *Granted the Plaintiffs' lawsuit in part;*
- *Declare the Defendant has committed an unlawful act;*
- *Declare Certificate Number 250/Gondangdia has no legal force because the term has expired as stipulated on May 12, 1994 in the Certificate;*
- *Declare the Plaintiffs as the owners of legal rights and in accordance with legal provisions over the land and building in the form of a house located on it, located at Jalan H. Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kebon Sirih Village, Menteng District, Central Jakarta, an area of 303 sqm of ex-SHGB No. 129/Garden Sirih;*

- Menyatakan Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk dapat diterbitkan Sertifikat atas Hak atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan H.Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 223 m² yang merupakan sisa dari SHGB Nomor 29/Kebun Sirih;
- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menghapusbukukan tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 223 m² (sisa dari 303 m²) dari daftar aset dan/atau bagian aset miliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi Putusan Perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.630.

Terhadap putusan tersebut PT Sarinah melalui Kuasa Hukum telah mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 23 November 2022 dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

Perkara Perdata dengan registrasi No. 133/Pdt.G/2020/PK/Kln dengan Sumanti Untung Suronto (Penggugat I), dr. Tri Wisnu Nugroho (Penggugat II) dan Emi Yuliani (Penggugat III) terkait proses kepemilikan dan penguasaan satu unit bidang tanah hak pengelolaan di Tlogo melalui skema pembebasan tanah. Para penggugat adalah ahli waris atas tanah Tlogo yang menjadi objek sengketa.

Para Penggugat menghendaki TWC melakukan pembayaran sebesar Rp9.683.000. Atas gugatan tersebut, TWC mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik/ *countersuit*) sebesar Rp5.775.000.

Pada tanggal 20 Mei 2021, terbit putusan PN Klaten yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- *Declare that the Plaintiffs have priority rights to be able to issue Certificates of Rights over land and buildings in the form of houses located on it, located at Jalan H.Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kebon Sirih Village, Menteng District, Central Jakarta, an area of 223 sqm which is the remainder of SHGB Number 29/Kebun Sirih;*
- *Ordered the Defendant and Co-Defendant I to write-off the land and building in the form of a house located on it, located on Jalan H. Agus Salim 32/4, RT 002/RW 001, Kebon Sirih Village, Menteng District, Central Jakarta, with an area of approximately 223 sqm (the remainder of 303 sqm) from the list of assets and/or part of his assets in accordance with applicable law;*
- *Ordered Co-Defendant I and Co-Defendant II to comply with the contents of this Case Decision;*
- *Punish the Defendant to pay the Court Fee which up to now is Rp3,630.*

Regarding this decision, PT Sarinah through its Legal Counsel has filed a cassation lawsuit at the Supreme Court on November 23, 2022 and is still in the process of being examined by the Supreme Court.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

Civil Cases with registration No. 133/Pdt.G/2020/PK/Kln with Sumanti Untung Suronto (Plaintiff I), dr. Tri Wisnu Nugroho (Plaintiff II) and Emi Yuliani (Plaintiff III) related to the process of ownership and control of a unit of land with management rights in Tlogo through a land acquisition scheme. The plaintiffs are the heirs of the Tlogo land which is the object of the dispute.

The Plaintiffs require TWC to make a payment of Rp9,683,000. Based on the lawsuit, TWC filed a countersuit amounting to Rp5,775,000.

On May 20, 2021, the decision of the Klaten District Court was issued which stated that the Plaintiff's claim was unacceptable.

Para Penggugat mengajukan banding dengan registrasi No. 415/Pdt/2021/PT SMG ke Pengadilan Tinggi Semarang dan telah terdapat putusan pada tanggal 18 November 2021 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak.

Para Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi atas Perkara Tanah Tlogo dan telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 ke Mahkamah Agung.

Sudah terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 155 K/Pdt/2022 tanggal 19 Mei 2022 atas permohonan pemeriksaan tingkat kasasi tersebut yang pada pokoknya berbunyi Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan sekaligus menghukum Para Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara.

The Plaintiffs filed an appeal with registration No. 415/Pdt/2021/PT SMG to the Semarang High Court and there was a decision on November 18, 2021 which stated that the Plaintiff's claim was rejected.

The Plaintiffs filed a petition for an examination of the cassation level on the Tlogo Land Case and have submitted a Memorandum of Cassation on December 28, 2021 to the Supreme Court.

There is already a Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia ("MARI") No. 155 K/Pdt/2022 dated May 19, 2022 regarding the request for an examination at the cassation level which basically reads Rejecting the cassation request from the Cassation Petitioners and simultaneously punishing the Cassation Petitioners to pay court costs.

47. Manajemen Risiko Keuangan dan Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Grup telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

47. Financial and Capital Risks Managements

a. Financial Risk Management Policy

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk. The Group define those risks as follows:

- *Credit risk is possibility that a customer will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Group will incur loss.*
- *Liquidity risk is the risk of the Group's inability to pay its liabilities at maturity. Currently, the Group expects to pay all liabilities at due date.*

To manage these risks effectively, the Group's Directors have approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Group's overall objectives, a financial risk management program that focuses on minimizing potential losses that adversely affect the Group's financial performance. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Group.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko likuiditas Grup selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai. Manajemen juga melakukan perencanaan setiap bulan dan pemantauan yang ketat terhadap realisasi serta saldo kas secara rutin; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya dan uang jaminan. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The main guidelines for this policy are as follows:

- In managing liquidity risk, the Group always maintains and provides adequate amounts of cash and cash equivalents. Management also conducts monthly planning and close monitoring of cash realization and balances on a regular basis; and
- All financial risk management activities are carried out prudently, consistently and in accordance with best market practices.

i. Credit Risk

The Group's credit risk is inherent in cash and cash equivalents, trade receivables, other current financial assets, other non current financial assets and security deposits. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy. The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risks. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	2022 Rp	2021 Rp	
Kas dan Setara Kas	5,817,311,403	3,725,597,431	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	159,988,146	141,656,618	Short-Term Investment
Piutang Usaha			Trade Receivables
Pihak Berelasi	746,960,792	576,651,735	Related Parties
Pihak Ketiga	1,094,670,849	1,057,789,779	Third Parties
Piutang Lain-lain			Other Receivables
Pihak Berelasi	11,221,843	20,185,129	Related Parties
Pihak Ketiga	114,368,411	86,493,036	Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	524,951,944	297,333,970	Accrued Revenues
Piutang Usaha Jangka Panjang -			Long Term Trade Receivable -
Pihak Berelasi	242,030,072	--	Related Parties
Investasi Jangka Panjang	32,633,441	35,242,078	Long Term Investments
Total	8,744,136,901	5,940,949,776	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ii. Risiko Likuiditas

Pada saat ini, Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan setara kas (Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

ii. Liquidity Risk

Currently, the Group expect able to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash and cash equivalents (Note 4) which are sufficient to meet liquidity requirements.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

2022					
< 1 Tahun/ Year Rp	1-2 Tahun/ Years Rp	> 2 Tahun/ Years Rp	Total/ Total Rp		
Utang Usaha				Trade Payables	
Pihak Berelasi	415,585,187	--	415,585,187	Related Parties	
Pihak Ketiga	451,637,243	--	451,637,243	Third Parties	
Utang Lain-lain				Other Payables	
Pihak Berelasi	289,231,354	--	289,231,354	Related Parties	
Pihak Ketiga	1,461,228,002	--	1,461,228,002	Third Parties	
Beban Akruai				Accrued Expenses	
Pihak Berelasi	678,890	--	678,890	Related Parties	
Pihak Ketiga	2,672,000,992	--	2,672,000,992	Third Parties	
Utang Bank Jangka Pendek	899,757,062	--	899,757,062	Short-Terms Bank Loans	
Utang Bank dan				Bank Loan and	
Lembaga Keuangan Lainnya	3,209,336,141	2,931,286,999	32,395,349,250	Other Financial Institutions	
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	1,126,000,000	487,500,000	5,893,781,013	Bonds Payable and Sukuk Ijarah	
Surat Utang Jangka Menengah	--		--	Medium Term Notes	
Liabilitas Sewa	153,970,716	47,636,585	1,474,695,586	Lease Liabilities	
Utang Jangka Panjang Lainnya	--	1,397,066,290	27,665,000	Other Long-Term Liabilities	
Total	10,679,425,587	4,863,489,874	39,791,490,849	55,334,406,310	Total
2021					
< 1 Tahun/ Year Rp	1-2 Tahun/ Years Rp	> 2 Tahun/ Years Rp	Total/ Total Rp		
Utang Usaha				Trade Payables	
Pihak Berelasi	184,107,523	--	184,107,523	Related Parties	
Pihak Ketiga	596,402,658	--	596,402,658	Third Parties	
Utang Lain-lain				Other Payables	
Pihak Berelasi	866,199,845	--	866,199,845	Related Parties	
Pihak Ketiga	2,718,321,020	--	2,718,321,020	Third Parties	
Beban Akruai				Accrued Expenses	
Pihak Berelasi	1,329,666	--	1,329,666	Related Parties	
Pihak Ketiga	3,000,712,890	--	3,000,712,890	Third Parties	
Utang Bank Jangka Pendek	1,722,245,844	--	1,722,245,844	Short-Terms Bank Loans	
Utang Bank dan				Bank Loan and	
Lembaga Keuangan Lainnya	1,463,087,314	27,734,542,753	7,603,248,000	Other Financial Institutions	
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	--	4,394,680,188	3,110,873,000	Bonds Payable and Sukuk Ijarah	
Surat Utang Jangka Menengah	--	--	--	Medium Term Notes	
Liabilitas Sewa	91,080,336	153,488,288	372,040,000	Lease Liabilities	
Utang Jangka Panjang Lainnya	--	432,202,588	27,665,000	Other Long-Term Liabilities	
Total	10,643,487,096	32,714,913,817	11,113,826,000	54,472,226,913	Total

iii. Risiko Mata Uang

Grup secara signifikan terekspos risiko mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) karena sebagian besar pembelian material dalam mata uang USD. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan.

	2022 Rp	2021 Rp	
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan			Impact on Profit Before Income Tax
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (1%)	(63,679,812)	(19,017,150)	Change in exchange rate against Rupiah (1%)
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (-1%)	63,679,812	19,017,150	Change in exchange rate against Rupiah (-1%)

iv. Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	2022 Rp	2021 Rp	
Bunga Mengambang	39,435,729,452	38,523,123,911	Floating Rate
Bunga Tetap	9,183,583,900	8,122,161,812	Fixed Rate
Tanpa Bunga	6,715,092,958	7,826,941,190	Without Rate
Total	55,334,406,310	54,472,226,913	Total

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

iii. Currency Risk

The Group is significantly exposed to currency risk in United States Dollars (USD) due to the majority of material purchases denominated in USD. There was no currency hedging activity as of December 31, 2022 and 2021.

The Group manages its exposure to foreign currencies by periodically monitoring movements in foreign currency exchange rates so that it can take necessary actions.

The following table shows the sensitivity of possible changes in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies with other variable assumptions, the impact on profit before tax expense.

iv. Interest Rate Risk

The Groups is exposed to interest rate risk primarily related to financial liabilities. To minimize interest rate risk, the Group manages interest expense by monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

The following table analyse the breakdown of financial liabilities by type of Interest:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably changes of interest rate on loans, with all other variable held constant, with the effect to the consolidated income before corporate tax expense:

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
Dampak Terhadap Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan			Effect on Income (Loss) Before Income Tax
Perubahan Tingkat Suku Bunga (1%)	35,045,130	34,622,361	Changes in Interest Rates (1%)
Perubahan Tingkat Suku Bunga (-1%)	(35,045,130)	(34,622,361)	Interest Rate Change (-1%)

b. Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying value Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Setara Kas	5,817,311,403	5,817,311,403	3,725,597,431	3,725,597,431	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	159,988,146	159,988,146	141,656,618	141,656,618	Short-Term Investment
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	746,960,792	746,960,792	576,651,735	576,651,735	Related Parties
Pihak Ketiga	1,094,670,849	1,094,670,849	1,057,789,779	1,057,789,779	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Berelasi	11,221,843	11,221,843	20,185,129	20,185,129	Related Parties
Pihak Ketiga	114,368,411	114,368,411	86,493,036	86,493,036	Third Parties
Piutang Usaha Jangka Panjang - Pihak Berelasi	242,030,072	242,030,072	--	--	Long Term Trade Receivable - Related Parties
Investasi Jangka Panjang	32,633,441	32,633,441	35,242,078	35,242,078	Long Term Investments
Total	8,219,184,957	8,219,184,957	5,643,615,806	5,643,615,806	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	415,585,187	415,585,187	184,107,523	184,107,523	Related Parties
Pihak Ketiga	451,637,243	451,637,243	596,402,658	596,402,658	Third Parties
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	289,231,354	289,231,354	866,199,845	866,199,845	Related Parties
Pihak Ketiga	1,461,228,002	1,461,228,002	2,718,321,020	2,718,321,020	Third Parties
Beban Akrua					Accrued Expenses
Pihak Berelasi	678,890	678,890	1,329,666	1,329,666	Related Parties
Pihak Ketiga	2,672,000,992	2,672,000,992	3,000,712,890	3,000,712,890	Third Parties
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	899,757,062	899,757,062	1,722,245,844	1,722,245,844	Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	38,495,106,481	38,495,106,481	36,800,878,067	36,800,878,067	Bank Loan and Other Financial Institutions
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	7,507,281,013	7,507,281,013	7,505,553,188	7,505,553,188	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	1,676,302,887	1,676,302,887	616,608,624	616,608,624	Lease Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya	1,424,731,290	1,424,731,290	459,867,588	459,867,588	Other Long-Term Liabilities
Total	55,293,540,401	55,293,540,401	54,472,226,913	54,472,226,913	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

c. Capital Management

The Group's objective when managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, so the entity can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. In order to manage the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase / decrease the amount of debt.

48. Tambahan Informasi Arus Kas

Transaksi Non Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Penambahan Properti Investasi, Aset Tetap dan Aset Hak Guna Melalui Utang	238,242,516	165,784,935
Penambahan Aset Tetap Melalui Kapitalisasi Biaya Pinjaman	82,769,640	266,435,989
Penambahan Entitas Asosiasi Melalui Imbreng	--	1,755,999,882
Penambahan Modal Saham Melalui Imbreng Investasi Entitas Anak	--	65,151,367,000

Addition of Investment Properties, Fixed Assets and Use Rights Assets Through Payables
Additional Fixed Assets Through Capitalization of Borrowing Costs
Additional Investment in Associate Through Imbreng
Additional Capital Stock Through Imbreng of Investment in Subsidiaries

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

48. Additional Information of Cash Flows

Non Cash Transaction

Supporting information for the statement of cash flows in connection with investing and financing activities is as follows:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below detail changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari 2022/ January 1, 2022 Rp	Arus kas/ Cash Flow Rp	Non Kas/ Non Cash		31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp	
			Salisih kurs/ Foreign Exchange Difference Rp	Lainnya/ Other Rp		
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	1,722,245,844	(3,240,240)	--	(819,248,542)	899,757,062	Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	36,800,878,067	1,101,014,772	--	593,213,642	38,495,106,481	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Obligasi dan Sukuk Ijarah	7,505,553,188	--	--	1,727,825	7,507,281,013	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	616,608,624	(106,035,503)	--	1,165,729,766	1,676,302,887	Lease Liabilities
Total	46,645,285,723	991,739,029	--	941,422,691	48,578,447,443	Total

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2021/ January 1, 2021 Rp	Arus kas/ Cash Flow Rp	Non Kas/ Non Cash		31 Desember 2021/ December 31, 2021 Rp	
			Salisih kurs/ Foreign Exchange Difference Rp	Lainnya/ Other Rp		
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya - Jangka Pendek	656,946,836	1,402,991,008	--	337,692,000	1,722,245,844	Short-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Utang Bank Jangka Panjang dan Lembaga Keuangan Lainnya	32,391,671,389	4,417,006,678	--	7,800,000	36,800,878,067	Long-Term Bank and Other Financial Institutions Loans
Obligasi dan Sukuk Ijarah	7,991,247,132	(478,100,000)	--	(7,593,944)	7,505,553,188	Bonds Payable and Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	1,101,947,389	(151,356,132)	--	(333,982,633)	616,608,624	Lease Liabilities
Total	42,141,812,746	5,190,541,554	--	3,915,423	46,645,285,723	Total

49. Peristiwa Penting Lainnya

49. Other Significant Event

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

TWC dan BHIVA

Penunjukan BHIVA sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) No. B-48/KSN/S/PB.02/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditujukan kepada Direktur Utama TWC perihal Jawaban Permohonan Persetujuan BHIVA sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) TMII, Kemensetneg menyatakan dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN antara Kemensetneg dengan TWC No. 1 tanggal 1 Juli 2021, dengan ketentuan:

- Kerja sama pemanfaatan (KSP) tetap dilakukan antara Kemensetneg dengan TWC, sedangkan TWC melakukan kerjasama operasional dengan BHIVA;
- Dengan adanya kerjasama operasional tersebut, tidak mengurangi kontribusi tetap dan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang menjadi bagian Kemensetneg sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP;
- TWC harus melakukan kajian dari aspek legalitas, finansial, investasi, perpajakan, dan sumber daya manusia dengan due diligence sebelum menetapkan BHIVA sebagai mitra kerjasama operasional sehingga tercipta *Good Corporate Governance*;
- Kerjasama operasional antara TWC dengan BHIVA mulai dilaksanakan 1 April 2023 setelah serah terima aset hasil revitalisasi TMII dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kemensetneg dan ditandatangani addendum Perjanjian KSP antara Kemensetneg dengan TWC;

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

TWC dan BHIVA

Appointment of BHIVA as a *Special Purpose Vehicle* (SPV) for the Management of Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Based on a letter from the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia (Kemensetneg) No. B-48/KSN/S/PB.02/12/2022 dated December 29, 2022 addressed to the President Director of TWC regarding the Answer to the Request for BHIVA Approval as a *Special Purpose Vehicle* (SPV) for TMII, the Ministry of State Secretariat stated that it could consider the request as long as it complies with the provisions of the Agreement BMN Utilization Cooperation (KSP) between the Ministry of State Secretariat and TWC No. 1 dated July 1, 2021, with the following provisions:

- Agreement Utilization Cooperation (KSP) is still being carried out between the Ministry of State Secretariat and TWC, while TWC is conducting operational agreement with BHIVA;
- With this operational agreement, it does not reduce the fixed contribution and profit sharing which is part of the Ministry of State Secretariat as stipulated in the KSP agreement;
- TWC must conduct a study from the aspects of legality, finance, investment, taxation, and human resources with due diligence before establishing BHIVA as an operational cooperation partner so as to create Good Corporate Governance;
- The operational agreement between TWC and BHIVA began April 1, 2023, after the handover of the assets resulting from the revitalization of TMII from the Ministry of Public Works and Public Housing to the Ministry of State Secretariat and the signing of the KSP Agreement addendum between the Ministry of State Secretariat and TWC;

- Isi perjanjian kerjasama operasional antara TWC dengan BHIVA harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.

- The contents of the operational cooperation agreement between TWC and BHIVA must obtain approval from the Ministry of State Secretariat.

50. Reklasifikasi Akun

Manajemen Perusahaan telah mereklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2021 agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2021		
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp
Laporan Posisi Keuangan			
Investasi Jangka Pendek	107,557,146	52,431,000	159,988,146
Investasi Jangka Panjang	85,064,441	(52,431,000)	32,633,441
Modal Saham	65,164,366,785	215	65,164,367,000
Saldo Laba - Dicadangkan	2,111,085	(215)	2,110,870

Statements of Financial Position
Short-Term Investment
Long Term Investments
Capital Stock
Retained Earning - Appropriated

51. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia sebanyak 2.147.659 lembar saham Seri B pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), yang telah ditempatkan dan disetor oleh Negara. Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KMK.06/2023 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke modal saham Perusahaan sebesar Rp11.679.371.956 sesuai dengan perhitungan nilai wajar saham per 30 Juni 2022 yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebanyak 2.147.658 lembar.

50. Reclassification of Account

The Company's management has reclassified several accounts in the 2021 financial statements to comply with the provision and presentation of financial statements for the year ended December 31, 2022. The reclassification is as follows:

51. Events After Reporting Period

The Company

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2023 dated January 18, 2023 concerning the addition of the Republic of Indonesia's Equity Participation into the Company's Share Capital originating from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in the amount of 2,147,659 Series B shares at PT Pembangunan Pariwisata Indonesia (ITDC), which have been placed and paid up by the State. The value of additional State capital participation as referred to is determined by the Minister of Finance based on a proposal from the Minister of State-Owned Enterprises.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 53/KMK.06/2023 concerning Determination of the Addition Value of the Republic of Indonesia Equity Participation to the Company's share capital of Rp11,679,371,956 in accordance with the calculation of the fair value of shares as of June 30, 2022 originating from the transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) as many as 2,147,658 shares.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Angkasa Pura I ("AP I")

Penyelesaian pembayaran termin VI atas Pekerjaan Design & Build Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian penyelesaian pembayaran progress termin IV atas pekerjaan Design & Build Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada tanggal 22 Februari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit non tunai dengan PT Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk untuk memperoleh fasilitas SCF skema Payable Financing, SKBDN, dan Trust Receipt atas SKBDN yang telah diterbitkan oleh Bank dengan limit fasilitas sebesar Rp1.500.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk kebutuhan modal kerja untuk pembayaran kepada pemasok AP I. Pada tanggal 24 Februari 2023, AP I mengajukan dokumen surat keterangan pembayaran atas invoice yang diajukan dalam SKBDN kepada BTN dan pada tanggal 27 Februari 2023, BTN menerbitkan SKBDN untuk pembayaran tagihan kepada WIKA sebesar Rp265.765.757.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

Fasilitas Pinjaman Berjangka - Mandiri

Pada tanggal 20 Maret 2023, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Mandiri dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp725.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah maksimal 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II dalam rangka jatuh temponya *revolving loan facility* Mandiri pada tahun 2023 (Catatan 26). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 8,90% saat penandatanganan.

Fasilitas Pinjaman Berjangka - BRI

Pada tanggal 27 Maret 2023, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp675.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah maksimal 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja AP II dalam rangka jatuh temponya *revolving loan facility* BRI pada tahun 2023 (Catatan 26). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 8,90% saat penandatanganan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Angkasa Pura I ("AP I")

Completion of payment for term VI of the Sultan Hasanuddin Makassar Airport Development Design & Build Work to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

In order to follow up on the Agreement for settlement of the progress of payment for term IV for the Design & Build job of Sultan Hasanuddin Airport Development, Makassar, on February 22, 2023, AP I signed a non-cash credit agreement with PT Bank Savings Indonesia (Persero) Tbk to obtain an SCF facility for the Payable Financing scheme, SKBDN, and Trust Receipt for SKBDN issued by the Bank with a facility limit of Rp1,500,000,000. This facility is used for working capital needs such as payments to AP I suppliers. On February 24, 2023, AP I submitted a payment statement document for the invoice submitted in the SKBDN to BTN and on February 27, 2023, BTN issued an SKBDN for bill payments to WIKA amounting to Rp265,765,757.

PT Angkasa Pura II ("AP II")

Term Loan Facility - Mandiri

On March 20, 2023, AP II obtained a term loan facility from Mandiri with a maximum loan facility amounting Rp725,000,000. The loan term is for maximum of 5 years from the date of signing the Agreement. The proceeds from this facility will be used for the refinancing AP II working capital in relation with maturity of revolving loan facility from Mandiri which will be due in 2023 (Note 26). This loan is subject to an interest rate of 8.90% at the time of signing.

Term Loan Facility - BRI

On March 27, 2023, AP II obtained a term loan facility from BRI with a maximum loan facility amounting Rp675,000,000. The loan term is for maximum of 5 years from the signing date of the Agreement. The proceeds from this facility will be used for the refinancing AP II working capital in relation with maturity of revolving loan facility from BRI which will be due in 2023 (Note 26). This loan is subject to an interest rate of 8.90% at the time of signing.

Fasilitas Pinjaman Berjangka - BTN

Pada tanggal 24 Maret 2023, AP II memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari BTN dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp481.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah maksimal 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Hasil penerimaan dari pembiayaan ini digunakan untuk mendanai Perusahaan secara umum termasuk pengeluaran terkait biaya dikapitalisasi dan biaya operasi yang telah ditagih dan dibayarkan pada tahun 2022 dan 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP"). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 8,90% saat penandatanganan.

PT Railink ("Railink")

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H., No. 05 Tanggal 27 Januari 2023 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0017880 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham menyetujui perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor dengan penerbitan saham baru sebanyak 40.000 lembar saham yang masih-masing bernilai Rp1 juta, berdasarkan total nilai atas dana pinjaman PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp24.000.000 dan dana talangan dan injeksi kas dari AP II sebesar Rp16.000.000 yang telah disetorkan oleh AP II dalam dua tahap pada tanggal 30 Maret 2022 dan 4 Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp8.429.000 dan Rp7.571.000.

Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan Februari 2023, Gapura (entitas anak AP II) menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") tahun 2020 sebesar Rp15.573.000 Gapura memutuskan untuk menerima hasil SKPLB tersebut. Selisih antara jumlah yang ditagihkan oleh Gapura dengan jumlah yang disetujui dalam SKPLB sebesar Rp5.304.000 dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Perjanjian Penting

- a) Perjanjian Konsesi – Direktorat Jendral Perhubungan Udara
AP II sedang dalam proses pembahasan dengan DJPU untuk perpanjangan konsesi selama 50 tahun ke depan. Pada tanggal 4 Agustus 2022, AP II telah mengirimkan rencana usaha (business plan) dan konsep perjanjian konsesi jasa kebandarudaraan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kemenhub.

Term Loan Facility - BTN

On March 24, 2023, AP II obtained a term loan facility from BTN with a maximum loan facility amounting Rp481,000,000. The loan term is for maximum of 5 years from the signing date of the Agreement. The proceeds from this facility will be used for general funding of AP II capital expenditure and operating expenditure that was billed and paid in 2022 and 2023 that were stated in AP II Annual Budget Plan ("RKAP"). This loan is subject to an interest rate of 8.90% at the time of signing.

PT Railink ("Railink")

Based on Notarial Deed No. 05 of Ariani L. Rachim, S.H. dated January 27, 2023 which was legalized by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0017880 dated January 31, 2023, the Shareholders approved the amendment to increase the issued/paid-up capital with the issuance of 40,000 new shares with a value of Rp1 million each, based on the total value of PT Kereta Api Indonesia's loan fund of Rp24,000,000 and AP II cash injection of Rp16,000,000 which has been deposited by AP II in two phases on March 30, 2022 and August 4, 2022 amounting to Rp8,429,000 and Rp7,571,000, respectively.

Tax Assessment Letter

In February 2023, Gapura (AP II subsidiary) received a Notice of Overpayment of Corporate Income Tax ("SKPLB PPh Badan") for the year 2020 in the amount of Rp15,573,000 Gapura decided to accept the outcome of the SKPLB. The difference between the amount billed by Gapura and the amount agreed upon in the SKPLB, amounting to Rp5,304,000 is charged to the current year's profit and loss statement.

Significant Agreement

- a) Concession Agreement – Directorate General of Civil Aviation
AP II is in the process of discussing with DJPU to extend the concession for the next 50 years. On August 4, 2022, AP II has submitted a business plan and draft of concession agreement to Directorate General of Civil Aviation (DJPU) of the Ministry of Transportation

Selain itu, AP II melalui surat No.04.02.03/00/07/2022/A.5093 pada tanggal 8 Juli 2022 telah mengajukan permohonan legal opinion dan legal assistance ke Jamdatun. Pada tanggal 17 Februari 2023, AP II telah mendapatkan respon dari Jamdatun atas surat permohonan tersebut antara lain:

- PM 81/2021 tidak dapat berlaku retroaktif. Periode 2018 hingga saat ini dikategorikan sebagai perjanjian diam-diam karena AP II masih melaksanakan usaha kebandarudaraan dan tidak ada keberatan dari Kementerian Perhubungan meskipun perjanjian telah berakhir. Mengacu pada perjanjian sebelum PM81/2021, rate adalah sebesar 2,5%.
- Ruang lingkup jasa kebandarudaraan yang menjadi objek perjanjian merupakan kewenangan Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
- Dalam hal besaran konsesi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, para pihak dapat menyepakati besaran nilai konsesi yang akan dicantumkan dalam perjanjian konsesi dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan surat DJPU Nomor AU.108/2/9/DBU-2023 perihal penyampaian risalah rapat pembahasan self assessment besaran nilai konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan mengajukan nilai besaran konsesi 2,5% untuk periode tahun 2018-2020. Mengingat peraturan yang mengatur terkait konsesi pada saat itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 dimana dalam peraturan tersebut mengatur besaran konsesi minimal 2,5%.

Pada tanggal 3 Maret 2023, AP II dan Direksi InJourney melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti pembahasan pada tanggal 13 Februari 2023 tersebut, dimana didapatkan kesimpulan dibawah ini:

- Diputuskan pencadangan yang dilakukan sampai dengan berakhirnya PM 193 tahun 2015 per bulan Mei 2021 masih mengacu perjanjian terdahulu sebesar 2,5% sedangkan untuk pencadangan beban konsesi setelah PM 193 tersebut dicabut menggunakan estimasi terbaik yang sudah dicadangkan oleh Manajemen AP II yaitu sebesar 1%.

In addition, AP II through letter No.04.02.03/00/07/2022/A.5093 dated July 8, 2022 has submitted a request for legal opinion and legal assistance to Jamdatun. On February 17, 2023, AP II has received a response from Jamdatun on the application letter, including:

- *PM 81/2021 cannot be applied retroactively. The period 2018 to date is categorized as a silent agreement because AP II is still carrying out airport business and there is no objection from the Ministry of Transportation even though the agreement has expired. Referring to the agreement before PM81/2021, the rate is 2.5%.*
- *The scope of airport services which is the object of the agreement is the authority of the Minister in charge of aviation affairs.*
- *In the event that the amount of concession is not regulated in laws and regulations, the parties may agree on the amount of concession value to be included in the concession agreement while still referring to the applicable laws and regulations.*

On February 21, 2023, based on DJPU Number AU.108/2/9/DBU-2023 regarding the submission of the meeting discussion about the self assessment for airport services concession rates that stated the Ministry of Transportation proposed concession rates at 2.5% for year 2018-2020. Considering the regulations governing concession at that time were Minister of Transportation Regulations Number PM 193 Year 2015 that regulated the minimum concession rates 2.5%.

On March 3, 2023, AP II and InJourney's Board of Directors held a meeting to follow up on the discussion on February 13, 2023, where the following conclusions were reached:

- *It was decided that the provision made until the expiration of PM 193 of 2015 as of May 2021 still refers to the previous agreement of 2.5%, while the provision for concession expenses after PM 193 is revoked uses the best estimate that has been reserved by AP II Management which is 1%.*

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b) Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma ("HLP") dengan PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")
Pada Tanggal 19 Januari 2023, AP II dan ATS membuat Perjanjian KSO dengan nomor PJJ.04.04/00/01/2023/0005 dan 089/ATS/DIR/ PKS-APII/II/2023, untuk membentuk KSO HLP, dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian HLP di Jakarta, yang meliputi penyelenggaraan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara. Perjanjian ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban AP II atas keuntungan/kerugian dari KSO sebesar 50%, dengan jangka waktu hingga tanggal 17 Mei 2025.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a. Perjanjian Penyediaan Prasarana dan Perbaikan Infrastruktur Untuk Pengoperasian *Tram Mover* di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah
Pada tanggal 6 Februari 2023, TWC melakukan kerjasama dengan PT Bhiva (Entitas Anak) dalam Penyediaan Prasarana dan Perbaikan Infrastruktur Untuk Pengoperasian *Tram Mover* di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 110/PF.01/II/ 2023. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
- b. Perjanjian Penyediaan Moda Transportasi Kendaraan Listrik (*Electric Vehicle*) di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah
Pada tanggal 6 Februari 2023, TWC melakukan kerjasama dengan PT Bhiva (Entitas anak) dalam Penyediaan Moda Transportasi Kendaraan Listrik (*Electric Vehicle*) di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 109/OP.30/II/2023. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

**PT AVIASI PARIWISATA
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b) *Management and Operation Cooperation Agreement for the Halim Perdanakusuma International Airport ("HLP") with PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")*
On January 19, 2023, AP II and ATS entered into a Joint Operation Agreement (JOA) with the reference number PJJ.04.04/00/01/2023/0005 and 089/ATS/DIR/ PKS-APII/II/2023, to establish the JOA HLP for the purpose of managing and operating HLP in Jakarta, including the provision of airport services and related airport services. This agreement also stipulates AP II rights and obligations regarding the profits/losses of the JOA, which amounts to 50%, with a term until May 17, 2025.

**PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")**

- a. *Infrastructure Provision and Infrastructure Improvement Agreement for Tram Mover Operations in area Taman Mini Indonesia Indah*
On February 6, 2023, TWC entered into a partnership with PT Bhiva (Subsidiary), in Provision of Infrastructure and Infrastructure Improvement For the Operation of Tram Mover in the Taman Mini Indonesia Indah Area in accordance with the Agreement Cooperation No. 110/PF.01/II/2023. The term of the agreement is valid from September 1, 2022 until March 31, 2023.
- b. *Agreement for the Provision of Electric Vehicles in the Area Taman Mini Indonesia Indah*
On February 6, 2023, TWC entered into a partnership with PT Bhiva (subsidiary) in Provision of Electric Vehicle Transportation Modes (*Electric Vehicle*) in the Taman Mini Indonesia Indah Area in accordance with the Cooperation Agreement No. 109/OP.30/II/ 2023. The term of the agreement is valid from September 1, 2022 until December 31, 2022. As of the date of the financial statements, the agreement is still in the process of being extended.

52. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107; Akuntansi Ijarah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

53. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2022 untuk diterbitkan pada tanggal 27 April 2023.

52. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non-Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

53. Responsibility for Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements ended December 31, 2022 to be published on April 27, 2023.